

Marxisme Tiongkok Dalam Pergolakan - 1978-1984

**Esai-Esai Mengenai Epistemologi, Ideologi Dan
Ekonomi Politik**

**Penyunting:
Bill Brugger - (1985)**

Oey's Renaissance

MARXISME
TIONGKOK
DALAM
PERGOLAKAN

Judul asli: *Chinese Marxism in Flux*
Pengyunting: Bill Brugger

Edisi Indonesia: Marxisme Tiongkok Dalam Pergolakan - 1978-1984
Alih Bahasa: Oey Hay Djoen
Editor: Edi Cahyono

Pengutipan untuk keperluan resensi dan keilmuan dapat
dilakukan setelah memberitahukan terlebih dulu
pada Penerjemah/Penerbit
Memperbanyak atau reproduksi buku terjemahan ini dalam bentuk
apa pun untuk kepentingan komersial tidak dibenarkan

Hak Cipta dilindungi Undang-undang
All Rights Reserved

Modified & Authorised by: Edi Cahyono, Webmaster
Disclaimer & Copyright Notice © 2007 Oey's Renaissance

**MARXISME
TIONGKOK DALAM
PERGOLAKAN -
1978-1984**

**ESAI-ESAI MENGENAI EPISTEMOLOGI,
IDEOLOGI DAN EKONOMI POLITIK**

Penyunting:
Bill Brugger

(1985)

alih bahasa: oey hay djoen

Oey's Renaissance

DAFTAR ISI

Daftar Tabel	vii
Introduksi	1
Bab 1. Teori Marxis dan Transisi Sosialis: Konstruksi suatu Hubungan Epistimologis Michael Dutton & Paul Healy	19
Bab 2. Ideologi PKT Sejak Pleno Ketiga Michael Sullivan	76
Bab 3. Sosialisme Terbelakang dan Perkembangan Intensif Bill Brugger	118
Bab 4. Reform Ekonomi, Legitimasi, Efisiensi dan Rasionalisasi Kate Hannan	148
Bab 5. Transisi Sosialis dan Cara Produksi Sosialis Greg McCarty	181
Bab 6. Perdebatan mengenai Hukum Nilai – Penghormatan pada Alm. Sun Yefang Steve Reglar	220
Bibliografi	267
Para Penyumbang Tulisan	279

Daftar Tabel

2.1 Perjuangan Kelas: Sebelum dan Sesudah Transformasi Sistem Pemilikan	95
2.2 Kebijakan-kebijakan dan Penyimpangan-penyimpangan	101
3.1 Akumulasi dan Investasi per Rencana Lima Tahun	133
3.2 Pertumbuhan Produktivitas	142
3.3 Pertumbuhan Produktivitas per Industri	143

INTRODUKSI

Di masyarakat-masyarakat yang menamakan dirinya “sosialis,” Marxisme adalah, di satu pihak, suatu “metode” untuk memahami dan mengubah kehidupan sosial dan, di lain pihak, suatu “ideologi” yang merasionalisasi kepentingan-kepentingan mereka yang berkuasa. Dalam hal ini, ia tidak berbeda dari sis-tem pikiran lain yang manapun. Namun, telah lama menjadi perhatian pokok dari teori politik untuk membebaskan yang ideologis dari unsur-unsur lainnya; dan Marxisme sendiri menawarkan suatu cara yang berguna untuk melakukan itu. Hal ini perlu diberi tekanan karena kecenderungan baru dalam studi-studi tentang Tiongkok untuk mengesampingkan semua pikiran resmi Tiongkok sebagai rasionalisi ideologis, dan tekanan dalam studi-studi sekarang untuk mencari sesuatu dunia nyata yang meniadakan kategori-kategori Marxis. Sambil “menolak pernyataan-pernyataan resmi Tiongkok sebagai ideologis,” para analis “dunia nyata” secara paradoksal sangat bernafsu untuk mengupas pernyaa-taan-pernyataan seperti itu, mencari unsur-unsur di dalamnya yang memperkuat pandangan mereka yang non-Marxis tentang dunia.

Analisis-analisis dunia riil seperti itu terjerembab ke dalam balutan ideologis-metodologis yang sama seperti kaum Marxis resmi Tiongkok. Di satu pihak, mereka mungkin menawarkan kepada kita wawasan-wawasan mengenai hubungan-hubungan sosial yang dikaburkan dalam retorika resmi. Namun, di lain pihak, mereka menawarkan rasionalisasi kepentingan-kepentingan mereka yang menentang seluruh proyek sosialis. Ambil contoh, studi-studi yang, dalam menolak “ideologi” Marxis, mencari “realitas” pada individu-individu yang memaksimalkan kegunaan-kegunaan mereka. Yang dianggap sebagai aksiomatik adalah pengertian tentang individu yang diatomisasi, yang nafsu-nafsunya dikekang oleh kekuatan-kekuatan pasar ataupun sistem legal eksternal. Analisis-analisis dari aliran ini merasa terhibur dengan lelucon-lelucon

Tiongkok yang mengatakan bahwa teladan yang tidak memikirkan diri sendiri, Lei Feng, sebenarnya seorang “ultra-kiri” karena telah gagal

melihat nilai intrinsik orang-seorang (individu). Mereka bersorak-sorai dengan kembalinya Tiongkok pada suatu konsepsi hukum yang “realis,” yang memperkenankan orang-seorang membuat ramalan-ramalan mengenai hasil-hasil perilaku yang memaksimalkan kegunaan dan pada suatu struktur ekonomik yang lebih “realistik,” yang lebih menyepadankan imbalan material dengan usaha orang-seorang. Manakala ditantang, mereka menuntut agar orang berkonsultasi dengan rakyat Tiongkok sendiri mengenai sifat “keuntungan-keuntungan riil.” Dalil tentang individu yang diatomisasi digabungkan pada dalil bahwa rakyat sendiri mengetahui yang terbaik bagi kepentingan mereka, atau, barangkali, bahwa pendapat-pendapat rakyat adalah lebih nyata daripada permainan kekuatan-kekuatan sosial.

Maka itu, ada suatu kecenderungan bagi banyak analis Barat untuk menggunakan pengertian “dunia nyata” untuk maksud-maksud ideologis. Ini berlaku juga pada banyak analis di Tiongkok yang menggunakan kategori “riil” untuk menolak utopianisme yang dikaitkan dengan “Komplotan Empat.” Kebanyakan penyumbang pada buku ini sepakat bahwa hasilnya adalah suatu ideologi resmi yang lebih mandul daripada yang mendahuluinya dan justru sama, kalau tidak lebih membingungkan.

Di lain pihak, penolakan resmi terhadap *utopianisme* telah disertai suatu penolakan resmi terhadap “dogmatisme.” Ini memungkinkan sejumlah besar akademikus Marxis yang tidak resmi menyelidiki kelahiran kembali (*renaissance*) Marxis Barat pada tahun 1960-an, literatur yang kritis mengenai Marxisme-Leninisme di bawah Stalin dan perdebatan-perdebatan sengit mengenai perkembangan Uni Sovyet pada tahun 1920-an. Di kalangan-kalangan akademik, suasananya lebih bebas dan lebih menggairahkan daripada yang ada di Uni Sovyet selama kurang-lebih enam puluh tahun. Penulis-penulis dan aktivis-aktivis seperti Luxemburg, Bucharin, Preobrazhensky dan Gramsci kini menjadi subjek perdebatan yang ramai dan terbuka. Bahkan mungkin untuk mendiskusikan karangan-karangan awal dari Marx dan untuk berspekulasi atas kemungkinan diterapkannya “cara produksi Asiatik” di Tiongkok. Sangat diharapkan bahwa perdebatan-perdebatan sengit

3 | Bill Brugger (peny.)

ini akan membanjiri perumusan-perumusan resmi Partai. Tetapi kini masih sedikit sekali tanda-tanda terjadinya hal itu, dan kampanye pada tahun 1983 terhadap “pencemaran spiritual” tidak memberikan banyak harapan akan terjadinya hal itu.

Diskusi-diskusi dalam buku ini sebagian besar setuju dengan komentar-komentar Su Shaozhi, Direktur Institut Marxisme- Leninisme dan Pikiran Mao Zedong dari Akademi Ilmu-ilmu Sosial Tiongkok,

Aspek-aspek tertentu pekerjaan teoritis kita ... masih berkisar seputar sejumlah *keantikan*, menyibukkan diri, seperti sebelumnya, dengan kesimpulan-kesimpulan abstrak yang terpisah dari kehidupan riil dan dengan demikian tampak mengkeret dan pucat.¹

Namun sedikit yang akan setuju dengan posisi instrumentalis Su, bahwa yang seperti itu harus diperangi karena,

ia memberikan suatu tempat perlindungan dan tempat persemaian bagi ideologi kiri dan menawarkan suatu dasar ideologi, yang menjadi dasar bagi eksponen-eksponen ... untuk mengecam reformasi-reformasi yang sedang berlangsung.²

Sejumlah penyumbang pada buku ini sangat bersimpati pada aspek-aspek dari pikiran “kiri” dari tahun-tahun sebelumnya, sekalipun mereka tidak akan mendukung penggunaan ideologisnya untuk mempertahankan dominasi kelompok-kelompok tertentu. Mereka tidak akan mengesahkan pertahanan ideologis studi-studi Marxis semata-mata untuk menjamin reform-reform ekonomik. Sebaliknya, mereka berdalih bahwa metodologi Marxis mungkin saja tepat yang diperlukan untuk menilai dan, dalam beberapa hal, mengkritik reform-reform itu. Sambil menegaskan bahwa Marxisme mesti berakar pada realitas, mereka mengutuk penggunaan yang *riil* bagi tujuan-tujuan ideologis.

Bagaimanakah konsep “riil” telah dipaksakan untuk kepentingan rasionalisasi ideologis? Pada akar masalah itu terdapatlah penggunaan istilah *riil* secara tidak-konsisten dalam tradisi Marxis dan pandangan-pandangan tidak-konsisten mengenai bagaimana seseorang dapat

¹) Su Shaozhi, Su dkk., 1983, hal. 43

²) Ibid.

memahaminya. Tidak ada suatu epistemologi Marxis yang disatukan. Unting-unting empirisis dan rasionalis mengenai pikiran telah berbaur bahkan sejak zaman Marx. Dalam Bab Pertama, Dutton dan Healy mencoba memberi makna pada kaitan-kaitan ini, dengan menggunakan konsep-konsep Althusserian, namun mengembangkan suatu posisi yang melampaui Althusser dan – hingga suatu batas, adalah kritis terhadap rasionalisme Althusser. Tesis mereka adalah, bahwa telah terdapat suatu kecenderungan umum dalam Marxisme-Leninisme dari suatu posisi Marx yang lebih rasionalis pada suatu posisi Stalin yang lebih empirisis. Mao Zedong, demikian mereka berargumentasi, tidak pernah melepaskan diri dari empirisisme Stalin. Demikian pula yang dilakukan Marxisme resmi setelah Mao.

Rasionalisme di sini dinyatakan sebagai suatu pendekatan yang menempatkan suatu pemisahan antara yang “riil dalam pikiran” dan yang “riil konkret” dan menjadikan yang tersebut lebih dulu sebagai objek studinya; dengan demikian ia mengangkat teori pada suatu posisi yang diistimewakan.

Empirisisme, sebaliknya, berfokus pada yang disebut belakangan, memandang teori hanya sebagai penjabaran-penjabaran yang pada pokoknya selalu dapat direduksi menjadi tanggapan-tanggapan dari “riil-konkrit” itu. Kedua pendirian itu, demikian dikemukakan, secara tidak dapat dielakkan bersifat dogmatik. Mengapa, demikian Dutton dan Healy bertanya, mesti diberikan keistimewaan ontologis kepada teori ataupun kepada yang riil-konkrit? Dalam kedua cara pendekatan itu secara tidak terelakkan terdapat suatu kecenderungan pada reduksionisme. Dengan reduksionisme, Dutton dan Healy tidak memaksudkan sekedar kecenderungan untuk mereduksi semua tanggapan menjadi teori atau semua teori menjadi tanggapan, tetapi penjurukan prioritas ontologis pada yang disebut Althusser suatu “hal/peristiwa” – peristiwa ekonomi, peristiwa politis atau peristiwa ideologis. Empirisisme Mao berbeda dari empirisisme Stalin dalam kecenderungannya untuk memberikan keistimewaan ontologis pada yang “politis” daripada yang “ekonomik,” tetapi ini tidak berarti bahwa ia tidak begitu reduksionis. Stalin cenderung pada suatu posisi di mana yang politis dan yang ideologis dengan mudah dapat disimpulkan dari yang ekono-mik. Mao

5 | Bill Brugger (peny.)

membalikkan ini, semakin lama semakin yakin bahwa yang ekonomis dan yang ideologis dengan mudah dapat disimpulkan dari yang politis. Ia seorang empiris karena –dalam metodologinya– tidak terdapat gagasan mengenai “praktek teoritis.” “Lompatan” Mao yang termashur dari pengetahuan perseptual pada pengetahuan rasional tidak lebih daripada sekedar ikhtisar dan penjabaran pengalaman sebelumnya.

Hukum (*guilu*) tidak lebih dari keteraturan-keteraturan yang dijalankan secara patuh.

Kedudukan sekarang dalam Marxisme resmi Tiongkok, menurut Dutton dan Healy, adalah sekedar kembalinya Marxisme itu pada empirisisme Stalin. Yang ekonomis kembali diistimewakan dan perjuangan kelas luruh dalam peristiwa ekonomis. Empirisisme Marxisme resmi dewasa ini adalah lebih tegar dari empirisisme Mao, sebagaimana yang dinyatakan dalam keteguhannya untuk setia pada “hukum-hukum ekonomi yang objektif” yang dapat disimpulkan oleh suatu “subyek yang serba-mengetahui” yang berlokasi di dalam proses kerja. Namun kesalahan-kesalahan metodologikal yang sama masih saja dilakukan.

Dutton dan Healy bersiteguh bahwa pendekatan Marx pada epistemologi Marxis tidak merupakan suatu kemajuan atas epistemologi Stalin; ia cuma membalikkan “kedudukan istimewa” ke mana pengetahuan mengenai masyarakat dapat dipulangkan. Proses pembalikan ini kini berulang lagi. Kalau bukan di bidang epistemologi, lalu di manakah terletak sumbangan Mao pada teori Marxis? Sullivan, dalam Bab Dua, menyarankan bahwa itu mungkin terletak pada konsepsi sosialisme lebih sebagai proses daripada suatu sistem. Ini merupakan suatu alasan yang telah kukembangkan dengan catatan bahwa gagasan mengenai sosialisme sebagai suatu sistem atau suatu cara produksi yang bijaksana sangat berhutang pada perumusan Stalin pada tahun 1936.³ Gagasan Stalin mengenai sosialisme, yang “secara dasar” dicapai pada waktu itu, mempunyai lebih banyak kesamaan dengan “tipe ideal” Weber. Posisi ini diperkuat kembali di Tiongkok pada waktu Kongres Ke Delapan PKT, ketika kontradiksi dasar dalam masyarakat (*zhuyao maodun*) tidak

³ Brugger, 1981(b).

ditetapkan dalam pengertian perjuangan kelas, tetapi pada perjuangan antara “sistem sosialis yang telah maju” dan “tenaga-tenaga produktif yang terbelakang.” Perumusan ini menandakan bahwa kontradiksi dasar (*jiben maodun*) dalam masyarakat, antara hubungan-hubungan produksi dan tenaga-tenaga produktif dan antara basis dan bangunan-atas, telah diselesaikan. Dalam tahun-tahun berikutnya, Mao secara berangsur-angsur berubah menjauhi posisi itu untuk mengembangkan pandangan bahwa kontradiksi dasar dalam masyarakat masih belum diselesaikan dan kontradiksi pokok masih tetap suatu masalah perjuangan kelas. Ini mengakibatkan yang kusebut “pandangan kelas yang generatif” yang merupakan suatu unsur penting dalam pemikiran Mao hingga melahirkan Revolusi Kebudayaan.⁴

Teori mengenai “meneruskan revolusi di bawah kediktatoran proletariat,” yang berkembang dan berlaku dari 1966-1977, berangsur-angsur dibongkar setelah jatuhnya “Komplotan Empat”; dan pada tahun 1979 dilakukan usaha-usaha untuk kembali pada garis Kongres Partai ke Delapan. Namun Sullivan menunjukkan, bahwa garis Kongres Partai ke Delapan tidak mungkin sepenuhnya dipulihkan. Yang dapat dipertahankan dari perumusan tahun 1956 adalah ide sosial-isme sebagai suatu *sistem*. Ini menghasilkan suatu pemahaman fungsionalis atas edisi yang direvisi dari pidato Mao yang termashur: “Mengenai Cara yang Tepat dalam Penyelesaian Kontradiksi di antara Rakyat.” Pergeseran pada suatu keutuhan (totalitas) fungsionalis telah beberapa kali terjadi dalam tradisi Marxis-Leninis dan diakibatkan oleh suatu kedwitarian (*ambiguity*) pada Marx mengenai sifat totalitas yang didesakkan oleh Marx agar menjadi fokus para ilmuwan sosial.

Bagi Georgy Lukacs, yang menentukan metode Marxis adalah konsep mengenai totalitas,

Bukan keutamaan motif-motif ekonomik dalam penjelasan historis yang merupakan perbedaan menentukan antara Marxisme dan pikiran burjuis, tetapi titik pandangan mengenai totalitas ... supremasi keseluruhan yang meresapi segala-galanya atas bagian-bagian ... Ilmu proletarian adalah revolusioner bukan hanya berkat ide-ide revolusionernya ... berlawanan dengan masyarakat

⁴ Brugger, 1978, hal.20-7.

Keutamaan kategori totalitas adalah pengembalian azas revolusi dalam ilmu⁵

Lukacs lebih lanjut bersiteguh bahwa, jika semua proposisi khusus dari Marxisme jatuh, maka Marxisme masih tetap akan berguna karena metodenya yang membulatkan. Pendekatan seperti itu telah dikritik oleh golongan Althusserian dan lain-lainnya atas dasar, bahwa Lukacs menganjurkan suatu “totalitas ekspresif,” yang bersumber dari beberapa azas organisasi (humanisme Feuerbachian) yang diistimewakan secara ontologis. Mereka menekankan, pada Marx masa belakangan, yang mereka sebut suatu “totalitas yang dilepaskan dari kerangkanya (*decentred totality*)” di mana pengistimewaan itu tidak dapat dilihat. Namun, mereka melakukan ini dalam suatu kerangka rasional yang sendirinya diistimewakan secara ontologi-kal. Namun, sekali orang mencoba memahami suatu totalitas yang dilepaskan dari kerangkanya dalam suatu kerangka empiris, maka tidak terelakkan lagi akan terjadilah suatu pergeseran ke arah fungsionalisme. Inilah yang justru terjadi di Tiongkok, di mana diskusi-diskusi mengenai hubungan-hubungan di dalam “sistem sosialis” menyerupai analisis fungsional gaya Barat. Memang, orang dapat menyusun kembali komentar-komentar Tiongkok hingga berarti bahwa Lompatan Jauh Kedepan telah melanggar “hukum perkembangan berencana dan seimbang” sedemikian rupa hingga Lompatan Jauh itu tampak sebagai penyebab disfungsi-disfungsi berganda. Sungguh, Mao Zedong mungkin berbalik di dalam kuburannya jika mengetahui bahwa konsepnya tentang “kontradiksi tidak-antagonistik” dapat diperlakukan sebagai sekedar suatu “disfungsi.”

Walaupun pengertian fungsionalis mengenai sosialisme sebagai suatu “sistem” telah dipertahankan, terdapat pula keistimewaan-keistimewaan Program Kongres ke Delapan PKT yang tidak dipertahankan. Satu persoalan penting mengepung gagasan bahwa sistem sosialis, yang diperkirakan lahir pada tahun 1956, telah “maju.” Dilihat dari perspektif hubungan-hubungan produksi, dinyatakan bahwa ia “telah terlalu maju”;

⁵ Lukacs, (1923), 1971, hal. 27;

yaitu, bahwa perubahan-perubahan dalam hubungan-hubungan produksi telah dipromosikan dengan kecepatan yang tidak setaraf dengan perkembangan tenaga-tenaga produktif. Ini sungguh-sungguh telah mempengaruhi kontradiksi dasar (antara hubungan-hubungan dan tenaga-tenaga produksi) yang dianggap telah diselesaikan/-dipecahkan. Sullivan menunjukkan bahwa perumusan baru ini sebelumnya telah digambarkan oleh Chen Yun pada Kongres ke Delapan PKT sendiri. Tugas pada tahun 1980-an, karenanya, tidak lagi dilihat sebagai meningkatkan taraf tenaga-tenaga produktif pada tuntutan-tuntutan “sistem yang telah maju” itu; ini telah menjadi sumber bencana “kekiri-kirian” pada tahun-tahun sebelumnya. Justru sistem sosialis haruslah dimodifikasi dan untuk sementara waktu, dibuat lebih “terbelakang.” Karenanya, adalah lebih baik untuk tidak berbicara tentang suatu kontradiksi sosialisme, satu yang tidak berkembang dan satu yang maju, dan masing-masing memerlukan konfigurasi berbeda dari tenaga-tenaga dan hubungan-hubungan produksi. Maka, kini kita mendapati dua “tipe ideal” gantinya sebuah dan dua kali lipat masalah teoritis. Semua kontradiksi pokok kini memusat pada kontradiksi antara aspirasi dan kemampuan, atau dalam jargon resmi: “antara tuntutan rakyat akan pembangunan suatu negeri industri yang maju dan realitas-realitas suatu negeri pertanian yang terbelakang” atau “antara kebutuhan rakyat akan perkembangan ekonomik dan kebudayaan yang cepat dan ketidak-mampuan ekonomi dan kebudayaan kita sekarang untuk memenuhi kebutuhan itu.” Tampaknya, metodologi Marxis telah direduksi pada argumen (uraian) tentang “kekurangan relatif.”

Argumen-argumen di atas dibicarakan lebih lanjut dalam Bab Tiga yang menyimak gagasan mengenai sosialisme yang terbelakang. Konsep seperti itu, agaknya, hanya mempunyai makna dalam hubungan dengan suatu gagasan mengenai “sosialisme maju.” Dalam laporan-laporan Tiongkok sekarang, ini lazimnya tidak kurang daripada yang dilukiskan oleh Marx sebagai “tahap pertama komunisme,” dan sangat berbeda dari “sosialisme maju” yang menurut ideolog-ideolog Sovyet telah ada di Uni Sovyet pada tahun-tahun 1970-an. Aku mengemukakan di Bab Tiga bahwa terdapat berbagai pandangan mengenai berlakunya hukum nilai pada masing-masing dari kedua jenis “sosialisme” ini. Pandangan-

pandangan itu bertentang-tentangan satu sama lain secara diametris – yang satu bersiteguh bahwa hukum nilai beroperasi lebih sempurna di bawah sosialisme maju daripada di bawah sosialisme terbelakang dan yang satu lagi bersiteguh bahwa hukum nilai itu beroperasi lebih terbatas. Namun, perhatian khusus adalah mengenai yang oleh Stalin disebut hukum “perkembangan berencana dan seimbang.” Ini bukan sebuah hukum melainkan sebuah perumusan yang, jika ia mau menjadi suatu pengertian objektif, menuntut suatu tatanan peraturan-peraturan. Agaknya, perencana-perencana Tiongkok “berayun” antara dua cara pendekatan. Di satu pihak mereka berpaling pada perumusan lama dari “ahli-ahli genetika” dari Uni Sovyet yang, pada tahun-tahun 1920-an, menguraikan bahwa ekonomi ditentukan oleh “mata-rantai terlemah”-nya (pertanian). Itu yang menjadi alasan bahwa “sistem” tahun 1956 adalah “terlalu maju.” Di lain pihak, perencana-perencana Tiongkok beroperasi dengan keseimbangan (*balances*) material yang ditentukan hanya dalam saling hubungan satu sama lainnya. Di sini orang menghadapi suatu totalitas fungsionalis di mana pengoperasian secara efisien dari suatu sistem yang ada, menjadi *telos*-nya sendiri. Penganut-penganut pandangan genetik yang direvisi cenderung mengatakan bahwa hubungan-hubungan pasar diperlukan selama sektor pertanian tidak berkembang; sedangkan yang bersiteguh pada perencanaan keseimbangan-keseimbangan material cenderung mengatakan bahwa mereka akan selalu diperlukan selama informasi yang tersedia bagi sang perencana masih tidak lengkap. Pandangan pertama telah membawa pada suatu pemulihan sebagian dari kapitalisme dalam pertanian, sedangkan pandangan kedua telah membawa pada diterimanya model-model matematis yang berbicara tentang produktivitas dari “semua” masukan dan dengan begitu menentang teori kerja mengenai nilai.

Untuk memahami gagasan mengenai sosialisme terbelakang dan sosialisme maju, demikian dikatakan, diperlukan suatu penjelasan lengkap mengenai dua konsep lain yang digunakan para ekonom-politik sosialis di negeri-negeri lain – perkembangan ekstensif dan perkembangan intensif. Ekonom-ekonom seperti itu menggunakan model-model linear maupun siklis, yang harus dihubungkan pada suatu teori mengenai tahapan-tahapan perkembangan. Namun di Tiongkok,

diskusi-diskusi mengenai perkembangan intensif dan ekstensif cenderung dilakukan di luar teori tahapan apapun. Pendekatan secara a-historis ini sangat berbeda dari yang lazimnya dianggap sebagai metodologi Marxis. Teori dan sejarah sistem-sistem selamanya tidak dapat dikerabatkan.

Teori sistem-sistem, harus ditekankan, adalah sepenuhnya tidak-teleologis. Walaupun Althusser akan menyangkalnya, terdapat suatu unsur teleologis yang kuat sekali dalam Marxisme. Memang, klaim akan legitimasi yang diajukan oleh Partai-partai Komunis lazimnya didasarkan pada pengetahuan sesuatu Partai tertentu mengenai *telos* komunis. Masalah legitimasi ini diangkat oleh Hannah dalam Bab Empat. Ia mencatat suatu pergeseran dalam yang oleh Max Weber dinamakan imbauan Partai pada rasionalitas sub-stantif (atau rasionalitas yang berorientasi pada nilai-nilai atau pertimbangan-pertimbangan teleologis). Krisis legitimasi yang dihadapi oleh Partai Komunis Tiongkok, setelah bertahun-tahun kekacauan, telah menghasilkan dilepaskannya himbauan-himbauan normatif atau himbauan-himbauan koersif (paksaan) agar dilaksanakan perjuangan kelas demi himbauan-himbauan sederhana yang remuneratif (berhadiah). Menghasilkan barang-barang melalui modernisasi telah menjadi *telos* baru, dan ini memberikan landasan bagi suatu rasionalitas baru. Lazimnya, namun, kalau PKT berbicara tentang rasionalitas, itu berarti yang oleh Weber disebut “formal” atau yang disebutkan oleh Hannah –mengikuti Habernass– “purposif” (“terarah”).

Tujuan terpenting yang mesti dikejar, tampaknya, adalah efisiensi ekonomi. Tetapi, apakah efisiensi itu? Kebanyakan ahli ekonomi merumuskan efisiensi dalam pengertian hubungan antara masukan-masukan dan keluaran-keluaran atau secara lebih luasnya sebagai penggunaan sumber-sumber secara ekonomis. Kebanyakan ahli sosiologi lebih jauh lagi daripada itu dan menafsirkan efisiensi sebagai pencapaian suatu tujuan tertentu dengan kerugian sekecil mungkin pada tujuan-tujuan lainnya. Ini tidak sama dengan rasionalitas formal. Bagi Weber rasionalitas formal adalah diberlakukannya cara-cara yang layak untuk tujuan-tujuan di dalam satu perangkat peraturan. Karenanya,

II | Bill Brugger (peny.)

dimungkinkan mempunyai suatu sistem birokratik yang sangat rasional tetapi yang juga sangat tidak-efisien dan, sudah tentu, *vice versa*. Ini lah yang pasti dipikirkan oleh Weber ketika ia pada tahun 1909 berkomentar bahwa mesin birokratik Jerman yang krasional telah mencapai jauh lebih sedikit daripada yang dicapai birokrasi-birokrasi Perancis dan Amerika yang korup.⁶ Maka itu, mungkinkan para perencana Tiongkok di dalam pengejaran mereka yang bertekad tunggal akan efisiensi mungkin telah menyumbang pada ketidak-rasionalan birokratik? Ataukah masalahnya ialah bahwa pengejaran rasionalitas birokratik itu yang menyumbang pada ketak-efisienan baru?

Dalam mengejar efisiensi, Bab Empat berargumentasi, perencanaan-perencana Tiongkok telah gagal dalam mengubah ketentuan- ketentuan. Mereka gagal karena rasionalitas sistem itu memasang suatu premi lebih tinggi pada stabilitas daripada pada pencapaian hasil-hasil ekonomik sederhana. Dengan biaya apapun dan berapa pun, ketidak-stabilan beberapa negeri Eropa Timur harus dihind-ari. Akibatnya, perencanaan-perencana Tiongkok dituntut mengejar tujuan efisiensi itu tanpa diberi alat-alat untuk melakukannya – yaitu, suatu reformasi dalam sistem harga-harga yang ditentukan pemerintah. Dengan demikian, usul-usul reformasi tahun 1987 membuyar dan yang berkanjang adalah yang disebutkan oleh Hannah: suatu “ekonomi komando.”

Kurangnya keberhasilan dalam usul-usul reformasi itu tidak hanya disebabkan oleh pengejaran kestabilan. Dalam sistem birokratik terdapat suatu kecenderungan untuk menggunakan alat- alat birokratik dalam mengatasi inefisiensi-inefisiensi yang diciptakan oleh birokrasi itu sendiri. Akibatnya tidak bisa lain kecuali lebih banyak masalah-masalah birokratik. Masalah birokrasi adalah yang oleh Marx ditanggulangi secara paling tidak sepadan. Sebetulnya banyak sekali yang dapat dimanfaatkan dari komentar sugestifnya dalam *Contribution to the Critique of Hegel's Philosophy of Right*, bahwa secara tertentu, kaum birokrat akan memiliki/menguasai negara.⁷ Pernyataan ini tidak dapat

⁶ Albrow, hal. 64.

⁷ Marx, (1843), Marx dan Engels, CW., III, 1975, hal. 47.

dijulukkan pada kategori *pemikiran yang tidak dewasa* yang masih berada di bawah pengaruh Hegel. Pernyataan itu menimbulkan masalah-masalah yang lebih mendasar daripada diskusi yang sangat terkenal mengenai negara dalam *The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte*. Naskah tersebut belakangan inilah yang oleh banyak kaum Trotskyis dipergunakan untuk mengkritik kekuasaan negara yang berlebih-lebihan di Uni Sovyet dan Tiongkok. Mereka berargumentasi bahwa di dalam suatu keadaan di mana terdapat suatu keseimbangan relatif antara kekuatan-kekuatan kelas, negara berada di atas masyarakat sipil dan gejala Bonapartisme muncul. Gejala Stalin dilihat sebagai suatu contoh dari Bonapartisme seperti itu, sekalipun tidak pernah ada kepastian hingga sejauh mana kaum Trotskyis bermaksud mengenakan julukan itu pada “kultus individu” (pemujaan perseorangan) versi Tiongkok.

Sayang sekali, tidak ada sumbangan Trotskyis pada kumpulan karangan ini. Juga tidak terdapat satupun wakil dari aliran yang berbicara tentang “cara produksi negara.” Namun kebanyakan penyumbang sangat memperhatikan pertumbuhan aparat negara yang tidak menunjukkan “transendensi” (*Aufhebung*) maupun perumusan Marxis yang sangat berlawanan “melenyapnya” (*Absterben*). Tiap gagasan mengenai suatu proses peralihan tunggal antara kapitalisme dan komunisme mesti mengajukan persoalan itu. Mao, yang mencoba memahami trans-isi itu sebagai satu proses tunggal, jarang melakukannya; dan kecuali beberapa komentar sugestif bahwa komune-komune pedesaan mengandung “tunas-tunas komunisme,” juga sangat sedikit Marxis Tiongkok lainnya yang melakukannya. Memang, seperti ditunjukkan oleh Sullivan, kebanyakan laporan resmi Tiongkok, yang adalah variasi-variasi dari pendekatan model-bangunan yang dirintis oleh Stalin pada tahun 1936, sama sekali tidak melihat peralihan sebagai suatu proses tunggal.

Sebagaimana masih dapat diingat, Stalin telah menciptakan suatu cara produksi sosialis, dan gagasan yang ada sekarang mengenai sosialisme yang terbelakang adalah suatu usaha serupa. Kebanyakan penulis dalam kumpulan tulisan ini menolak pendekatan itu. McCarthy dalam Bab Lima, sebaliknya, sekalipun sangat kritis terhadap Stalin dan kepemimpinan Tiongkok dewasa ini, mempertahankan bahwa yang salah dengan Marxisme-Leninisme adalah suatu teoretisasi yang sepadan

mengenai, –yang memang benar adalah–, suatu cara produksi yang bijaksana. Bagai-manapun, suatu cara produksi bukanlah sekedar suatu konfigurasi khusus mengenai tenaga-tenaga dan hubungan-hubungan produksi, melainkan cara produkt surplus masyarakat di produksi, dikutib dan didistribusi.

Beberapa tahun yang lalu, sarjana-sarjana Hungaria Konrad dan Szeleny, dengan memadukan pendekatan-pendekatan Marx, Weber dan Polanyi, mengemukakan bahwa masyarakat-masyarakat sosialis bukanlah tahapan-tahapan tengah antara kapitalisme dan komunisme, melainkan dipimpin/diperintah oleh azas-azas integrasi yang secara dasar berbeda dari kedua-duanya.⁸

Kapitalisme dikuasai oleh integrasi pasar. Komunisme masih belum diteorikan, namun dapatlah dianggap bahwa komunisme diperintah oleh satu bentuk integrasi timbal-balik (pertukaran barang-barang dan jasa-jasa tanpa perantaraan uang dan ekuivalen-ekuivalen pasar). Sosialisme, sebagai-mana adanya, diperintah oleh yang disebutkan oleh Polanyi “integrasi redistributif,” di mana surplus diambil dari produsen oleh suatu lapisan elit dan kemudian didistribusikan kembali menurut pandangan elit itu mengenai rasionalitas. Lapisan elit itu memperoleh legitimasinya dari pengetahuannya mengenai suatu *telos* yang memakai kategori-kategori Marxis. Elit intelek-tual ini sedang menjadi suatu kelas baru.

Sumbangan McCarthy pada kumpulan ini dalam Bab Lima disusun dalam suatu kerangka Marxist yang lebih ortodoks daripada karya Konrad dan Szeleny, tetapi titik pangkalnya adalah juga mengenai cara surplus diproduksi, dikutib dan didistribusikan. Ia mengisyarat-kan bahwa cara produksi sosialis telah mengubah pemimpin-pemimpin negara menjadi suatu kelas penguasa baru, sambil mengubah kelas-kelas dari masyarakat lama menjadi suatu massa pekerja yang lebih homogen. Perubahan-perubahan yang digerakkan sejak 1978 bukan suatu restorasi dari kapitalisme, juga bukan suatu gerak pengun-duran diri yang perlu untuk maju menuju komunisme. Perubahan-perubahan itu harus dilihat sebagai

⁸ Konrad dan Szelenyi, 1979.

jawaban gaya sosialis pada suatu ketidak-mampuan untuk mengembangkan suatu surplus pertanian yang mencukupi. Mungkin sekali, demikian ia mengemukakan, bahwa sistem tanggung-jawab rumah-tangga akan menggerogoti dominasi cara sosialis, namun hingga kini tidak ada tanda-tanda akan terjadinya hal itu.

Argumen-argumen McCarthy mengenai suatu cara produksi sosialis ditolak oleh Reglar dalam Bab Enam, yang mengemukakan pendapatnya bahwa salah satu kesalahan besar dari ekonom Sun Yefang almarhum adalah penerimaannya atas ide suatu cara produksi sosialis (sekalipun sangat berbeda jauh dari penerimaan McCarthy). Namun, penilaian Reglar atas Sun Yefang adalah sangat baik. Begitu pula, Reglar menentang argumen-argumenku terhadap adanya “hukum-hukum ekonomi yang objektif,” dan mendukung keyakinan bahwa perencanaan dapat dipimpin sesuai “hukum nilai.” Reglar juga memakai alasan-alasan Sun untuk menentang yang dipandanginya sebagai pendekatan “distribusionis” Hannah dalam Bab Empat. Jika para pembaca sebelumnya belum diyakinkan, maka tidak disangsikan lagi bahwa mwenjelang Bab Enam buku ini telah diproduksi dalam semangat “membiarkan seratus aliran pikiran berlomba.”

Namun terdapat dua aspek yang menyatukan bagian besar sumbangan pada buku ini. Pertama, seperti sudah didiskusikan di muka, adalah tekanan selalu atas “realitas” kategori-kategori Marxis. Yang kedua adalah arti penting yang diberikan pada peranan negara dalam semua aspek kehidupan sosial Tiongkok. Bab Satu berbicara tentang peranan dari suatu epistemologi resmi. Bab Dua mencatat arti penting menentukan dari “garis ideologis yang tepat.” Bab Tiga mendiskusikan batas-batas yang diberlakukan ortodoksi resmi dalam perdebatan ekonomi politik. Bab Empat mengemukakan bahwa rasionalitas dari suatu mesin birokratik bertentangan dengan hasratnya sendiri akan efisiensi. Bab Lima bahkan lebih jauh lagi dan mengemukakan bahwa negara bersifat menentukan bagi dinamika-dinamika suatu cara produksi baru dan tidak dapat diharapkan akan melenyap (dengan sendirinya). Bab Enam mendokumentasikan pandangan-pandangan Sun mengenai peranan negara dalam suatu ekonomi sosialis, yang adalah tidak-ortodoks dari sudut pandangan sosialisme Stalinis dan sosialisme pasar.

Perdebatan-perdebatan yang sedang berlangsung mengenai peranan negara di Tiongkok adalah lebih menggairahkan daripada yang telah berlangsung selama beberapa dasawarsa. Tetapi para penyumbang pada kumpulan tulisan ini sependapat bahwa batas-batas ideologi resmi telah ditetapkan terlalu sempit.

Bab Empat membicarakan hasrat resmi untuk menyasikan kepentingan-kepentingan negara, unit ekonomik dan individu. Dalam kenyataan, yang dituju adalah hubungan antara negara dan unit ekonomik, dan antara unit ekonomik dan individu, tetapi bukan hubungan antara individu dan negara. Hubungan antara individu dan negara secara konvensional dipertimbangkan pada tingkat lain – sebagai suatu persoalan legal. Namun banyak warganegara dialienasi (diasingkan) dari negara sedemikian rupa hingga sedikit sekali yang akan diperbaiki oleh reform-reform legal. Tindakan-tindakan legal mungkin memperluas kemerdekaan negatif (kebebasan dari campur-tangan) namun itu sedikit sekali kegunaannya untuk memajukan kemerdekaan positif (kebebasan untuk mewujudkan potensi seseorang sebagai warganegara suatu bentuk *polis* baru dan sebagai seorang produser koperatif). Yang diperlukan adalah menanggulangi alienasi!

Alienasi adalah suatu konsep Marxis yang telah mengalami nasib buruk dalam Marxisme-Leninisme ortodoks. Sejak Stalin, konsep itu telah dianggap sebagai suatu residu dari Marx muda yang humanis dan dicemari idealisme. Namun, sejak publikasi *Economic and Philosophical Manuscripts* Marx, beberapa dasawarsa yang lalu, ia telah mencekam perhatian sarjana-sarjana di negeri-negeri sosialis dan dalam beberapa peristiwa, bahkan telah didiskusikan dalam pers resmi Partai. Begitulah peristiwa di Cekoslovakia pada tahun 1968 dan selama suatu waktu singkat, peristiwanya di Tiongkok pada tahun 1983. Antara 1978 dan 1983 menurut taksiran telah muncul hampir 600 karangan mengenai alienasi dalam jurnal-jurnal dan surat-kabar surat-kabar Tiongkok. Namun, baru pada awal 1983 pidato filsuf veteran Zhou Yang pada Peringatan Seratus Tahun wafatnya Marx, telah mengedepankan persoalan itu dalam harian Komite Sentral PKT *Renmin Ribao*. Bahkan pada waktu itu, pidato itu diterbitkan setelah sejumlah anggota pimpinan

berusaha membatasi diskusi itu pada jurnal-jurnal akademik. Dalam pidatonya yang diterbitkan itu, Zhou memodifikasi, dan secara tertentu membalikkan, posisi yang telah diambilnya terhadap humanisme pada tahun 1963. Ia mengemukakan bahwa suatu pengutukan resmi atas humanisme Marxis telah dipakai untuk mengesahkan aktivitas tidak manusiawi dalam Revolusi Kebudayaan. Ia merasakan adanya suatu kebutuhan untuk berusaha menguasai unsur humanis dalam Marxisme dan menggunakan konsep-konsep pokoknya –seperti alienasi– dalam suatu analisis mengenai masyarakat sosialis,

Masyarakat sosialis jauh lebih unggul daripada masyarakat kapitalis, namun itu tidak berarti bahwa sama sekali tidak ada alien-asi dalam masyarakat sosialis. Di masa lalu kita telah melakukan banyak hal yang bodoh dalam pembangunan ekonomi dikarenakan kurangnya pengalaman dan kegagalan kita untuk memahami pembangunan sosialis – dunia kebutuhan itu; kita tidak terelakkan lagi menderita akibat-akibatnya; ini adalah alienasi di bidang ekonomi. Karena demokrasi dan sistem legal tidak sehat, pegawai negeri kadang-kadang secara sembarangan menggunakan kekuasaan yang dianugerahkan oleh rakyat kepada mereka dan merekalah yang menjadi penguasa-penguasa (atas rakyat); ini adalah alienasi di bidang politik, atau alienasi kekuasaan. Sedangkann mengenai alienasi di bidang ideologi, ini ditipifikasikan dalam kultus individu. Ini mempunyai kesamaan-kesamaan tertentu dengan alienasi religius yang dicela oleh Feuerbach.⁹

Karena telah menerbitkan pandangan-pandangan Zhou Yang, sejumlah anggota senior redaksi *Renmin Ribao* dipindahkan dari jabatan-jabatan mereka, termasuk wakil redaktur kepala, Wang Ruoshi, yang adalah seorang berwenang mengenai alienasi. Menjelang musim gugur tahun 1983, suatu gerakan besar-besaran dilancarkan untuk menolak gagasan akan kemungkinan adanya alienasi di bawah sosial-isme, dipimpin oleh Wang Zen, Kepala Sekolah Parftai Pusat, dan Deng Liqun, Direktur Departemen Propaganda Komite Sentral Partai. Puncak gerakan itu dicapai dengan suatu pidato panjang sejarawan Partai yang veteran, Hu Qiaomu, pada bulan Januari 1984.¹⁰

Di tempat lain telah kudiskusikan isi pengutukan-pengutukan¹¹ itu.

⁹ RMRB., 16 Maret 1983, hal. 5.

¹⁰ Hu Qiaomu, RMRB., 27 Januari 1984 hal.1-3.

¹¹ Brugger, 1984(a).

Yaitu berpokok pada argumen bahwa tidak ada eksploitasi, karena kaum pekerja memiliki alat-alat produksi. Lagi pula, birokratisme jangan dikacaukan dengan alienasi kekuasaan, karena berbuat demikian akan mengaburkan garis demarkasi antara kapitalisme dan sosialisme. Akhirnya, jangan pula berbicara tentang alienasi ideologi seakan-akan itu sama dengan alienasi yang dikemukakan Feuerbach dalam kasus religi; dalam masyarakat sosialis, agaknya, tidak ada ekuivalen ideologis dari religi, karena religi tidak mesti memainkan peranan instrumental yang sama sebagai candu.

Keluasan penolakan di atas jelas sekali. Namun yang pokok adalah, bahwa penggunaan argumen-argumen mengenai alienasi dari apa yang diistilahkan “hak,” berpulang pada argumen-argumen “golongan kiri” yang diasosiasikan dengan almarhum Mao Zedong dan “Komplotan Empat.” Diskusi Mao dan “Komplotan Empat” mengenai “revolusi berlanjut” justru berdasarkan keyakinan bahwa suatu perubahan sederhana dari pemilikan legal tidaklah mengakhiri eksploitasi dan bahwa tidak ada garis pemisah yang pasti dan tajam antara sosialisme dan kapitalisme. Sebagaimana masih dapat diingat, gantinya menjadi sebuah model, sosialisme telah dipandang sebagai suatu proses yang dapat dibalikkan. Sekalipun Mao dan “Komplotan Empat” akan menyangkali tiap penggunaan konsep “alienasi,” mereka dapat dianggap telah mengemukakan hal yang sama artinya dengan itu.

Hal ini sangat jelas bagi teoritis-teoritis yang menolak penggunaan istilah itu karena itu dapat menggoyahkan kesadaran massa.¹²

Sekalipun “Komplotan Empat” mungkin tidak akan menyetujui mengenai aspek-aspek religius dari kultus individu, ia mungkin juga tidak akan menyetujui dengan fungsionalisme kersang yang menjadi sumber pandangan kaum instrumentalis. Sesungguhnya, bahkan para ideolog resmi dewasa ini menjauhi pandangan fungsionalis dalam menganggap pentingnya simbolisme feodal yang menyatakan diri dalam Revolusi Kebudayaan.

¹² Chen Ruisheng dan Xu Xiaoying, *RMRB.*, 3 Januari 1983, hal. 3

Menurut pendapatku, serangan resmi yang dilancarkan belakangan ini terhadap orang-orang yang menggunakan Marx muda dalam suatu kritik atas masyarakat sosialis merupakan suatu kemunduran serius dalam menghidupan kembali Marxisme di Tiongkok. Karenanya adalah mustahil bahwa penggunaan kritisisme Rosa Luxemburg yang jitu dan penuh wawasan mengenai Lenin untuk merintis suatu metode baru dari kepemimpinan Partai¹³ akan pernah mendapatkan persetujuan resmi. Suatu kecenderungan telah berkembang, sekali lagi, untuk menggantikan dimensi kritis dari Marxisme dengan dimensi ideologis. Dalam hal ini, Marxisme dapat dianggap sebagai benar-benar memainkan suatu peranan dalam memacu alienasi ideologis. Ini masalah yang menjadi awal introduksi ini.

¹³ Cheng, 1983.

BAB SATU

Teori Marxis Dan Transisi Sosialis:

KONSTRUKSI SUATU HUBUNGAN EPISTEMOLOGIS

Michael Dutton dan Paul Healy

Bab ini adalah sebuah karya teori dan dengan demikian bertentangan dengan kebanyakan literatur yang dewasa ini beredar mengenai Marxisme Tiongkok.* Agaknya sudah terlalu lama sarjana-sarjana di bidang Asian Studies telah lebih berusaha menyamai daripada mempelajari epistemologi Mao Zedong - suatu epistemologi yang sepenuhnya empirisis. Penekanan pada teori dalam bab ini mempunyai dua maksud. Pertama, secara metodologis, bab ini mencoba menetapkan suatu jarak dari tradisi empirisis ini.

Ini dilakukan bukan dengan mengambil suatu posisi baru di dalam wilayah epistemologi, tetapi dengan suatu kritik mengenai epistemologi itu sendiri, *per se*. Ia bersikap kritis terhadap karya-karya yang mengandalkan diri pada epistemologi, baik itu yang rasional ataupun yang empirisis, yang memastikan bahwa yang riil (baik yang riil-konkrit atau yang riil-dalam-pikiran) adalah obyek studi. Karya-karya seperti itu mesti mendudukkan (posit) suatu hubungan perbedaan/

*Tesis pokok bab ini diambil dari Dutton, 1983. Sebuah versi lebih awal dari karya bersama ini telah disajikan pada Konferensi Nasional ke-4 dari Asian Studies Association, Monash University, Melbourne, 10-14 Mei, 1982. Namun, kita mesti menyatakan, bahwa tesis pokok itu, argumen-argumen dan khususnya posisi dasar kita telah dengan ketat digarap kembali. Aspek-aspek baru telah ditambahkan, yang lain-lainnya secara mendasar direvisi dan beberapa dihapus. Hal ini terutama mengenai seksi-seksi yang berkaitan dengan Marx, Lenin dan kepemimpinan pasca-Mao, dan sampai batas tertentu dengan mengenai seksi-seksi yang membahas Bogdanov, Stalin dan Mao. Dalam banyak hal bab ini mencerminkan asuatu kritik mendasar akan posisi kita sebelumnya. Kami ingin menyatakan terima kasih pada Colin Mackerras, Bill Burger, Jeff Minson, Peter Williams, Don McMillen, Nick Knight, Graham Young, Dennis Woodward, Anne Brown dan Peter Costa atas komentar-komentar mereka yang kritis dan sangat membantu dan atas dorongan mereka.

persesuaian antara yang riil dan pikiran. Mereka tidak dapat, sebagaimana Cutler, Hindess, Hirst dan Hus-sain telah berargumentasi, menunjang penegasan itu, ataupun menunjang peleburan tingkatan-tingkatan pengalaman menjadi sebuah tempat “mengetahui.”¹ Dalam epistemologi-epistemologi reduksionis seperti itu, sebuah tingkat praktek –baik itu ekonomik, politis, atau tingkat teoritis–, menjadi tempat diketahuinya semua praktek lainnya. Satu tingkat diistimewakan di atas semua tingkat lainnya.

Seorang pelaku (subyek) yang mempunyai jalan ke tempat ini, karenanya, mengetahui semua tempat lainnya. Kedua, dalam menyimak karya Marx, Lenin, Stalin, Mao dan kepemimpinan pasca- Mao, bab ini melancarkan suatu kritisisme atas devolusi (pewari-san/penurunan melalui perubahan-perubahan) teori dalam Marxisme. Ia bersikap kritis terhadap interpretasi-interpretasi mengenai Marx yang menyatakan (tanpa bukti) bahwa metodologi Marx adalah empirisis. Akibat tafsiran-tafsiran seperti itu sangat dramatik. Teori, peranannya, cara mengungkapkannya dan kegunaannya, tidak lagi merupakan masalah-masalah keserjanaan Marxis. Peranan, artikulasi dan kegunaan teori adalah jelas sekali dan sesungguhnya “sejelas” sifat riil dari sasaran riil “pengetahuan” empirisis. Dengan menegaskan sifat anti-empiris epistemologi Marx maka kita sepenuhnya sependapat dengan Althusser.² Namun, sebagai-mana Hindess, Hirst, Cutler dan Hussain telah memperdebatkannya, Althusser dan juga Marx, telah bersalah karena rasionalisme mereka. Sambil berusaha melepaskan diri dari empirisisme, mereka tidak melepaskan diri dari epistemologi reduksionis³ lainnya. Adalah dua bahaya empirisisme dan rasionalisme, sebenarnya bahaya karena masih tetap berada dalam kungkungan dan ketidak-mantapan epistemologi itulah, yang mengakibatkan parahnya kelemahan setiap usaha untuk menteorikan transisi sosialis.

Corrigan, Ramsay dan Sayer: Pemutusan-hubungan Mao dengan Problematik Sosial Bolshevik.

Kelemahan-kelemahan seperti itu hanya dapat dimengerti melalui suatu penelitian teori Marxis, dan lebih khusus lagi melalui suatu penelitian kumpulan-kumpulan teori yang secara jelas meng-hadapi problem

transisi (yaitu, Bolshevisme, Marxisme Tiongkok, dsb.). Namun, sebagian besar karya keserjanaan mengenai Tiongkok telah tidak mampu melihat hubungan antara perkembangan kumpulan teori ini dan arah kebijaksanaan dari kepemimpinan Tiongkok sekarang. Karenanya, adalah menyegarkan untuk melihat diumumkan-nya seperangkat naskah oleh Corrigan, Ramsay dan Sayer yang secara jelas bersangkutan dengan ini dan yang memperlakukan Marxisme Tiongkok secara teoritis.⁴ Naskah-naskah mereka, dalam hal ini sekurang-kurangnya, adalah seminal (mempunyai kemungkinan berkembang di masa datang). Mereka berusaha memperlakukan Marx-isme Tiongkok, dan Pikiran Mao khususnya, sebagai bagian dari suatu korpus (*corpus* = tubuh) karya umum yang dapat ditetapkan sebagai teori Marxis, dan tidak sebagai suatu penyimpangan Oriental (Timur). Tidak seperti kebanyakan sarjana yang bekerja di wilayah Marxisme Tiongkok, posisi Corrigan, Ramsay dan Sayer bukan cuma omong kosong belaka; mereka berusaha membuktikan validitasnya. Kita juga menunjang keharusan pemahaman perkembangan teori Marxis agar dapat memahami inovasi-inovasi dan masalah-masalah teoritis Marxisme Tiongkok. Lagi pula, kami yakin bahwa keserjanaan di wilayah ini hingga kini telah gagal dalam usaha menangani masalah ini. Dalam arti ini, maka karya Corrigan, Ramsay dan Sayer merupakan suatu kemajuan penting.

Corrigan, Ramsay dan Sayer menyatakan bahwa Pikiran Mao Zedong mesti dilihat sebagian bagian dari tubuh umum karya teoritis Marxis dan, karena itu, hanya dapat difahami jika dipandang dari sudut Bolshevisme. Mengenai hal-hal ini kami sepenuhnya sependapat. Namun kami berbeda dengan mereka dalam sejumlah bidang. Karya mereka gagal menunjukkan salah satu dari masalah dasar Marxisme masa kini – yaitu epistemologinya yang reduksionis. Lagi pula, kami berbeda secara sangat dramatis mengenai keban-yakan argumen yang mereka kemukakan untuk menunjang klaim mereka bahwa posisi Mao adalah suatu inovasi penting dalam teori Marxis yang memutuskan hubungan dengan tradisi Bolshevik. Karya Mao tidak semestinya dianggap sebagai suatu pemutusan hubungan dengan tradisi itu, karena tradisi yang didiskusikan tidak cukup “menyatu” untuk membenarkan istilah “pemutusan hubungan.” Selanjutnya, penggunaan istilah ini gagal

mengakui secara teoritis perihal kesinambungan epistemologis antara posisi-posisi reduksi-sionis yang diartikulasikan oleh Stalin dan Mao. Corrigan, Ramsay dan Sayer mengemukakan pendapat bahwa karya Mao memutuskan hubungan (sekalipun sebagian) dengan yang mereka namakan “problematik Bolshevik.” Dalam “problematik” ini, mereka menegaskan,

Tenaga-tenaga produksi telah disetarakan (equated) dengan teknologi industrial *per se*, dan industri kapitalis dari Barat dipandang sebagai memberikan paradigma (model pola) bagi perkembangan mereka. Perspektif ini menopang berbagai-bagai kebijaksanaan untuk memindahkan sumber-sumber dari pertanian kepada industri berat, dengan perkiraan bahwa sesudah itu produksi pertanian dapat pada gilirannya *dimodernisasi*, dan hubungan-hubungan sosialisinya akhirnya diubah, atas suatu basis industrial *maju* yang cocok; dalam perspektif ini sudah jelas kebenarannya bahwa mekanisasi mesti mendahului kerjasama.⁵

Demikian, *problematik Bolshevik* menyerupai teori Stalin mengenai tenaga-tenaga produktif dalam hal, bahwa ia hampir secara khusus bersangkutan dengan modernisasi dan industrialisasi. Mao memutuskan hubungan dengan problematik ini, demikian mereka menegaskan, dengan tekanannya atas hubungan-hubungan produksi dan dengan penekannya pada perjuangan kelas. Mereka terus berargumentasi,

Teori-teori dan praktek-praktek Mao mengenai pembangunan sosialis secara implisit hampir selengkapnya menantang dalil strategi Bolshevik, sekalipun – dan ini jauh daripada suatu soal linguistik belaka – ia sering tertahan dalam problematik yang sama di dalam tulisan-tulisannya.⁶

Dalam cara-cara apakah Mao tetap terkait pada Bolshevisme? Corrigan, Ramsay dan Sayer menegaskan bahwa Pikiran Mao Zedong tetap terkait “tidak saja pada tingkat penting dalam memudahkan pemisahan-pemisahan” yang membikin pincang (antara kebijaksanaan dalam negeri dan luar negeri, misalnya) dan menopang kemungkinan “membuka diri/keterbukaan” pada model-model modernisasi dan rasionalitas burjuis, tetapi lebih penting lagi adalah bahwa Bolshevisme menggenangi “bidang-bidang inti” epistemologi dari teori PKT.⁷ Harus diberi tekanan yang kuat pada pentingnya epistemologi dalam analisis Corrigan, Ramsay dan Sayer, karena mereka menegaskan bahwa pada tingkat inilah Mao memutuskan hubungan dengan problematik Bolshevik. “Kami mulai

dengan epistemologi Mao sebagai dasar bagi seluruh perspektifnya mengenai organisasi, mengenai hubun-gan-hubungan produksi, maupun mengenai aktivitas kultural.”⁸ Maka itu, pada epistemologi kita harus berpaling jika kita mau mensyahkan atau tidak mensyahkan klaim apapun bahwa Mao telah memutuskan hubungan (sekali pun secara implisit dan sebagian) dengan Bolshevisme. Adalah karena sebab itu bab ini dipusatkan pada yang epistemologis. Ini tidak berarti bahwa kami sendiri menganut suatu posisi epistemologis. Juga tidak berarti bahwa kami menonjolkan ini karena kami berpedoman pada sentralitas yang epistemologis *per se*. Kami tidak percaya bahwa terdapat suatu posisi epistemologis murni di dalam Marxisme yang cuma menunggu untuk ditemukan kembali. “Pemusatan kami pada yang epistemologis hanyalah untuk mengakui bahwa semua pemikir Marxis terkemuka telah berpegang pada salah satu posisi epistemologis, baik itu posisi rasionalis maupun posisi empiris.” Strategi penonjolan arti-pentingnya epistemologi di sini adalah, karenanya, sama dengan strategi memandu studi yang dilakukan oleh Corrigan, Ramsay dan Sayer. Namun, kita akan mengatakan bahwa karena hamba-tan-hambatan untuk bekerja dalam epistemologi ini, posisi Corrigan, Ramsay dan Sayer adalah tidak dapat dipertahankan. Penyebabnya ini terletak pada konsep mereka, “problematik sosial.” Mereka menulis,

Penggunaan istilah *problematik* oleh kami ada keterkaitan pada tradisi Althusserian dalam hal, bahwa kami menggunakannya untuk memusatkan perhatian pada yang kami anggap suatu acuan pasti dalam mana semua variant Bolshevismee, dengan segala perbedaannya (yang penting), berakar; suatu kerangka yang dianggap dengan sendirinya dan secara implisit terbuka bagi perdebatan, yang di dalam batas-batasnya konfrontasi mereka diartikulasikan. Namun kami mengkualifikasikan problematik ini bersifat *sosial*-dan hal ini mesti ditekankan sekali-karena Bolshevisme bukan hanya sekedar seperangkat ide melainkan suatu kumpulan praktek.

Bagi Corrigan, Ramsay dan Sayer, suatu problematik tidak dapat diperlakukan sebagai “sekedar stgruktur-struktur dan peristiwa-peristiwa idesional daripada sosial.”⁹ Adalah pada struktur-struktur dan peristiwa-peristiwa sosial ini kita harus berpaling jika kita bermaksud meneliti “problematik sosial” itu. Dengan kata lain, obyek (dan subyek, karena subyeknya tertanan secara implisit di dalam yang riil) suatu

problematis sosial adalah yang riil. Ini sama sekali tidak mempunyai kesamaan apapun dengan tradisi Althusserian. Bagi Althusser, suatu problematis sepenuhnya berada dalam pikiran, bekerja atas suatu obyek pikiran, dan adalah –lagi pula– sepenuhnya suatu bangunan teoritis.¹⁰ Ini tidak berarti bahwa gagasan Althusser tidak mengandung masalah-masalah; lebih tepat dikatakan, bahwa ini cuma untuk menyatakan bahwa konsep yang diuraikan dalam posisi rasionalisnya tidak dapat segera dipindahkan pada suatu posisi empiris. Untuk menggali konsep-konsep dari suatu posisi epistemologis dan menggunakannya dari suatu perspektif lain adalah menjadikan konsep-konsep, yang sendirinya mengandung persoalan, nyaris tidak dapat dilakukan. Suatu contoh bagus dari ini adalah penguasaan Corrigan, Ramsay dan Sayer atas gagasan Althusser mengenai problematis. Mari kita periksa konsep Althusserian ini secara lebih tuntas, karena dengan berbuat demikian akan kita tunjukkan sifat tidak dapat dipertahankannya “problematis sosial” Corrigan, Ramsay dan Sayer. Kita akan membuktikan bahwa ia memang tidak dapat beroperasi sebagai suatu alat untuk memisahkan problematis Mao dan problematis Bolshevisme, dan bahwa ia bahkan tidak dapat menopang klaim, bahwa Bolshevisme dipersatukan dalam suatu ruang tunggal sebagai suatu “problematis sosial.” Bagi Althusser, sebagaimana tunjukkan oleh Geras, suatu problematis menandakan,

...kerangka teoritis (atau ideologis) yang menghubungkan konsep-konsep dasar satu sama lainnya, menentukan sifat setiap konsep itu menurut tempat dan fungsinya dalam sistem hubungan-hubungan itu, dan dengan demikian menganugrahan pada tiap konsep, arti penting khusus masing-masing.¹¹

Maka itu, ia berfungsi sebagai seperangkat pertanyaan-pertanyaan bijaksana; karena selagi suatu problematis membatasi “semua pikiran yang mungkin” dari suatu kompleks teoritis,¹² itu dilakukannya tanpa semua itu mesti dapat dilihat. Bidang problematis itu, kemudian, menetapkan yang dapat dilihat (dan, karenanya, apa yang tidak dapat dilihat). Ia menentukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan dan bidang jawaban-jawaban yang mesti diberikan. Althusser mengemukakan,

Adalah bidang problematis itu yang menentukan dan membangun yang tidak terlihat sebagai keculian yang ditentukan, *dikeculikan* dari medan jarak pengelihatan dan *ditentukan* sebagai keculian oleh

Dari sini dapat kita lihat, bahwa ini justru sama pentingnya, bagi Althusser, untuk memahami kesenjangan-kesenjangan dan ke-bungkaman-kebungkaman suatu problematik seperti memahami apa yang ada dan bersinambungan. Untuk memahami kebungkaman-kebungkaman dan setengah-kebungkaman setengah-kebungkaman dari problematik itu, harus kita menyelidikinya secara teoritis; karena yang problematik itu sepenuhnya berada di dalam pikiran dan bekerja atas suatu obyek pikiran; ia bukan, karena itu, “terbuka” bagi “pemeriksaan empiris.” Dengan demikian, yang problematik itu (tidak seperti “problematik sosial” dari Corrigan, Ramsay dan Sayer) menempatkan suatu obyek tidak sebagai sesuatu yang ditentukan melainkan sebagai suatu bangunan teoritis. Mereka tidak dapat dikembalikan pada perangkat apapun dari keadaan-keadaan “tertentu” atau “riil.” Problematik itu bukan, menurut Althusser, sebuah alat bagi interpolasi

dari yang riil ke dalam pikiran, melainkan lebih merupakan mekanisme bagi produksi suatu pengetahuan (Althusser menamakan pengetahuan ini Generalitas-generalitas III [*Generalities*]) dari suatu bahan baku (Generalitas-generalitas I). Namun, bahan baku ini bukanlah yang sebenarnya (ia bukan sekedar yang “sosial”), melainkan lebih merupakan suatu konsep pikiran dari yang sebenarnya – dari yang sosial. Bahan baku ini digarap melalui suatu proses kerja “teoritis” (Generalitas-generalitas II), diteorikan dan diubah menjadi pengetahuan. Maka itu, suatu problematik sebagai mekanisme dari produksi ini, dapat dilihat sebagai termasuk dalam kategori Generalitas-generalitas II.¹⁴ Namun, kalau ia berada di dalam Generalitas-generalitas II, maka ia mestinya sepenuhnya di dalam pikiran dan tidak mungkin “sosial” – obyeknya dibangun secara teoritis dan tidak ditentukan secara empiris. Apabila suatu “problematik sosial” mengklaim bekerja berdasarkan bentuk-bentuk fenomenal itu, berdasarkan yang sosial –yaitu, sebagai suatu mekanisme mediasi antara yang riil dan pikiran– lalu bagaimanakah ia dapat bekerja melampaui bentuk-bentuk fe-nomenal itu di dalam penentuan suatu epistemologi? Jika obyek-obyeknya adalah yang riil, bagaimanakah ia dapat menentukan obyek-obyek teoritis yang tidak

mesti merupakan suatu pencerminan sederhana dari yang sosial? Dengan kata-kata lain, dengan menerima gagasan suatu “problematik sosial,” bagaimanakah Corrigan, Ramsay dan Sayer dapat melampaui bentuk-bentuk fenomenal? Namun, gagasan mengenai suatu “problematik sosial” tidak dapat sekedar disejajarkan dengan gagasan problematik Althusserian. Sebabnya mengapa penyejajaran sederhana tidak mungkin adalah karena gagasan suatu “problematik sosial” bekerja atas dan dilahirkan dalam kebungkaman-kebungkaman gagasan Althusserian. Justru persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh “problematik sosial” Corrigan, Ramsay dan Sayer –yaitu, persoalan mengenai mediasi antara yang nyata dan pikiran– tidak dapat begitu saja dikesampingkan, sebagaimana Althusser coba lakukan, jika seseorang

bertahan pada suatu posisi epistemologis. Tanpa turun ke dalam kemunduran tiada terhingga, haruslah dikemukakan bahwa suatu problematik memberitahukan Generalitas-generalitas I melalui mediasi dengan yang riil. Kita nanti akan kembali pada problem-problem rasionalisme. Untuk sekarang, cukuplah bahwa kita mengkritik empirisisme. Kami yakin bahwa posisi Corrigan, Ramsay dan Sayer adalah empiris, dan karenanya –sesungguhnya– tidak melampaui bentuk-bentuk fenomenal. Bahkan, mereka menganggap posisi-posisi epistemologi hanya sebagai akibat-akibat dari bentuk-bentuk fenomenal ini dan dengan begitu mereka menganggap teori cuma sebagai pencerminan dari yang sosial, dari yang riil. Dengan kata-kata lain, teori cuma menjadi sistematisasi dari yang riil. Semua pengetahuan terdapat dalam yang nyata, cuma menunggu penggaliannya. Bentuk-bentuk fenomenal dalam yang nyata tidak memerlukan penjelasan teoritis, karena sentralitasnya pada epistemologi “dapat dilihat” melalui “problematik sosial” yang mengorganisasinya. Misalnya, mereka menganggap teori mengenai tenaga-tenaga produktif bersifat pokok/sentral bagi problematik Bolshevik. Namun, jika kita memeriksa konsep ini secara teoritis, sebagaimana yang memang akan kita lakukan dalam bab ini, kita dapat melihat bahwa *teori* ini cuma suatu efek dari suatu posisi epistemologis tertentu dan bukan posisi epistemologis itu sendiri. Maka, yang kita perdebatkan adalah, bahwa “sifat ditentukannya” obyek mereka itu berarti bahwa posisi teoritis mereka adalah suatu posisi hasil

penggalian. Mereka mencoba menggali esensi yang riil dari yang riil. Posisi teoritis mereka menjadi tidak lebih daripada suatu konstruksi yang didasarkan pada unsur-unsur yang-ditentukan-secara-empiris dan pada korelasi-korelasi (pertalian-pertalian) yang-diobservasi-secara-empiris antara unsur-unsur ini. Pengetahuan tidak lebih daripada sekedar “abstraksi yang bagus” dari esensi yang riil – permisahan yang esensial dari yang tidak-esensial. Dalam konsepsi pengetahuan empirisis ini, keseluruhan pengetahuan ditanamkan dalam yang riil; ia selengkapnya terukir dalam struktur dari yang tertentu itu. Kami bulat-bulat menolak epistemologi empirisis ini. Sebelum dilanjutkan, adalah perlu untuk menunjukkan bahwa dalam bab ini, kita mencoba melacak timbulnya epistemologi-epistemologi reduksionis di dalam Marxisme, dan akibat darinya atas perkembangan strategi-strategi transisi sosialis. Di bawah rubrik umum ini akan kita teliti karya Marx, Lenin, Stalin dan Mao, dan kemudian berusaha menilai hingga seberapa jauh kepemimpinan Tiongkok sekarang telah memutuskan hubungan dengan tradisi-tradisi teoritis yang telah berkembang. Karya ini, karenanya, menjejak suatu jalan yang serupa dengan jalan Corrigan, Ramsay dan Sayer; sekalipun, dengan perbedaan dalam obyek kita sebagaimana yang sudah kami lukiskan, argumentasi dan kesimpulan-kesimpulan kami secara mendasar berbeda dari mereka punya. Sebenarnya, karya kami merupakan suatu kritik mendasar atas banyak dari anggapan-anggapan dasar mereka. Sebuah kritik seperti itu adalah seksi berikutnya mengenai Marx. Di sini bab ini mengikuti Althusser dalam menegaskan sifat karya Marx yang anti-empiris. Kami berusaha membuktikan kepalsuan penegasan-penegasan – suatu kepalsuan yang begitu dibela oleh Corrigan, Ramsay dan Sayer – bahwa Marx terikat pada empirisisme. Kami melakukan ini dengan merujuk pada karya-karya Marx sendiri. Tujuannya, namun, bukan hanya untuk mengkritik Corrigan, Ramsay dan Sayer, melainkan untuk membuktikan bahwa tidak terdapat posisi epistemologis yang disatukan di dalam yang disebut “tradisi Marxis-Leninis.” Yang kita dapatkan adalah suatu pergeseran dari suatu epistemologi rasionalis pada Marx kepada suatu epistemologi empirisis pada Stalin. Menyusul penelitian mengenai posisi teoritis umum Marx, bab ini beralih pada karya para teoritis yang berkepentingan dalam

menggunakan tubuh teori umum ini bagi perangkat-perangkat khusus perhitungan dalam membeda-bedakan konjunktur-konjunktur. Dari sudut pandangan inilah karya Lenin disimak. Pada soal ini, bab ini berpaling dari argumen-argumen filosofis Marx yang lebih abstrak dan berusaha menunjukkan bagaimana posisi-posisi filosof-ikal ini mempunyai suatu pengaruh (atau bahkan tiadanya pengaruh) atas penguraian teori-teori transisi sosialis. Kedwitarian Lenin mengenai persoalan-persoalan filosofis yang pokok, dibarengi perhatiannya yang sangat dapat dimengerti akan industrialisasi dan modernisasi yang cepat, demikian dikemukakan, secara teoritis mengakibatkan erosi dari argumen epistemologis Marx yang bersifat pokok. Maka, itulah dasar lahirnya empirisisme dan positivisme Stalin – suatu posisi yang, dapat kita debat, tidak lebih dan tidak kurang cuma dibalikkan oleh Mao, dan kemudian tampaknya sekali lagi telah “dijungkir-balikkan di atas kepalanya” oleh kepemimpinan Tiongkok sekarang.

Posisi Marx

Marx mempertahankan suatu perbedaan antara obyek riil dan obyek pengetahuan, dan dengan berbuat begitu memutuskan hubungan dengan epistemologi-epistemologi empiris. Pokok bagi posisinya adalah perbedaan antara ideologi dan ilmu. Ideologi hanya berkonsentrasi pada “bentuk-bentuk fenomenal,” lahir dari suatu tanggapan mengenai bagaimana hal-hal “mengungkapkan/menyatakan dirinya sendiri.” Maka itu, pengetahuan ideologis diproduksi berdasarkan suatu kese-suaian antara kategori-kategori pikiran dan pengalaman. Sebaliknya, pengetahuan ilmiah diproduksi berdasarkan suatu perbedaan antara wujud/rupa dan esensi. Marx menegaskan hal ini dalam sebuah surat tahun 1967 pada Engels,

Di sana akan segera diketahui bagaimana lahirnya *cara melihat segala sesuatu* kaum filistin dan ekonomi vulgar, yaitu, karena hanya *bentuk* fenomenal langsung dari hubungan-hubungan ini yang direfleksikan dalam otak mereka dan bukan *hubungan-hubungan dalamnya*. Dan sambil lalu, seandainya yang dikatakan belakangan itu yang terjadi, untuk apa lagi *ilmu* diperlukan?⁶⁵

Dalam Capital Volume III, Marx mengemukakan hal serupa, “Tetapi semua ilmu akan menjadi mubasir jika wujud luar dan esensi segala

sesuatu langsung bertepatan.”¹⁶ Karenanya, Marx menuntut agar melangkah melampaui observasi – agar melangkah melampaui “gerak yang dapat dilihat, yang cuma bersifat eksternal” dan mencapai “gerak instrinsik yang sebenarnya,” dan baginya ini merupakan “pekerjaan ilmu.”¹⁷

Pemutusan hubungan dengan empirisisme dalam produksi “pengetahuan ilmiah” dan penekanan pada “metode yang benar secara ilmiah” jelas-jelas dibuktikan di dalam Introduction tahun 1957. Dalam memperlakukan metode ekonomi politik, Marx menyatakan,

Tampaknya adalah tepat untuk memulai dengan yang riil dan yang konkrit, dengan pra-syarat sebenarnya, yaitu dengan memulai, dalam ekonomika, dengan misalnya kependudukan, yang merupakan landasan dan subyek seluruh tindak sosial dari produksi. Namun, setelah meneliti lebih dalam, ini ternyata palsu .. Maka itu, jika aku mesti memulai dengan kependudukan, ini akan merupakan suatu konsepsi (*Vorstellung*) yang kacau-balau dari keseluruhan itu, dan kemudian aku akan, melalui penentuan lebih lanjut, secara analitis bergeser menuju konsep-konsep (*Begriff*) yang bahkan lebih sederhana, dari yang dibayangkan konkrit menuju pada abstraksi-abstraksi yang bahkan lebih kurus, sampai aku tiba pada determinasi-determinasi yang paling sederhana. Dari sana perjalanan itu akan harus dijejaki kembali sampai aku akhirnya tiba kembali pada kependudukan, namun kali ini tidak sebagai suatu konsepsi kacau-balau dari keseluruhan itu, melainkan sebagai suatu totalitas yang kaya dari banyak determinasi dan hubungan. Yang disebut terdahulu adalah jalan yang secara historis ditempuh oleh ekonomika pada saat asal-mulanya ... Yang tersebut belakangan jelas merupakan metode ilmiah yang benar.¹⁸

Maka itu, dalam epistemologi Marx, pengetahuan bukan suatu refleksi passif dari realitas (empirisisme); ia adalah suatu pro-dukt aktivitas (dari praktek) yang seluruhnya berlangsung di dalam pikiran. Karya ilmu, karenanya, adalah merekonstruksi yang konkrit, tidak memulai dengan “yang nyata dan yang konkrit” tetapi dengan cara konsep-konsep abstrak, dengan cara bergeser dari yang abstrak pada yang konkrit.

Corrigan, Ramsay dan Sayer mengakui posisi ini dalam hubungan dengan Introduction tahun 1857, tetapi mendebat bahwa Marx kemudian menolak strategi ini. Sebagai bukti, mereka mengutip naskah Marx tahun 1880, Marginal Notes on Adolph Wagner.¹⁹ Dalam naskah itu Marx menulis,

Semua ini adalah *jalan! De prime abord* (pertama-tama sekali) aku tidak memulai dari konsep-konsep dan karena itu tidak memulai dari *konsep nilai*; dan karenanya tidak harus dengan cara apapun *membagi* yang tersebut belakangan itu. Dari mana aku mulai adalah bentuk sosial paling sederhana dengan mana produkt kerja dinyatakan dalam masyarakat masa-kini, dan ini adalah *barang dagangan*. Aku menganalisa ini, dan sebenarnya, mula-mula dalam *bentuk permunculannya*.²⁰

Dari ini, Corrigan, Ramsay dan Sayer menyimpulkan bahwa dasar kritik Marx adalah yang empiris – bahwa ia memulai dengan yang empiris, dan bahwa baginya konsep-konsep adalah konstruksi-konstruksi “*a posteriori*”, produk-produk akhir, bukan alat-alat analisis pracetakan.”²¹ Posisi Corrigan, Ramsay dan Sayer menurut kami di dasarnya pada suatu kesalahan serius dalam menafsirkan Marx.” Di dalam mendiskusikan

** Posisi Corrigan, Ramsay dan Sayer mengenai landasan empiris dari kritik Marx membuat mereka menggugat Althusser dan Balibar, dalam *Reading Capital*, mengenai *apriorism* (1978, hal. 164). Meneruskan dari yang kami lihat sebagai salah-penangkapan mereka yang kserius tentang Marx, kami akan berargumentasi lebih lanjut bahwa posisi mereka juga didasarkan atas suatu salah-penangkapan tentang Althusser. Menuduh Althusser mengenai *apriorisme* berarti mengagakan bahwa aspek karyanya berurusan dengan perbedaan antara “obyek nyata” dan “obyek pemikiran.” Bagi Althusser obyek nyata itu berada di luar, dan bebas dari, pikiran. Obyek pikiran, sebaliknya, tidak pernah sesuatu tertentu. Ia tidak pernah merupakan realitas konkret. Ia selalu “bahan yang sudah digarap (penyajian, konsep, “fakta”) yang adalah produk-produk dari praktek-praktek sebelumnya,” baik secara “empiris,” “teknis” atau “ideologis.” Bahan mentah ini bahkan bisa saja ilmiah, produk dari praktek teoritis di waktu lalu. Ilmu pengetahuan (proses praktek teoritis) selalu menggarap “yang umum,” yang “abstrak,” bahkan apabila ini mempunyai bentuk suatu *faktum*, dan berangkat dari sini berherak secara analitis ke arah yang konkret dalam pikiran. Ia tidak pernah menggarap sesuatu yang secara obyektif “tertentu” atau menggarap “fakta” murni. Sesungguhnya, praktek teoritis mengelaborasi fakta ilmiahnya sendiri dengan menggarap tuntas secara teoritis fakta ideologis yang diuraikan oleh praktek-praktek ideologis sebelumnya. (Lihat Althusser, 1979, hal. 167; 173; 183-4). Althusser berargumentasi bahwa, dalam suatu ilmu yang sudah terbentuk, praktek teoritis “menggarap bahan mentah (Keumuman I) yang terbentuk dari atau konsep-konsep yang masih ideologis atau dari fakta ilmiah, atau dari konsep-konsep yang sudah dielaborasi secara ilmiah, yang betapapun termasuk pada suatu tahap ilmu yang lebih dini (suatu eks-Keumuman III). Karenanya, adalah dengan mentransformasi Keumuman I ini menjadi suatu Keumuman III (pengetahuan) bahwa ilmu pengetahuan itu bekerja dan menghasilkan” (Althusser, 1979, hal. 184) Dalam pengertian ini, serangan Corrigan, Tamsay dan Sayer atas *apriorisme Althusser* tampak tidak bisa dipertahankan.

Marginal Notes on Adolph Wagner Marx, agaknya mereka menuntut suatu perbedaan antara “konsep-konsep” dan “fakta konkrit.” Tetapi, ketika Marx menyelidiki dan mendiskusikan barang dagangan sebagai suatu “bentuk sosial,” titik pangkal Marx masih tetap sebuah konsep, konsep dari suatu kesatuan sosial yang konkrit.²² Perbedaan Marx antara memulai dari “konsep-konsep” dan memulai dari “bentuk sosial” berasal dari perhatiannya atas cara yang dicoba oleh Wagner untuk menetapkan dan menghubungkan konsep-konsep ekonomi, suatu usaha yang ditolak oleh Marx sebagai “percekcokan kacau-balau” mengenai konsep-konsep atau kata-kata.²³ Demikian yang dinyatakan oleh Marx: “Karena itulah *vir obscurus* kita, yang bahkan tidak memperhatikan metode analitiku, yang tidak dimulai dari “Manusia,” tetapi dari periode masyarakat tertentu secara ekonomis, sama sekali tidak ada kesamaannya dengan metode profesorial-Jerman yang menghubungkan-hubungkan-konsep.”²⁴

Ini mendorong Athar Hussain menyimpulkan,

*De prime abordaku tidak memulai dari konsep-konsep tidak secara berlawanan menghadapi konstruksi-konstruksi pikiran atau konsep-konsep dengan fakta riil, melainkan secara berlawanan menghadapi konsep-konsep yang khusus bagi problematik Antropologi Filosofis dengan konsep-konsep Materialisme Historis. Marx tidak memulai dari konsep nilai, karena ia telah membuang problematik Antropologi Filosofis. Ia memulai dari konsep-konsep yang mendasari pernyataan: Dari mana aku mulai adalah bentuk sosial paling sederhana dengan mana produkt-kerja dinyatakan dalam masyarakat masa-kini”*²⁵

Posisi Corrigan, Ramsay dan Sayer, karenanya, tampak tidak dapat dipertahankan. Kami akan menegaskan bahwa tidak ada perubahan dalam posisi Marx dari Introduction tahun 1857 hingga *Marginal Notes on Adolph Wagner*. “Metode ilmiah”-nya yang benar, metode analisisnya, secara konsisten mulai dengan konsep-konsep, tidak dengan yang empiris. Untuk menyatakan lain, sebagaimana yang mereka

Bahan mentah yang digarap praktek teoritis bukanlah gagasan-gagasan atau konsep-konsep pembawaan yang dikaruniakan secara mendasar pada pikiran; ia adalah produk dari praktek-praktek “empiris,” “teknis,” “ideologis” dan “ilmiah”; ia adalah bahan yang sudah digarap. Kami juga perlu mengemukakan bahwa Althusser dan Marx sependapat dalam masalah ini. Ini bukan untuk mengingkari masalah-masalah massif dari posisi Althusser; ini cuma untuk menyangkal bahwa *apriorisme* adalah salah-satu dari masalah-masalah itu.

lakukan, melihat konsep-konsep sebagai konstruksi- konstruksi *a posteriori* pada Marx, menghasilkan suatu keruntuhan ke dalam pengetahuan eksperimental dan empirisisme. Pengetahuan eksperimental menjadi disetarakan (*equated*) dengan pengetahuan ilmiah. Dengan tegas Marx menolak hal ini dalam uraiannya mengenai “metode ilmiah yang benar.” Hal ini jelas dibuktikan dalam Introduction tahun 1857, ketika ia menyatakan,

Konsep konkrit adalah konkrit karena ia merupakan suatu sintesis dari banyak definisi, dengan demikian menyatakan kesatuan berbagai aspek. Karenanya ia muncul dalam penalaran sebagai suatu pembulatan, suatu hasil, dan tidak sebagai titik-pangkal, sekali-pun ia merupakan titik asal-usul yang riil, dan dengan demikian juga titik asal-usul dari tanggapan dan imajinasi. Prosedur yang pertama melemahkan citra-citra (*images*) penuh-arti menjadi dalil-dalil abstrak, yang kedua mengarah dari perumusan-perumusan abstrak melalui penalaran kepada reproduksi situasi konkrit.²⁶

“Karya ilmiah” Marx “tidak mulai dengan yang empiris”; melainkan “ia mulai dengan konsep-konsep yang diderivasi dari praktek-praktek empiris,” namun bukan praktek-praktek empiris saja, melainkan juga praktek-praktek ideologis. Jelas *Grundrisse, A Contribution to the Critique of Political Economy* dan *Capital* semuanya telah mulai dengan suatu penguraian dan penilaian kritis atas konsep-konsep dan dalil-dalil ekonomi politik burjuis. Marx tidak pernah hanya mengobservasi dunia dan mengumpulkan “fakta.” Ia selalu mengerjakan konsep-konsep dan teori-teori “ideologis” yang telah dikembangkan sebelumnya. Introduction tahun 1857 pada *Grundrisse* cuma satu pembuktian akan hal itu. Karenanya, Marx menyusun suatu proses teoritis yang dilaksanakan dalam pikiran di dalam suatu problematik tertentu. Setelah mengesampingkan yang riil sebagai tempat produksi-pengetahuan, ia membedakan suatu lahan praktek yang lain daripada yang riil, namun melakukan itu tanpa mengingkari keberadaan yang tersebut belakangan. Setelah melucuti yang riil dari pengistimewaan ontologis yang diumumkan pada yang riil itu dalam kebanyakan catatan-catatan historis, Marx dapat menyatakan bahwa “totalitas sebagaimana ia muncul di dalam kepala, sebagai suatu totalitas pikiran, adalah suatu produk dari kepala yang berpikir.”²⁷

Namun, dengan mengatakan ini, Marx tidak mengingkari yang riil,

karena ia mengakui bahwa itu “mempertahankan keberadaan otonomnya di luar kepala presis seperti sebelumnya.”²⁸ Jadi, dalam pandangannya mengenai produksi “pengetahuan ilmiah,” Marx secara amat jelas, telah memutuskan hubungannya dengan epistemologi-epistemologi empiris yang melebur obyek riil dan obyek pikiran. Namun, ada problem-problem dari konsepsi Marx mengenai produksi pengetahuan; ia tetap berada di dalam wilayah epistemologi dengan mengambil suatu posisi rasionalis. Epistemologi yang dikemukakannya, sekalipun tidak sebagai suatu doktrin filosofis umum melainkan untuk suatu pengetahuan tertentu – ekonomi politik, adalah sama dengan yang dikemukakan oleh Althusser, yaitu “penguasaan yang konkrit dalam pikiran.” “Metode ilmiah”-nya “yang benar” memahami dunia sebagai suatu tatanan rasional yang dapat diungkapkan melalui konsep-konsep. Konsep-konsep umum dibentuk melalui abstraksi dari yang riil-konkrit dan dikembangkan dan digarap dalam pikiran untuk memproduksi yang konkrit-dalam-pikiran. Suatu persesuaian telah diproduksi antara pengetahuan dan obyeknya, yang terdapat antara dua alam yang jelas berbeda secara ontologis, yaitu “pikiran” dan “yang konkrit.”

Maka timbullah sejumlah kesukaran darinya. Bagi Marx (dan Althusser), seluruh proses produksi-pengetahuan berlangsung di dalam pikiran. Karena begitu kejadiannya, maka persoalan-persoalan yang jelas mesti ditanyakan adalah: apakah hubungan antara yang riil dan pikiran, dan antara pengetahuan mengenai yang riil dan yang riil? Disusun dalam kerangka seperti ini, pertanyaan-pertanyaan seperti itu tampaknya dibangun dalam batasan suatu “problem pengetahuan,” yaitu, pertanyaan-pertanyaan itu menunjuk jawaban-jawabannya sendiri. Konsep-konsep mengenai yang riil mesti mempunyai persesuaian tertentu dengan yang riil, begitu pula harusnya pengetahuan mengenai yang riil. Ini dikarenakan konsep itu menguasai realitas konkrit di dalam pikiran, dan oleh sebab itu, mesti merefleksikannya. Maka itu, kita agaknya telah sampai pada “teori refleksi” Lenin, yang telah begitu lama menopang begitu banyak salah-tafsir empiris tentang Marxisme. Namun, apabila kita mengikuti karya Macherey dan Balibar dalam literatur dan dari Lecourt dalam filsafat, maka persepsi-persepsi, citra-citra, gambaran-gambaran dan konsep-konsep (hasil-hasil dari praktek-praktek

sebelumnya) adalah refleksi-refleksi yang retak-retak mengenai yang riil, retak “tidak” secara identik, “tidak *mimessi*” (persesuaian satu-sama-satu). Lecourt menegaskan bahwa bukan terdapat satu tetapi dua dalil dalam teori epistemologis Lenin mengenai refleksi sebagaimana itu disusun dalam *Materialisme and Empirio-Criticism*. Dalil pertama dari teori refleksi adalah, bahwa pikiran memang merefleksikan suatu realitas yang ada; dan yang kedua adalah, bahwa refleksi jangan dianggap sebagai pencerminan. Refleksi yang dibicarakan Lenin, menurut Lecourt, adalah suatu refleksi tanpa sebuah cermin.²⁹ Ini dikarenakan, sebagaimana ditunjukkan oleh Macherey, dengan mengutip Lenin:

“Tidak dapatlah kita menyebutkannya suatu *cermin* apabila ia tidak memberikan suatu refleksi yang tepat sekali dari dunia. Maka itu cermin itu hanya kelihatannya saja sebuah cermin, atau setidaknya tidaknya ia merefleksi dalam caranya sendiri yang khusus ... Hasilnya, hubungan antara cermin itu dan yang direfleksikannya (realitas historis) cuma *sebagian (partial)*, cermin itu memilih, ia tidak merefleksikan segalanya. Pemilihan itu sendiri tidak secara kebetulan, ia adalah simptomatik; ia dapat memberitahukan kepada kita mengenai sifat cermin itu.”³⁰

Sifat parsial dari refleksi itu berarti bahwa pengetahuan mengenai yang riil tidak dapat ditemukan di dalam hubungan antara yang riil yang direfleksikan dan yang riil, melainkan mesti dicari tempatkan di dalam proses “teoritis” (yaitu, sepenuhnya dalam pikiran) yang menggarap refleksi parsial ini untuk membikin suatu pengetahuan mengenai yang riil. Maka itu, dapat kita mengatakan, bahwa pengetahuan mengenai yang riil adalah teoritis.

Namun, jika refleksi itu parsial, lalu apakah yang menjadi dasar dari parsialitas ini? Jika parsialitas itu simptomatik, dan memberitahukan kepada kita tentang cermin itu, maka parsialitas ini mesti diproduksi (barangkali secara tidak sadar). Jika ia diproduksi (bahkan secara tidak sadar), maka ia mestilah, menurut Althusser, produksi dari suatu problematik khusus (dalam hal bahwa ia tidak hanya “diberikan/ditentukan” (*given*) pada pikiran melainkan lebih dulu diproduksi melalui kerja teoritis). Maka itu, adalah problematik itu yang menentukan parsialitas refleksi itu (melalui produksi parsialitas itu). Karenanya ia dapat dikatakan tergolong dalam Generalitas-generalitas II. Tetapi Generalitas-generalitas II hanya mengerjakan konsep-konsep,

tidak mengerjakan sesuatu yang ditentukan. Jika kita benar, maka ada suatu kontra-diksi antara penegasan bahwa Generalitas-generalitas sepenuh bekerja dalam pikiran dan dalam artikulasi teori refleksi. Tampaknya pada titik ini terdapat suatu keselipan dalam karya Marx dan Althusser, karena tidak seorangpun dari mereka memusatkan perhatiannya pada masalah abstraksi dari yang riil, pada persoalan proses mediasi antara yang riil dan pikiran. Sesungguhnya, itu sebuah pertanyaan yang tidak dapat dijawab dalam posisi rasionalis yang mereka ambil kecuali dengan mengakui bahwa terdapat suatu proses pengetahuan yang benar-benar empiris yang berlangsung di dalam ideologi dan, karenanya, mendahului karya ilmu. Dengan begitu, empirisme, sebagai suatu kategori, hanya digusur dalam produksi pengetahuan ilmiah; ia tidak digusur secara total. Bahaya-bahaya muncul dalam posisi ini, tidak saja dalam arti suatu perbedaan yang amat menyangsikan antara ilmu dan ideologi,³¹ melainkan juga dalam memahami salah-penafsiran ideologis mengenai proses mediasi antara yang riil dan pikiran sebagai wilayah-problem dalam produksi pengetahuan ilmiah. Atas dasar apakah pada rasionalisme diberikan status ilmiahnya dan empirisme dikutuk sebagai selalu bersifat ideologis? Kebungkaman-kebungkaman mengenai masalah ini, kita yakin, telah memungkinkan “bangkitnya kembali” empirisme. Mereka memungkinkan Corrigan, Ramsay dan Sayer, misalnya, mengklaim bahwa problem Althusserianisme adalah teoretisme dan, karenanya, bersiteguh bahwa dengan membuat gagasan mengenai suatu problematik menjadi “sosial” (yaitu, sebagai suatu alat mediasi antara yang riil dan pikiran), mereka menjadikannya lebih ilmiah. Persoalan hubungan antara pengetahuan dan yang riil justru sama problematiknya. Kesesuaian yang diproduksi antara kedua alam ini mungkin bagi Marx karena, biarpun proses-proses pembentukannya berbeda, kedua-duanya adalah sintetik.³² Dengan demikian Marx tidak terikat pada konsepsi Hegelian “bahwa proses evolusi dari dunia konkrit itu sendiri” difahami sebagai suatu hasil yang tidak terpisahkan dari genesisnya (kelahirannya). Bahkan, Marx mengambil arah yang sangat berbeda,

Maka itu, akan menjadi tidak cocok dan keliru untuk menyajikan kategori-kategori ekonomi secara berturut-turut dalam tatanan rentetan mereka memainkan peranan dominan dalam sejarah.

Sebaliknya, tatanan suksesi mereka ditentukan oleh saling hubungan mereka dalam masyarakat burjuis modern dan dengan demikian adalah justru sebaliknya dari yang tampaknya wajar bagi mereka atau sesuai dengan rangkaian perkembangan historis. Yang menjadi persoalan bukanlah peranan yang dimainkan oleh berbagai hubungan ekonomi dalam pergantian (suksesi) berbagai formasi sosial dalam perjalanan sejarah; bahkan juga bukan rangkaian mereka *sebagai konsep-konsep* (*Proudhon*) (suatu gagasan samar-samar mengenai proses historis), melainkan posisi mereka di dalam masyarakat burjuis modern.³³

Pemahaman mengenai yang riil-konkrit tidak diperoleh dari asal-mula hasil-hasilnya, melainkan lebih dari strukturnya masa-kini. Yang konkrit difahami sebagai suatu “sintesis dari banyak determinasi,” sebagai suatu totalitas sosial dengan suatu kedayagunaan yang terkandung di dalamnya – yaitu yang oleh Althusser disebut “efek masyarakat” yang menjadikan hasil itu ada sebagai suatu masyarakat.³⁴ Persoalan pokok bagi Marx (dan juga Althusser) adalah kedayagunaan suatu struktur. Bagi Marx, efek-efek tidak berada di luar sebuah struktur; lebih tepatnya: sebuah struktur adalah imanen (tetap ada) dalam efek-efeknya. Singkatnya, sebuah struktur yang cuma merupakan suatu perpaduan sistematis, hierarkikal, diartikulasikan dari unsur-unsur khasnya, tidak berarti apapun di luar efek-efeknya. Sebagaimana ditunjukkan oleh Cutler, Hindess, Hirst dan Hussain, jika yang konkrit tidak sintetik, jika ia tidak dibentuk menjadi suatu keutuhan yang tersusun rapi, maka ia tidak akan terbuka bagi penggambaran dalam suatu totalitas konsep³⁵ yang rasional. Juga pengetahuan, sebagaimana telah kita kemukakan, dipandang sebagai suatu proses sintetik oleh Marx (lihat catatan 28 di atas). Produksi dari yang konkrit-dalam-pikiran (*thought concrete*) menghasilkan suatu kesesuaian antara kedua alam yang konkrit dan pikiran. Dengan demikian satu perpaduan sintetik unsur-unsur bersesuaian dengan dan menggambarkan yang lain.³⁶ Hubungan-hubungan antara konsep-konsep dalam pikiran menggambarkan hubungan-hubungan riil yang ada di dalam yang konkrit. Baik pikiran maupun yang konkrit memiliki suatu tatanan rasional; dan selanjutnya tatanan kedua seri itu bersesuaian. Dengan memutuskan hubungan (sebagian/parsial) dengan empirisisme namun berpegangan pada suatu konsepsi rasionalis mengenai produksi-pengetahuan dan dengan demikian tetap berada di dalam wilayah epistemologi, maka posisi Marx

memperlihatkan dogmatisme yang menjadi pembawaannya. Yang sama berlaku juga pada posisi Althusser, bahkan berlaku pada setiap argumen dengan dasar epistemologis. Semua epistemologi memastikan suatu perbedaan maupun suatu kesesuaian antara dua alam keberadaan (yang konkrit) dan pengetahuan (pikiran) itu – perbedaan karena kedua alam itu secara ontologis terpisah dan adanya keberadaan tidak tergantung pada adanya pengetahuan; kesesuaian karena pengetahuan dianggap beres-sesuaian dengan atau menandakan keberadaan, dan selanjutnya, pengetahuan dan keberadaan mesti ada dalam bentuk-bentuk yang cocok satu sama lain jika kesesuaian itu mungkin. Kesesuaian ini terlaksana melalui pengalaman subyek dalam doktrin-doktrin empirisis, dan melalui operasi dan tatanan dari, dan hubungan-hubungan antara konsep-konsep dalam epistemologi-epistemologi rasional. Pengetahuan yang berlaku/absah mesti konform dengan spesifikasi-spesifikasi epistemologis, tetapi spesifikasi-spesifikasi itu sendiri menyaratkan suatu “pengetahuan” sebelumnya mengenai sifat keberadaan dan pengetahuan dan mengenai kesepadanan pengetahuan dengan keberadaan. Misalnya, di dalam epistemologi-epistemologi empirisis bagaimanakah validitas pengantar (*agency*) dari pengalaman manusia dapat dibuktikan kecuali dengan merujuk pada pengalaman itu sendiri? Semua epistemologi tidak dapat dielakkan lagi adalah dogmatik.³⁷

Kita juga berargumentasi bahwa semua epistemologi melibatkan problem-problem selanjutnya, yaitu kecenderungan-kecenderungan ke arah reduksionisme. Ini disebabkan karena semua epistemologi memastikan suatu tingkat wacana ilmiah yang diistimewakan tanpa ada duanya yang memberikan alat untuk menunjuk obyek-obyek yang ada. Wacana-wacana ilmiah yang tidak cocok dengan tingkat yang diistimewakan ini ditolak sebagai tidak ilmiah, karena adalah tingkat yang diistimewakan itu yang dijadikan tolol-ukur bagi semua bentuk wacana ilmiah lainnya. Dalam epistemologi-epistemologi empirisis tingkat yang diistimewakan itu merupakan suatu tempat atau tempat-tempat di dalam yang riil. Bagi rasionalisme, tingkat yang diistimewakan itu adalah teori (teoretisisme). Dengan demikian setiap epistemologi, sekalipun tidak mesti menentukan suatu tempat khusus produksi-pengetahuan, memperkenankan suatu keruntuhan pada satu “tempat

mengetahui” – yaitu tingkat teori ataupun suatu tempat khusus dalam yang riil (peristiwa-peristiwa politis, ekonomik atau ideologis dari formasi sosial itu). Jalan-masuk kepada “tempat mengetahui” ini memungkinkan diketahuinya semua tempat lainnya. Adalah kecenderungan reduksionis dari semua posisi epistemologis ini yang menimbulkan

problem-problem serius yang menyangkut teori-teori dan strategi-strategi transisi sosial – problem-problem yang menjangkiti Marxisme. Dalam karya Marx dan Lenin kecenderungan-kecenderungan reduksionis ini mendua-arti dan terbatas. Namun, dengan munculnya Stalin dan kebangkitan kembali posisi teoritis Bogdanov, mereka menjadi dominan. Adalah pada kedua-artian dan keterbatasan dalam karya Lenin inilah kita sekarang mesti berpaling untuk memahami timbulnya posisi Stalin dan Bogdanov.

Posisi Lenin

Lenin, seperti Marx, mencoba membedakan obyek riil dari obyek pikiran dan mendudukan/memastikan keberadaan suatu tempat prak-tek teoritis yang terpisah dari praktek-praktek lainnya. Oleh Lenin, pikiran tidak dipandang sebagai tindak suatu subyek individual, “yang tanpa gerak, bagaikan jenius,”³⁸ melainkan lebih sebagai suatu proses – suatu proses produksi teoritis,

*Kognisi (pengertian/kesadaran) adalah perkiraan yang abadi, tiada akhirnya dari pikiran akan obyek. Refleksi mengenai alam dalam pikiran manusia mesti difahami sebagai tidak secara mati, tidak secara abstrak, tidak hampa akan gerak, tidak tanpa kontradiksi-kontradiksi, melainkan dalam proses gerak abadi, timbulnya kontradiksi-kontradiksi dan pemecahan-pemecahan mereka.*³⁹

Maka itu, proses pengetahuan bukan suatu abstraksi kosong, melainkan –bahkan– “dari gang, bewegung (kemajuan, gerak), yang dalam dan semakin dalam, dari pengetahuan kita mengenai segala sesuatu.”⁴⁰ Maka, bagi Lenin, pengetahuan adalah diderivasi dari suatu praktek teoritis – suatu proses yang menggarap konsep- konsep. Pikiran, sebagai ditunjukkan oleh Lenin dalam hubungan dengan Spinoza, bukan produkt dari suatu “subyek yang sadar, mandiri, bebas,” melainkan lebih merupakan suatu atribut substansi.⁴¹ Adalah karena ini Lenin

menegaskan materialitas konsep-konsep pikiran: *Begriff* (konsep) masih belum merupakan konsep tertinggi: yang lebih tinggi lagi adalah *ide* = kesatuan *Begriff* dan Realitas.⁴² Di sini Lenin menegaskan landasan material dari pikiran. Pikiran tidak dapat difahami sebagai bebas dari yang riil, karena, sebagaimana telah kita ketahui, ia menganggapnya sebagai suatu bagian dari substansi.

Ini tidak berarti bahwa Lenin memandang yang riil dan pikiran sebagai satu; melainkan ia lebih memandang pikiran sebagai terikat pada yang riil melalui kategori refleksi epistemologis. Ia mengatakan,

Pengetahuan adalah refleksi mengenai alam oleh manusia. Tetapi ini bukan suatu refleksi sederhana, bukan suatu refleksi lang-sung, bukan suatu refleksi lengkap, melainkan proses dari serentetan abstraksi-abstraksi, pembentukan dan perkembangan konsep-konsep, hukum-hukum, dsb., dan konsep-konsep, hukum-hukum, dsb. ini (pikiran, ilmu = *ide logis*) secara bersyarat, kurang-lebih *meliputi* sifat universal yang diatur-hukum dari alam yang bergerak dan berkembang abadi... Manusia tidak dapat memahami = merefleksikan = mencerminkan alam *sebagai suatu keseluruhan* dalam kelengkapannya, *totalitas langsungnya*, ia cuma dapat secara *kekal*/semakin mendekatinya, menciptakan abstraksi-abstraksi, konsep-konsep, hukum-hukum, suatu gambaran ilmiah dari dunia, dsb., dsb.⁴³

Karenanya, refleksi, sebagaimana kita kemukakan di muka, bulan-lah suatu pencerminan; pandangannya adalah parsial dan hanya lebih mendekati suatu pandangan yang sebenarnya melalui produksi konsep-konsep, melalui suatu praktek teoritis. Macherey, Balibar dan Lecourt, seperti masih dapat diingat, menunjukkan bahwa ia adalah suatu refleksi tanpa sebuah cermin.⁴⁴ Seperti dikatakan Lenin, sebuah cermin yang tidak merefleksikan sesuatu secara tepat sulit disebut sebuah cermin.⁴⁵ Pikiran dan yang riil, bagi Lenin, tidak dapat direduksikan; mereka merupakan tempat-tempat praktek yang terpisah dan tidak dapat dikacaukan. Maka itu, di sini dapat kita melihat bahwa mengenai persoalan epistemologi setidak-tidaknya, Lenin berusaha mempertahankan suatu kesetiaan pada posisi Marx, suatu kesetiaan – boleh kita tambahkan – yang segera akan lenyap dengan munculnya Stalin dan pentahbisan empirisisme sebagai posisi epistemologis yang universal dari Marxisme-Leninisme. Sekalipun akan sia-sia untuk membantah bahwa kecenderungan- kecendrungan empirisisme seperti itu

telah dimulai dengan Stalin, memang masih dapat dipersoalkan bahwa kecenderungan-kecenderungan seperti itu, yang mendua-arti dan terbatas pada Marx dan Lenins, akhirnya ditahbiskan di bawah Stalin. Yang dapat kita tunjukkan adalah, bahwa dalam hal Lenin, kelemahan-kelemahan dan kedwi-artian kedwi-artian teoritis fundamental tertentu menimbulkan anggapan bahwa empirisisme “adalah” epistemologi Marxis-Leninis. Salah satu kelemahan paling penting dalam karya Lenin adalah kegagalannya untuk secara sepadan mengkritik posisi filosofis dari Bolshevik kiri A.A.Bogdanov.

Bogdanov dan Stalin: Empirisisme Tuntas

Kelemahan ini bersifat pokok sekali bagi praktek Bolshevik, karena dalam karya Bogdanov masalah hubungan antara filsafat dan perkembangan teknologis mesti “dituntaskan.” Penegasan penting pertama Bogdanov dalam penuntasan ini adalah, bahwa melalui bentuk-bentuk pengalaman tertentu yang diistimewakan, keberadaan dan kesadaran menjadi identik,

Kehidupan sosial dalam semua manifestasinya adalah suatu kehidupan fisik Sosialitas tidak terpisahkan dari kesadaran. Keberadaan sosial dan kesadaran sosial adalah, dalam arti yang setepatnya, identik.

Identitas keberadaan dan kesadaran yang ditegaskan Bogdanov ini, dicapai melalui pengistimewaan ontologis yang disebutkannya “pengalaman hidup.” “Pengalaman hidup” ini bukan sekedar segala tipe pengalaman manusia, melainkan adalah pengalaman yang diorganisasi secara sosial berdasarkan konsepsi teknologis mengenai organisasi kerja.⁴⁶ Pengalaman yang terorganisasi secara sosial seperti itu, yang berlaku/bertindak sebagai titik nodal (titik pusat suatu sistem) dalam unifikasi keberadaan dan kesadaran, secara ontologis diistimewakan karena, jika subyek-subyek mendapat jalan masuk ke tempat ini, maka mereka akan (secara ontologis) “mengetahui.” Tempat ini, merupakan titik nodal tidak hanya dalam peleburan keberadaan dan pikiran, tetapi *ipso facto* mengakibatkan konstruksi dari suatu subyek yang mengetahui. Pengetahuan, maka itu, tidak berfungsi lagi, sebagaimana halnya dengan Marx dan Lenin: sebagai suatu proses tanpa sesuatu subyek, tetapi lebih

41 | Bill Brugger (peny.)

merupakan kebalikannya, sebagai ungkapan penuh penegasan-penegasan dan sensasi-sensasi eksperimental dari subyek itu.⁴⁷

Menurut Bogdanov, adalah kelas pekerja yang mempunyai jalan masuk pada tempat yang diistimewakan secara ontologis ini, karena adalah kelas ini yang telah mengalami bentuk-bentuk produksi yang secara organisasi dan teknis yang paling maju. Pengalaman kelas pekerja, bagi Bogdanov, adalah bentuk tertinggi dari pengalaman yang terorganisasi secara sosial, karena konsepsi tektolog-ikal Bogdanov mengenai proses kerja berarti bahwa mereka yang berpengalaman dalam industri ilmiah modern adalah, sebagai hasilnya, adalah mereka yang mempunyai bentuk tertinggi kesadaran politis dan ilmiah. Maka, dengan demikian adalah “pengalaman kerja” yang merupakan suatu pengalaman ilmiah. Sebagai yang difahami Bogdanov,

Dalam produksi mesin, divergensi-divergensi fundamental dalam sifat kerja mulai menghilang. *Tangan-tangan yang bekerja* tidak lagi sekedar tangan-tangan saja, si pekerja bukan seorang pelaksana-/pelaku (performer) mekanis yang pasif. Ia disubordinasi, tetapi ia juga *memerintah/menguasai* “budak besi”-nya, - mesin itu. Semakin rumit dan sempurna mesin itu, semakin kerjanya direduksi menjadi observasi dan kontrol. Pekerja harus mengetahui semua aspek dan kondisi kerja dari mesinnya, dan campur-tangan dalam gerak mesin itu hanya jika diperlukan; sedangkan, pada saat-saat yang tidak terelakkan berupa ulah atau kekacauan dari pihak mesin itu, ia mesti mampu cepat-tanggap, cepat berinisiatif, dan cepat-mengambil keputusan. Semua ini adalah ciri-ciri tipikal dan fundamental dari kerja pengorganisasian, dan untuk itu seseorang harus mempunyai pengetahuan, inteligensi, kemampuan dalam pengerahan perhatian secara maksimal, yang adalah ciri-ciri dari seorang organisator. Namun masih ada usaha fisik; bersama otak, tangan harus juga bekerja. Bersamaan dengan itu semua, perbedaan-perbedaan tajam juga mulai muncul di antara para pekerja; spesialisasi ditransfer oleh mereka kepada mesin-mesin itu, bekerja pada mesin-mesin yang berbeda-beda di dalam isi *organisasionalnya* hampir sama saja. Dengan demikian ada ruang bagi saling-kontak dan saling mengerti di dalam pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama, suatu kesempatan untuk saling membantu dengan nasehat dan perbuatan. Inilah asal-usul kekerabatan dalam kerja-sama yang merupakan dasar bagi proletariat membangun semua organisasinya. Bentuk kerja ini dikarakterisasi oleh kenyataan bahwa kerja organisasional secara erat berhubungan dengan pelaksanaan dan pelaksananya bukanlah person-person individual, melainkan *kolektivitas-kolektivitas*.⁴⁸

Posisi inilah yang timbul kembali di bawah Stalin pada akhir tahun-

tahun 1920-an; karena, sementara karir politik Bogdanov berakhir sebagai suatu akibat dari kritisisme Lenin, kritik-kritik itu sama sekali belum cukup untuk secara sungguh-sungguh menggusur posisi teoritis dari mana Bogdanov berdebat. Sementara Bogdanov secara pribadi dicaci-maki, posisi teoritisnya secara diam-diam direhabilitasi di bawah Stalin. Dalam suatu posisi yang sangat mirip dengan posisi Bogdanov, Stalin mengemukakan bahwa perkembangan “kesadaran” selalu “didahului” oleh perkembangan “segi material” dan bahwa “kesadaran” kemudian akan “berubah sesuai dengan itu.”⁴⁹ Dengan kata-kata lain, kondisi-kondisi material (hubungan seseorang dengan alat-alat produksi) menentukan *kesadaran*. Ini bahkan dengan jelas dibuktikan dalam tulisan-tulisan masa awal Stalin. Dalam *Anarchism or Socialism*, misalnya, Stalin menyatakan, bahwa,

Pada suatu waktu ketika manusia melawan alam secara kolektif, berdasarkan komunisme primitif; pada waktu hak milik mereka merupakan hak milik komunis dan, karenanya, pada waktu itu mereka nyaris tidak menarik garis perbedaan antara *punyaku* dan *punyamu*, kesadaran mereka adalah komunistik. Telah tiba waktunya ketika perbedaan antara *punyamu* dan *punyaku* menembus proses produksi; pada waktu itu hak milik, juga, memperoleh suatu watak privat (perseorangan) individualistik, dan, karenanya, kesadaran orang menjadi digenangi dengan perasaan hak milik perseorangan. Kemudian tibalah waktu, yaitu waktu sekarang, ketika produksi kembali memperoleh suatu watak sosial dan, sebagai akibatnya, hak milik pun akan segera memperoleh suatu watak sosial – dan inilah justru sebabnya mengapa kesadaran orang secara berangsur-angsur menjadi digenangi dengan sosialisme.⁵⁰

Posisi Stalin, yang amat dekat pada posisi Bogdanov, secara teoritis adalah sangat jauh dari Lenin yang jelas tidak memandang “kondisi-kondisi material” (yaitu, proses produksi) sebagai tempat bagi produksi “kesadaran,” melalui sesuatu jenis proses “realisasi diri” secara spontan. Lenin dengan tegas menjelaskan hal ini dalam *What Is To Be Done?* (suatu posisi, kita sependapat, yang tidak pernah ditinggalkan oleh Lenin). Dalam nasakah itu Lenin dengan tandas menyatakan,

Sering dikatakan bahwa kelas pekerja *secara spontan* bercondong (bergravitasi) pada sosialisme. Ini sepenuhnya benar dalam pengertian bahwa teori sosialis mengungkapkan sebab-sebab kemelaratan kelas pekerja secara lebih mendalam dan lebih tepat daripada teori lain yang manapun, dan karena itu kaum pekerja mampu mengasimilasinya begitu mudah, namun *dengan syarat*, bahwa

teori ini sendiri tidak menyerah pada spontanitas, *dengan syarat* bahwa ia menundukkan spontanitas pada dirinya.⁵¹

Persyaratan yang ditetapkan Lenin atas perkembangan sosialisme di kalangan kelas pekerja adalah penting karena itu menunjukkan bahwa, bagi Lenin, posisi ekonomik pelaku-pelaku (*agents*) tertentu di dalam proses produksi membuat pelaku-pelaku lebih terbuka bagi teori sosialis. Namun masih tetap melalui teori (yang berasal dari praktek diskursif [tidak bersambungan satu sama lain] dan bukan dari sesuatu peristiwa ekonomik), kondisi-kondisi bagi politisasi kaum pekerja itu dihasilkan dan dikembangkan. Dengan kata-kata lain, kelas pekerja tidak sosialis secara spontan semata-mata karena anggota-anggotanya adalah pekerja; kaum pekerja dipolitisasi melalui teori revolusioner, melalui teori yang telah mempunyai suatu tempat produksi yang terpisah dari yang ekonomik. Dengan perbedaan sejelas itu antara Lenin dan spontanisme sosial Bogdanov dan Stalin, bagaimana dan mengapa yang tersebut belakangan itu menjadi unggul setelah kematian Lenin? ” Lecourt telah secara meyakinkan mendemonstrasikan –sekurangnyanya– sebagian dari sebab kegagalan Lenin. Lecourt mengatakan, bahwa “dalam persoalan pokok mengenai kerja dan organisasinya ia (Lenin) bersama seangkatan menyeluruh kaum Bolshevik menganut beberapa dari presuposisi ideologis yang disistematisasikan oleh Bogdanov di dalam teori metafisisnya.”⁵² Presuposisi-presuposisi ini adalah kecenderungan-kecenderungan positifis dan teknisis dalam pikirannya mengenai organisasi proses produksi. Walaupun kita tidak akan tidak sependapat dengan Lecourt bahwa Lenin gagal membersihkan dirinya dari kecenderungan-kecenderungan ini, kita akan menyanggah anggapan bahwa ke-cenderung-kecenderungan ini berasal-usul Bolshevik. Karya Marx sendiri telah memberikan lebih daripada suatu isyarat mengenai kecenderungan ini. Misalnya, di dalam suatu diskusi mengenai perusahaan-perusahaan saham bersama dalam *Capital*, Volume III, Marx menulis bahwa,

*** Teori-teori mengenai spontanisme sosial memancar dari ekonomisme, yaitu teori-teori itu mereduksi semua hal-ikhwal mengenai bangunan-atas menjadi sekedar epifenomena dari yang ekonomis. Karena itu “kesadaran kelas” menjadi sekedar suatu pencerminan dari kondisi-kondisi ekonomis.

Dalam perusahaan-perusahaan perseroan fungsi dipisahkan dari hak pemilikan atas modal, karenanya kerja juga sepenuhnya terpisah dari hak milik atas alat-alat produksi dan surplus-kerja. Hasil perkembangan akhir produksi kapitalis ini merupakan suatu fase peralihan yang disyaratkan menuju rekonversi kapital menjadi hak milik para produser, sekalipun tidak lagi sebagai hak milik perseorangan produser-produser secara individual, melainkan lebih sebagai hak milik produser-produser yang tergabung, sebagai hak milik sosial langsung. Di lain pihak, perusahaan perseroan itu adalah suatu transisi menuju konversi semua fungsi di dalam proses reproduksi yang masih tetap terkait dengan hak milik kapitalis, menjadi sekedar fungsi-fungsi produser-produser yang tergabung, menjadi fungsi-fungsi sosial.⁵³

Di sini Marx menegaskan bahwa hak pemilikan dan hubungan-hubungan produksi sangat terpisah satu dari yang lainnya. Satu efek dari analisis ini adalah menyangkal bahwa hak milik kapitalis –menurut definisi–menetapkan hubungan-hubungan produksi itu sebagai kapitalis(-tik). Sebenarnya ia lebih bekerja atas peranggapan bahwa perusahaan-perusahaan bersaham ditentukan sebagai kapitalis(-tik) karena kenyataan, mereka adalah hak milik perseorangan dari produser-produser secara individual. Mereka tidak dianalisa sebagai kapitalis karena mereka dipahatkan di dalam proses produksi yang jelas-jelas kapitalis; melainkan karena soalnya lebih dipandang sebagai masalah kepemilikan legal. Bahaya suatu posisi yang membiarkan penentuan mengenai sifat proses kerja pada masalah kepemilikan dan tidak memeriksa hubungan-hubungan produksi, segera menjadi jelas kalau kita melihat kecenderungan- kecenderungan yang bersifat teknis dalam karya Marx. Dalam *Grundrisse* Marx mengemukakan bahwa,

Hingga pada derajat itu waktu kerja –yaitu sekedar kuantitas kerja– yang didudukkan/ditempatkan oleh modal sebagai satu-satunya unsur penentu, hingga derajat itulah kerja langsung dan kuantitasnya menghilang sebagai azas penentu produksi – dari penciptaan nilai-nilai pakai – dan kedua-duanya direduksi secara kuantitatif, pada suatu proporsi yang lebih kecil, dan secara kualitatif, sebagai suatu –tentu saja– momen yang tidak bisa tidak ada tetapi yang disubordinasikan, jika dibandingkan dengan kerja umum ilmiah, penerapan ilmu-ilmu alam secara teknologis, di satu pihak, dan pada kekuatan produksi umum yang lahir dari perpaduan sosial (*Gliederung*) dalam produksi total di pihak lain – suatu perpaduan yang muncul sebagai suatu buah alami dari kerja sosial (sekalipun ia merupakan suatu produk historik) Dengan demikian modal bekerja menuju pembubarannya sendiri sebagai bentuk yang menguasai/mendominasi produksi.⁵⁴

Posisi ini, yang begitu berat positivis, sedikit banyak mengarah pada determinisme ekonomik yang mengajukan teori bahwa kemajuan teknologis menghasilkan timbulnya sosialisme. Sementara Marx menghindari ini dengan menekankan peranan kerja, ia memang mengi-syaratkan bahwa kemajuan teknologis berguna bagi sosialisme dan tidak secara tidak terputuskan terkait pada kapitalisme. Lagi pula, ia jelas mengemukakan bahwa hasil-hasil dan kemajuan- kemajuan seperti itu dalam teknologi adalah pokok sekali bagi semua teori mengenai transisi dari suatu cara produksi kapitalis pada sosialisme. Namun, Marx tidak mengisyaratkan bahwa medan penerapan bagi teknologi ini (yaitu, di dalam proses kerja), adalah suatu tempat yang diistimewakan secara ontologis, sebagaimana yang dilakukan oleh Bogdanov dan Stalin. Seperti Lenin, Marx menghindari anggapan-anggapan lancung seperti itu. Namun anggapan-anggapan seperti itu “dapat diderivasi” dari Marx. Di dalam *Capital*, yang diasimilasi dalam pikiran adalah suatu totalitas sintetik dari hubungan-hubungan sosial, suatu sistem hubungan-hubungan antara para pelaku (*agents*) sosial. Dalam sistem ini, yang ekonomik difahami sebagai determinan utama dari hubungan-hubungan sosial ini. Proses ekonomik melahirkan efek-efek yang diperlukan, yang adalah sebagian dari sistem itu; ia mempengaruhi cara para pelaku (*agents*) sosial menanggapi dan bertindak. Demikian, yang ekonomik menjamin syarat-syarat keberadaannya secara ideologis. Sebagaimana dikemukakan oleh Cutler, Hindess, Hirst dan Hussain,

la mesti berbuat begitu karena efek-efek tertentu diperlukan olehnya sebagai suatu sistem dan efek-efek ini berlaku melalui hubungan-hubungan di antara orang-orang. Karena kapitalisme itu suatu *sistem*, tindakan-tindakan pasti tertentu diperlukan dari orang-orang yang menjalaninya, karena efek-efek itu diperlukan dalam konsepnya, maka tindakan-tindakan itu mesti terjadi *secara bebas* dari kemauan orang-orang itu, dan sebagai akibatnya penya-ratan kemauan mereka itu perlu. Karena itu teori mengenai ideolo-gi itu perlu bagi suatu konsep suatu sistem hubungan-hubungan sosial di mana efek-efek tertentu merupakan akibat-akibat yang perlu dari sistem itu.⁵⁵

Efek-efek ini dilahirkan melalui kategori pengalaman. Para pelaku sosial bertindak sebagai repositori-repositori bagi efek-efek pengalaman-pengalaman yang terutama ditentukan oleh yang ekonomik. Tindakan-tindakan dan kesadaran pelaku-pelaku sosial itu ditentukan oleh

pengalaman ini. Dengan demikian, tiap pelaku sosial yang ditempatkan sebagaimana mestinya di dalam sistem itu akan mengalami dan bertindak sesuai dengannya. Dalam arti ini, dapatlah dikatakan bahwa efek-efek pengalaman dilahirkan oleh sistem dari tempat-tempat khusus. Walaupun mungkin sekali Marx telah mengemukakan bahwa produksi pengetahuan mesti terjadi seluruhnya di dalam pikiran (justru untuk menghindari efek-efek pengalaman pelaku-pelaku sosial yang dilahirkan oleh sistem yang dikuasai di dalam pikiran), mudah diketahui bagaimana posisi Bogdanov (gagasannya mengenai “pengalaman hidup,” konsepsi tekto-logis mengenai organisasi kerja, dan pengistimewaan proses kerja secara ontologis sebagai tempat-nya penentuan kesadaran dan pembangunan suatu “subyek yang mengetahui”) dapat diderivasi dari uraian rasionalis *Capital* Marx; karena kecenderungan onto-logis yang sama untuk mengistimewakan yang ekonomik terdapatlah di situ.⁵⁶ Kecenderungan-kecenderungan Marx yang positifis dan teknisnis memungkinkan kita mengenali sesuatu yang dengan susah payah coba ditunjukkan Bahro, yaitu bahwa konsepsi Marx mengenai komunisme selalu mempresuposisikan suatu tingkat industrialisasi yang tinggi.⁵⁷ Mengenai hal ini, semua bolsheviki, termasuk Lenin, sependapat. Dalam suatu formasi sosial yang terbelakang, seperti Uni Sovyet pada tahun 1917, suatu tekanan berat atas industri-alisasi tidak saja dapat dimaklumi, melainkan itu diperlukan sekali. Namun, masalahnya adalah, bahwa industrialisasi dan modernisasi (atau, sesungguhnya, kolektivisasi itu sendiri) tidak berarti sosialis atau membawa pada sosialisme. Jika semua Bolsheviki mesti dituduh telah mengacaukan masalah ini (dan karenanya membangun problematik Bolsheviki itu) maka, sebagaimana telah kita ketahui, demikian pula halnya dengan Marx. Tetapi jika kita memeriksa berbagai posisi di dalam Bolshevisme, kita dapat melihat bahwa ada perbedaan-perbedaan menentukan dalam cara teknisisme ini difahami. Perbedaan-perbedaan itu mempunyai implikasi-implikasi menentukan bagi strategi-strategi sosialis. Posisi Lenin, seperti posisi Marx, memandang teknologi sebagai netral dan karenanya, menurut ketentuan, menyumbang pada sosial-isme. Dalam komentarnya mengenai sistem Taylor, Lenin dengan jelas mendemonstrasikan kecenderungan-kecenderungannya yang teknisnis. Lenin berkata,

Sistem Taylor –tanpa pemrakarsa-pemrakarsanya mengetahui atau menginginkannya– menyiapkan saat ketika proletariat akan mengambil alih semua produksi sosial dan mengangkat komite-komite pekerjanya sendiri untuk maksud pendistribusian dan rasionalisasi secara layak semua kerja sosial. Produksi besar-besaran, mesin-mesin, jalanan kereta api, telepon – semua menyediakan beribu-ribu peluang untuk mengurangi waktu kerja kaum buruh yang terorganisasi dengan tiga-perempatnya dan membuat keadaan mereka empat kali lipat lebih baik daripada keadaan mereka sekarang.⁵⁸

Sebagaimana telah ditunjukkan oleh Lecourt, perlakuan Lenin atas teknik-teknik kapitalis organisasi buruh, sebagai netral dan berguna, jelas menyumbang pada kelemahannya dalam memerangi kecenderungan Bogdanovis di dalam barisan Partai Bolshevik. Namun, akan tidak adil dan tidak benarlah untuk membongkahkan Lenin, Bogdanov dan Stalin menjadi satu. Lenin memandang indus-trialisasi sebagai prasyarat bagi sosialisme, tidak sebagai proses dari pembangunan politisnya. Ia dengan jelas melihat keperluan akan kerja politis dan kultural di luar proses kerja, yaitu sebagai suatu tempat aktivitas tersendiri. Mengenai kaum tani, misalnya, Lenin menganggap tugas pokoknya adalah edukasi kultural.

Obyek ekonomik dari edukasi kultural seperti itu adalah mengorganisasi kaum tani ke dalam koperasi-koperasi Sesungguhnya, tidak ada usaha mengembangkan koperasi-koperasi seperti akan berhasil di Uni Sovyet kecuali jika Partai lebih dulu mampu menaikkan standart kultural kaum tani.⁵⁹ Dengan demikian, peristiwa ekonomik itu bergantung pada tingkat politis, namun betapapun, terpisah darinya. Di sini tidak ada masalah memperhitungkan tingkat determinasi politis dengan sekedar menyimpulkannya dari yang ekonomik. Namun Stalin, yang posisi teoritisnya mencerminkan posisi Bogdanov, dengan jelas menegaskan suatu identitas antara peristiwa ekonomik dan peristiwa politis. Dalam hubungan dengan kaum tani, Stalin berargumentasi,

Ingin kuminta perhatian kalian pada perusahaan-perusahaan pertanian, dan istimewa perusahaan-perusahaan pertanian negara, sebagai pengungkil-pengungkil yang memudahkan rekonstruksi pertanian atas suatu landasan teknik baru, yang membangkitkan suatu revolusi dalam pikiran-pikiran kaum tani dan membantu mereka untuk menghempaskan konservatisme, rutin.⁶⁰

Sebagaimana ditunjukkan oleh Bettelheim sehubungan dengan kutiban

ini, adalah “teknik ilmiah” modern yang “bertindak” atas petani- petani konservatif sementara mereka cuma “ditindak” belaka.⁶¹ Mereka “ditindak” dan “diproletarkan” secara organisasional (dalam proses kerja aktual) dan secara politis; (“kesadaran” mereka “diangkat” pada yang proletarian melalui pengalaman mereka yang terorganisasi secara sosial di dalam proses kerja). Demikian, adalah gagasan mengenai pengalaman yang terorganisasi secara sosial inilah yang lebih pokok bagi epistemologi Stalin, daripada, seperti halnya dengan Marx dan Lenin, gagasan mengenai praktek teoritis. Bagi Stalin, teori dapat menjadi pengalaman karena “keberadaan” menyamai “kesadaran.” “Keberadaan” menyamai “kesadaran” pada titik produksi; dengan demikian kelas pekerja, yang mempunyai jalan masuk pada tempat ini, menjadi suatu subyek kolektif yang mengetahui. Kita dapat melihat betapa jauh kita telah pergi dari posisi Marx dan Lenin. Perbedaannya tidak terletak pada tekanan atas industrialisasi, melainkan lebih pada cara suatu proses seperti itu difahami. Bagi Stalin, industrialisasi bukan hanya suatu prasyarat bagi sosialisme; ia adalah merupakan konstruksi politisnya. Melalui perannya di dalam proses kerja, kelas pekerja memperoleh pengalaman yang dianggap revolusioner maupun ilmiah. Proses kerja bukan saja titik produksi ekonomik melainkan juga titik produksi pengetahuan melalui pengalaman-pengalaman subyek kolektif yang mengetahui - yaitu kelas pekerja. Yang kita persoalkan di sini, maka itu, adalah arti-pentingnya peleburan teoritis ini. Kenyataan bahwa Stalin mengistimewakan peristiwa ekonomik tidak, menurut pendapat kita, sepenting mekanisme aktual yang “memungkinkan” suatu peristiwa (*instance*) diistimewakan. Maka itu, argumen-argumen yang menghadapkan teori-teori tenaga-tenaga produktif pada “kekuasaan populer” akhirnya tidak mengenai masalah-nya; mereka cuma mempersoalkan bentuk-bentuk fenomenal. Yang penting adalah mekanisme epistemologis yang memungkinkan suatu peristiwa khusus menjadi diistimewakan; karena adalah mekanisme ini yang diabadikan sebagai epistemologi Marxis-Leninis. Ini benar-benar suatu hentakan aneh; karena, seperti yang telah kita coba tunjukkan, baik Marx maupun Lenin tidak mengambil posisi ini. Kita sekarang akan memalingkan perhatian kita pada Tiongkok dan menunjukkan bahwa walaupun ekonomisme Stalin mungkin saja telah diatasi, namun epistemologi

esensialis, sebenarnya, telah diperkokoh kembali.

Mao Zedong: Pembalikan Stalin tetapi Penerusan Empirisme

Kritik Mao atas Stalin menekankan ekonomisme dan humanisme Stalin dan mengidentifikasi dasar penyimpanan Stalin itu sebagai teori tenaga-tenaga produktif. Teori ini, demikian perasaan Mao, mereduksikan sosialisme menjadi tidak lebih daripada pemilikan negara atas tenaga-tenaga produktif. Karena, begitu kepemilikan negara ini tercapai, perjuangan kelas menjadi mubasir dan revolusi, dalam peristiwa-peristiwa politis dan ideologis, menjadi tiada artinya. Pihak Tiongkok sangat kritis terhadap posisi Stalin mengenai masalah-masalah ini, ****

... dengan ditinggalkannya dialektika Marxis-Leninis oleh Stalin di dalam pemahamannya mengenai hukum-hukum perjuangan kelas dalam masyarakat sosialis, Stalin secara prematur (terlalu dini) menyatakan bahwa sesudah agrikultura pada dasarnya telah dikolektivisasi maka *tiada lagi ada kelas-kelas antagonistik* di Uni Sovyet dan bahwa ia sekarang bebas dari konflik-konflik kelas, secara sepihak menekankan homogenitas internal dari masyarakat sosialis dan tidak melihat kontradiksi-kontradiksinya...⁶²

Selanjutnya, strategi yang dijalankan untuk mengembangkan tenaga-tenaga produktif, yaitu tekanan pada industri berat (di mana, bagi Stalin dan Bogdanov, kelas pekerja mempunyai jalan masuk pada “pengalaman kerja”) yang dibiayai dengan mengambil surplus dari daerah-daerah pedesaan, telah mengakibatkan –boleh dikata– pengucilan terhadap kaum tani sebagai suatu kelas yang maju.⁶³ Lagi pula, strategi Stalinis ini telah diuraikan secara teoritis, karena kaum tani dianggap sebagai mau tidak mau terbelakang dan tidak didisiplin oleh organisasi kerja. itisisme seperti itu mengakibatkan rontoknya teori tenaga-tenaga produktif; teopri ini digantikan oleh teori yang menempatkan hubungan-hubungan produksi sebagai pokok. Demikian, gagasan Bogdanov mengenai tektologi organisasional dan tenikal juga menjadi digusur. Pokok bagi posisi Mao mengenai hubungan-hubungan produksi adalah gagasan

**** Seksi bab ini terutama membahas posisi Mao pada tahun-tahun 1960-an sesudah ia mengembangkan kritiknya atas Stalin dan telah mulai merumuskan garis-garis dasar ks suatu teori mengenai kelahiran kelas-kelas selama periode peralihan sosialis, meningkatnya bahaya restorasi kapitalis dan keharusan yang mendesak akan perjuangan kelas yang bersinambungan dalam masyarakat sosialis.

mengenai eksploitasi (pemerasan) dan perjuangan dalam penentuan “pengalaman kerja.” Bagi Stalin dan Bogdanov, masih kita ingat, adalah melalui “pengalaman yang terorganisasi secara sosial” dalam proses kerja, seseorang menjadi “diproletarkan,” seseorang mengembangkan “kesadaran” proletariat. Maka itu, “pengalaman kerja” dan “sikap/pandangan kelas” dicampakkan dari peristiwa ekonomik. Tanpa tedeng aling-aling, Mao memutuskan hubungan dengan konsep mengenai “perkembangan kesadaran kelas” ini,

Di banyak tempat dalam buku-text (yaitu, buku-text *Ekonomi Politik Sovyet*), tekanan diberikan pada peranan yang dimainkan oleh mesin-mesin di dalam transformasi sosialis. Namun, jika kita tidak meningkatkan kesadaran kaum tani dan membentuk-kembali ideologi manusia, bagaimana mungkin kita mengandalkan pada mesin-mesin saja? Masalah perjuangan antara kedua jalan sosialisme dan kapitalisme dan masalah menggunakan ideologi sosialis untuk membentuk kembali manusia dan mendisiplinnya adalah suatu masalah besar di negeri kita.⁶⁴

Sebagai gantinya ia mengembangkan suatu pandangan yang agak berbeda mengenai penentuan sikap kelas. Ia membedakan antara asal-usul kelas (ditentukan dengan merujuk pada hubungan seseorang dengan alat-alat produksi) dan pendirian kelas.⁶⁵ Pendirian kelas ditentukan oleh sikap seseorang terhadap revolusi; yaitu apakah seseorang itu revolusioner atau kontra-revolusioner. Metode kategorisasi seperti itu jelas sekali bagi Mao – itu harus dilakukan berdasarkan kesediaan untuk berintegrasi dengan kaum buruh dan tani (dengan yang tertindas/dieksplotasi) dan hingga sejauh mana ini dilakukan di dalam praktek.⁶⁶ Jelas sekali, bagi Mao, ada determinan-determinan eksperiental dalam pembentukan sikap kelas; yaitu, pengalaman pribadi dalam perjuangan (perjuangan kelas, perjuangan untuk produksi dan eksperimentasi ilmiah, dengan yang tersebut lebih dahulu sebagai “mata-rantai kunci”) dan derajat eksploitasi seseorang (betapa “miskin dan kosong”-nya seseorang. Perhatian pada perjuangan dan eksploitasi ini membawa Mao pada suatu posisi di mana “pengalaman kerja” tidak lagi terbatas, sebagai suatu titik asal-usul bagi penentuan strategi, pada kelas pekerja (seperti halnya bagi Stalin dan Bogdanov), melainkan lebih diperluas pada “rakyat” (kaum buruh, kaum tani, burjuis kecil kota dan burjuasi nasional yang patriotik). Adalah “rakyat” yang tertindas yang terlibat dalam perjuangan melawan musuh-usuh mereka. Penentuan pengalaman, karenanya,

bergeser dari hubungan-hubungan pekerja dengan teknik ilmiah, pada tingkat eksploitasi atas rakyat dan derajat keikutsertaan dalam perjuangan; tidak lagi “dibaca dari” peristiwa ekonomik, melainkan lebih dari yang politis.”**** Pergeseran Mao dari “pengalaman kerja” pada “rakyat,” maupun identifikasinya mengenai kontradiksi “di kalangan rakyat” (diselesaikan lewat “perjuangan damai,” yaitu, melalui diskusi-diskusi, kritisisme, bujukan/himbauan dan edukasi) dan “di antara” rakyat dan musuh-musuh mereka (yang harus diselesaikan melalui perjuangan kelas), mengakibatkan pengelakan/penghindaran ekonomisme maupun humanisme Stalin. Namun, yang jelas tidak diatasi dalam epistemologi Mao adalah sentralitas gagasan Bogdanovis mengenai “pengalaman yang

**** Kita dapat melihat pada saat ini bahwa pengaruh-pengaruh dislokasi ini bersesuaian dengan praktek-praktek yang sudah disendikan dari kaum Marxis Tiongkok terdahulu yang telah menekankan peranan progresif dari kaum tani. Penentuan kelas atas dasar tingkat eksploitasi adalah, misalnya, suatu pokok utama dari teori Li Dazhao tentang “nasion proletarian”. Teori ini, yang dikemukakan pada bulan Januari 1920, pada dasarnya berargumentasi bahwa *nasion* Tiongkok sebagai suatu keseluruhan adalah sebuah negeri proletarian, karena hubungan perhambaan dan pengeksploitasian yang luar-biasa oleh kekuasaan imperialis (Meisner, 1977, hal. 144-6). Pengulangan posisi ini juga dapat dijumpai dalam berbagai bentuk teori Tiongkok masa-kini mengenai politik luar-negeri, seperti teori Lin Biao tentang perang rakyat dan “tesis tentang tiga dunia”-nya Mao. Posisi Lin, yang diumumkan tepat sebelum Revolusi Kebudayaan, memandang daerah pedesaan (dunia ketiga) yang malang mengepung kota-kota dunia (kekuasaan imperialis) (Lin Biao, *PR*, 36, 3 September 1965, hal. 9-30). Tesis Mao mengenai tiga dunia, yang dikemukakan pada tahun 1974, memandang negeri-negeri dunia kesatu (Uni Sovyet, dan Amerika Serikat) sebagai kaum penghisap dan penindas, sedangkan negeri-negeri dunia ketiga menderitakan penindasan yang paling buruk. Karena penderitaan, eksploitasi dan penindasan mereka itu, negeri-negeri dunia ketiga mewakili kekuatan revolusioner utama yang memerangi imperialisme, kolonialisme dan hegemonisme. Negeri-negeri dunia ketiga yang tertindas ini berada dalam suatu posisi untuk bergabung dengan negeri-negeri dunia kedua (negeri-negeri yang menindaas dan mengeksploitasi negeri-negeri dunia ketiga, tetapi sendiri ditindas dan dieksploitasi oleh Uni Sovyet dan Amerika Serikat) untuk membentuk suatu front persatuan yang luas di dalam perjuangan kelas melawan negeri-negeri dunia kesatu (*Renmin Ribao*, *PR*, 45, 4 November 1977, hal. 10-4). Lihat juga Deng Xiaoping, *PR*, 15, Supplement, 12 April 1974, hal. 1-V). Demikian, kita dapat melihat bahwa politik-politik keterbelakangan dan hipo-perkembangan, dan pengalaman penindasan dan eksploitasi, secara efektif dipandang “memproletariankan,” atau lebih tepatnya merevolusiponerkannya, dunia ketiga. Kita juga dapat melihat bahwa akibat dari penggusuran teori tentang tenaga-tenaga produktif tidak hanya dirasakan di dalam kebijakan dalam-negeri Tiongkok, melainkan juga di dalam kebijakan luar-negeri.

hidup.” Benar, perhatian Bogdanov akan suatu konsepsi teknologis yang ilmiah mengenai proses kerja telah disingkirkan, tetapi efek-efek epistemologis mengenai dipertahankannya kategori “pengalaman” masih tertinggal. Dalam pengertian ini, terdapat suatu kesinambungan antara Stalin dan Mao. Masih tetap terdapat suatu subyek yang serba-mengetahui yang mempunyai, sebagai landasannya, yang oleh Bogdanov disebut pengalaman yang diorganisasi secara sosial. Ternyata hanya tempat bagi diperoleh-nya pengalaman itu yang telah berubah – yaitu, dari yang ekonomik menjadi yang politis. Dengan cara demikian, kritik Mao atas Stalin tidak pernah terputus dari posisi epistemologis yang mendasarinya, dan pada pokoknya masih Bogdanovis, sekalipun dalam bentuk yang dibalikkan. Hal ini dengan jelas diperagakan oleh metode kepemimpinan “garis massa” Mao, yang oleh Mao sendiri dikarakterisasi sebagai “teori Marxis mengenai pengetahuan.”⁶⁷

Ini berarti: ambillah ide-ide dari massa (ide-ide yang tercecceer dan tidak disistematikkan) dan konsentrasikan itu (melalui studi dijadikan ide-ide yang terkonsentrasi dan sistematis), lalu pergilah ke padamassa dan propagandakan dan jelaskan ide-ide itu hingga massa menjadikannya sebagai kepunyaan mereka sendiri, berpeganganlah dan terjemahkanlah semua itu menjadi aksi, dan ujilah ketepatan ide-ide itu dalam aksi-aksi seperti itu.⁶⁸

Posisi ini jelas-jelas Bogdanovis. Konsepsi mengenai studi di sini bukanlah penguraian teoritis, melainkan lebih merupakan sistematisasi dan pengorganisasian ide-ide dari massa itu. Dalam batasan ini, Mao berbicara mengenai perlunya “menyintesis data tanggapan (persepsi) dengan mengatur dan merekonstruksinya,”⁶⁹ dan “menyistematikkan dan menyintesis ... pengalaman dan mengang-katnya pada jenjang teori.”⁷⁰ Justru pada titik ini kita sampai pada argumen Bogdanov bahwa “pikiran biasa” dan “pikiran ilmiah” pada dasarnya adalah sama, cuma dibedakan oleh pengorganisasian pikiran itu. Namun begitu, bagi Mao gerak pengetahuan tidak berakhir di sini. Tahap paling penting dari proses pengetahuan, sejauh hal ini bagi Mao, adalah pengujian teori melalui praktek. Praktek adalah satu-satunya kriterium kebenaran dan hanya melalui praktek perjuangan kelas revolusioner, produksi dan eksperimentasi dapatlah pengetahuan diuji dan dikembangkan.⁷¹ Sudah kita lihat bahwa tinda-kan Mao melepaskan teori tenaga-tenaga produktif dari kerangka pusatnya telah mengakibatkan suatu penekanan

pada yang politis, pada perjuangan kelas dan kontradiksi-kontradiksi di kalangan rakyat. Karena itu, kebenaran bagi Mao –jika praktek (politis) menjadi satu-satunya kriterium– adalah bentuk pengorganisasian pengalaman. Ini justru posisi Bogdanov sebagai yang dijelaskan oleh Ballestrein,

Teori Bogdanov mengenai kebenaran mengikuti premis-premis umumnya yang empirisis. Pengujian pengetahuan adalah “pengorganisasian pengalaman” dalam bentuk konsep-konsep, pernyataan-pernyataan, teori-teori. Tidak ada kemungkinan untuk, tetapi juga tidak ada keperluan akan atau kepentingan dalam, mencari kriteria di luar dunia pengalaman kita guna menilai kesepadanan suatu pernyataan atau teori.”⁷²

Maka, jelas sekali penguraian pengalaman yang diperoleh dari praktek politis telah dipandang oleh Mao sebagai “praktek teoritis.” Suatu praktek teoritis yang secara relatif otonom dari yang politis adalah, karenanya, atas dasar ini, tidak terpikirkan. Mao menegaskan hal ini pada berbagai kesempatan, dan sesungguhnya meng-karakterisasi Marx dengan cara ini,

Marx mengambil bagian di dalam praktek gerakan revolusioner dan juga menciptakan teori revolusioner ... Marx melakukan penyelidikan dan studi-studi terperinci selama berlangsungnya perjuangan-perjuangan praktis, menyusun penjabaran-penjabaran dan kemudian menyocokkan kesimpulan-kesimpulannya dengan mengujinya di dalam perjuangan-perjuangan praktis – inilah yang kita sebut kerja teoritis.⁷³

Karenanya, daripada menghapuskan landasan epistemologis dari posisi Marx, Mao cuma “menggantikan” kriteria bagi penentuannya. Pengalaman kerja tidak lagi “disimpulkan” dari peristiwa ekonomik melainkan lebih merupakan praktek politik yang “disimpulkan.” Karena itu kita dapat mengatakan bahwa Mao tidak pernah putus dengan epistemologi empirisis Stalin dan Bogdanov yang menjadikan pengalaman sebagai pusatnya. Di dalam esainya *On Practice*, yang dianggap sebagai karya sentral dari teori pengetahuan Maois, Mao dengan jelas mengidentifikasi pengalaman dalam yang riil sebagai dasar pengetahuan,

Jika anda menghendaki pengetahuan, maka anda mesti ambil bagian di dalam praktek mengubah realitas ... Semua pengetahuan sejati berasal-usul dalam pengalaman langsung. Tetapi orang tidak dapat memperoleh pengalaman langsung dari segala sesuatu; sebenarnya-lah, kebanyakan dari pengetahuan kita datang dari pengalaman tidak-langsung ... Maka itu pengetahuan seseorang hanya terdiri atas dua bagian, yaitu yang datang dari pengalaman langsung dan yang datang dari pengalaman tidak-langsung. Lagi pula, yang merupakan pengalaman tidak-langsung bagiku adalah pengalaman langsung dari orang lain. Maka itu ... pengetahuan jenis apapun tidak terpisahkan dari pengalaman langsung.⁷⁴

Dapat dilihat dengan jelas bahwa bagi Mao, gagasan mengenai “pengalaman” adalah pokok bagi setiap konsepsi mengenai pengetahuan. Ia bersifat produksi pengetahuan cuma sistematisasi pengalaman saja. Ada yang mengemukakan bahwa gambaran Mao mengenai proses persepsi menjadikan dirinya seorang empiris tuntas, setidaknya-tidaknya pada awal proses kognisi. Kita menegaskan bahwa Mao adalah seorang empiris tuntas pada semua tahap proses pengetahuan. Sungguh suatu godaan untuk membela Mao terhadap tuduhan-tuduhan akan empirisisme dengan mendebat bahwa ia menganggap persepsi hanya memecahkan problem fenomena dan bahwa ia terus-menerus menuntut agar orang melangkah lebih jauh dari ini dan menangkap esensinya.⁷⁵ Tidak meragukan lagi bahwa Mao membayangkan sesuatu proses interaksi di dalam proses kognitif antara “teori” atau “prekonsepsi-prekonsepsi” dan data terus-menerus yang diperoleh melalui pengalaman. Prekonsepsi-prekonsepsi seperti itu mencakup teori Marxis-Leninis.⁷⁶ Teori ini tidak boleh dipakai sebagai “dogma mati” atau diterapkan secara universal, melainkan semestinya lebih dipadukan dengan persepsi sendiri seseorang, dengan “praktek konkret,” sehingga sesuatu pengertian dapat diperoleh dari pengalaman seseorang.⁷⁷ Namun, sama sekali tidak ada indikasi akan praktek teoritis dalam epistemologi Mao, biarpun adanya yang disebut “interaksi” ini. Kumpulan prekonsepsi-prekonsepsi ini, “teori” ini, bagi Mao tidak lebih dan tidak kurang hanya “penjumlahan pengalaman sebelumnya.” Lagi pula, hanya setelah orang mempelajari teori, hanya setelah mereka menangkap “penjumlahan” ini, mereka akan mampu “menyistematikkan dan menyintesiskan pengalaman mereka dan mengangkatnya pada jenjang teori,” setelah itu baru mereka “tidak keliru menganggap pengalaman”

parsial “mereka sebagai kebenaran universal dan tidak melakukan kesalahan-kesalahan empiris.”⁷⁸ Dan ini adalah masalah pokok bagi Mao. Ia mengemukakan bahwa empirisisme semata-mata bersandar pada pengalaman langsung, pada bentuk-bentuk fenomenal, bagi produksi “pengetahuan”-nya. Ia, namun, melampaui bentuk-bentuk fenomenal itu dengan menyintesis dan merekonstruksi persepsi-persepsi yang, demikian dikatakannya, “kaya” dan “sesuai dengan realitas.”⁷⁹ Demikian yang dinyatakan oleh Mao,

Untuk sepenuhnya merefeksi sesuatu dalam totalitasnya, untuk merefeksi esensinya, untuk merefeksi hukum-hukum yang menjadi pembawaannya, adalah perlu untuk –melalui pekerjaan pikiran– merekonstruksi data persepsi indra yang kaya, membuang sampahnya dan memilih yang esensial, menyingkirkan yang palsu dan mempertahankan yang benar, meneruskan dari yang satu pada yang lain dan dari yang sebelah luar pada yang sebelah dalam, agar membentuk suatu sistem konsep-konsep dan teori-teori – adalah perlu untuk melakukan suatu lompatan dari pengetahuan terus-menerus pada pengetahuan rasional.⁸⁰

Dengan demikian, lompatan pada pengetahuan rasional bagi Mao, tidak lebih daripada interaksi pengalaman langsung dan penjumlahan dan penjabaran pengalaman sebelumnya (baik pengalaman sendiri seseorang maupun pengalaman orang-orang lain). Tidak lebih daripada suatu lompatan yang didasarkan pada suatu interaksi antara pengalaman pribadi dan pengalaman dari suatu tatanan lebih tinggi. Hasil akhirnya mungkin bukan empirisisme “sempit dan parsial,” tetapi masih tetap empirisisme. Kegagalan untuk memutuskan hubungan dengan empirisisme terjadi justru karena tidak terdapat gagasan otonomi antara peristiwa-peristiwa (*instances*) teoritis dan politis. Oleh karenanya, ini membawa kita pada kesimpulan bahwa kategori subyek harus tetap di dalam epistemologi Mao karena, jika kelas-kelas atau individu-individu mempunyai jalan masuk pada pengetahuan eksperiental (yaitu pada tempat pengalaman sebagai pengetahuan yang diistimewakan secara ontologis), maka mereka mesti merupakan suatu subyek yang mengetahui. Mao mungkin saja telah mengritik subyek humanisme yang diindividualkan, tetapi kategori subyek tidak digusur, melainkan cuma dikolektifkan. Hal ini jelas dibuktikan dalam *Talk on Sakata's Article*-nya pada tahun 1964, di mana ia mendiskusikan kognisi kelas pekerja.

Suatu kelas adalah subyek kognisi. Pada mulanya, kelas pekerja adalah suatu kelas dalam dan dari dirinya sendiri, dan ia tidak mempunyai pengetahuan mengenai kapitalisme. Kemudian, ia berkembang dari suatu kelas dalam dan dari dirinya sendiri menjadi suatu kelas yang berada untuk dirinya sendiri, dan, pada waktu itu, ia mulai memahami kapitalisme. Ini adalah suatu masalah perkembangan kognisi yang didasarkan pada kelas sebagai subyek.⁸¹

Maka itu, bagi Mao, adalah pengalaman dari kelas pekerja yang memungkinkannya untuk “mengetahui” dirinya sendiri sebagai suatu kelas, sebagai suatu subyek. Di sini kita dengan jelas melihat peleburan obyek dalam pikiran, yang berkaitan pada produksi pengetahuan, dan obyek ksesungguhnya. Dalam proses ini, epistemologi empiris yang memungkinkan konsepsi mengenai kerja secara tektologis di bawah Stalin, tidak digusur, sekalipun posisi teoritis yang dikemukakan oleh Marx dan Lenin telah digusur. Proses yang didiskusikan oleh Mao dalam kutipan di atas adalah suatu proses abstraksi. Kelas buruh, melalui pengalamannya di dalam perjuangan, telah menjadi suatu subyek yang mengetahui - telah mendapatkan kemampuan untuk memisahkan dan mengabstraksi yang esensial dari yang tidak-esensial dalam yang riil, dan dengan begitu menegakkan sebagian dari yang riil sebagai tempat produksi pengetahuan; ia telah menjadi suatu kelas bagi dirinya sendiri. Ia telah, dalam proses yang sama itu, menegakkan dirinya sebagai subyek pengetahuan, sebagai pelaku (*agent*) yang “mengetahui” yang riil. Kelas pekerja akan menjadi “mengetahui” justru karena ia telah mengabstraksikan yang esensial dari yang tidak-esensial dan, karenanya, “memiliki” esensi riil dari obyek riil itu. Pada titik ini kita kembali sampai pada kesimpulan bahwa Mao, tidak seperti Marx dan Lenin, tidak mempunyai gagasan mengenai praktek teoritis. Karena itu ia bersama Stalin dan Bogdanov mempunyai suatu komitmen dasar pada epistemologi empirisisme yang reduksionis. Sebagaimana dengan Stalin dan Bogdanov, obyek “riil” adalah “dapat diketahui” bagi Mao melalui pengalaman subyek yang mengetahui. Namun, harus dicatat bersama Mao, bahwa selagi pandangan subyek mungkin tetap diistimewakan secara ontologis (dan dengan demikian posisinya sama dengan posisi Bogdanov dan Stalin), dasar pengistimewaan ini telah berubah secara dramatis. Bagi Mao, pengistimewaan itu tidak disebabkan oleh interaksi seseorang dengan teknologi yang maju (sebagaimana hal itu bagi Stalin

dan Bogdanov), melainkan lebih didasarkan pada tingkat penderitaan dan penindasan seseorang. Semakin seseorang itu tertindas, semakin besar seseorang itu memiliki potensialitas revolusioner. Dengan pengertian ini kelas buruh dapat lebih mudah memperoleh “kesadaran revolusioner” sejati, bukan karena ia didisiplin dan diorganisasi melalui proses kerja, tetapi lebih dikarenakan ia adalah suatu kelas tertindas. Karena itu, bagi Mao, kelas-kelas seperti kaum tani dapat, seperti halnya dengan kelas buruh, memperoleh jalan pada “kesadaran revolusioner” sejati. Lagi pula, untuk sebagian besar, pengistimewaan kelas pekerja oleh Mao terutama bersifat linguistik. Dalam posisi teoritis Mao agaknya tidak terdapat mekanisme yang dapat mengistimewakan kelas pekerja di atas kelas-kelas tertindas lainnya (misalnya, kaum tani). Dengan demikian kita mendapatkan bahwa analisis Mao lebih gencar menggunakan istilah-istilah seperti “massa” dan “rakyat,” karena kelompok-kelompok inilah yang cukup tertindas untuk memperoleh “kesadaran” kelas “revolusioner.” Adalah massa, rakyat, yang memiliki “kesadaran revolusioner sejati” karenanya, yang akan mengetahui yang riil. Mao mengisyaratkan pada hal ini di dalam naskah tahun 1963 *Dari Mana Asalnya Ide-ide yang Tepat?*,

Di dalam perjuangan sosial, kekuatan-kekuatan yang mewakili kelas yang maju kadang-kadang menderita kekalahan bukan dikarenakan ide-ide mereka tidak tepat, melainkan karena, di dalam keseimbangan kekuatan-kekuatan yang terlibat dalam perjuangan, mereka untuk sementara waktu tidak sekuat kekuatan-kekuatan reaksi; oleh karenanya untuk sementara waktu mereka kalah, tetapi mereka lambat atau cepat pasti akan menang.⁸²

Walaupun dalam kebanyakan peristiwa (*instances*) praktek menjadi kriterium kebenaran, ujian terakhir akan keberlakuan terletak di luar alam praktek. Bagi Mao, validitas pengetahuan direduksi menjadi pertanyaan mengenai siapa yang menguraikan ide itu. Sebagaimana telah dibikin jelas oleh diskusi di atas, pengetahuan dianggap benar karena ia dimiliki oleh anggota-anggota kelas yang maju, yaitu oleh mereka yang menderita suatu derajat tinggi penindasan dan penghisapan dan yang, karenanya, sampai pada kesadaran mengenai penindasan atas diri mereka dan jalan-jalan untuk menanggulangnya.⁸³

Kita dapat melihat di sini suatu determinisme yang memungkinkan

produksi pengetahuan menjadi satu-satunya cagar rakyat. Bersamaan dengan itu kita juga dapat melihat reduksionisme yang dikandung dalam epistemologi Mao. Mao menunjuk satu tingkat praktek (yang politis) sebagai tempat yang menentukan dan cenderung mereduksi semua peristiwa lainnya menjadi sekedar epifenomena dari tempat itu. Tanpa itu, subyek yang serba-mengetahui akan tidak “mengetahui” semua tingkatan praktek, ia “Cuma” dapat “mengetahui” peristiwa-peristiwa yang terbuka jalannya baginya; ia tidak lagi “serba mengetahui.” Maka jelas sekali, spontanisme sosial Stalin yang didasarkan pada yang ekonomi telah disingkirkan, tetapi hanya untuk digantikan oleh spontanisme Mao yang didasarkan pada yang politis.

Kepemimpinan Pasca-Mao: Suatu Pembalikan lain, tetapi Masih Tetap Empirisisme.

Seperti itu pula, Tiongkok pasca-Mao tidak bebas dari kecenderungan-kecenderungan yang menimbulkan Stalinisme maupun Maoisme. Sangat penting untuk mendudukan/meng-ajukan di sini bahwa kita akan meneliti kecenderungan-kecenderungan tertentu yang telah muncul sejak kematian Mao dan yang “disebut penumbangan Komplotan Empat.” Dalam batasan ini, penelitian kita mengenai periode debat teoritis dan politis yang intens mengenai transisi sosialis adalah bersifat penjajakan dan persiapan/pendahuluan. Posisi teoritis dari kepemimpinan pasca-Mao masih harus dipastikan secara jelas. Terdapat parameter-parameter jelas bagi perdebatan itu, tetapi di dalam lingkupan ini terdapat juga perbedaan-perbedaan. Terdapat juga kecenderungan-kecenderungan yang tidak dapat diartikan sebagai “anti-sosialis *per se*” – misalnya spesifikasi kode-kode legal, perluasan demokrasi, dan ditingkatkannya otonomi bagi perusahaan-perusahaan. Dengan memperhatikan kualifikasi-kualifikasi dan pembatasan-pembatasan ini, bab ini akan menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan-kecenderungan jelas dan mengganggu di dalam Marxisme Tiongkok untuk membalikkan Mao tepat seperti yang dilakukan Mao terhadap Stalin. Itu dibuktikan oleh suatu kecenderungan untuk meruntuhkan semua jenjang praktek pada yang ekonomik dan oleh pradominasi suatu epistemologi empiris dengan pengalaman sebagai landasannya. Bagian bab ini akan meneliti perkembangan-perkembangan di dalam Marxisme Tiongkok sejak 1978,

terutama sejak Sidang Pleno Ke Tiga Komite Sentral Ke Sebelas pada bulan Desember tahun itu. Ini bukan untuk mengingkari luar biasa pentingnya debat-debat teoret-ikal dan perjuangan-perjuangan politis yang sehubungan dengan itu yang terjadi pada periode 1976-78. Selama tahun-tahun yang agak rumit itu, sejumlah posisi teoritis mengenai persoalan transisi sosialis telah dikemukakan. Pleno Ke Tiga, namun, menandakan suatu perubahan penting dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dijalankan oleh kepemimpinan Tiongkok. Sesungguhnya, resolusi *On Questions of Party History* yang diterima pada Pleno Ke Enam, menyatakan,

Sidang Pleno Ke Tiga dari Komite Sentral ke II pada bulan Desember 1978 menandakan suatu titik balik yang sangat menentukan dengan arti yang jauh-jangkauannya dalam sejarah Partai kita sejak lahirnya Republik Rakyat. Ia telah mengakhiri keadaan yang menyebabkan Partai maju dengan tersendat-sendat dalam pekerjaannya sejak Oktober 1876.⁸⁴

Sidang Pleno Ke Tiga membuang slogan “pakailah perjuangan kelas sebagai mata-rantai penentu” dan menggeser fokus pekerjaan pada “modernisasi sosialis.” Ia menekankan keharusan untuk memperkuat demokrasi sosialis dan sistem legal sosialis. Lebih lanjut, ia mengangkat azas “mencari kebenaran dari fakta,” dengan melangkah dari realitas dan mengkaitkan teori dan praktek. Adalah pada persoalan epistemologis ini kita lebih dulu mengarahkan perhatian kita. Kampanye untuk mempromosikan “praktek: sebagai: satu-satunya kriterium kebenaran: dan slogan-slogan seperti “mencari kebenaran dari fakta: membuktikan epistemologi empirisis kepemimpinan sekarang itu. Perdebatan-perdebatan epistemologis sejak 1976 sangat bersandar pada naskah-naskah Mao *On Practice, Rectify the Party’s Style of Work* dan *Where Do Correct Ideas Come From?* Pokok bagi posisi Mao yang digariskan dalam karya-karya itu, seperti sudah kita ketahui, adalah gagasan mengenai pengalaman. Kepemimpinan sekarang telah menguasai gagasan ini *in toto* dan jelas-jelas menidentifikasi pengalaman dalam yang riil sebagai landasan pengetahuan.

Untuk menemukan hukum-hukum segala sesuatu, untuk mem-prakirakan jangkauan kemajuan mereka, adalah perlu untuk secara pribadi ikut-serta di dalam praktek, untuk terlibat dalam melaksanakan perjuangan, untuk terbenam dalam *nexus*-dalam segala sesuatu ... Kecuali seseorang

memulai dengan realitas, ikut-serta dalam praktek, dan berada dalam sentuhan langsung dengan studi fenomena obyektif, tidak mungkin untuk menemukan hukum-hukum segala sesuatu.⁸⁵

Lagi pula, tepat sebagaimana bagi Mao, teori dipandang tidak lebih daripada penjumlahan dan penjabaran pengalaman praktis.⁸⁶ Sebagaimana telah ditunjukkan, posisi ini, sentralitas gagasan mengenai pengalaman ini, jelas-jelas adalah Bogdanovis. Watak empirisis epistemologi ini telah dikarakterisasi secara tidak disadari, dalam pengertian-pengertian yang mengingatkan pada Mao, oleh Lei Shenwu,

Kita semua mengetahui bahwa di dalam pembentukan suatu teori, tidak peduli dari jenis praktek apa atau dengan bimbingan ideologi yang betapapun benarnya, suatu pemrosesan dengan otak manusia selalu diharuskan. Fungsi pemrosesan melalui pemikiran berarti sampai pada perumusan konsep-konsep dan sistem-sistem teoritis melalui langkah-langkah seperti peninjauan kembali dan regenerasi atas dasar data sensual yang kaya dan hidup yang diderivasi dari praktek dengan menyerap yang paling hakiki dan menyingkirkan yang kasar, menyerap yang benar dan menyingkirkan yang palsu, berspekulasi dari faktor yang satu pada faktor lainnya, dan menembus dari yang cuma permukaannya pada yang paling dalam.⁸⁷

Metode “melompat: dari pengetahuan terus-menerus (*perpetual*) pada pengetahuan rasional adalah presis proses yang sama yang digaris-kan Mao di dalam *On Practice*. Lei menyinggung sesuatu proses interaksi antara data perpetual dan “pendirian” subyek, “pandangan” dan “pendekatan” subyek. Di sini dapat kita melancarkan kritisisme yang sepenuhnya sama seperti yang kita lakukan terhadap Mao; proses interaksi antara “pengalaman langsung” dan “penjumlahan dan penjabaran pengalaman praktis” (sebelumnya) tidak teoritis; ia jelas-jelas empirisis. Epistemologi empirisis ini memandang yang riil sebagai bahan baku, titik pangkal dari produksi pengetahuan. Ia melihat subyek mengabstraksi esensi (yang paling hakiki, yang benar) dari obyek riil, menyingkirkan semua yang tidak esensial (kasar, yang palsu), dan dengan demikian memproduksi pengetahuan. Pengetahuan menjadi tidak lebih daripada bagian esensial dari obyek riil. Teori abstrak, “penjumlahan dan penjabaran” ini menjadi, paling-paling, suatu pendekatan pada realitas. Maka itu jelaslah, sama sekali tidak ada konsepsi, seperti yang terdapat pada Marx dan Lenin, mengenai praktek teoritis di dalam epistemologi kepemimpinan Tiongkok dewasa ini.

Hal ini juga diperagakan oleh posisi kepemimpinan sekarang mengenai kriterium kebenaran. Praktek (pengalaman) memainkan suatu peranan ganda di dalam proses kognitif – ia tidak hanya menjadi sumber dari semua pengetahuan, melainkan ia juga merupakan ujian tunggal bagi validitas pengetahuan. Praktek yang dirujuk di sini bukanlah praktek individual melainkan praktek sosial (pengalaman yang terorganisasi secara sosial) dalam produksi material, perjuangan kelas dan eksperimentasi ilmiah. Selanjutnya, ujian validitas ini mau memastikan apakah “ide-ide dari alam subyektif” mencapai atau tidak mencapai hasil-hasil yang dinanti- nantikan/diharapkan di dalam praktek – apakah mereka berhasil atau tidak berhasil. Bagaimana keberhasilan seperti itu mesti diukur? Mengemukakan praktek sebagai ujian pengetahuan tidak memperhitungkan faktor-faktor seperti kekeliruan di dalam gaya bekerja atau ketidak-mampuan untuk melaksanakan pengetahuan itu karena keterbatasan waktu atau keterbatasan sumber-sumber.⁸⁸ Suatu kritisisme yang jauh lebih serius adalah bahwa keberhasilan hanya dapat diukur dengan persepsi, dengan tahap *pertama* proses pengetahuan sebagaimana itu difahami oleh kepemimpinan Tiongkok sekarang. Subyek harus “melihat” apakah hasil-hasil yang diharapkan telah tercapai atau tidak tercapai. Tindakan “melihat” itu sendiri sudahlah empiris, tetapi kini terlihat secara lebih jelas; karena dalam peristiwa (*instance*) ini pengetahuan secara langsung luruh kembali ke pada persepsi dalam yang nyata. Namun, kritisisme yang paling tajam adalah bahwa pengetahuan mengenai yang riil telah luruh (dalam asal-usulnya maupun dalam pengujiannya) ke dalam praktek sosial; ke dalam yang riil. Agaknya tidak ada gagasan mengenai suatu jenjang otonom dari praktek teoritis dalam “proses pengetahuan” ini; yang ada hanyalah “praktek pada umumnya” dalam yang riil. Dengan demikian pengetahuan secara sepenuhnya ditanamkan dalam yang riil. Kita dapat melihat dengan jelas hingga sejauh mana kepemimpinan Tiongkok sekarang telah bergeser dari posisi epistemologis yang dianjurkan oleh Marx. Tepat sebagaimana dengan Stalin, empirisisme terus diabadikan sebagai epistemologi Marxis-Leninis. Banyak rujukan oleh Mao pada kriterium mengenai praktek telah dipakai oleh kepemimpinan sekarang untuk mensyahkan posisinya. Naskah Mao tahun 1963: *Where Do Correct Ideas Come From?* telah dikutip dengan bangsa dalam hal ini. Naskah yang secara

jelas sekali merujuk pada perjuangan kelas dan peranannya dalam kriteria mengenai praktek telah, namun, dihapus dari uraian kepemimpinan sekarang mengenai epistemologi Mao. Apakah ini menunjukkan bahwa yang politis, sebagai tempat praktek yang menentukan (dan karenanya produksi pengetahuan), telah digusur? Bab ini akan terus mengemukakan bahwa kecenderungan-kecenderungan ke arah ini tampaknya menonjol/berkuasa. Seterusnya akan ditunjukkan bahwa kecenderungan ke arah penggusuran yang politis tidak dibarengi oleh suatu gagasan mengenai praktek teoritis sebagaimana yang digariskan oleh Marx dan Lenin, melainkan lebih disertai suatu permunculan kembali teori Stalin mengenai tenaga-tenaga produktif dengan yang ekonomik sebagai tempat yang menentukan produksi pengetahuan. Stalin, yang dibalikkan oleh Mao, tampaknya telah “dibalikkan kembali” oleh kepemimpinan Tiongkok dewasa ini.

Komunike Pleno Ke Tiga mengumumkan bahwa “...perjuangan-perjuangan kelas yang bergolak secara besar-besaran dengan suatu watak massal pada pokoknya telah berakhir.”⁸⁹ Selanjutnya, komunike itu mendeskripsikan bahwa tekanan pekerjaan Partai mesti bergeser pada modernisasi sosialis. Dasar argumen ini adalah bahwa sistem eksploitasi atas manusia oleh manusia telah dilenyapkan, dan bahwa kaum penghisap tidak ada lagi sebagai kelas-kelas.⁹⁰ Ini telah dicapai melalui transformasi alat-alat produksi dari kepemilikan perseorangan menjadi milik umum. Ye Jianying mengemukakan,

Kita telah menghapuskan eksploitasi atas manusia oleh manusia, telah mengubah sistem kepemilikan perseorangan dengan produser- produser kecil, “telah menegakkan secara lengkap kepemilikan umum sosialis” atas alat-alat produksi dan mulai mempraktekkan azas “dari masing-masing orang menurut kemampuannya, kepada masing-masing orang menurut pekerjaannya, dan dengan demikian telah menjadi mungkin” bagi rakyat Tiongkok “... untuk memasuki masyarakat sosialis.”

Dengan pandangan ini, sosialisme menjadi suatu persoalan kepemilikan atas alat-alat produksi. Begitu kepemilikan ini dibuktikan telah berada di tangan “rakyat,” maka alat-alat produksi itu telah menjadi sosialis. Dengan demikian, dalam menentukan apakah proses kerja itu sosialis

atau tidak, persoalannya telah semata-mata menjadi suatu persoalan kepemilikan judisio-legal. Hubungan- hubungan produksi tidak diperiksa, begitu pula itu tidak dianggap bersangkutan dengan persoalan transisi sosialis. Hubungan-hubungan produksi “ditempatkan di jalan sosialis” dengan pemindahan legal kepemilikan atas alat-alat produksi secara sederhana. Begitu pemindahan kepemilikan secara sederhana kepada “rakyat” ini telah terjadi, maka meningkatnya perkembangan teknis dari tenaga-tenaga produktif :bertindak atas” hubungan-hubungan produksi untuk melengkapi transformasi sosialis proses kerja. Dengan demikian maka adalah tenaga-tenaga produksi itu yang, setelah pemindahan legal alat-alat produksi, menjadi katalisator bagi transformasi “bentuk” proses kerja. Maka itu, kemajuan teknologi-kalah yang menjadi dinamika bagi transformasi sosialis. Pereduksian sosialisme menjadi suatu persoalan kepemilikan judisio-legal atas alat-alat produksi ini tidak tanpa akibat- akibat. Telah terdapat suatu kecenderungan yang jelas pada Marx-isme Tiongkok untuk mengemukakan bahwa, begitu pola kepemilikan telah diubah, “hukum-hukum ekonomik yang obyektif,” yang bekerja dalam setiap cara produksi, juga berubah secara fundamental dalam sifatnya; mereka menjadi sosialis dalam isi. Hanya dengan mematuhi “hukum-hukum ekonomik yang obyektif” ini, hanya dengan beroperasi di dalamnya dan tidak mencampurinya, menjadi mungkin untuk menjamin perkembangan tenaga-tenaga produktif dan keberhasilan sosialisme. Sosialisme, sebenarnya, terancam apabila politik mencampuri bekerjanya hukum-hukum ini. Dengan demikian, dikemukakan bahwa sosialisme, yang didefinisikan sebagai produksi massal sosialis yang didasarkan pada kepemilikan umum,⁹¹ akan lahir melalui perkembangan tenaga-tenaga produktif. Ye Jianying melanjutkan,

Pertama-tama, *bagi sosialisme untuk menggantikan kapitalisme*, kita mesti membebaskan tenaga-tenaga produktif dan mencapai suatu peningkatan terus-menerus dari produktivitas kerja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan material dan kultural rakyat. Ini adalah tujuan fundamental dari revolusi sosialis. Begitu proletariat telah merebut kekuasaan politik di suatu negeri, dan teristimewa *setelah penegakan sistem sosialis*, adalah suatu keharusan untuk mengarahkan fokus pekerjaan pada pembangunan ekonomik, *secara aktif memperluas tenaga-tenaga produktif* dan secara berangsur-angsur memperbaiki standard hidup rakyat.⁹²

Posisi ini jelas-jelas mengandung ekonomisme maupun positivisme. Hanya melalui kemajuan teknologis dan perkembangan tenaga-tenaga produktif akan lahir sosialisme. Suatu tingkat perkembangan teknologis yang tinggi tidak dipandang sebagai suatu pra-syarat bagi sosialisme (sebagaimana dalam pandangan Marx dan Lenin); melainkan ia lebih dipandang sebagai mekanisme yang sesungguhnya melahirkan sosialisme (seperti pandangan Bogdanov dan Stalin). Dengan garis ini, maka perjuangan kelas menjadi berlebih-lebihan. Sesungguhnya, perjuangan kelas itu menjadi suatu halangan bagi perkembangan tenaga-tenaga produktif dan, dengan demikian, halangan bagi pencapaian sosialisme. Maka sangat jelas sekali, kritik Mao atas ekonomisme Stalintelah ditinggalkan sama sekali. Apabila perjuangan kelas dipandang sebagai suatu halangan bagi modernisasi sosialis, maka menjadilah perlu untuk membatasi peranan perjuangan kelas di dalam proses transisi sosialis. Stabilitas dan kesatuan politis, karenanya, menjadi ditekankan; segala sesuatu yang mengganggu stabilitas dan kesatuan ini tidak dapat ditenggang. Perjuangan kelas tidak lagi dipandang sebagai “mata-rantai yang menentukan”; karena suatu posisi seperti itu dipandang tidak sesuai bagi suatu masyarakat sosialis. Sesungguhnya, kritik kepemimpinan Tiongkok sekarang terhadap Mao teru-tama didasarkan pada yang dianggapnya “kesalahan-kesalahan teoritis dan praktis” Mao mengenai perjuangan kelas di dalam pembentukan sosial sosialis.⁹³ Setelah menyatakan bahwa perjuangan kelas tidak lagi menjadi “kontradiksi dasar” setelah dilenyapkannya kelas-kelas penghisap, *Resolusi Pleno Ke Enam* selanjutnya dengan cara sepenuhnya membatalkan tekanan atas perjuangan kelas. Ia menyatakan bahwa, sementara perjuangan kelas untuk waktu yang lama akan tetap ada “dalam batas-batas tertentu” dan bahkan mungkin menjadi semakin tajam dalam keadaan-keadaan tertentu, kebanyakan kontradiksi tidak akan “termasuk dalam lingkupan perjuangan kelas”; dan bahwa “metode-metode lain kecuali perjuangan kelas mesti digunakan bagi pemecahannya yang cocok.” Seandainya tidak begini, maka stabilitas sosial akan “terancam.”⁹⁴ Perjuangan kelas yang tertinggal adalah suatu perjuangan melawan sisa kekuatan-kekuatan burjuasi. Dalam melakukan perjuangan kelas terhadap sisa-sisa ini, “perlu memusat di sekeliling dan mengabdikan tugas pokok modernisasi.”⁹⁵ Karenanya, perjuangan kelas yang masih ada, menyatakan dirinya di

dalam peristiwa (*instance*) ekonomik.

Perjuangan kelas di masa lalu lazimnya memmanifestasikan diri secara langsung di dalam perjuangan antara yang berniat merebut kekuasaan dan yang berniat mempertahankan kekuasaan politiknya, antara yang berusaha mengambil alih dan yang berjuang menentangnya. Di masa depan, perjuangan kelas akan terutama berpusat disekitar modernisasi sosialis dan diabdikan pada modernisasi sosialis, manifestasi utamanya akan berupa perjuangan antara yang membela empat modernisasi dan yang mencoba menggerowoti pelaksanaan empat modernisasi ini.⁹⁶

Maka jelas sekali, yang politis telah diluruhkan menjadi/ke dalam yang ekonomik. Banyak dari perdebatan mengenai sifat dan jangkauan perjuangan kelas dalam masyarakat sosialis telah berlangsung dalam hubungan dengan penilaian kembali teori Mao mengenai “revolusi berkesinambungan.” Selagi istilah itu sendiri untuk sementara waktu dipertahankan, artinya telah ditafsirkan secara luas sekali. Hua Guo-feng, misalnya, mengakui keharusan suatu revolusi yang berkesinambungan di dalam super-struktur (bangunan atas) agar ia “akan bersesuaian dengan lebih baik dengan landasan ekonomik sosialis,” dan revolusi yang berkesinambungan dalam alam hubungan-hubungan produksi agar mereka “akan bersesuaian dengan lebih baik dengan tenaga-tenaga produktif yang berkembang.”⁹⁷ Ia juga mempertahankan, sekalipun sambil lalu, gagasan mengenai kekuatan-kekuatan kapitalis dan unsur-unsur burjuis yang baru timbul, dan akan adanya mereka di dalam Partai. Bahaya restorasi kapitalis tetap ada.⁹⁸ Namun, uraian Hua mengenai “revolusi berkesinambungan” lebih banyak bersumber dari gagasan Mao sebelumnya mengenai “revolusi yang tidak terputus-putus” di mana penyelesaian secara tepat atas kontradiksi di kalangan rakyat, lebih daripada perjuangan kelas, dipandang sebagai kekuatan pendorong sejarah. Dalam versi Hua mengenai “revolusi berkesinambungan,” perjuangan kelas tidak dila-hirkan secara terus-menerus sebagai akibat landasan material dari pembentukan sosial, melainkan ia lebih merupakan suatu akibat dari sisa pengaruh-pengaruh masa lalu dan kelakuan kapitalis secara individual.⁹⁹ Pandangan-pandangan Hua mengenai masalah persesuaian antara landasan ekonomik dan bangunan-atas secara tidak langsung diserang oleh Wu Jiang: “sungguh tidak dapat dipahami bahwa segera setelah pembangunan landasan ekonomiknya sendiri, bangunan-atas sosialis kita mesti, secara keseluruhan atau

sebagian besarnya, berada dalam ketidak-serasian dengan landasannya.”¹⁰⁰ Persoalannya di sini adalah lebih daripada ketidak-sepakatan mengenai derajat ketidak-serasian antara landasan ekonomik dan bangunan atasnya. Sementara komentar-komentar Wu secara khusus ditujukan terhadap “Komplotan Empat,” posisinya secara efektif menegasi/mengingkari kebutuhan yang dirasakan Hua akan revolusi besar-besaran yang berkesinambungan dalam bangunan-atas.¹⁰¹ Mungkin saja terdapat suatu kebutuhan akan “penyesuaian kembali” atau “perubahan” dalam bagian-bagian tertentu dari bangunan-atas, tetapi implikasinya adalah, bahwa “aktivitas revolusioner” terutama harus dibatasi pada yang ekonomik, khususnya pada perkembangan tenaga-tenaga produktif; karena inilah yang merupakan “faktor-faktor paling aktif dan revolusioner” yang menentukan sifat dari formasi sosial.¹⁰² Resolusi Pleno Ke Enam mengesahkan pandangan ini dan sepenuhnya menolak teori mengenai “revolusi berkesinambungan.” Ini tidak berarti bahwa tugas-tugas revolusi telah ditunaikan, juga tidak berarti bahwa tidak perlu dilangsungkan perjuangan-perjuangan revolusioner. Yang dimaksudkan adalah, bahwa kategori revolusi sosialis (yaitu, periode dari penumbangan sistem eksploitasi hingga realisasi komunisme) telah dirumuskan kembali sebagai suatu proses teratur yang dilaksanakan di dalam sistem, tidak melalui konfrontasi dan konflik kelas. Menurut pandangan ini, masalahnya bukanlah persoalan penyesuaian sistem-sistem eksploitasi dan kelas-kelas penghisap, karena itu sudah tidak ada lagi dengan transformasi hak-milik atas alat-alat produksi. Masalahnya lebih mengenai cara bagaimana meningkatkan lebih tinggi lagi tenaga-tenaga produktif yang secara otomatis akan menghasilkan penyempurnaan dan perkembangan hubungan-hubungan produksi sosialis dan bangunan-atas maupun penghapusan perbedaan-perbedaan kelas dan perbedaan-perbedaan dan ketidakadilan-ketidakadilan sosial (yang justru masih terdapat karena tidak sepadannya perkembangan tenaga-tenaga produktif).¹⁰³ Dengan demikian kemajuan teknologis dan perkembangan tenaga-tenaga produktif menjadi mekanisme yang diistimewakan dengan mana sosialisme benar-benar dicapai. Promosi produksi itu sendiri difahami sebagai suatu proses revolusioner. Garis Kongres Ke Delapan PKT, yang banyak bersumber pada Stalin, sebagian telah dipulihkan kembali, yaitu bahwa perjuangan kelas tidak merupakan kontradiksi

pokok dari masyarakat sosial; kontradiksi pokok itu lebih terletak dalam hubungan antara “tenaga-tenaga produktif yang terbelakang dan sistem sosialis yang maju.” Implikasi dari restorasi itu akan ditinjau dalam Bab Dua.

Jelas sekali, “meneruskan revolusi” telah menjadi tidak lebih daripada sebuah masalah pengembangan tenaga-tenaga produktif, masalah modernisasi dan perluasan teknologi. Politik telah menjadi tidak lebih daripada promosi produksi. Pidato Ye Jianying pada ulang tahun ke tigapuluh dari pendirian Republik Rakyat telah menegaskan hal ini,

Pada saat ini, empat modernisasi merupakan poros kehidupan politik kita. Keamanan negara, stabilitas sosial dan kehidupan material dan kultural yang lebih baik bagi rakyat kita, semuanya bergantung pada keberhasilan modernisasi, pada pertumbuhan produksi. Pekerjaan kita di semua bidang mesti berputar disekeliling dan mengabdikan modernisasi.¹⁰⁴

Hal serupa telah dibikin lebih jelas lagi dalam sebuah editorial *Renmin Ribao* lima bulan sebelumnya,

Empat modernisasi tidak akan terlaksana melalui omong kosong, kita harus dengan sungguh-sungguh menghindari omong kosong dan dengan sungguh-sungguh memberi bobot pada politik produksi, pekerjaan vokasional dan teknis. Yang berada di berbagai front harus menjaga bahwa setiap jenis pekerjaan yang akan kita lakukan sekarang mengabdikan pelaksanaan empat modernisasi dan mempunyai arti penting politis yang teramat menentukan. Dari sudut pandangan ini dapatlah dikatakan, bahwa menambang lebih banyak minyak merupakan politik dari industri petroleum, memproduksi lebih banyak batu-bara adalah politik kaum buruh tambang batu-bara, menghasilkan lebih banyak gandum adalah politik kaum tani, membela perbatasan menjadi politik para prajurit, belajar dengan rajin menjadi politik para siswa. *Satu-satunya kriterium bagi hasil-hasil edukasi politis adalah perbaikan/kemajuan yang dicapai di dalam kondisi-kondisi ekonomik (Lenin, 1921).* Kita harus teguh dalam menerima praktek sebagai satu-satunya kriterium kebenaran, dan hasil-hasil sesungguhnya dalam pekerjaan dan situasi pekerjaan sebagai ukuran-ukuran tingkat politik semua unit dan individu.¹⁰⁵

Sebagaimana dibikin sejelas-jelasnya oleh kutipan di atas, praktek ekonomik (misalnya, penambangan batu-bara, dsb.) adalah selalu praktek politis. Kita akan sependapat bahwa aktivitas ekonomik adalah politis dalam arti bahwa produksi ekonomik (bersama dengan “paduan” praktek-praktek yang disatukan sebagai “sosialis”) membantu konsolidasi suatu ekonomi sosialis. Namun, kutipan ini menjangkau lebih jauh daripada

itu dan tampaknya untuk menggerowoti, sekurang-kurangnya hingga batas tertentu – proposisi bahwa praktek ekonomik adalah selalu praktek politis.

Ini adalah karena, jika politik dari peristiwa (*instance*) ekonomik ditujukan untuk meningkatkan produksi ekonomik, maka yang politis “tampaknya,” dalam kenyataan, sama sekali ditiadakan dari peristiwa ekonomik itu. “Penampakan” ini diungkapkan oleh kenyataan bahwa kriterium yang dipakai di dalam penentuan yang disebut “aktivitas politis” dalam peristiwa ekonomik itu dinyatakan sebagai semurnya ekonomik (yaitu, untuk memperluas dan mengembangkan produktivitas). Maka itu, politik, karena aktivi-tasnya sendiri, “tampaknya” ditiadakan dari yang ekonomik. Mari kita bahas argumen ini sebagaimana ia terpapar di hadapan kita; karena penampilan-penampilan bisa menyesatkan sekali.

Dalil utama itu adalah bahwa politik “tampaknya” ditiadakan dari praktek ekonomik oleh penegasan bahwa politik adalah suatu praktek ekonomik. Dengan kata-kata lain, adalah aktivitas politis yang “tampaknya” meniadakan yang politis. Namun di sini dapat kita melihat bahwa justru tindakan peniadaan yang politis dari yang ekonomik itu sendiri adalah suatu aktivitas politis; ia sendiri adalah suatu praktek yang diungkapkan-secara-politis. Karena tindakan peniadaan yang politis itu sendiri adalah suatu praktek politis, maka dapat kita katakan, bahwa yang politis tetap berada di dalam yang ekonomik, yaitu bahwa ia mencampuri untuk menyatakan peniadaannya sendiri. Namun, praktek politis ini tidak dapat dilihat secara langsung; karena visibilitasnya tersembunyi oleh penegasannya mengenai peniadaannya sendiri. Walaupun begitu, dapat kita melihatnya sekarang, ia hadir dan aktif dalam yang ekonomik. Tetapi, penggunaan yang politis di dalam peristiwa (*instance*) ekonomik itu adalah untuk menonjolkan dan perinci obyek dari praktek seperti itu sebagai ekonomik dan, dalam pengertian ini, ia bekerja sebagai tidak lebih daripada suatu bayangan dari yang ekonomik. Tujuannya adalah mengistimewakan praktek ekonomik secara “politis” dan sebagai itu, ia bekerja sebagai suatu epifenomenon belaka dari tempat itu. Materialitas yang politis itu, karenanya, dapat dikatakabn telah sepenuhnya dipenuhi/dijenuhi oleh yang ekonomik yang

mengamankan dan memper-tahankannya. Kriteria untuk aktivitas politis menjadilah ekonomik. Ini berarti bahwa “kesadaran politis” mesti secara tidak dapat dilepaskan terkait pada produksi ekonomik karena, seperti telah kita ketahui, politik itu cuma sekedar epifenomenon dari yang ekonomik. Di sinilah terletak landasan bagi timbulnya kembali spontanisme sosial Stalin, bahwa “kesadaran politis” adalah suatu refleksi dari keadaan-keadaan ekonomik. “Pengalaman yang terorganisasi secara sosial” dalam proses kerja dipandang sebagai norma/ukuran pendirian politis seseorang; karena, apabila “kesadaran politis” itu “disimpulkan” dari peristiwa ekonomik, maka peristiwa itu mesti menjadi titik penentuannya. Dengan demikian kita kembali pada posisi Stalin dan Bogdanov, suatu posisi yang ditinggalkan oleh Mao dengan memusatkan pada gagasan mengenai eksploitasi dan perjuangan di dalam penentuan “pengalaman kerja.”

Banyak dari yang diperdebatkan dalam Marxisme Tiongkok mengenai hubungan antara politik dan ekonomi telah dengan jelas sekali menyangkut posisi Mao mengenai hal ini.¹⁰⁶ Perdebatan itu berpusat sekitar persoalan mengenai keutamaan ekonomi dan apakah politik dapat menjadi menentukan dalam keadaan-keadaan tertentu. Lin Zili dan You Lin, misalnya, telah mengemukakan bahwa, sementara politik dapat mempunyai suatu efek refleksif yang penting atas ekonomi, ia tidak dapat menentukan ekonomi. Keutamaan politik dalam keadaan apapun telah sepenuhnya disanggah.¹⁰⁷ Menghadapi posisi ini, Zhao Guoliang mengajukan suatu hubungan dialektikal antara ekonomi dan politik dan menyatakan bahwa sekalipun ekonomi merupakan faktor yang akhirnya menentukan, politik dapat, dalam keadaan-keadaan tertentu, bersifat menentukan. Politik tidak mungkin bersifat utama (ini dipandang sebagai suatu kesalahan fundamental) bahkan apabila dalam keadaan-keadaan khusus memainkan suatu peranan utama, karena ia menegaskan keutamaan mutlak dari ekonomi pada instansi/tingkat terakhir. Namun begitu, karena hubungan dialektikal di antara mereka, politik dan ekonomi saling bergantung satu sama lain, dan dalam keadaan-keadaan khusus salah satu mungkin menjadi menentukan. Zhao sangat bergantung pada Mao akan dukungan bagi posisinya yang lebih “fleksibel.” Sebagai dukungan itu ia mengutip *On Contradiction* Mao,

Sementara orang berpikir bahwa.... dalam kontradiksi antara tenaga-tenaga produktif dan hubungan-hubungan produksi, tenaga-tenaga produktif merupakan aspek pokok; dalam kontradiksi antara teori dan praktek, praktek adalah aspek pokoknya; dalam kontradiksi antara landasan ekonomik dan bangunan-atas, landasan ekonomi merupakan aspek pokok; dan tidak ada perubahan dalam posisi masing-masing. Ini adalah konsepsi materialis mekanis, bukan konsepsi materialis dialektikal. Memang benar, tenaga-tenaga produktif, praktek dan landasan ekonomik pada umumnya memainkan peranan pokok dan menentukan; siapapun yang menyangkal hal ini bukan seorang materialis. Tetapi harus juga diakui bahwa, dalam keadaan-keadaan tertentu, aspek-aspek seperti hubungan-hubungan produksi, teori dan superstruktur pada gilirannya menyatakan diri mereka dalam peranan yang pokok dan menentukan. Mana-kala tidak mungkin bagi tenaga-tenaga produktif untuk berkembang tanpa suatu perubahan dalam hubungan-hubungan produksi, maka perubahan dalam hubungan-hubungan produksi memainkan peranan yang pokok dan me-mentukan ... Manakala bangunan-atas (politik, kebudayaan, dsb.) menghalangi perkembangan landasan ekonomik, perubahan-perubahan politis dan kultural menjadi pokok dan menentukan.¹⁰⁸

Duan Ruofei dan Dai Cheng, menjawab Zhao, menyatakan bahwa maksud Mao sesungguhnya adalah, bahwa politik mempunhai suatu efek refleksif atas ekonomi, bukan suatu efek menentukan, dan bahwa terdapat suatu perbedaan esensial antara kedua istilah/pengertian itu.¹⁰⁹ Yang dikehendaki Duan dan Dai adalah, menurut Womack, suatu peniadaan (*exclusion*) *a priori* mengenai keutamaan politik dalam keadaan apapun.¹¹⁰

Sejumlah hal mesti dikemukakan di sini. Apakah posisi Mao dapat dikarakterisasi sebagai “fleksibel” atau tidak, menurut kita secara esensial tidak penad (*irrelevant*). Tentu, fleksibilitas (keutamaan yang ekonomik, tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu yang politis dapat menjadi pokok dan menentukan) itu tampaknya makin lama makin kurang nyata dengan berkembangnya kritik Mao atas ekonomisme Stalin. Diskusi sebelumnya mengfenai kritik Mao atas Stalin tidak dilakukan karena kita yakin bahwa pikiran Mao merupakan suatu kumpulan tulisan yang konsisten, yang tidak memamerkan kontradiksi ataupun perkembangan. Diskusi itu dilakukan justru karena ia dipandang sebagai suatu perkembangan yang sepenuhnya baru di dalam teori Marxis yang secara menentukan telah memutuskan hubungan dengan konsepsi terdahulu mengenai transisi sosialis dan dengan begitu merupakan alat dengan mana semua problem sosialisme dapat dipecahkan. Tidak

demikian halnya! Namun begitu, apakah posisi Mao fleksibel atau apakah “revolusi bersinambungan” dapat dianggap sebagai suatu model umum bagi transisi sosialis, hal pokoknya adalah bahwa Mao selalu memberikan kausalitas yang diistimewakan kepada yang ekonomik atau pada yang politis. Pengistimewaan seperti itu, oleh Mao ataupun oleh kepemimpinan pasca-Mao, telah menjadi mungkin justru karena epistemologi reduksionis mereka. Yang penting adalah mekanisme epistemologis yang mendasarinya, yang memungkinkan terjadinya pengistimewaan satu tempat (yang politis ataupun yang ekonomik) secara ontologis. Ini tidak berarti bahwa tidak terjadi perubahan dalam strategi-strategi transisi sosialis manakala satu tempat dan bukan tempat yang lain diistimewakan secara ontologis. Bahkan ini untuk mengatakan bahwa setiap dikotomi (pembelahan dalam dua bagian) yang mungkin ditimbulkan antara yang politis dan yang ekonomik, antara landasan dan bangunan-atas, antara tenaga-tenaga dan hubungan-hubungan produksi, pada hakekatnya adalah palsu. Semua dikotomi seperti itu bertopang atas suatu epistemologi reduksionis yang mendasarinya. Mungkin saja Mao telah memutuskan hubungan dengan posisi Stalin dan Bogdanov dengan memusatkan pada yang politis, tetapi epistemologi reduksionis yang mendasarinya tetap dipertahankan. Adalah kesetiaan terus-menerus pada epistemologi ini oleh kepemimpinan Tiongkok sekarang yang memungkinkannya untuk membalikkan Mao dan sekali lagi secara ontologis mengistimewakan yang ekonomik. Kecenderungan-kecenderungan gamblang ke arah pengistimewaan seperti itu jelas sekali dalam semua perdebatan teoritis mengenai transisi sosialis yang telah berlangsung di dalam Marxisme Tiongkok sejak tahun 1976. Perdebatan mengenai hubungan antara politik dan ekonomi memberikan suatu contoh jelas dari pengistimewaan ini dan dari kecenderungan untuk meluruhkan yang politis ke dalam yang ekonomik.

Jelas, bahwa tidak hanya yang politis yang telah menjadi suatu epifenomenon yang ekonomik; nasib serupa telah menimpa yang ideologis. Bagi kepemimpinan Tiongkok sekarang, pekerjaan ideologis telah menjadi tidak lebih daripada menghimbau rakyat akan perlunya modernisasi sosialis dan pengembangan tenaga-tenaga

produktif, mendorong rakyat untuk menerima perubahan apa saja yang diperlukan untuk merealisasi tujuan ini dan, selanjutnya, mendorong mereka untuk bekerja dengan rajin bagi realisasinya. Pekerjaan ideologis dan organisasional tidak sangsi lagi terus berlanjut; tetapi pekerjaan ini hanya untuk menjamin keberhasilan “garis politis” sekarang dan dari kebijaksanaan-kebijaksanaan dan tugas-tugas bagi realisasi empat modernisasi itu.¹¹¹ Bagi Ye Jianying pekerjaan ideologis harus “berpijak pada realita.”¹¹² Ia mengemukakan bahwa, “kita harus mulai dari keadaan obyektif dan menanggulangi problem-problem aktual yang masih belum dipecahkan karena kegagalan dalam mengemansipasikan pikiran.”¹¹³ Mengemansipasikan pikiran, bagi Ye, berarti mempelajari hukum-hukum ekonomi obyektif yang mengendalikan/menguasai pembangunan sosialis dan bertindak sesuai dengannya. Ini harus dilakukan agar seseorang dapat mempelajari “problem-problem baru yang dihadapi dalam gerak maju kita dan mencari jalan-jalan terbaik untuk mengembangkan tenaga-tenaga produktif, memajukan antusiasme rakyat akan pekerjaan dan meningkatkan standar hidup mereka; kita harus menyesuaikan kembali dan mereformasi struktur ekonomi kita, sistem manajemen kita dan metode-metode kerja kita.”¹¹⁴ Dari sini orang dapat melihat kecenderungan yang ideologis, seperti yang politis, untuk menjadi sekedar suatu epifenomenon dari yang ekonomik.

Bagian Bab ini telah mengemukakan adanya kecenderungan-kecenderunga yang mengganggu di dalam Marxisme Tiongkok pasca-1976 untuk meluruhkan tingkat-tingkat praktek pada satu tempat – yang ekonomik. Garis sekarang mengenai sifat berkurangnya/menurunnya perjuangan kelas, yang hanya dimanifestasikan dalam peristiwa (*instance*) ekonomik, dan mengenai sifat politis praktek ekonomik, menandakan derajat peleburan dari kedua peristiwa (*instance*) ini. Hal yang sama dapat dikatakan bagi peristiwa ideologis yang, menurut kepemimpinan Tiongkok sekarang, harus secara langsung mengabdikan/melayani produksi ekonomik. Sesungguhnya, mengemansipasikan pikiran hanya dapat dicapai melalui dipecahkannya problem-problem ekonomik dan dengan mematuhi “hukum-hukum ekonomi obyektif.” Dalam kata-kata Ye Jianying, pekerjaan di “semua” bidang lain berputar secara langsung di sekiling modernisasi ekonomik. Ilmu

dan teknologi terkait semakin dekat pada produksi. Ilmu dan teknologi dikarakterisasi sebagai bagian dari tenaga-tenaga produktif. Yang terlibat dalam riset ilmiah dipandang sebagai bagian dari rakyat pekerja yang secara langsung terlibat dalam proses kerja.¹¹⁵ Secara sama, perhatian akan penegakan suatu sistem legal sosialis memancar langsung dari pengurangan tekanan pada perjuangan kelas dan keharusan mempromosikan stabilitas dan persatuan. Begitulah, ia dimaksud untuk memajukan perkembangan tenaga-tenaga produktif dan untuk menjamin “ketertiban umum” dalam pekerjaan dan produksi.¹¹⁶ Jelas, terdapat kecenderungan yang sangat menonjol dalam strategi kepemimpinan Tiongkok sekarang mengenai transisi sosialis yang tampak menyambung metode analitis abstrak dari Bogdanov dan Stalin. Maka hingga di sini, kita dapat melihat kecenderungan ke arah determinisme tektologis yang pokok bagi teori Stalin mengenai tenaga-tenaga produktif. Dengan demikian kita telah mendekati pada posisi 1936 Stalin, bahwa transisi pada sosialisme telah pasti dengan syarat bahwa ekonomi telah berkembang sepenuhnya.

Bagi Stalin, industrialisasi pada pokoknya dipandang telah diselesaikan menjelang tahun 1936 dan, karenanya, semua rakyat dapat menggunakan/memanfaatkan pengalaman kerja. Dengan demikian, semua unsur masyarakat dapat menggunakan teknik-teknik maju yang tidak saja menghasilkan produktivitas lebih tinggi, melainkan juga suatu “kesadaran” sosialis yang lebih tinggi. Sebagaimana kemudian diuraikan oleh sejarah resmi Uni Sovyet, periode dari 1924 hingga 1936 telah menyaksikan perubahan-perubahan mendasar di semua bidang,

Selama periode ini hubungan kekuatan-kekuatan kelas di dalam negeri telah berubah sama sekali; suatu industri Sosialis yang baru telah diciptakan, kaum kulak telah dihancurkan, sistem pertanian kolektif telah unggul, dan kepemilikan Sosialis atas alat-alat produksi telah ditegakkan di setiap cabang ekonomi nasional sebagai landasan masyarakat Sovyet. Kemenangan Sosialisisme telah memungkinkan demokratisasi lebih lanjut dari sistem pemilihan dan diberlakukannya hak pilih langsung, sama dan umum dengan surat pemilihan rahasia.¹¹⁷

Pemilihan umum ini diperluas pada “seluruh rakyat,” karena kini “seluruh rakyat” berhak menggunakan organisasi ilmiah yang dulunya

merupakan cagar kelas buruh. Sejarah resmi itu melanjutkan,

Dengan demikian garis-garis pemisah kelas lama antara rakyat pekerja USSR dihapuskan, keeksklusivan kelas lama sedang menghilang. Kontradiksi-kontradiksi ekonomik dan politis antara kaum buruh, kaum tani dan kaum intelektual berkurang dan menjadi hilang. Landasan bagi persatuan moral dan politis masyarakat telah diciptakan.¹¹⁸

Yang telah berubah bagi Stalin antara 1924 dan 1936 adalah subyek sejarah. Ia semakin berpindah dari yang hanya kelas buruh kepada konsep “seluruh rakyat.” “Seluruh rakyat” dipandang oleh Stalin sebagai semakin diperolehnya hak menggunakan pengalaman yang diorganisasi secara sosial. Dalam periode sekarang di Tiongkok juga, konsepsi mengenai subyek semakin diperluas hingga meliputi kelompok-kelompok lain kecuali kelas buruh dan tani. Walaupun terdapat perbedaan-perbedaan besar dalam cara Stalin memperluas definisi “rakyat” pada tahun 1936 dan cara perluasan itu dilaksanakan di Tiongkok sekarang, juga terdapat kesamaan-kesamaan yang mencolok. Perkembangan tenaga-tenaga produktif dipandang oleh orang Tiongkok sebagai kekuatan penggerak sejarah. Maka itu, adalah perkembangan itulah yang pokok, tidak hanya bagi kemajuan ekonomik, tetapi juga bagi perkembangan politis sosialis. Peranan perjuangan kelas menjadi tidak pokok, karena itu tidak dipandang lagi sebagai suatu faktor tetap dan dinamik dalam kemajuan sosialis, melainkan lebih merupakan suatu praktek historis yang tidak perlu lagi. Perjuangan kelas kini dipandang sebagai kekuatan penggerak hanya dalam periode “transformasi penuh pergolakan” dari masyarakat lama pada masyarakat baru.¹¹⁹ Dalam suatu masyarakat sosialis, setelah “transformasi penuh pergolakan” ini, tekanan harus pindah dari perjuangan kelas pada perkembangan tenaga-tenaga produktif. Perjuangan kelas harus menyurut karena ia anathema (haram) bagi perkembangan tenaga-tenaga produktif. Sebaliknya, perkembangan tenaga-tenaga produktif adalah, pada gilirannya, bersifat pokok bagi transisi sosialis, tidak hanya karena ia suatu keharusan ekonomik, tetapi karena diyakini bahwa itu merupakan mekanisme aktual yang membawa pada keberhasilan penegakan sosialisme.

Dari sudut pandangan ini, semakin tinggi perkembangan tenaga-tenaga produktif, semakin “ilmiah” pula “pengalaman hidup” dari

rakyat. Seperti dinyatakan oleh Lei Zhenwu,

Kita mengetahui bahwa kemampuan manusia untuk memprak-tekkan sesuatu tidak selalu menetap pada jenjang yang sama, melainkan berkembang maju secara terus-menerus sejalan dengan gerak maju sejarah dan kemajuan-kemajuan dalam ilmu dan teknologi.¹²⁰

Bagi kepemimpinan Tiongkok sekarang, agaknya, pengetahuan berkembang sejalan dengan proses kerja yang semakin maju secara teknologis dan, dengan adanya ini, mesti berasal darinya. Yang ekonomik menjadi diistimewakan secara ontologis. Ia sekali lagi membangun suatu subyek yang mengetahui. Karena praktek merupakan sumber dari semua pengetahuan sejati, karena praktek memainkan suatu peranan promotif dalam perkembangan kognisi, karena praktek telah ditetapkan sebagai yang mengembangkan tenaga-tenaga produktif, dan karena semua jenjang praktek telah diluruhkan ke dalam yang ekonomik, maka mereka yang terlibat dalam proses produksi (yaitu mereka yang “mempunyai pengalaman kerja”) menjadi subyek-subyek yang serba-mengetahui. Karenanya, kita dapat melihat bahwa semakin berkembang proses kerja, semakin “mengetahui” pula subyek itu jadinya. Dengan adanya kecende-rungan-kecenderungan humanis pada kepemimpinan sekarang (yang diperagakan oleh diangkatnya penekanan atas [perjuangan kelas, usaha-usahanya untuk mengakhiri pembatasan “hak burjuis,” dan dipromosikannya konsep “seluruh rakyat adalah sama dihadapan hukum”), diyakini bahwa semakin tinggi tingkat tenaga-tenaga produktif, semakin besar pula hak “seluruh penduduk” pada penggunaan/pemanfaatan pengalaman ilmiah. Dengan demikian, landasan teoritis dari konstitusi Stalin tahun 1936 muncul kembali di Tiongkok pasca-Mao, di mana, dengan menggunakan kata-kata Bogdanov, “seluruh rakyat” menjadi “kolektivitas-kolektivitas.” Bagi kepemimpinan Tiongkok sekarang, “pengalaman kerja” tidak lagi “disimpulkan” dari praktek politik seperti halnya bagi Mao, melainkan dari yang ekonomik, seperti halnya bagi Stalin dan Bogdanov. Tetapi, landasan epistemologis yang mendasari posisi-posisi mereka yang berbeda itu, adalah presis landasan yang sama —sentralitas gagasan mengenai pengalaman. Mao hanya menggantikan tempat bagi penentuan pengalaman. Tetapi dengan kcara itu Mao, sekurang-kurangnya, telah mengatasi ekonomisme kdan humanisme Stalin. Yang

seperti itu tidak dapat dikatakan bagi kepemimpinan Tiongkok sekarang.

KESIMPULAN

Bab ini telah mengemukakan bahwa kampanye-kampanye politis dan teoritis yang menyatakan praktek sebagai satu-satunya kriterium kebenaran cuma sekedar alat-alat untuk menaikkan-/mengangkat yang ekonomik. Namun begitu pengangkatan ini telah difahami dan diterima, alat-alat politis dan teoritis seperti itu tidak akan diperlukan lagi. Sesungguhnya, kemerosotannya telah dipastikan oleh kenyataan bahwa mereka dapat mengistimewakan tempat-tempat praktek lainnya. Untuk saat ini, kampanye-kampanye itu adalah, dan tidak dapat merupakan lebih daripada pekerja-pekerja-dalam (*underlabourers*) bagi yang ekonomik, karena hanya tempat ini yang diistimewakan secara ontologis.

Bab ini telah mengemukakan bahwa walaupun posisi Mao berbeda secara radikal dari posisi kepemimpinan sekarang, alat-alat teoritis dan epistemologis yang sama dipakai untuk mengistimewakan suatu praktek tertentu (yaitu yang politis atau pun yang ekonomik). Dipertahankannya mekanisme-mekanisme peleburan epistemologis seperti itu, akan kita sepakati, menyambungkan Mao, Stalin, dan kepemimpinan Tiongkok sekarang pada posisi epistemologis yang sama. Jelas, kita sama sekali tidak sependapat dengan Corrigan, Ramsay dan Sayer.

Karya Corrigan, Ramsay dan Sayer, sebagaimana yang masih kita ingat, berpusat pada hubungan-hubungan produksi sebagai titik untuk menentukan sifat “problematik sosial” mereka. Mereka menghadap-hadapkan, di satu pihak, Lenin, Stalin dan kepemimpinan Sovyet (dan Tiongkok) sekarang dan, di lain pihak, Mao. Lagi pula, mereka menghadap-hadapkan, teori mengenai tenaga-tenaga produktif dan kekuasaan rakyat. Yang disebut belakangan ini mereka anggap sebagai mewakili suatu inovasi dan perkembangan penting di dalam teori Marxis yang menjadikan Mao sebagai penanggung-jawab tunggal. Kita berpendapat bahwa gagasan-gagasan mengenai kekuasaan rakyat dan kehendak rakyat dapat, dan telah sama menindas (*repressive*) dan sewenang-wenang (*arbitrary*) seperti gagasan-gagasan dan praktek-

praktek yang lebih sering dinyatakan sebagai “otoritarian.” Maka itu, kekuasaan rakyat (sebagai suatu tempat yang diistimewakan sebagaimana ia dikarakterisasikan oleh Mao, misalnya) tidak mesti lebih “sosialis” daripada yang dinamakan teori mengenai tenaga-tenaga produktif. Lagi pula, adalah gagasan mengenai kekuasaan rakyat yang menopang dan dipakai untuk membenarkan banyak dari ekseseks Revolusi Kebudayaan Tiongkok. Lagi pula, kekuasaan rakyat seperti teori mengenai tenaga-tenaga produktif, telah, dan masih digunakan untuk mengesahkan pengistimewaan *rakyat* (dan juga akibat wajarnya - penindasan yang “non-rakyat”) secara ontologis. Kekuasaan rakyat, seperti teori mengenai tenaga-tenaga produktif, bukan jaminan bagi suatu bentuk sosialisme yang demokratik.

Kita harus melihat melampaui dikotomi (keterbelah-duaan) antara tenaga-tenaga produktif dan hubungan-hubungan produksi dan meneliti landasan teoritis posisi-posisi seperti itu. Corrigan, Ramsay dan Sayer telah gagal melakukan hal ini. Sebaliknya, mereka mengemukakan bahwa konsep problematik telah ditentukan secara sosial. Dari sini mereka telah mampu menegaskan problematik Bolshevik sebagai sesuatu yang menonjolkan peranan tenaga-tenaga produktif dan yang mencakup posisi teoritis dari semua Bolshevik terkemuka. Namun, kita telah berusaha membuktikan bahwa seseorang dapat mengembalikan/memulangkan “Bolshevisme” ini pada Marx. Kecenderungan positivis ini sama sekali bukanlah kriteria yang mesti dipakai dalam memerinci suatu problematik Bolshevik. Di dalam “problematik Bolshevik” Corrigan, Ramsay dan Sayer, dapat kita melihat perbedaan-perbedaan teoritis yang penting dalam cara kecenderungan positivis ini difahami. Lenin, seperti halnya Marx, menekankan praktek teoritis sebagai suatu tempat produksi yang terpisah. Ia memahami modernisasi, sekali lagi seperti Marx, sebagai suatu prasyarat bagi sosialisme. Ia tidak mengistimewakan yang ekonomik sebagai suatu alat didaktik sebagaimana yang dila-kukan oleh Stalin dan Bogdanov. Kedua tokoh tersebut belakangan ini menggunakan pengalaman kelas buruh sebagai landasan teori-teori kognisi (*cognition* = kesadaran/pengertian) mereka. Karenanya “teori tentang tenaga-tenaga produktif” mereka mempunyai suatu status ontologis yang tidak ditemukan pada Marx maupun Lenin.

Mao, demikian telah dikemukakan, dengan menjadikan teori mengenai tenaga-tenaga produktif tidak pokok lagi, telah meninggalkan yang ekonomik sebagai tempat yang diistimewakan secara ontologis, tetapi ia mempertahankan “mekanisme bagi produksi pengetahuan berdasarkan pengistimewaan satu peristiwa (*instance*).” Yang telah dilakukan hanyalah membalikkan Stalin. Mao memindahkan tempat bagi produksi suatu subyek yang mengetahui (dari yang ekonomik pada yang politis), tetapi tidak meninggalkan/melepaskan mekanisme untuk produksinya. Ini tidak mengingkari bahwa “pergeseran” Maois ini mengakibatkan perubahan-perubahan sangat mendasar dalam konseptualisasi dan penjelasan teoritis mengenai politik maupun teori. Melainkan, ini hanya untuk menyatakan bahwa perubahan-perubahan seperti itu adalah dari “dalam” posisi epistemologis yang sama dan tidak terdapat tanda-tanda bahwa ia melepaskan diri dari situ. Kita dapat mengatakan bahwa Mao bekerja di dalam epistemologi yang sama seperti Stalin karena, secara teoritis, mereka sama-sama mengambil suatu posisi yang mengistimewakan pengalaman, yang mendudukan suatu subyek yang mengetahui dan, karenanya, memperkenankan semua praktek disimpulkan dari satu tempat tunggal. Secara teoritis mereka sama-sama menganut epistemologi empirisisme reduksionis. Medan produksi pengetahuan mungkin telah berubah dari Mao pada Stalin, tetapi mekanisme yang memberitahukan produksi ini, dan alat-alat peleburan yang menyusul sebagai suatu hasil, tidak berubah.

Adalah karena Mao terus mendukung epistemologi empiris sebagai benar-benar Marxis-Leninis sehingga epistemologinya kini dapat dipakai untuk mengesyahkan praktek-praktek yang hampir pasti tidak akan disetujuinya. Kepemimpinan Tiongkok sekarang telah mempertahankan epistemologi Mao; mengenai ini tidak perlu disangsikan. Yang telah diubah oleh kepemimpinan sekarang hanyalah medan penerapannya (dari yang politis balik pada yang ekonomik). Ini tidak mengingkari perubahan-perubahan mendasar yang timbul sebagai akibat perubahan seperti itu, ini juga bukan soal menyanggah kepadanannya (*relevance*).

Adalah status kepedanan ini yang mesti dipertanyakan. Apakah ia dapat diterima untuk menyanggah kesamaan mekanisme epistemologis dan

alat-alat dalam produksi strategi-strategi sosialis dan sebagai gantinya berfokus pada dikotomi antara determinisme ekonomik dan kekuasaan rakyat? Kita beranggapan tidak demikian halnya; karena, sebagaimana sudah kita kemukakan, dikotomi-dikotomi seperti itu bergantung pada posisi epistemologis yang mengorganisasinya dan melalui mana mereka menjadi dapat dimengerti. Tanpa suatu pengertian mengenai epistemologi ini, maka dikotomi antara kekuasaan rakyat dan determinisme ekonomi bahkan tidak dapat dikedepankan. Walaupun begitu, dengan suatu pengertian mengenai epistemologi ini, sebagaimana telah kita coba tunjukkan, pengedepanan suatu dikotomi seperti itu menjadilah meragukan.

Yang jelas-jelas tidak menyangsikan adalah sentralitas dari yang epistemologis bagi setiap wacana ilmiah mengenai transisi sosialis. Epistemologi yang memberitahu wacana-wacana ilmiah seperti itu dan adalah praktek-praktek epistemologis ahli-ahli teori sosial yang perlu diperiksa secara amat ketat dan dianggap sebagai sangat meragukan. Kita menentang praktek epistemologis dari peleburan teoritis yang tampaknya berkuasa/berdominasi di kalangan ahli-ahli teori ini. Kita menentang praktek-praktek seperti itu dalam karya Marxis, karena praktek-praktek seperti, sebagaimana kita ketahui, dapat dengan mudah beralih menjadi suatu bentuk determinisme ekonomik (yaitu, perkembangan ekonomik *per se* mengantar pada sosialisme). Sebaliknya, melalui perluruhan praktek-praktek pada suatu tempat lain (yaitu, yang politis), suatu peralihan menjadi voluntarisme juga dapat terjadi dengan mudah. Yang harus ditantang, karenanya, bukan cuma ekonomisme atau voluntarisme dari praktek-praktek seperti itu, melainkan lebih tepatnya mekanisme epistemologis yang membuahkkan praktek-praktek seperti itu. Maka itu, di sini kita tidak harus menegaskan keotonomian praktek-praktek (sedangkan pada saat yang sama tidak mengingkari antar-hubunga/keterkaitan mereka satu sama lain) itu saja, melainkan harus juga menekankan perlunya kekhususan dalam pemeriksaan praktek-praktek tertentu. Yang kita tuntut adalah suatu penolakan terhadap perlakuan epistemologis, dan suatu perangkat perhitungan yang lebih tepat, yang jauh lebih terinci, yang dimaksud untuk memeriksa praktek-praktek ini dan akibat-akibatnya dalam

konjungtur-konjungtur yang sangat terinci. Adalah dengan dalil yang bersifat sangat sementara mengenai ekhususian perhitungan dalam pikiran ini, kita yakin kaum sosialis dapat merencanakan suatu kumpulan praktek yang kemudian dapat disebut sosialis. Namun, perlu kita menekankan bahwa praktek-praktek itu tidak-dapat-direduksikan, seperti juga pekerjaan teoritis yang harus dilakukan, untuk mengartikulasikan mereka. Bukanlah tempatnya kita di sini untuk merencanakan secara terinci suatu usulan jadwal bagi transisi sosialis. Suatu pekerjaan seperti ini, namun, tidak saja perlu, melainkan juga – berdasarkan yang sudah kita kemukakan di depan– mendesak sekali. Jika sosialisme harus berlanjut dalam suatu formasi sosial tertentu, maka ia mesti sangat jelas secara teoritis dan khususnya terletak di dalam materialitas berbagai lembaga formasi sosial itu. Mengemukakan yang lain tidak saja melemahkan alternatif sosialis, tetapi juga mengancam keberadaannya sendiri.

Catatan

¹ Lihat Cutler, Hindess, Hirst dan Hussain, 1977, I, hal.211-5; Hindess, 1977, hal. 4-6; Hindess dan Hirst, 1977, hal.9-19.

² Althusser, 1979; Althusser dan Balibar, 1979.

³ Cutler, Hindess, Hirst dan Hussain, 1977, I, hal. 107-34; Hindess, 1977, hal. 196-228; Hindess dan Hirst, 1977, hal. 1-9, 27-30.

⁴ Corrigan, Ramsay dan Sayer, 1978; Corrigan, Ramsay dan Sayer, 1979.

⁵ Corrigan, Ramsay dan Sayer, 1979, hal. 62.

⁶ Ibid., hal.123.

⁷ Ibid., hal. 9.

⁸ Corrigan, Ramsay dan Sayer, 1978, hal. 102.

⁹ Ibid., hal. 166.

¹⁰ Lihat Althusser, 1979; Althusser, 1971; Althusser, 1976; Althusser dan Balibar, 1979. Untuk pemaparan dan penilaian kritis mengenai karya-karya ini, lihat Callinicos, 1976; Cutler, Hindess, Hirst dan Hussain, 1977-78; Hindess, 1977; Hindess dan Hirst, 1975; Hindess dan Hirst, 1977; Thompson, 1978; Balibar, 1978; Boyne,

71 | Bill Brugger (peny.)

1979; Castells dan de Ipola, 1976; Edgeley, 1979; Sayer, 1979; Collier, 1979; Geras, 1977; Glucksmann, 1977; Hirst, 1979(b); Neild dan Seed, 1979.

¹¹ Geras, 1977, hal. 244.

¹² Therborn, 1976, hal. 59.

¹³ Althusser dan Balibar, 1979, hal. 25-6.

¹⁴ Hindess, 1977, hal. 244, n.8.

¹⁵ Marx, (1867), Marx dan Engels, 1975, hal. 179.

¹⁶ Marx, III, 1959, hal. 817.

¹⁷ Ibid., hal. 313.

¹⁸ Marx, (1858), 1977, hal. 100-01.

¹⁹ Corrigan, Ramsay dan Sayer, 1978, hal. 16.

²⁰ Marx, (1879-80), 1972, hal. 50; sebuah terjemahan lain dalam Carver (ed.) 1975, hal. 198.

²¹ Corrigan, Ramsay dan Sayer, 1978, hal. 16-7.

²² Carver (ed.), 1975, hal. 169-70.

²³ Ibid., hal. 170.

²⁴ Marx, (1879-80), 1972, hal. 52.

²⁵ Hussain, 1972, hal. 27. Problematik Antropologi Filsafiah merujuk pada problematik Marx muda yang Feuerbachian-humanistik pada sebelum putusnya (Marx dari Feuerbach) pada tahun 1845-7. Sebuah uraian singkat mengenai ciri-ciri karaktersitik problematik ini, lihat Ibid., hal. 24.

²⁶ Marx, (1857), Marx, 1970, hal. 206.

²⁷ Marx, (1858), 1977, hal. 101.

²⁸ Ibid.

²⁹ Lecourt, dikutip dalam Macherey dan Balibar, 1978, hal. 5.

³⁰ Macherey, 1978, hal. 120.

³¹ Hindess, 1977, hal. 199-211; Hirst, 1979(a).

³² Cutler, Hindess, Hirst dan Hussain, 1977, I, hal. III.

³³ Marx. (1857), Marx, 1970, hal. 213.

³⁴ Althusser dan Balibar, 1979, hal. 65.

³⁵ Cutler, Hindess, Hirst dan Hussain, 1977, I, hal. III.

³⁶ Ibid.

³⁷ Untuk suatu kritik mengenai dogmatisme dan serba-berputarnya posisi-posisi epistemologikal yang tak terelakkan dan untuk suatu alternatif pada pelaksanaan epistemologikal, lihat Cutler, Hindess, Hirst dan Hussain, teristimewa. I; Hindess, 1977; Hindess dan Hirst, 1977.

³⁸ Lenin, (1914), CW., XXXVIII, 1972, hal. 195.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Ibid., hal. 91.

⁴¹ Ibid., hal. 168.

⁴² Ibid., hal. 170.

⁴³ Ibid., hal. 182.

⁴⁴ Ledcourt, dikutip dalam Macherey dan Balibar, 1978; untuk yang lebih luas mengenai teori refleksi dalam kesusasteraan, lihat Macherey, 1978, terist., hal. 105-35.

⁴⁵ Lenin, (1908), CW., XV, 1963, hal. 202.

⁴⁶ Tektologi didefinisikan sebagai ilmu universal mengenai organisasi kerja; ia merupakan sebuah metafor biologis.

⁴⁷ Lihat kritik Lenin mengenai hal ini, Lenin, (1908), CW., XIV, 1962, hal. 59.

⁴⁸ Bogdanov, 1923, hal. 357-8.

⁴⁹ Stalin, (1906-07) Works, I, 1952, hal. 319.

⁵⁰ Ibid., hal. 317.

⁵¹ Lenin, (1902), CW.V, 1961, hal. 386.

73 | Bill Brugger (peny.)

⁵² Lecourt, 1977, hal. 141.

⁵³ Marx, III, 1959, hal. 817.

⁵⁴ Marx, (1858), 1977, hal. 700.

⁵⁵ Cutler, Hindess, Hirst dan Hussain, 1977, I, hal. 177.

⁵⁶ Ibid., hal. 121.

⁵⁷ Bahro, 1978, hal. 125.

⁵⁸ Lenin, (1914), CW., XX, 1964, hal. 154.

⁵⁹ Lenin, (1923), CW., XXXIII, 1966, hal. 474.

⁶⁰ Stalin, (1928), Works, XI, 1954, hal. 279.

⁶¹ Bettelheim, 1976(b), hal. 68.

⁶² RMRB. dan Hongqi, PR., 29, 17 Juli 1964, hal. 11.

⁶³ Peck, 1977, hal. 12-15.

⁶⁴ Mao Zedong, (1961-62), dalam Mao, 1974, hal. 262.

⁶⁵ Mao Zedong, n.d., dalam Mao, 1974, hal. 433.

⁶⁶ Mao Zedong, (1939), SW., II, 1965, hal. 246.

⁶⁷ Mao Zedong, (1943) SW., III, 1965, hal. 119.

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ Mao Zedong, (1937), SW., I, 1965, hal. 302.

⁷⁰ Mao Zedong, (1942), SW, III, 1965, hal. 42.

⁷¹ Mao Zedong, (1937), SW., I, 1965, hal 296-7; 304-5.

⁷² Ballestrem, 1969, hal. 297-8.

⁷³ Mao Zedong, (1942), SW., III, 1965, hal.40.

⁷⁴ Mao Zedong, (1937), SW., I, 1965, hal. 300;

⁷⁵ Mao Zedong, (1937), SW., I, 1965, hal. 299.

⁷⁶ Lihat a.l. Mao Zedong, (1942), SW., III, 1965, hal. 38-9; Mao Zedong, (1956), Schram (ed.) 1974, hal. 86.

⁷⁷ Ibid., dan Starr, 1979, hal. 51-3.

⁷⁸ Mao Zedong, (1942), SW., III, 1965, hal. 42.

⁷⁹ Mao Zedong, (1937), SW., I, 1965, hal. 302.

⁸⁰ Ibid., hal. 303.

⁸¹ Mao Zedong, (1964), Mao, 1974, hal. 399.

⁸² Mao Zedong, (1963), Mao, 1971, hal. 503.

⁸³ Kesimpulan ini didukung oleh Starr, 1979, hal. 62-3; 84-5; 87.

⁸⁴ CCP.CC., 27 Juni 1981, BR., 27, 6 Juli 1981, hal. 26.

⁸⁵ Li Xiulin, Ding Yelai dan Zheng Hansheng, Zhexue Yanjiu, 10, 1978, Chinese Studies in Philosophy, 3, 1980, hal. 24.

⁸⁶ Mao Zedong, (1937), SW., I, 1965, hal. 300.

⁸⁷ Lei Zhenwu, Zhexue Yanjiu, 9, 1979, JPRS., 74922, 14 Januari 1980, hal. 27.

⁸⁸ A.l. Hal ini, dalam hubungannya dengan Mao, disiratkan oleh Starr, 1979, hal. 63.

⁸⁹ CCP.CC., 22 Desember 1978, PR., 52, 29 Desember 1978, hal. 11.

⁹⁰ CCP.CC., 27 Juni 1981, PR., 27, 6 Juli 1981, hal. 13-4.

⁹¹ Hu Qiaomu, Juli 1978, PR., 45, 10 November 1978, hal. 9.

⁹² Ye Jianying, 29 September 1979, BR., 40, 5 Oktober 1979, hal. 21;

⁹³ CCP.CC., 27 Juni 1981, BR., 27, 6 Juli 1981, hal. 20 dan 27.

⁹⁴ Ibid., hal. 37.

⁹⁵ Hua Guofeng, 18 Juni 1979, NPC., 1979, hal. 22.

⁹⁶ BR., 47, 23 November 1979, hal. 17.

⁹⁷ Hua Guofeng, 12 Agustus 1977, CCP., 1977, hal. 28-9.

75 | Bill Brugger (peny.)

⁹⁸ Ibid., hal. 32-3.

⁹⁹ Hua Guofeng, PR., 19, 6 Mei 1977, hal. 15-27; untuk sebuah analisis mengenai revolusi yang tidak terputus-putus dan revolusi yang bersinambungan; lihat Young dan Woodward, 1978.

¹⁰⁰ Wu Jiang, PR., 3, 20 Januari 1978, hal. 7.

¹⁰¹ Ibid.

¹⁰² Ibid., hal 6.

¹⁰³ CCP.CC., 27 Juni 1981, BR., 27, 6 Juli 1981, hal. 39.

¹⁰⁴ Ye Jianying, 29 September 1979, BR., 40, 5 Oktober 1979, hal. 23.

¹⁰⁵ RMRB., 11 April 1979, hal. 1. Kutipan ini dari Lenin, (1921), terdapat dalam CW., XXXIII, 1966, hal. 79.

¹⁰⁶ Untuk uraian lebih lengkap mengenai perdebatan Tiongkok dalam hubungan ini, lihat Womack, 1981.

¹⁰⁷ Lin Zili dan You Lin, *Jingji Yanjiu*, 1, 1978, *Chinese Economic Studies*, 3, 1979, hal. 87-108.

¹⁰⁸ Mao Zedong, (1937), SW., I, 1965, hal. 335-6.

¹⁰⁹ Duan Ruofei dan Dai Cheng, *Jingji Yanjiu*, 7, 1979, hal. 28-36.

¹¹⁰ Womack, 1981, hal.73.

¹¹¹ Ye Jianying, 29 September 1979, BR., 40, 5 Oktober 1979, hal. 24.

¹¹² Ibid., hal. 27.

¹¹³ Ibid..

¹¹⁴ Ibid.

¹¹⁵ Deng Xiaoping, 18 Maret 1978, PR., 12, 24 Maret 1978, hal. 10-11.

¹¹⁶ Ye Jianying, 1979, NPC., 1979, hal. 224-30.

¹¹⁷ CPSU., 1939, hal. 342.

¹¹⁸ Ibid., hal. 344.

¹¹⁹ Liu Danian, BR., 35, 1 September 1980, hal. 14-5.

¹²⁰ Lei Zhenwu, *Zhexue Yanjiu*, 9, 10\979, *JPRS.*, 74922, 14 Januari 1980, hal. 28.

BAB DUA

Ideologi PKT Sejak Sidang Pleno Ketiga

Michael Sullivan

Bab Satu menunjukkan pentingnya Sidang Pleno Ketiga dari Komite Sentral Ke XI pada tahun 1978 dalam *mengistirahatkan* teori Mao mengenai dilanjutkannya revolusi di bawah kediktaturan proletariat dan dalam “merehabilitasikan” garis Kongres Partai Ke VIII tahun 1956. Telah ditunjukkan juga asal-usul Stalinis garis itu. Pada tahun 1936, ketika menghantarkan Rancangan Konstitusi USSR pada Kongres Sovyet-sovyet Ke VIII - Luar biasa, Stalin mengemukakan bahwa,

...kemenangan lengkap sistem sosialis di semua bidang ekonomi nasional kini sudah menjadi kenyataan. Dan apakah artinya itu? Itu berarti bahwa eksploitasi atas manusia oleh manusia telah dihapuskan, dilenyapkan, sedangkan kepemilikan sosialis atas perkakas-perkakas dan alat-alat produksi telah ditegakkan sebagai landasan yang tidak tergoyahkan dari masyarakat Sovyet kita.¹

Bagi Stalin, kemenangan dalam revolusi telah dicapai dan suatu sistem sosialis telah lahir dengan berhasilnya transformasi —pada pokoknya— sistem kepemilikan perseorangan atas alat-alat produksi. Dalam suatu nada yang sama, *Resolusi mengenai Laporan Politik Komite Sentral* (yang diberikan oleh Liu Shaoqi) pada bulan September 1956 mengumumkan,

...kontradiksi antara proletariat dan burjuasi di negeri kita pada dasarnya telah dipecahkan ... Sistem eksploitasi kelas pada pokoknya telah diakhiri, dan ... sistem sosial sosialisme telah, pada pokoknya, ditegakkan di Tiongkok.²

Kesamaan-kesamaan antara posisi di atas dan posisi Stalin kurang-lebih duapuluh tahun yang lalu dengan gamblang menjelaskan mengapa PKT tetap menghormati Stalin sebagai “seorang Marxis-Leninis yang besar,” walaupun adanya “berbagai kesalahan besar”³ Stalin, setelah ia dikecam oleh Khrushchev pada Kongres Ke XX PKUS pada awal 1956. Sesungguhnya, sekalipun perpisahannya dari metode-metode Sovyet dalam hal perencanaan dan administrasi di pertengahan tahun-tahun

1950-an⁴ dan tekianan yang diberikannya pada Konggres Partai Ke Delapan mengenai “tugas-tugas revolusioner” yang tersisa (penyingkiran unsur-unsur kontra-revolusioner yang tersisa dan pembebasan Taiwan⁵ PKT tetap terikat di dalam ortodoksi Stalinis. Tiongkok telah memasuki tahap perkembangan pasca revolusioner!

Posisi di atas direhabilitasi pada akhir 1978 dan ia tetap sebagai ortodoksi resmi. Namun terdapat suatu ciri garis Konggres ke VIII lain yang direhabilitasi sesudah Pleno ke III, yang tidak lagi menjadi ortodoksi resmi. Ini mengenai isi yang diberikan pada istilah-istilah “kontradiksi dasar” (*jiben maodun*) dan “kontradiksi utama” (*zhuyao maodun*). Pada bulan September 1938, di dalam *Materialisme Dialektis dan Historis*, Stalin telah mengajukan kemenangan revolusi sosialis sebagai penyelesaian kontradiksi di dalam kapitalisme antara hubungan-hubungan produksi dan tenaga-tenaga produktif. Sosialisme dipandang sebagai “suatu hal/peristiwa di dalam mana hubungan-hubungan produksi sepenuhnya bersesuaian dengan watak tenaga-tenaga produktif.”⁶ Demikian, tugas kepemimpinan Partai selama sosialisme adalah mempromosikan kemajuan industri dan agrikultura agar “memperbaiki standar-standar material dan kultural kaum pekerja, kaum tani dan kaum intelektual.”⁷ Seperti dinyatakan dalam bab di muka, bagi Stalin daya penggerak kemajuan adalah perkembangan ekonomi di dalam “sistem” sosialis. Perumusan pihak Tiongkok tahun 1956 adalah identis (sama): kontradiksi dasar (*jiben maodun*) masyarakat-masyarakat kelas antara hubungan-hubungan produksi dan tenaga-tenaga produktif dan antara dasar dan bangunan-atas telah diselesaikan. Dengan pertimbangan ini, Resolusi mengenai Laporan Politik Konggres ke VIII memproklamasikan bahwa kontradiksi utama adalah,

Sudahlah kontradiksi antara tuntutan rakyat untuk membangun suatu negeri industrial maju, antara kebutuhan rakyat akan perkembangan ekonomikal dan kultural yang cepat dan ketidakmampuan perekonomian dan kebudayaan kita sekarang untuk memenuhi kebutuhan itu. Mengingat kenyataan bahwa suatu sistem sosialis sudah didirikan di negeri kita, *kontradiksi ini, pada hakekatnya, adalah antara sistem sosialis yang maju dan tenaga-tenaga produktif masyarakat yang terbelakang*. Tugas utama yang kini dihadapi Partai dan rakyat adalah memusatkan semua usaha pada penyelesaian kontradiksi ini....⁸

Dinyatakan seperti itu, “kontradiksi dasar” telah diteropongkan menjadi “kontradiksi utama.” Suatu kontradiksi antara “sistem” dan “tenaga-tenaga produktif” adalah pada tatanan yang sama sebagai suatu kontradiksi antara “tenaga-tenaga produktif” dan “hubungan-hubungan produksi” yang mestinya/dinyatakan sudah diselesaikan. Bagian pertama dari kutipan di atas, karenanya, mesti diartikan sebagai suatu pernyataan mengenai kontradiksi utama dan bagian kedua sebagai suatu pernyataan-kembali mengenai “kontradiksi dasar,” yang bertubrukan dengan pemikiran ortodoks. Bab ini dengan singkat akan melacak sejarah perumusan di atas setelah Kongres ke VIII. Akan dicatat bahwa perubahan-perubahan itu terjadi berdasarkan pemaknaan pada “kontradiksi dasar” dan “kontradiksi utama” itu. Ini akan mempunyai implikasi-implikasi yang sangat mendasar mengenai bagaimana tahap[-tahap perkembangan sosialis itu didemarkasikan. Akhirnya, melalui suatu analisis mengenai keputusan-keputusan sidang-sidang Pleno ke V dan ke VI dari Komite Sentral ke XI pada bulan Februari 1980 dan Juni 1981 dan dari Konstitusi Partai yang diterima pada Kongres ke XII, akan ditunjukkan bagaimana garis Kongres Partai ke VIII yang direhabilitasi itu telah dimodifikasi. Aspek pertama dari kontradiksi utama tersebut di atas dipertahankan, tetapi bagian kedua – pernyataan yang kontradiktif mengenai “kontradiksi dasar” – dilepaskan demi untuk suatu teori mengenai “sosialisme yang belum berkembang.” Ini akan menetapkan landasan diskusi mengenai sosialisme belum berkembang dalam Bab Tiga.

Dari Garis Kongres ke VIII hingga Teori mengenai Melanjutkan Revolusi.

Tidak lama setelah Kongres ke VIII, walaupun pemerkuatan pengakuan akan sumbangan-sumbangan positif dari Stalin, Mao mulai mendefinisikan kemenangan revolusi dengan pengertian berbeda. Di dalam pidatonya yang termashur dan berpengaruh kepada Sidang ke Sebelas dari Konferensi Tertinggi Negara pada bulan Februari 1957, yang berjudul *Mengenai Penyelesaian Kontradiksi-kontradiksi di Kalangan Rakyat secara Tepat*, Mao menyiratkan bahwa kemajuan selama sosialisme terjadi melalui terus-menerus timbulnya dan penyelesaian kontradiksi-kontradiksi. Ini adalah landasan dari apa yang

menjadi terkenal sebagai “teori revolusi yang tiada berhenti-henti (*buduan geming lun*).”⁹ dari Mao. Menurut Mao, didirikannya suatu sistem sosialis di tahun 1956 tidak berarti bahwa kontradiksi dasar dari masyarakat berkelas telah diselesaikan. Kontradiksi dasar antara hubungan-hubungan produksi dan tenaga-tenaga produktif dan antara dasar dan bangunan-atas, masih tetap ada. Setelah meninggalkan perumusan Stalinis mengenai kontradiksi dasar, Mao mau tidak mau mesti sampai pada suatu kesimpulan berbeda mengenai kontradiksi utama dan secara terbuka mengkritik *Resolusi atas Laporan Politik* Kongres Ke VIII. Dalam pidatonya pada Pleno ke III dari Komite Sentral ke VIII di bulan Oktober 1957, Mao berargumentasi bahwa kontradiksi utama dalam masyarakat sosialis masihlah antara proletariat dan burjuasi, antara jalan sosialis dan jalan kapitalis.¹⁰

Namun, putusnya hubungan Mao dengan ortodoksi yang diakui tidak-lah jelas sekali. Hal ini dapat diketahui jika orang membandingkan versi-versi resmi dan yang tidak resmi dari pidato Mao pada sidang Pleno Ketiga itu. Versi resminya, yang diterbitkan pada tahun 1977 di dalam jilid kelima *Selected Works of Mao Zedong*, berisikan suatu kritisisme tajam terhadap *Resolusi mengenai Laporan Politik*,

(ia) memuat suatu pasase yang berbicara tentang kontradiksi pokok antara sistem sosialis yang maju dan tenaga-tenaga produktif yang trbelakang. Perumusan ini tidak tepat!¹¹

Ini mesti dibandingkan dengan suatu versi tidak resmi yang muncul pada tahun 1969 dalam kompilasi Garda Merah *Mao Zedong Sixiang Wansui* (Hidup Pikiran Mao Zedong). Di sini, pernyataan Mao mengenai kontradiksi tersebut di atas hanya mengartikan bahwa, sekalipun Marx dan Engels tidak pernah menjelaskannya seperti itu, “itu tidak mengandung bahaya.” Perumusan mengenai kontradiksi pokok itu agaknya lebih merupakan “suatu kesalahan gaya bahasa” daripada suatu kesalahan teoritis yang besar.¹² Bab ini nanti akan kembali pada hubungan arti versi resmi yang diumumkan itu. Cukuplah jika sekarang dikatakan bahwa sekalipun orang tidak dapat mengetahui versi mana yang tepat, kedwitarian dalam pikiran Mao adalah sedemikian rupa sehingga versi yang tidak resmi itu agaknya lebih masuk akal. Kedwitarian Mao setelah Kongres Ke VIII terletak pada keyakinannya

yang tidak berubah mengenai keberadaan sosialisme sebagai suatu *sistem* sedangkan ia merasa bahwa garis Kongres Ke VIII meremehkan pentingnya kontradiksi-kontradiksi dalam masyarakat sosialis. Hal ini jelas pada versi yang direvisi dari pidatonya *Correct Handling.*, yang muncul beberapa bulan sebelum sidang Pleno Ke III,

Kemenangan pasti perjuangan kita tidak berarti bahwa kontradiksi-kontradiksi sudah tidak ada lagi dalam masyarakat kita. Membayangkan bahwa itu tidak ada “adalah suatu ide pandir yang bertentangan dengan realitas.”¹³

Tampaknya, Mao enggan mengesampingkan Kongres Ke VIII karena di situ telah diproklamasikan kemenangan sosialisme. Ia tidak mau mengge-rowoti/melemahkan yang telah diterima sebagai suatu titik balik historis yang penting. Namun begitu, tekanan barunya pada kontradiksi-kontradiksi membawanya pada kesimpulan-kesimpulan yang bertolak belakang/secara diametrisal berlawanan dengan garis Kongres Ke VIII. Hal ini dengan jelas dapat dilihat dalam argumen-argumennya yang mendukung Lompatan Jauh Ke Depan. “Bentuk” proses selama sosialisme, demikian dikatakan Mao pada waktu itu, adalah “seperti gelombang” karena tiada henti-hentinya timbul dan dipecahkannya kontradiksi-kontradiksi menentukan ketidakeimbangan dan ketimpangan dalam ekonomi. Lagi pula, karena kontradiksi sering mengambil bentuk perjuangan kelas, maka faktor-faktor politis, sosial dan ideologis menjadi sama pentingnya dalam perkembangan ekonomik seperti diseimbangkannya masukan dan keluaran (inputs and outputs) yang diisyaratkan oleh perumusan sederhana Kongres Ke VIII.¹⁴ Mao masih belum membalikkan hubungan antara yang ekonomik dan yang politis yang didiskusikan dalam Bab Satu. Tetapi ia telah meninggalkan posisi Stalinis yang telah membawa banyak pemimpin lainnya dalam PKT pada kesimpulan-kesimpulan yang sangat berbeda-beda mengenai kontradiksi, kemajuan dan perkembangan ekonomik. Kedwitarian pikiran Mao antara penegasan Stalinisnya tentang adanya suatu “sistem” sosialis dan penolakannya yang tidak-Stalinis terhadap determinisme ekonomik yang berpandangan linear mengenai kemajuan, bertahan terus selama Lompatan Jauh Ke Depan. Namun, keruntuhan Lompatan Jauh Ke Depan dan bertumbuhnya

81 | Bill Brugger (peny.)

pertentangan Sino-Sovyet, memaksa Mao memikirkan kembali posisinya. Mao mulai dengan serius menyangsikan apakah suatu *sistem* sosialis benar-benar telah menjadi kenyataan pada tahun 1956 dan apakah keberhasilan transformasi sistem kepemilikan perseorangan atas alat-alat produksi menandakan berakhirnya transformasi revolusioner. Penilaian kembali Mao atas sifat kontradiksi-kontradiksi dasar dan pokok setelah Kongres Ke VIII mulai mempunyai suatu makna baru. Ia mulai berbicara tentang perlunya “melanjutkan revolusi.” Bab Satu telah melacak evolusi pikiran Mao pada awal tahun-tahun 1960-an dan telah menunjukkan pentingnya *Reading Notes* Mao mengenai buku teks Sovyet *Ekonomi Politik*. Dalam kritisismenya atas nasakah itu, Mao menyatakan bahwa nasakah itu,

... tidak memulai dari kontradiksi-kontradiksi dalam studinya mengenai ekonomi sosialis. Sebenarnya nasakah itu tidak mengakui keumuman (universalitas) kontradiksi-kontradiksi, atau kenyataan bahwa kontradiksi-kontradiksi sosial merupakan kekuatan penggerak dari perkembangan sosial.¹⁵

Langkah Mao yang menentukan, yang ditempuh pada tahun 1962, adalah pengakuannya bahwa di antara kontradiksi-kontradiksi yang dilahirkan oleh masyarakat sosialis adalah kontradiksi-kontradiksi kelas. Dengan demikian kontradiksi dasar antara hubungan-hubungan produksi dan tenaga-tenaga produktif mendapat suatu makna baru; kontradiksi dasar menentukan perlunya transformasi revolusioner yang berkesinambungan. Hal ini dibikin jelas sekali dalam *Talk at an Enlarged Central Work Conference* Mao pada Januari 1962, di mana ia mengemukakan bahwa,

... dalam masyarakat sosialis unsur-unsur burjuis baru mungkin masih dihasilkan. Selama seluruh tahap sosialis masih terdapat kelas-kelas dan perjuangan kelas, dan perjuangan kelas ini adalah suatu perkara berlarut-larut, kompleks, bahkan kadang-kadang garang.¹⁶

Nadanya bahkan lebih keras lagi dalam pidato Mao pada sidang Pleno Ke X dari Komite Sentral Ke VIII pada bulan September tahun itu,

Kita mesti mengakui adanya suatu perjuangan kelas melawan kelas, dan mengakui kemungkinan restorasi kelas-kelas reaksioner ... Suatu negeri seperti negeri kita masih dapat bergeser pada kebalikannya ... Aku menganggap oportunisme sayap-kanan di Tiongkok mesti diberi nama baru: ia mesti disebut revisionisme Tiongkok.¹⁷

Mendasari klaim-klaim ini adalah suatu definisi sosialisme yang berbeda dari perumusan Kongres Ke VIII ataupun teori berikutnya mengenai revolusi yang tidak terputus. Sosialisme bukan suatu *sistem* yang lahir ketika kepemilikan perseorangan atas alat-alat produksi ditransformasikan. Transformasi itu hanyalah langkah pertama yang diharuskan dalam suatu proses yang berkepanjangan dalam menegasi hubungan-hubungan produksi kapitalis. Lebih dari-pada suatu sistem, sosialisme adalah “proses” di mana hubungan-hubungan kapitalis itu dinegasikan. Lagi pula, hubungan-hubungan kapitalis secara tetap direproduksi selama proses negasi mereka; ini menimbulkan perjuangan kelas. Perjuangan kelas yang ditimbulkan oleh masyarakat sosialis sendiri kini dianggap sebagai kon-tradiksi pokok. Penyelesaiannya bergantung pada kepemimpinan sekarang yang tepat; jika tidak, maka “revisionisme” atau kemunduran akan terjadi. Eksplorasi teoritis Mao tidak secara utuh/lengkap diungkapkan pada awal 1960-an, sekalipun garis-garis besarnya telah muncul dalam polemik-polemik resmi Tiongkok dengan Uni Sovyet menjelang pecahnya Revolusi Kebudayaan. Sebagaimana ditunjukkan Bab sebelumnya, banyak dari ide-ide itu menjadi sebagian dari apa yang dikenal dalam Revolusi Kebudayaan sebagai teori Mao mengenai “dilanjutkannya revolusi (*jixu geming lun*) di bawah kediktaturan proletariat.” “Teori” ini diterima sebagai ideologi resmi PKT pada Kongres Ke IX pada tahun 1969 dan dipertegas lagi pada Kongres Ke X pada tahun 1973.¹⁸ Ia juga memberikan titik pangkal bagi teori-teori mengenai transisi yang diselidiki selama pertengahan 1970-an oleh anggota-anggota dari yang dinamakan “Komplotan Empat” dan *aliran ekonomi politik Shanghai* (Shanghai School of Political Economy).¹⁹

Restu resmi bagi teori pelanjutan revolusi menghasilkan kriti-sisme dukungan bagi perumusan-perumusan Kongres Ke VIII selama bagian besar 1970-an. Tetapi suatu hal penting seringkali diabaikan. Teori mengenai pelanjutan revolusi menimbulkan kritisisme yang sifatnya secara kualitatif berbeda dengan yang ditimbulkan oleh teori mengenai revolusi yang tidak terputus-putus, sekalipun asal-usul kedua-duanya terletak pada penekanan Mao pada timbulnya kontradiksi-kontradiksi secara tiada henti-hentinya setelah hubungan-hubungan kepemilikan

telah ditransformasi. Sebagaimana masih diingat, teori mengenai revolusi yang tidak terputus-putus, tetap membe-narkan gagasan mengenai sosialisme sebagai suatu “sistem.” Teori yang tersebut belakangan, sebaliknya, memandang sosialisme sebagai suatu “proses” yang secara potensial bisa berbalik, yang memerlukan aksi revolusioner terus-menerus – aksi yang jauh melampaui “penyelesaian kontradiksi-kontradiksi secara tepat.” Pengikut-pengikut pandangan-pandangan Mao mengenai revolusi yang tidak terputus-putus hanya mengklaim bahwa garis Kongres Partai Ke VIII adalah tidak dialektis dan karenanya garis itu salah. Pengikut-pengikut pandangan-pandangan Mao berikutnya mengenai revolusi yang berkesinambungan, sebaliknya, cenderung memandang garis Kongres Ke VIII sebagai suatu pernyataan ideologis dari mereka yang mencari kemunduran. Dalam nada itu telah dikemukakan, bahwa kontradiksi antara suatu sistem sosialis yang maju dan tenaga-tenaga produktif yang terbelakang adalah “secara teoritis tidak berdasar.” Lagipula,

...pembuatan (pembalsuan = fabrication) *kontradiksi utamaini* adalah untuk menciptakan suatu *dasar* bagi kepalsuan mereka mengenai *padamnya perjuangan kelas* untuk menegasi tesis Marxis-Leninis Ketua Mao yang ilmiah bahwa kontradiksi pokok di Tiongkok adalah *konfrontasi antara kelas pekerja dan burjuasi*, mengingkari adanya kontradiksi-kontradiksi, kelas-kelas dan perjuangan kelas dalam masyarakat sosialis, menentang pelanjutan revolusi di bawah kediktaturan proletariat, menumbangkan kediktaturan proletariat dan memulihkan kapitalisme.²⁰

Sekalipun orang tergoda untuk serta merta mengabaikan gaya kritisisme ini sebagai hanya “slogan-slogan kosong” yang tipikal dari Revolusi Kebudayaan, orang mesti mengakui arti penting simbolik yang luar biasa, sebagai suatu contoh negatif, yang dicapai oleh Kongres Partai Ke VIII, begitu teori mengenai “pelanjutan revolusi” telah diterima sebagai kebijaksanaan resmi. Orang menduga bahwa pengikut-pengikut Revolusi Kebudayaan, yang sadar akan pemutusan hubungan mereka dengan ortodoksi Stalinis maupun dari posisi Mao sendiri pada akhir tahun-tahun 1950-an, terus menerus mencemaskan suatu serangan-balasan ideologis atas nama garis Kongres Ke VIII. Mereka menyadari bahwa mereka bermain di atas lapisan es ideologis yang tipis. Mungkin sekali kekhawatiran-kekhawatiran seperti itu yang pada buntut pergolakan akhir tahun-tahun 1960-an, mengakibatkan setiap

penyimpangan dicoreng dengan sapuan “garis Kongres Ke VIII.” Demikian, Zhou Enlai (dipuji dewasa ini sebagai pengikut realistik garis Kongres Ke VIII) memberitahukan Kongres Ke X pada tahun 1973, bahwa Lin Biao dan Chen Boda (dicaci dewasa ini sebagai penentang-penentang garis Kongres Ke VIII) telah berusaha menegasi “pelanjutan revolusi” pada Kongres Ke IX (1969) demi untuk mempromosikan produksi. Ini hanya,

... suatu versi dari sampah revisionis itu-itu juga yang diperbarui dalam keadaan-keadaan baru, yang diselundupkan oleh Liu Shaoqi dan Chen Boda ke dalam resolusi Kongres Ke VIII, yang menegaskan bahwa kontradiksi utama di negeri kita bukanlah kon-tradiksi antara proletariat dan burjuasi, melainkan adalah *antara sistem sosialis yang maju dan tenaga-tenaga produktif masyarakat yang terbelakang*.²¹

Orang mungkin saja tidak sepenuhnya menerima gagasan bahwa telah terjadi perbenturan pada Kongres Ke VIII untuk menyimpangkan analisis Mao mengenai kontradiksi-kontradiksi; sesungguhnya, Mao menolak suatu tipe kritisisme seperti itu selama Revolusi Kebudayaan.²² Namun penting sekali diperhatikan arti penting simbolik dari garis Kongres Ke VIII itu selama tahun-tahun 1970-an. Juga penting sekali diingat bahwa pengikut-pengikut teori Mao mengenai revolusi yang tidak terputus-putus maupun revolusi yang berkesinambungan adalah bertentangan dengan garis Kongres Ke VIII. Maka itu mungkin sekali bahwa beberapa pemimpin telah tetap bersikap kritis sekali terhadap garis itu namun belum tentu mendukung “Komplotan Empat” atau “aliran Shanghai.” Barangkali kutipan di atas dari Zhou Enlai dapat difahami dalam pengertian itu. Pertimbangkan pula, sejenak, rencana programatik bagi modernisasi industri, pertanian, ilmu dan teknologi serta pertahanan nasional (empat modernisasi) yang diajukan oleh Dewan Negara di bawah kepemimpinan *de facto* Deng Xiaoping pada tahun 1975. “Program Umum untuk Pekerjaan Seluruh Partai dan Seluruh Rakyat” telah dikritik oleh “Komplotan Empat” pada tahun 1976 sebagai salah satu dari “tiga rumput beracun” Deng dan dipuji pada tahun 1977, setelah dihancurkannya “Komplotan Empat,” sebagai suatu “bunga harum.”²³ Dokumen ini, tentu saja, bersikap kritis sekali terhadap kebijakan-kebijaksanaan yang berkaitan dengan “Komplotan Empat” tetapi dengan sangat berhati-hati menjauhkan diri dari perumusan-perumusabn

Kongres Ke VIII,

Dengan mengikuti teori Mao, kita mengkritik teori mengenai tenaga-tenaga produktif yang dijabakan oleh penipu-penipu politik seperti Liu Shaoqi. Inti kepalsuan mereka terletak pada pernyataan mereka bahwa setelah selesainya revolusi sosialis dalam kepemilikan atas alat-alat produksi, maka kontradiksi pokok di dalam negeri tidak lagi antara proletariat dan burjuasi, atau antara sosialisme dan kapitalisme, melainkan adalah antara hubungan-hubungan produksi yang maju dan tenaga-tenaga produktif yang terbelakang. Mengkritik teori mengenai tenaga-tenaga produktif adalah sepenuhnya benar dan merupakan keharusan. Kita harus mengkritiknya sekarang, dan terus melakukan itu di masa depan.²⁴

Seorang komentator, Kenneth Lieberthal, menjelaskan serangan ini dalam hubungan dengan perhatian Deng untuk menghiasi dokumen itu dengan bahasa Kebudayaan Revolusioner dengan tujuan meningkatkan kehormatan politisnya.²⁵ Ini mungkin saja begitu; tetapi terdapat alasan-alasan kuat untuk menilai kritisisme itu sebagaimana adanya. Terdapat perbedaan-perbedaan penting antara perumusan-perumusan Kongres ke VIII dan teori dibalik rencana-rencana tahun 1973 mengenai pelaksanaan empat modernisasi. Perbedaan-perbedaan itu mendapatkan pengungkapan konkretnya selama dua tahun pertama setelah wafatnya Mao (1976-78). Bilamana seseorang memperhatikan perkembangan-perkembangan ideo-logikal di Tiongkok dalam periode segera setelah wafatnya Mao, maka haruslah diingat bahwa teori-teori mengenai revolusi yang tidak terputus-putus dan revolusi yang berkesinambungan menyaji-kan kritisisme-kritisisme yang berbeda-beda mengenai garis Kongres Partai Ke VIII. Pada bulan Desember 1976, Ketua baru Partai, Hua Guofeng, tampaknya tidak saja menolak argumen-argumen “Komplotan Empat,” tetapi juga menolak garis Kongres Partai Ke VIII. Yang dimaksudkan belakangan ini dinyatakan secara tidak langsung dalam kritisismenya mengenai ortodoksi Stalinis.

Stalin,

... tidak melihat pada masyarakat sosialis dari suatu pandangan materialis dialektis tentang kesatuan pertentangan-pertentangan (unity of opposites), melainkan memandangnya sebagai suatu keseluruhan yang utuh (integrated) yang di dalamnya hanya ada identitas dan tidak ada kontradiksi-kontradiksi.

Selama akhir tahun-tahun 1950-an, menurut Hua, Mao “secara fundamental menegaskan pandangan metafisis yang menyatakan bahwa kontradiksi-kontradiksi tidak ada di dalam masyarakat sosialis dan tidak terdapat lagi kebutuhan untuk berevolusi.”²⁷ Hua menekankan pentingnya argumen-argumen Mao bahwa kontradiksi dasar dari masyarakat sosialis adalah antara hubungan-hubungan produksi dan tenaga-tenaga produktif dan antara dasar (basis) dan superstruktur dan bahwa kontradiksi antara proletariat dan burjuasi dan antara jalan sosialis dan jalan kapitalis adalah kontradiksi pokok dalam masyarakat sosialis.²⁸ Liu Shaoqi dan Chen Boda, sebaliknya,

... mengatakan bahwa burjuasi telah dilenyapkan dan persoalan mengenai yang mana akan menang, sosialisme atau kapitalisme, sudah diselesaikan. Mereka menyebarkan teori mengenai padamnya perjuangan kelas justru dengan tujuan untuk mencoret revolusi sosialis.²⁹

Argumen-argumen serupa telah dikemukakan pada Kongres Ke XI pada bulan Agustus 1977, yang berusaha mengonsolidasikan kepemimpinan Hua Guofeng dan pada Sidang Pertama Kongres Rakyat Nasional Ke V pada bulan Februari 1978.³⁰ Tujuan Hua yang gamblang adalah untuk melaksanakan “empat modernisasi” di dalam kerangka “melanjutkan revolusi.” Ini sebenarnya bukan teori yang akan diakui oleh Mao setelah tahun 1962. “Teori” itu, tentu saja, telah dibersihkan dari ide-ide Mao zaman itu di bawah rubrik/dengan judul pelenyapan pengaruh “Komplotan Empat.” Yang diberlakukan sebagai “revolusi berkesinambungan” adalah yang dulu disebut “revolusi yang tidak terputus-putus” dan ide-ide Mao dari akhir tahun-tahun 1950-an dijadikan pengilhamannya. Tetapi haruslah ditekankan di sini: sekalipun teori ini sangat berbeda dari teori mengenai “revolusi berkesinambungan” yang dilukiskan di muka, ia tetap bersikap kritis terhadap garis Kongres Ke VIII. Perkembangan-perkembangan tahun-tahun 1976-78 menggaris-bawahi kenyataan bahwa permusuhan terhadap garis Kongres Ke VIII mungkin tidak hanya datang dari penyokong-penyokong (penganjur-penganjur) dan pewaris-pewaris (yang diuntungkan) Revolusi Kebudayaan, melainkan juga dari banyak lainnya yang tidak terkenal atau diketahui sebagai pengikut-pengikutnya — termasuk musuh-musuh bebuyutan “Komplotan Empat.” Di sini kita melihat suatu kesinambungan pada tahun-tahun 1977-78 dengan saran-

saran dalam *Program Umum* tahun 1975. Dengan demikian kita dapat memahami ungkapan-ungkapan yang tidak mendua-arti dari versi pidato Mao bulan Oktober 1957 yang muncul dalam naskah resmi *Selected Works* Mao yang diterbitkan pada tahun 1977 dan yang dijadikan rujukan pada awal Bab ini. Suasana waktu itu mungkin juga dapat menjelaskan mengapa versi resmi itu diberi judul *Jadilah Aktivistis dalam mempromosikan Revolusi*. Selama dua tahun, kepemimpinan pasca-Mao sangat menekankan pengembangan suatu posisi ideologiokal yang berbeda dari posisi “Komplotan Empat” maupun garis Kongres Ke VIII. Lompatan *semu* jauh ke depan pada tahun 1978 mesti difahami dalam hubungan pengertian suatu versi “revolusi yang tidak terputus-putus” dalam mempromosikan “empat modernisasi.” Sekarang kita mengetahui bahwa keabsahan kedudukan Hua Guofeng sebagai ketua didasarkan pada perumusan ini dan bahwa, bahkan ketika “Komplotan Empat: sedang ditangkapi, sejumlah anggota kepemimpinan PKT menyarankan perubahan-perubahan yang lebih jauh jangkauannya daripada yang ditempuh oleh Hua.³¹ Menjelang tahun 1978, orang-orang ini sedang naik daun dan dapat menuntut keabsahan/pengakuan sementara lompatan-semu itu terjerembab dalam kesulitan-kesulitan. Menjelang tahun 1978, semakin banyak pemimpin kian merasakan bahwa sekalipun adanya kampanye yang luas-jangkauannya terhadap “Kelompok Empat; banyak dari perubahan-perubahan itu cuma bersifat kosmetik. Kembali pada “revolusi yang tidak terputus-putus,” dalam kenyataan kalau bukan-nya selalu dalam nama belaka, telah memulihkan kembali ide mengenai suatu *sistem* sosialis. Langkah berikutnya adalah mendefinisikan kembali kontradiksi pokok itu. Persiapan telah dilakukan bagi suatu penilaian kembali garis Kongres Ke VIII. Pada bulan Juni tahun 1978, Deng Xiaoping mengemukakan bahwa “titik pangkal dan hal fundamental” dari Pikiran Mao Zedong bukanlah teori mengenai pelanjutan revolusi melainkan “mencari kebenaran dari fakta.” Praktek adalah “satu-satunya kriterium kebenaran.”³² Tetapi, apakah praktek itu? Praktek menjadilah pencapaian hasil- hasil yang diharapkan – suatu gagasan yang lebih pragmatis daripada Marxis. Demikian, karena suatu sistem sosialis telah didirikan pada tahun 1956, maka kini mungkinlah untuk merencanakan perkembangan sosialis. Praktek ada dalam produksi ekonomik yang nyata dan tidak dalam membuat revolusi.

Seperti yang dikatakannya oleh Deng, apakah garis Partai itu kondusif (mendatangkan hasil) bagi perkembangan tenaga-tenaga produktif....” adalah satu-satunya penengah/arbitrer (hakim, penentu) mengenai ketepatan garis ini.”³³ Hua pasti tidak akan menyangkal bahwa adalah penting sekali untuk mengembangkan tenaga-tenaga produktif dan, seperti sudah ditunjukkan, telah sampai pada pemahaman pentingnya pelak-sanaan itu di dalam suatu “sistem sosialis”; tetapi ide pengembangan tenaga-tenaga produktif sebagai “satu-satunya” arbitrer (hakim, penentu) mengenai ketepatannya adalah terlalu jauh untuk dapat diterima. Dalam media resmi, kritisisme atas kegagalan Stalin dalam memahami kontradiksi-kontradiksi sebagai kekuatan pendorong kemajuan, berlangsung terus.³⁴

Sejarahwan Partai yang veteran dan ilmuwan sosial Hu Qiaomu mendukung pandangan-pandangan Deng dalam suatu pidato yang amat penting pada Dewan Negara pada bulan Juli 1978. Di sini Hu mengembalikannya argumen lama Stalinis bahwa tugas kepemimpinan adalah menjamin/memastikan bahwa pekerjaan ekonomik berjalan sesuai dengan “hukum-hukum ekonomik obyektif.” Sejak pendirian suatu sistem sosialis telah menyelesaikan/memecahkan problem-problem politis yang terpenting, maka problem-problem yang masih tersisa adalah ilmiah sifatnya; bagaimana caranya yang terbaik untuk menjalankan perekonomian.³⁵ Adalah kepatuhan pada hukum-hukum ekonomik obyektif yang akan menyusun/menentukan suatu kerangka kerja bagi kebijaksanaan ekonomik yang tepat, bukan teori mengenai pelanjutan revolusi. Dalam kenyataannya, pidato Hu merupakan suatu kritisisme langsung atas rencana-rencana bagi lompatan-semu yang diumumkan Hua banyak pembangkangan tambahan di bawah permukaan dan terjadilah konfrontasi. Kegentingannya meledak pada suatu Konferensi Kerja pada bulan November 1978 dan, tentu saja, pada sidang Pleno Ke III yang termashur itu. Perjuangan kelas yang bergolak secara besar-besaran kini dinyatakan, sekali lagi (seperti pada tahun 1957), telah berakhir.³⁶ Fokus Partai secara tegas berpindah/beralih dari revolusi kepada modernisasi dan dalam segala hal –kecuali dalam nama–sidang Pleno itu menghid-upkan kembali perumusan Kongres Partai Ke VIII.

Penilaian Kembali Garis Kongres Ke VIII: Kucingnya Berubah Warna

Pada tahun-tahun 1970-an, Deng Xiaoping telah dikritik karena ucapannya bahwa tidaklah penting apakah seekor kucing itu berwarna putih atau hitam selama ia menangkap tikus. Setelah sidang Pleno Ke III “menangkap tikus” –yaitu mencapai hasil-hasil ekonomik– menjadi acara/perintah harian. Namun, selagi penyesuaian- penyesuaian kembali dibuat atas strategi ekonomik pada Sidang Kedua Kongres Rakyat Nasional Ke V pada bulan Juni 1979 dan rencana-rencana baru diresmikan pada Sidang Ketiga pada bulan Agustus-September 1980,³⁷ perhatian besar masih diberikan pada warna kucing itu. Pada bulan Maret 1979, Deng Xiaoping dalam sebuah pidato penting, dengan berhati-hati menegaskan, bahwa selama “tahap baru” sosialisme yang dikumandangkan oleh sidang Pleno ke III, modernisasi ekonomik mesti terus dibimbing oleh empat azas yang dihormati sepanjang zaman: kesetiaan pada jalan sosialis, kediktaturan proletariat, kepemimpinan Partai Komunis dan Marxisme-Leninisme Pikiran Mao Zedong.³⁸ Jelas bahwa Deng berusaha menangkalkan kritisisme dari dua arah berbeda. Di satu pihak, ia harus menghadapi ketidak-puasan kepemimpinan PKT dan sistem sosialis yang diungkapkan dalam Gerakan Dinding Demokrasi. Setelah mendorong gerakan itu selama rapat-rapat yang menuju pada sidang Pleno Ke III pada tahun 1979, Deng kini menegaskan bahwa kritisisme akan ditenggang selama itu tidak melanggar ke empat azas di atas. Untuk memberi bobot mengenai hal ini, pemerintah- pemerintah dikeluarkan pada 29 Maret 1979 bagi penangkapan Wei Jinsheng, pembuat sebuah “poster berhuruf besar” pada 5 Desember 1978 berjudul *Demokrasi adalah Modernisasi Kelima*.³⁹ Di lain pihak, Deng mesti menghadapi anggota-anggota Partai yang menganggap resolusi-resolusi sidang Pleno Ke III sebagai suatu pergeseran ke kanan yang berlebihan (eksesif).⁴⁰ Dalam menempuh suatu jalan tengah, Deng mengambil jalan perumusan-perumusan yang dihormati sepanjang zaman. Namun isi perumusan-perumusan itu telah mengalami perubahan yang sangat besar. Kita sudah melihat bagaimana Pikiran Mao Zedong dibelokkan ke suatu arah pragmatis dengan “berkedok mencari kebenaran dari fakta.” Kita juga telah melihat bagaimana kepatuhan pada kepemimpinan PKT

telah dirumuskan kembali dalam pengertian modernisasi ekonomik menggantikan pelanjutan revolusi. Sedangkan yang mengenai kediktaturan proletariat, ini kini dipandang identis dengan perumusan lama “kediktaturan demokrasi rakyat,” sebuah perumusan yang lebih memberi hasil pada penegakan suatu sistem legal sosialis di mana hak-hak lebih dilimpahkan pada “rakyat” daripada bersi-fat khusus-kelas dan lebih memberi hasil pada bentuk-bentuk demokrasi perwakilan, di dalam mana semua golongan rakyat yang tidak-diharamkan mempunyai haknya.⁴¹ Adalah azas yang satu lagi – “kesetiaan pada jalan sosialis” yang memberikan konteks teoritis menyeluruh bagi semua perubahan lainnya dalam ideologi PKT. Arti penting simbolik garis Kongres Ke VIII sebagai suatu contoh negatif membuatnya sulit untuk direhabilitasi. Sidang Pleno Ke III telah menghukum keputusan-keputusan Kongres Ke VIII secara umum, namun pertimbangan-pertimbangan mengenai perpindahan tekanan pada sidang Pleno Ke III tidak melunakkan dampak sebuah karangan dalam edisi *Lishi Yanjiu* (Riset Historis) bulan April 1979. Karangan itu menunjukkan bahwa analisis yang dibuat pada Kongres Ke VIII adalah ilmiah dan sesuai dengan realitas obyektif keadaan Tiongkok. Kontradiksi pokok antara proletariat dan burjuasi memang secara dasar telah diselesaikan dalam pengertian kekuasaan politis dan kepemilikan.⁴² Sidang Pleno Ke III dipandang sebagai suatu penerusan dan promosi jiwa Kongres Ke VIII; lagi pula, “tuduhan-tuduhan palsu” yang diajukan terhadapnya sudah “ditelanjangi sebagaimana adanya.” Diharapkan bahwa “kejayaan Kongres Ke VIII” akan bersinar dengan semakin cemerlang.⁴³ Dalam semangat yang sama sebuah karangan dalam *Guangming Ribao* menunjukkan pada bulan Agustus 1979, bahwa *Report on the Draft Constitution of the USSR* Stalin tahun 1936 telah menarik kesimpulan yang tepat. Kesalahan Stalin bukannya karena untuk mengecilkan arti-pentingnya perjuangan kelas, sebagaimana ditekankan oleh Hua Guofeng pada tahun 1977, melainkan lebih karena keyakinannya bahwa perjuangan kelas telah menjadi lebih tajam.⁴⁴ Sesungguhnya, semangat penilaian kembali telah diberi dukungan resmi secara berapi-api oleh Ye Jianying dalam pidatonya pada bulan September 1979 menjelang ulah ke tigapuluh Republik Rakyat.⁴⁵ Maka tampak bahwa perumusan-perumusan Stalinis tahun 1956 telah sepenuhnya dihidupkan kembali. Saich, salah seorang dari

sedikit sarjana barat yang mengomentari arti-pentingnya pemulihan ini, menunjukkan bahwa,

... *nama baik* Kongres Partai Ke VIII (1956) telah dipulihkan. Kongres itu merupakan suatu peristiwa simbolik bagi kepemimpinan seketrang karena ia ... mendapatkan gemanya pada kepemimpinan sekarang. Karena itu, isi dasar dari dokumen-dokumen yang telah diterima oleh Kongres dipandang masih penad (of relevance).⁴⁶

Namun masalah tidaklah sesederhana itu! Persetujuan bahwa kontradiksi dasar telah diselesaikan dan bahwa kontradiksi pokok tidak lagi merupakan masalah kelas tidak mesti menyatakan penerimaan secara tidak langsung bahwa kontradiksi pokok adalah “antara sistem sosialis yang maju dan tenaga-tenaga produktif yang terbelakang.” Pada awal penilaian kembali itu, *Lishi Yanjiu* menyimak bahwa sistem sosialis yang ditegakkan pada tahun 1956 “tidak dapat dianggap lain kecuali maju,” namun Kongres Ke VIII “mungkin telah tidak teliti dan tepat” dalam menetapkan/merumuskan kontradiksi utama.⁴⁷ Selama tahun 1979, jurnal-jurnal akademik lainnya berusaha mencermatkan perumusan itu hingga sifat “maju” dari sistem sosialis itu diingkari. Sebenarnya, apakah yang dimaksudkan dengan Kata “maju” itu? Masalah ini diangkat dalam sebuah karangan oleh Su Shaozhi dalam edisi Juni 1979 jurnal Shanghai *Xueshu Yuekan* (*Bulanan Akademik*) yang berjudul *Mengenai Kontradiksi Pokok yang Dihadapi Masyarakat Kita Dewasa ini*. Su mulai dengan menunjukkan bahwa sekalipun penolakan perumusan Kongres Ke VIII mengenai kontradiksi pokok selama Revolusi Kebudayaan “tidak berdasarkan fakta,” tidaklah perlu menghidupkannya lagi sekarang.⁴⁸ Ini disebabkan karena hubungan-hubungan produksi sosialis hanya mungkin dikatakan maju apabila hubungan-hubungan produksi itu memenuhi tuntutan-tuntutan “tenaga-tenaga produktif yang meningkat” dan memperlancar perkembangannya. Telah sering diperdebatkan bahwa sistem pemilikan komune di pedesaan Tiongkok adalah lebih “maju” daripada kepemilikan oleh team produksi. Di dalam praktek, mengingat tingkat perkembangan tenaga-tenaga produktif ketika komune-komune didirikan, hanya team produksi yang dapat memenuhi tuntutan-tuntutan tenaga-tenaga produktif dan memperlancar perkembangannya. Pada akhir tahun-tahun 1950-an dan 1960-an, jelas

bahwa team-team produksi lebih maju daripada komune. Sesungguhnya, demikian Su mengemukakan secara meyakinkan, sejak tenaga-tenaga produktif “tidak pernah dapat dikejar oleh hubungan-hubungan produksi dalam hal apapun,”⁴⁹ maka yang dirumuskan sebagai *maju* pada akhir 1950-an mungkin sama sekali tidaklah maju. Argumen yang sama seperti itu berlaku bagi sistem sosialis itu sendiri. Bagi kaum Marxis, demikian Su mengemukakan, kriterium sosialisme maju adalah yang ditetapkan oleh Marx dalam *Critique of the Gotha Programme* – yaitu tahap pertama komunisme. Tahap sosialisme sekarang “masih belum berkembang baik” dan “aspek-aspek sistem sosial yang tidak sempurna” masih harus ditransformasi dan disesuaikan pada kebutuhan-kebutuhan produksi.⁵⁰

Argumen-argumen seperti yang dikemukakan Su Shaozhi mengisyaratkan bahwa penggunaan istilah *maju* untuk melukiskan hubungan-hubungan produksi adalah tidak tepat, atau sebaliknya, sejumlah hubungan-hubungan produksi mestinya dilukiskan sebagai “terlalu maju.” Ia suatu masalah yang akan kita bicarakan lagi. Cukuplah kiranya dicatat di sini bahwa adalah argumen-argumen seperti ini yang membuka jalan bagi perumusan-perumusan mengenai “sosialisme tidak berkembang” – di mana hubungan-hubungan produksi dimodifikasi agar bersesuaian dengan yang diakui sebagai rendahnya tingkat tenaga-tenaga produktif. Jelaslah, suatu pengukuhan bagi Kongres Ke VIII harus membuang gagasan mengenai adanya suatu kontradiksi pokok antara sistem sosialis yang maju dan tenaga-tenaga produktif yang terbelakang. Kontradiksi ini tidak disebut-sebut ketika sebuah komentar *Renmin Ribao* mendukung Su Shaozhi maupun Kongres Ke VIII pada bulan Agustus 1979.⁵¹

Garis Kongres Ke VIII dan Penyelesaian Kontradiksi Secara Tepat.

Dalam Bab ini telah dikemukakan bahwa reaksi pertama Mao terhadap garis Kongres Partai Ke VIII pada tahun 1957, walaupun mengukuhkan sosialisme sebagai suatu sistem, adalah menolak gagasan bahwa kontradiksi dasar telah diselesaikan dan, tentu saja, menolak gagasan bahwa kontradiksi pokok adalah “antara sistem sosialis yang maju dan tenaga-tenaga produktif yang terkebelakang.” Menjelang 1979, posisi resmi dari PKT yang telah mengukuhkan sosialisme sebagai suatu

sistem, mengemukakan bahwa kontradiksi dasar memang telah diselesaikan dan, tentu saja, menolak perumusan mengenai kontradiksi pokok dalam hubungannya dengan sistem sosialis yang maju dan tenaga-tenaga produktif yang terkebelakang. Posisi itu sangat berbeda dalam isinya dengan pandangan-pandangan Mao tahun 1957, sekali terdapat beberapa kesamaan-kesamaan formal. Sekalipun Deng tidak sependapat dengan pandangan-pandangan Mao tahun 1957 mengenai penyelesaiannya, ia masih dapat mempertahankan bahwa kontradiksi antara hubungan-hubungan produksi dan tenaga-tenaga produktif adalah bersifat men- dasar. Deng akhirnya menanggalkan perumusan Kongres Ke VIII mengenai kontradiksi utama dengan memilih suatu versi mengenai sosialisme yang tidak berkembang, diungkapkan dalam bahasa Kongres Ke VIII mengenai suatu kesenjangan antara aspirasi-aspirasi dan kemampuan-kemampuan. Mao telah menanggalkannya dan menyetujui perjuangan kelas. Masalahnya ialah, bahwa kedua mereka menolaknya.

Kita dapat melihat di sini bagaimana pidato Mao tahun 1957 *On the Correct Handling of Contradictions* dapat dipaksa berlaku oleh kepemimpinan PKT sekarang. Kita dapat memahami juga ironi yang mencolok dari penyejajaran unsur-unsur perumusan Kongres Ke VIII yang tidak dialektis dengan yang sebenarnya dimaksudkan sebagai suatu kemajuan dialektis pada perumusan itu. Seperti dikatakan oleh Deng,

Adalah lebih baik menguraikan kontradiksi dasar sesuai penjelasan Kawan Mao Zedong dalam karangannya *On the Correct Handling of Contradictions Among the People...* Ia telah berbicara banyak mengenai masalah ini, dan tidak perlulah aku mengulanginya.... Bagaimanapun, pengalaman selama lebih dua puluh tahun yang lalu telah membuktikan bahwa penjelasan-penjelasan Kawan Mao Zedong mengenai kontradiksi ini adalah *lebih pantas daripada yang lain-lainnya*.⁵²

Pandangan-pandangan Deng segera dituangkan ke dalam pernyataan-pernyataan resmi PKT yang menandakan bagaimana *On the Correct Handling ...* seharusnya dibaca/diartikan. Laporan mengenai Pekerjaan Pemerintah, yang diterima oleh Sidang Kedua Kongres Rakyat Nasional Ke V pada Juni 1979, menekankan arti-penting analisis Mao mengenai kontradiksi-kontradiksi, dengan sudah tentu mengemukakan bahwa kontradiksi pokok bukan perjuangan kelas seperti yang diyakini oleh

Mao, tetapi tugas-tugas modernisasi ekonomi sebagaimana yang dikehendaki oleh Kongres Ke VIII.⁵³

Tetapi, begitu kontradiksi pokok telah direduksi pada modernisasi ekonomi, isi yang diberikan pada kata *kontradiksi* menjadi berubah.

Analisisnya tidak lagi dialektis dan menjadi mekanis. Penyelesaian kontradiksi-kontradiksi secara tepat tidak lebih daripada penepatan-selarasan (*fine-tuning*) mekanisme sosial itu. Sebagaimana ditunjukkan oleh Introduksi kumpulan tulisan ini, menyelesaikan suatu kontradiksi di kalangan rakyat diperlakukan sebagai jawaban pada suatu disfungsi. Dari dalil dialektis bahwa perubahan dalam suatu totalitas adalah hasil saling pengaruh-mempengaruhinya kekuatan-kekuatan internal yang saling-mengimbangi, orang diha-dapkan pada sesuatu yang menyerupai analisis fungsional barat.⁵⁴ Sekalipun Mao tidak sepenuhnya bebas dari tuduhan-tuduhan akan fungsionalisme pada tahun 1957, kita tidak bisa tidak terkejut menyaksikan cara pendekatannya direduksi menjadi sekedar pelaksanaan-pelaksanaan pemecahan-masalah dalam suatu sistem statik. Pendirian lembaga-lembaga untuk menjamin demokrasi sosialis dan hukum, karenanya, cuma sekedar mekanisme- mekanisme guna menangani setiap disfungsi sistem. Ditetapkan/didefinisikan/dinyatakan sebagai tiada adalah pandangan dialektis Mao mengenai kemajuan dan seluruh dinamika perjuangannya.

Namun tidak ada Marxis-Leninis yang dapat mendefinisikan tidak adanya perjuangan kelas, sebagaimana dialami dengan pahit sekali oleh Stalin pada akhir tahun-tahun 1930-an. Perjuangan kelas harus diberikan suatu tempat di dalam ideologi baru; tetapi soalnya adalah, tempat apa? Ini merupakan salah satu dari masa-lah-masalah yang paling diperdebatkan dalam merumuskan garis ideologis baru itu, karena selama banyak tahun di bawah Mao, perjuangan kelas telah dipandang sebagai kontradiksi pokok atau *mata-rantai terpenting*. Sebagaimana sudah ditunjukkan, posisi yang dihidupkan kembali dari Kongres Ke VIII bahwa suatu sistem sosialis telah ditegakkan, menurut dalilnya mereduksi perjuangan kelas pada suatu posisi yang sekunder. Kongres Ke VIII, demikian dikemukakan, mengakui persatuan fundamental dari rakyat, sekalipun tugasnya untuk mengalihkan fokus pekerjaan Partai tidak

dihiraukan hingga sidang Pleno Ke III pada tahun 1978.⁵⁵ Dengan kesatuan fundamental itu, perjuangan kelas yang ada setelah tahun 1956 kini dipandang berbeda jauh dari yang ada sebelum lahirnya sistem sosialis.

Hal ini di paparkan dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1: Perjuangan Kelas Sebelum dan Sesudah Transformasi Sistem Kepemilikan

SISTEM KEPEMILIKAN

	Sebelum Trans- formasi	Sesudah Transformasi
<u>Perjuangan kelas</u>		
Skala	Terhadap kelas-kelas penghisap keseluruhan	Terhadap sejumlah kecil kaum kontra-revolusioner, unsur-unsur penghisap baru, sisa-sisa Komplotan Empat, dan sejumlah kecil sekali sisa unsur-unsur kelas penghisap yang belum direformasi
Bentuk	Pada skala besar dan massa bergolak	Diselesaikan sesuai undang-undang negara
Tipe	Kekerasan	Dengan berkurangnya jumlah, dan menyempitnya kalawasan, lebih santai daripada gawat.

Sumber: *Xinhua, RMRB*, 22 Juli 1979, *JPRS*, 74012, 15 Agustus 1979, hal. 34.

Dari Tabel 2.I dapat dilihat bahwa perjuangan kelas telah diberi suatu posisi sekunder karena ia tidak dapat menghancurkan sistem sosialis.

Hal itu kini terjadi di antara individu-individu yang, entah apa alasannya, mengancam atau menggerogoti sosialisme. Menurut definisinya percobaan-percobaan mereka pasti gagal. Di sini suatu isi yang ganjil diberikan pada kata “kediktaturan proletariat.” Kediktaturan itu tidak dimanifestasikan dalam mobilisasi massa ataupun dalam perjuangan politis secara kolektif, melainkan melalui lembaga-lembaga hukum sosialis yang diterapkan/di-berlakukan secara merata pada semua orang.^{5 6} Karena kediktaturan proletariat dianggap sama dengan kediktaturan demokrasi rakyat dan karena barisan-barisan rakyat telah diperluas hingga meliputi hampir semua orang, maka makna teoritis istilah itu menjadi kediktaturan dari hampir setiap orang atas setiap orang lainnya. Ini tidak mempunyai hubungan apapun dengan proletariat, tetapi demikian pula halnya dengan perumusan yang berlaku selama Revolusi (Besar) Kebudayaan “Proletariat.” Dalam laporan-laporan resmi dikatakan bahwa tugas terpenting kediktaturan proletariat bukan lagi untuk menindas musuh-musuh kelas, tetapi untuk melindungi dan mengembangkan tenaga-tenaga produksi sosial.

Marx pasti akan terheran-heran! Kediktaturan proletariat telah menjadi sinonim dengan berkuasanya hukum. Posisi ini mengingatkan pada posisi yang diambil oleh Dong Biwu pada Kongres Ke VIII, yang kini dihormati.^{5 7} Kesenambungan sekali lagi telah ditegakkan.

Bab ini sudah menyebutkan bahwa penilaian resmi mengenai perjuangan kelas adalah yang paling ditentang dari semua perumusan ideologis baru. Penentangan itu seringkali mengingatkan pada penilaian-penilaian pra-1978. Sejumlah kader, demikian dikemukakan,

... mencemaskan bahwa apabila perjuangan kelas tidak dianggap sebagai mata-rantai kunci, kita tidak akan mampu menjamin arah sosialis dari pembangunan ekonomik... Sejumlah kawan merasa bahwa jika kita tidak menjadikan perjuangan kelas sebagai mata-rantai kunci, maka tidak akan ada pekerjaan politik yang mesti dilakukan.^{5 8}

Dalam jurnal-jurnal akademik ditekankan, misalnya, bahwa sekarang ini dan untuk waktu lama di masa mendatang, kita mesti tetap waspada terhadap revisionisme. “Proletariat mesti berteguh dalam perjuangan kelas untuk mencegah degenerasi negeri sosialis.”^{5 9} Semua ini sangat

bertentangan dengan posisi resmi yang menyatakan bahwa tidak ada perjuangan kelas dari tipe yang dimaksudkan, tidak ada kemungkinan bahaya “revisionisme” dan tidak ada kemungkinan bahaya degenerasi, selama sistem sosial masih utuh/lengkap.

Menjelang tahun 1982, pers resmi daerah memperingatkan akan bahaya-bahaya “evolusi damai” kembali pada kapitalisme dan tentang “berubahnya warna politis” PKT. Sekalipun Revolusi Kebudayaan itu telah merupakan suatu kesalahan, Partai,

... jangan pergi pada ekstrem lainnya, menegasi hal-hal yang benar dalam pendirian Mao Zedong bahwa bahaya evolusi damai masih terdapat di Tiongkok.⁶⁰

Untuk menyanggah kritisisme di atas, Partai pada tahun 1982 menegaskan kembali mengenai sifat sekunder perjuangan kelas.

Walaupun kontradiksi dasar masih tetap antara hubungan-hubungan produksi dan tenaga-tenaga produktif, itu tidak memanifestasikan dirinya sebagai perjuangan kelas. Ketika Partai melancarkan suatu serangan besar-besaran terhadap “polusi spiritual” pada tahun 1983, orang menduga bahwa perumusan resmi itu adalah, dan akan terus berada, dalam ketegangan berat.

Melangkah Mundur untuk Melangkah maju

Diskusi di muka mengenai kediktaturan proletariat dan penolakan garis Kongres Ke VIII mengenai “kontradiksi utama” mungkin tampak sebagai tidak lebih daripada suatu percekcoakan soal-soal tetek-bengek belaka. Sebenarnya, sama sekali bukan begitu. Terdapat banyak akibat praktikal yang sangat penting dengan perumusan baru itu. Begitu telah diterima bahwa hubungan-hubungan produksi mungkin terlalu jauh majunya dari tenaga-tenaga produktif, maka menjadilah mungkin untuk kembali pada bentuk-bentuk sosial sebelumnya tanpa mengakui bahwa itu berarti memupuk kapitalisme. Perumusan-perumusan ideologis itu sebagian besar mungkin saja merupakan suatu rasionalisi kebijaksanaan-kebijaksanaan yang sudah diputuskan. Tetapi ideologi dan kebijaksanaan pasti lebih mempunyai suatu hubungan yang timbal-balik daripada Cuma yang satu-arah.

Argumen-argumen yang sudah kita jumpai dalam tulisan Su Shaozhi telah dikembangkan sesudah tahun 1979 menjadi teori-teori mengenai tahap-tahap perkembangan antara sosialisme belum berkembang dan sosialisme maju. Para ahli teori merasa akan diingat bahwa suatu sistem perencanaan dan pengelolaan telah diterima yang adalah terlalu maju bagi tingkat tenaga-tenaga produktif. Demikian, ketika kritik dilakukan mengenai “daya kebiasaan lama” yang menghalangi empat modernisasi itu, rujukan jelas lebih rujukan dengan sendiri dilakukan tidak saja pada endapan-endapan (*residues*) masyarakat lama, tetapi juga pada kebiasaan-kebiasaan yang berasal dari suatu sistem “maju” yang tidak layak yang diterima pada tahun 1950-an.⁶¹ Dirasakan pada waktu itu, bahwa kemajuan ekonomik yang pesat mungkin dapat dicapai bukan dengan sabar memperbaiki/meningkatkan tenaga-tenaga propduktif tetapi dengan terus-menerus memperbaiki sistem. Menurut veteran ekonomi politik Xu Dixin,

Kita sebetulnya telah menentukan bahwa prospek transformasi mesti makan waktu kurang-lebih limabelas tahun. Namun, dikarenakan suatu hasrat subjektif untuk mempercepat segala sesuatu..... transformasi itu dicapai dalam waktu empat tahun. Kita terutama terlalu tergesa-gesa dalam memaksakan ko-perasi pertanian dan transformasi kerajinan tangan dan bisnis-bisnis kecil. Perubahan-perubahan itu terlalu cepat.⁶²

Dikarenakan penekanan pada kepesatan ini, kebijaksanaan ekonomi yang “pada dasarnya tepat” telah berubah menjadi kebijaksanaan yang menghambat/mengganggu perkembangan tenaga-tenaga produktif. Tetapi, bisa dipertanyakan, karena kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diterima sejak sidang Pleno Ke III dimaksudkan untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan yang berasal dari tahun 1950-an ketika Partai “terlalu ketat menutup pintu,” perbedaan apakah yang terdapat antara kebijaksanaan ekonomi pada awal 1980-an dengan kebijaksanaan awal 1950-an selama periode *Demokrasi Baru*? Xu menghindari masalah ini. Ia membedakan dua periode itu tidak dalam pengertian kebijaksanaan-kebijaksanaan konkret yang dilaksanakan, melainkan dalam pengertian adanya suatu sistem sosialis yang dominan. Tetapi, jika sistem itu tidak layak, itu mungkin saja begitu sebagai suatu akibat kebijaksanaan. Bagaimanapun juga, sekali orang memisahkan

kebijaksanaan dari beroperasinya sistem, hanya tinggal satu langkah pendek untuk berargumentasi bahwa setiap kebijaksanaan yang mengembangkan produksi akan menyempurnakan sistemnya. Maka, dapatkah orang mendebat bahwa hubungan-hubungan produksi kapitalis akan memperbaiki/meningkatkan sistem sosialis jika disimpulkan bahwa itu memperlancar hasilnya (*output*)?

Argumen-argumen Xu Dixin mengingatkan pada suatu pidato yang tidak banyak dibicarakan, yang diucapkan Chen Yun pada Kongres Ke VIII. Pidato itu sangat berlainan dari yang terdapat dalam dokumen-dokumen Kongres. Pada waktu itu Chen Yun mengakui keberhasilan transisi pada sosialisme yang dilihatnya sepenuhnya dalam hubungan dengan suatu perubahan dalam kepemilikan formal. Namun ia memperingatkan terhadap ketergesaan yang tidak patut dalam mengubah aspek-aspek lain dari hubungan-hubungan produksi. Sebaliknya, ia menuntut suatu pelonggaran pembatasan-pembatasan yang telah diberlakukan pada hubungan-hubungan pasar selama periode “Demokrasi Baru.” Pembatasan-pembatasan itu telah memperlancar transisi pada sosialisme, tetapi kini sistem kepemilikan telah berubah, pembatasan-pembatasan itu tidak diperlukan lagi. Sesungguhnya, diteruskannya pembatasan-pembatasan itu dapat merintangikan perkembangan lebih lanjut dari produksi dan menggerowoti sosialisme. Perusahaan-perusahaan kapitalis-Negara, yang dibatasi selama proses transisi itu, mesti dibebaskan dari pembatasan-pembatasan itu karena mereka telah menjadi *sosialis*. Menjelang akhir tahun 1970-an Chen tampaknya mengatakan: “Sudah kubilang begitu.” Ia, tentu saja, kini dipandang sebagai salah satu dari arsitek-arsitek utama perubahan-perubahan akhir-akhir ini.

Karena itu, kebijaksanaan-kebijaksanaan yang berlaku sekarang, dipandang sebagai suatu “langkah mundur secukupnya” dari suatu bentuk perkembangan abnormal kepada suatu struktur yang lebih rasional. Pelonggaran abnormal terhadap yang sekarang dipandang sebagai “hukum ekonomik obyektif” bahwa tenaga-tenaga produksi harus sepenuh bersesuaian dengan tingkat tenaga-tenaga produktif sedang dilempangkan, dan hubungan-hubungan produksi sedang disusun kembali untuk mencapai kesesuaian itu. Inilah rationale bagi

pembongkaran struktur komune di dalam pertanian dan dipromosikannya sistem pertanggung-jawaban pedesaan. Argumen-argumen serupa dipakai untuk mendukung perluasan otonomi perusahaan, peningkatan integrasi dengan lembaga-lembaga keuangan dan perdagangan luar negeri, operasi-operasi gabungan (*joint*) dengan korporasi-korporasi transnasional dan ekonomi perseorangan yang bertumbuh. Telah dikedepankan, bahwa sekalipun ekonomi perseorangan dan “zona ekonomi khusus” tidak sosialis, mereka menyumbang pada peningkatan produksi dan dengan demikian menyumbang pada pengkonsolidasian sistem sosialis.

Langkah mundur pada kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dikaitkan pada tahapan-tahapan awal dari transisi sosialis dibenarkan dengan kepatuhan pada “hukum ekonomik obyektif” bahwa hubungan-hubungan produksi mesti selalu bersesuaian dengan perkembangan tenaga-tenaga produktif. Tetapi, sekali itu dipandang sebagai suatu “hukum ekonomik obyektif,” lalu bagaimana itu dapat dipandang sebagai suatu “kontradiksi dasar” yang telah diselesaikan? Jelas, jika kebijaksanaan-kebijaksanaan dijalankan untuk kembali pada kemulusan operasi “hukum ekonomik obyektif,” maka itu belumlah terselesaikan. Tetapi dengan begitu, juga tidak dapat dikatakan bahwa itu telah diselesaikan pada waktu Kongres Partai Ke VIII. Ini jelas sekali dalam argumen-argumen yang dikemukakan oleh Su Shaozhi. Pada tahun 1956, masih dapat kita ingat, telah dinyatakan secara tidak langsung bahwa tuntutan-tuntutan sistem sosialis adalah sedemikian rupa sehingga hubungan-hubungan produksi mesti diturunkan skalanya agar bersesuaian dengan tingkat tenaga-tenaga produktif. Jelaslah kiranya, bahwa yang dimaksudkan oleh sistem sosialis itu adalah dari tatanan yang jauh lebih rendah daripada yang dari tahun 1950-an.

Salah satu dari pemaparan-pemaparan yang paling jelas mengenai tahap-tahap perkembangan telah dibuat pada tahun 1981 oleh Feng Wenbin, Wakil Presiden dari Sekolah Partai Pusat. Feng membedakan antara *asaz-azas* yang menentukan suatu sistem sosialis dan *bentuk* yang diambil oleh kepemilikan umum. Selama kepemilikan umum atas alat-alat produksi berdominasi, selama eksploitasi telah diakhir dengan tenaga kerja tidak lagi merupakan barang dagangan dan selama

101 | Bill Brugger (peny.)

distribusi adalah menurut kerja yang dilakukan, orang dapat berbicara tentang adanya suatu sistem sosialis. Namun, bentuk yang diambil oleh kepemilikan umum bergantung pada tingkat tenaga-tenaga produksi. Bentuk kepemilikan umum yang diterima/dijalankan di dalam pertanian ternyata tidak layak.

Sosialisasi pertanian di masa depan bergantung pada dinaikkannya tingkat tenaga-tenaga produktif, dengan de-kolektivisasi sekarang hingga derajat tertentu. Selama azas-azas menyeluruh yang menentukan sistem sosialis itu dipertahankan, ini tidak dapat dipandang sebagai kembali pada kapitalisme. Dengan memperluas argumen-argumen itu, karangan-karangan lain berbicara tentang “keadaan tenaga-tenaga produktif yang bertingkat-tingkat,” menuntut “bentuk-bentuk kepemilikan yang pluralistik.” Semua ciri-ciri sosialisme yang “tidak lengkap dan tidak murni” ini masih dikuasai oleh azas-azas menyeluruh. Sistem secara menyeluruh itu tidaklah kapitalis.

Namun jelas sekali, bahwa tidak semua orang diyakinkan oleh argumen-argumen seperti itu. Seperti yang dapat dilihat dari Tabel 2.2, garis antara kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dicantumkan di sebelah kiri dan penyimpangan-penyimpangan di sebelah kanan tidaklah mudah ditarik.

Tabel 2.2: Kebijakan-kebijakan dan Penyimpangan-
penyimpangan

Kebijakan	Penyimpangan
Sistem tanggung-jawab dalam agrikultura	Penolakan kebutuhan akan kolektivisasi tahun 1950-an
Desentralisasi pengelolaan ekonomi pada perusahaan	Penolakan untuk melaksanakan rencana-rencana pusat dengan mempraktekkan <i>departementalisme egoistik</i>

Kodifikasi Posisi Ideologis Baru: Dari Pleno ke V hingga Kongres ke XII

Pada sidang Pleno Ke V bulan Februari 1980 dan sidang Pleno Ke VI pada juni 1981, usaha-usaha telah dilakukan untuk menyatukan berbagai untaian ideologi yang didiskusikan di muka. Sidang Pleno Ke VI terkenal karena direhabilitasikannya Liu Shaoqi secara anumerta. Merayakan rehabilitasi itu, *Renmin Ribao* memuji “Laporan Politis” Liu pada Kongres Ke VIII dan Resolusi yang dihasilkan dari situ; di situ terkandung “pendirian-pendirian penting (yang) tepat dan Marxis, baik itu dipandang pada waktu itu maupun sekarang.”⁷⁷ *Renmin Ribao*, namun, berhati-hati sekali, dengan hanya mengutip bagian dari resolusi itu yang berbicara tentang kontradiksi di antara tuntutan rakyat bagi pembangunan suatu negeri industrial yang maju dan realitas dari suatu negeri pertanian yang terbelakang dan kontradiksi-kontradiksi antara aspirasi dan kemampuan-kemampuan.⁷⁸ Sistem sosialis yang *maju* telah didiamkan. Komentar-komentar resmi mengenai sidang Pleno Ke V selanjutnya menegaskan identitas antara *Resolusi* Kongres ke VIII dan pidato Mao *On the Correct Handling ...*⁷⁹ Suatu posisi serupa diambil oleh Pleno ke VI yang menerima suatu interpretasi resmi baru mengenai sejarah PKT sejak 1949, berjudul *Resolusi mengenai Masalah-masalah Tertentu dalam Sejarah Partai Sejak Pendirian Republik Rakyat Tiongkok*.⁸⁰ Pemahaman fungsionalis dari *correct handling of contradictions* dirayakan⁸¹ dan jalan terbuka bagi Mao untuk dituduh *berlawanan dengan Pikiran Mao Zedong* pada tahun-tahun 1960-an dan 1970-an — suatu posisi yang diwarisi Hua Guofeng dalam dua tahun setelah wafatnya Mao.⁸²

Sidang-sidang Pleno Ke V dan Ke VI membersihkan jalan bagi penyusunan suatu Konstitusi baru Partai yang akan diterima/disyahkan oleh Kongres Ke XII yang berlangsung pada September 1982.⁸³ Itu agaknya merupakan suatu proses yang lambat dan berat yang menimbulkan banyak perdebatan dan perselisihan.⁸⁴ Semula telah diumumkan bahwa Kongres Ke XII akan berlangsung lebih dini,⁸⁵ namun mungkin dikarenakan perselisihan kongres itu baru dilangsungkan pada tanggal yang ditentukan.

Bab ini sudah mendiskusikan tafsiran yang salah dari beberapa analisis barat yang mengatakan bahwa baru pada Kongres Ke XII garis Kongres Partai Ke VIII dianggap cacat. Seorang sarjana seperti yang dimaksudkan itu, Lowell Dittmer, lebih jauh mengemukakan bahwa keengganan untuk mengkritik Kongres Ke VIII untuk sebagian adalah dikarenakan kenyataan bahwa Kongres itulah yang menaikkan Deng Xiaoping pada kepemimpinan pusat.⁸⁶ Dittmer mengabaikan bukti bahwa Deng sendiri adalah penggerak utama di balik penafsiran kembali garis Kongres Ke VIII pada tahun 1979 dan dari perkawinan *Resolusi*-nya dengan penafsiran fungsionalis atas Mao. Dengan tampaknya sudah siap untuk menilai kembali Kongres Ke VIII dan secara mencolok, dalam pidato pembukaannya pada Kongres pada tanggal 1 September, Dengan membandingkan arti penting Kongres Ke XII, bukannya khususnya dengan Kongres Ke VIII, melainkan dengan Kongres Ke VII pada tahun 1945. Kongres Ke VII adalah *yang paling penting dalam periode revolusi demokratik, mengikhtisarkan secara tepat perkembangan revolusi demokratik* selama duapuluh tahun lebih yang penuh kesulitan dan penderitaan itu. Ia telah menyarankan *suatu program yang tepat dan taktik-taktik yang tepat untuk kemenangan revolusi itu*.⁸⁷ Seperti itu pula, demikian diharapkan, Kongres Ke XII akan dipandang sebagai yang paling penting selama tahap sosialis.

Kongres Ke XII juga mengikhtisarkan perkembangan selama duapuluh tahun lebih yang penuh kesulitan dan penderitaan dan menghasilkan *suatu program yang tepat* untuk menjamin kemenangan sosialisme.⁸⁸ Kongres Ke VIII, sebaliknya, telah diadakan ketika *Partai tidak secukupnya siap secara ideologis untuk pembangunan sosialis yang menyeluruh*. Sekalipun orientasi menyeluruh Kongres Ke VIII dirasakan tepat, jika orang membandingkan keadaan pada tahun 1982,

....bersama waktunya Kongres Ke VIII, Partai kita telah mendapatkan pengertian yang jauh lebih dalam mengenai hukum-hukum yang menguasai pembangunan sosialis Tiongkok, memperoleh jauh lebih banyak pengalaman dan menjadi jauh lebih sadar dan teguh dalam melaksanakan azas-azas kita yang benar.⁸⁹

Pengangkatan Kongres Ke VII oleh Deng adalah sesuai dengan azas melangkah mundur untuk maju ke depan. Namun, dengan sendirinya,

tidak ada orang yang menganjurkan agar kembali pada kebijaksanaan-kebijaksanaan dari zaman Pembebasan. Kongres Ke VIII masih harus dikokohkan sebagai penyelenggaraan transformasi sistem kepemilikan perseorangan. Seperti dinyatakan oleh *Renmin Ribao* menjelang Kongres Ke XII,

Kongres Nasional PKT ke VIII adalah suatu pertemuan besar dengan arti sejarah yang mendasar, dilangsungkan pada suatu saat menentukan ketika terdapat suatu titik balik penting dalam sejarah negeri kita..... Ia menunjukkan suatu arah yang jelas bagi perkembangan perjuangan sosialis dalam periode baru itu dan bagi pembangunan Partai. Kebijakan-kebijaksanaan khusus dan umum yang tepat yang ditentukan pada Kongres Nasional Ke VIII merupakan suatu sumbangan cemerlang kearah ditemukannya suatu jalan pembangunan sosialis yang sesuai dengan keadaan-keadaan negeri kita.^{9 0}

Program Umum Konstitusi Partai, yang diterima pada 6 September 1982, mengkodifikasikan jumlah terbesar unsur-unsur yang dikumpulkan pada Pleno ke V dan ke VI,^{9 1} tetapi satu unsur di dalam diskusi-diskusi tahun-tahun sebelumnya mencolok sekali karena ketidakhadirannya. Ini adalah diskusi-diskusi mengenai tahap-tahap perkembangan dari sosialisme tidak berkembang pada sosialisme yang maju. Barangkali setiap diskusi yang gamblang mengenai sosialisme tidak berkembang mungkin mempromosikan suatu perbandingan yang tidak menyenangkan dengan Uni Sovyet, di mana partai Komunisnya sendiri telah merumuskan versinya sendiri mengenai sosialisme maju. Perbandingan ini akan ditinjau dalam Bab Tiga. Cukuplah ditunjukkan di sini bahwa sekalipun terdapat kesamaan-kesamaan mencolok dalam determinisme ekonomik dari kedua ideologi PKT dan PKUS, ingatan-ingatan akan perselisihan-perselisihan yang lalu mencegah penyelidikan-penyelidikan sepenuhnya mengenai kesamaan-kesamaan itu. Misalnya, dalam prakteknya, PKT maupun PKUS mengokohkan suatu *Partai dan negara dari seluruh rakyat*, tetapi setelah bertahun-tahun polemik, PKT tidak akan mengakuinya secara tegas.

Kemungkinan suatu sebab kedua mengapa *Program Umum* gagal menyebutkan tahapan-tahapan perkembangan sosialis adalah semata karena kontroversi itu masih berlangsung dengan hebatnya. Telah banyak diskusi pada tahun 1981 dan 1982 mengenai mereka yang tidak

dapat menunjukkan perbedaan antara sosialisme dan kapitalisme. Hal ini menjadi istimewa pentingnya karena Partai mengetatkan kontrolnya dalam lingkungan industrial dan meluncurkan gerakan besar untuk menciptakan suatu *peradaban sosialis* baru. Kegelisahan gawat telah sering menggejolak di kalangan Tentera. Surat kabar Tentera *Jiefangjunbao* bertanya menjelang Kongres Ke XII,

Bagaimana dapat kita mengatasi serbuan-serbuan ide-ide burjuis dan non-proletar lainnya dan tetap mempertahankan gelar terhormat sebagai komunis-komunis terpuji? Jika ini dianggap *ultra-kiri*, maka mempertahankan kepemimpinan Partai dan empat azas dasar adalah juga *ultra-kiri*.^{9 2}

Lagi pula, pada tahun 1983, tanda-tanda lebih jauh mengenai suatu pukulan-balik terhadap beberapa dari reform-reform ekonomi telah terbukti. Terdapat banyak bukti bahwa tahap-tahap perkembangan sosialis masih sangat kontroversial.

Restorasi Kapitalisme

Garis yang kabur dari perbedaan antara sosialisme dan kapitalisme bukan cuma sebuah masalah ideologi yang sulit dimengerti. Ia telah mempunyai suatu akibat penting atas cara kader-kader tingkat-lebih-rendah mengerjakan tugas-tugas mereka. Dalam pertanian, misalnya, kader-kader tidak pernah bisa memastikan hingga mana presisnya batas-batas kebijaksanaan resmi itu dan sampai seberapa kapitalis presisnya hubungan-hubungan produksi itu dapat dibiarkan berkembang. Kader-kader sering dituduh telah melepaskan peranan kepemimpinan mereka dalam mengikuti kaum tani dalam pembongkaran ekonomi kolektif secara berlebih-lebihan.

Orang-orang seperti itu dipersalahkan dengan sebutan “mengekorisme” (*tailist*).^{9 3} Tetapi yang “membuntutisme” pada tahun 1978 adalah *tepat* pada tahun 1980. Karenanya, mereka yang “tepat” pada tahun 1978 dapat dikecam sebagai “komandois” dengan meluasnya sistem pertanggung-jawaban rumah-tangga.^{9 4} Apakah, misalnya, yang harus dilakukan oleh kader-kader Biro Pendidikan Sichuan ketika mereka melihat bahwa salah satu akibat keberhasilan sistem pertanggung-jawaban rumah-tangga adalah, bahwa murid-murid sekolah dasar lebih suka kembali bercocok-tanam daripada menamatkan sekolah mereka?^{9 5} Kurangnya petunjuk-

petunjuk pelaksanaan kebijaksanaan yang jelas semestinya secara ideal diimbangi dengan kader-kader yang menggunakan akal sehat mereka sesuai dengan garis ideologis. Tetapi jika garis itu tidak jelas, apakah yang harus dilakukan oleh kader-kader itu?

Jenis-jenis problem seperti itu timbul manakala orang mempertimbangkan “kejahatan ekonomi.” Orang dapat mengambil suatu posisi positivis dan mengatakan bahwa semua kejahatan ekonomik adalah yang dikatakan begitu oleh hukum. Tetapi hukum (teristimewa kumpulan hukum baru) tidak dapat merinci segalanya dan perbedaan antara “menghidupkan ekonomi individual” dan “kejahatan ekonomi” menjadi sangat sulit untuk ditentukan.

Hal ini jelas sekali di provinsi Guangdong, di mana, demikian disebutkan oleh *Nanfang Ribao*, kejahatan ekonomi adalah “agak ekstensif,” unsur-unsur kriminal adalah , korupsi di kalangan kader adalah “gawat,” dan di sana “ideologi kapitalis bahwa segala sesuatu bergantung pada uang telah merajalela.”⁹⁶ Kegawatan problem itui sedemikian rupa sehingga *Nanfang Ribao* membandingkan perjuangan terhadap kejahatan ekonomik dengan kampanye-kampanye “Tiga Anti” dan “Lima Anti” dari zaman awal 1950-an.⁹⁷ Secara ironis, perjuangan terhadap kejahatan ekonomik telah dilukiskan sebagai satu aspek perjuangan kelas dalam suatu situasi di mana ideologi resmi mempertahankan bahwa perjuangan kelas yang penuh pergolakan adalah sesuatu dari masa-lalu. Di sini orang diingatkan pada suatu situasi serupa di Uni Sovyet di akhir tahun-tahun 1930-an setelah Stalin mengajukan hal yang sama.

Sebab-sebab yang mendasari kesulitan-kesulitan di atas diselidiki dalam sejumlah artikel yang menunjuk pada bahaya-bahaya liberalisasi burjuis dan polusi spiritual yang dihasilkan oleh penyusupan-penyusupan ideolog internasional dan domestik.⁹⁸ Penjahat utamanya adalah pengaruh seberang-lautan yang teristimewa berbahaya di Guangdong karena “zona ekonomi khusus”;⁹⁹ tetapi jelas terdapat pula pelemparan kesalahan pada kebijakan-kebijakan reformasi yang sedang berlangsung di dalam negeri. Salah-satu sumber utama kesulitan adalah “produksi skala kecil” yang mau-tidak-mau akan berkelanjutan untuk waktu lama. Ini menjadikan “lahan” bagi “penyimpangan kanan.”¹⁰⁰ Orang diingatkan di sini pada

keluihan lama dari Komplotan Empat, walaupun kali ini meluasnya produksi ukuran kecil merupakan akibat langsung dari dorongan pemerintah.

Selagi usaha-usaha dilakukan untuk memperkuat sistem perencanaan, telah semakin menjadi jelas bahwa konsesi-konsesi pada kapita-lisme sejak sidang Pleno Ke III adalah berlebih-lebihan (eksesif). Misalnya,

Jika kita tidak memandang produksi dan peredaran berencana seba-gai azas panduan, maka ekonomi yang dijalankan oleh negara secara terpadu akan menjadi berantakan (desintegrate), ekonomi yang dimiliki secara kolektif akan menyimpang dari pelayanan keper-tin-gan-keper-tingan ekonomi menyeluruh dari rakyat dan dari orientasi sosialis, dan ekonomi seluruh masyarakat akan bertindak secara tidak bertanggung-jawab di bawah dominasi kekuatan-kekuatan pasar yang spontan.^{1 01}

Bahkan lebih suggestif adalah pernyataan,

Jika negara hanya mengambil sebagian dari keuntungan-keuntungan dan membiarkan perusahaan-perusahaan membuat keputusan-keputusan mereka sendiri dalam produksi dan operasi, maka sistem kepemilikan oleh seluruh rakyat tidak akan diwujudkan dalam organisasi dan pengelolaan produksi. Dalam hal ini, akan sulit dikatakan bahwa negara masih menjadi pemilik perusahaan-perusahaan itu dan bahwa perusahaan-perusahaan itu masih merupakan perusahaan-perusahaan negara.^{1 02}

Bagaimana orang mesti mengartikan kutipan di atas kecuali bahwa itu menunjukkan bahwa perbedaan resmi secara formal antara kapi-talisme dan sosialisme adalah tidak mencukupi, dan bahwa beberapa bentuk yang dianggap *sosialis* sebenarnya adalah kapitalis. Pada tahun 1981 dan 1982, diskusi-diskusi mengenai masalah ini dilaku-kan secara sangat terbuka,

Singkatnya, kita dengan teguh mempertahankan sistem kepemilikan sosialis tetapi, sebagaimana dituntut pada tingkat perkembangan sosialis ini, memperkenalkan ekonomi perseorangan dan pola-pola operasional lain sebagai pelengkap-pelengkap. Dapatkah sistem sosialis mengijinkan kepemilikan kapitalis? Apakah perusahaan-perusahaan gabungan (joint enterprises) kita merupakan kapita-lisme negara? Masalah-masalah ini patut kita pelajari lebih lanjut.^{1 03}

Tidak kurang dari seorang ekonom veteran seperti Xue Muqiao menuntut adanya pertimbangan serius mengenai batas-batas bentuk-

bentuk kapitalis,

Kepemilikan perseorangan telah diakui oleh hukum, dan perusahaan-perusahaan yang dioperasikan bersama dengan modal Tiongkok dan asing dan bahkan sejumlah kecil perusahaan-perusahaan asing juga telah diakui. Kini, setelah kita dapat menerima masuknya modal asing dan menyambut penanaman modal oleh Hoakiau (orang-orang Tionghoa seberang lautan), apakah orang-orang yang mempunyai simpanan-simpanan besar di bank-bank di-perkenankan untuk menanam modalnya dalam perusahaan-perusahaan negara? Pada saat ini sejumlah perusahaan mendorong staf dan pekerja mereka bergabung dengan mereka sebagai mitra; banyak koperasi telah didirikan oleh anggota-anggota komune dengan mengumpulkan dana-dana mereka sendiri dan mereka mengeluarkan bonus-bonus kepada kaum pekerja menurut pekerjaan yang dilakukan dan pada investor-investor menurut jumlah modal yang diurukan. Sejumlah komune rakyat pedesaan yang makmur juga telah mendirikan perusahaan-perusahaan di luar jangkauan resmi bisnis-bisnis mereka, atau telah menanamkan modal dalam perusahaan-perusahaan negara. Di beberapa daerah sejumlah perusahaan telah didirikan dengan modal perseorangan-perseorangan dan masing-masing mempekerjakan (hires) sepuluh atau lebih anggota staf dan pekerja. Hingga sejauh manakah sektor-sektor ekonomi semi-sosialis atau non-sosialis ini dapat berkembang? Masalah ini adalah sangat penting dan rumit dan memerlukan pendiskusian yang serius.¹⁰⁴

Beberapa dari peringatan mengenai restorasi kapitalisme mengingatkan pada beberapa variasi dari ideologi lama tentang “melanjutkan revolusi di bawah kediktaturan proletariat” dan pra-kritisisme yang diperluas dari Kongres Ke VIII agar mempertimbangkan/memperhitungkan perumusan-perumusan pasca-1978.¹⁰⁵ Namun kebanyakan peringatan itu adalah lebih moderat. Telah dikedepankan, misalnya, bahwa landasan ideologi PKT –azas mengenai kesesuaian antara hubungan-hubungan produksi dan tenaga-tenaga produktif– adalah berubah-ubah (sewenang-wenang = tidak menentu); sukar untuk menyebutkannya suatu “hukum ekonomi obyektif,”

Tidak dapat disangkal kenyataan bahwa hubungan-hubungan produksi harus sesuai bagi perkembangan tingkat tenaga-tenaga produktif, tetapi itu tidak dapat ditafsirkan secara mekanis.... Karena cuma suatu konsep relatif belaka untuk mengatakan bahwa tingkat tenaga-tenaga produktif tinggi atau rendah atau.... maju atau terbelakang, tiada yang dapat menentukan suatu garis demarkasi yang jelas dan tidak mendua-arti yang menghasilkan suatu perubahan pada hubungan-hubungan produksi lama.¹⁰⁶

Juga diperdebatkan agar jangan secara ketat memisahkan hubungan-hubungan produksi dari tenaga-tenaga produktif,

Dianalisa secara seketatnya, tenaga-tenaga produktif dan hubungan-hubungan produksi adalah dua abstraksi yang diderivasi dari analisis kita mengenai produksi sosial. Dalam ... produksi tidak terdapat pemisahan. Kedua itu bersama-sama selalu merupakan suatu kesatuan dialektis.¹⁰⁷

Mendasari kritisisme-kritisisme di atas adalah ketakutan bahwa keyakinan implisit bahwa apa saja yang menyumbang pada produksi juga menyumbang pada sosialisme dalam kenyataannya akan menjurus pada kapitalisme. Menurut standard Marxis manapun, mempekerjakan (*hiring*) dan memecat pekerja dan hasil-hasil (keuntungan = laba) atas investasi adalah eksploitatif dalam artian kapitalis.¹⁰⁸ Orang tidak dapat menjelaskan itu sebagai “pelengkap-pelengkap” pada ekonomi sosialis kecuali orang merinci secara sangat jelas derajat dari suplementasi yang diijinkan, kondisi-kondisi yang menjadikannya dapat ditenggang (*tolerated*) dan untuk berapa lama. Tidak ada gunanya mengatakan bahwa mereka akan ditenggang selama mereka mengembangkan tenaga-tenaga produktif; kapitalisme dapat melakukan itu dengan baik sekali. Juga tidak ada gunanya mengatakan bahwa sistem sosialis adalah unggul (*superior*) karena hubungan-hubungan produksi dapat dibentuk agar sesuai dengan tingkat tenaga-tenaga produktif, sedang di bawah kapitalisme kontradiksi di antara mereka menjadi lebih tajam, kecuali orang memerinci sebelumnya cara untuk mengetahui bahwa yang satu bersesuaian pada yang lainnya. Kesalahannya, seperti ditunjukkan dalam Bab Satu, dan yang disebutkan lagi di dalam Bab ini, berasal dari keyakinan reduksionis bahwa orang dapat dengan sederhana menghapus hubungan-hubungan produksi dari tenaga-tenaga produktif.

Bahkan jika kita mengandaikan bahwa campuran hubungan-hubungan sosialis dan kapitalis sekarang ini cocok bagi tahapan perkembangan sekarang, segera setelah orang menciptakan suatu bangunan hukum untuk mengamankan hak-hak milik tanpa sesuatu mekanisme legal guna melaksanakan peningkatan mutu hubungan-hubungan produksi, maka orang mesti melanggar hukum itu di masa mendatang atau melepaskan ide mengenai transisi sosialis. Misalnya, apakah yang mesti menjadi pegangan orang dari Bab I, Pasal 13 dari Konstitusi Negara, yang

III | Bill Brugger (peny.)

diumumkan dengan resmi pada 4 Desember 1982, yang menandakan bahwa “negara melindungi hak warganegara untuk mewarisi milik perseorangan”?¹⁰⁹ Mengomentari ini, ahli hukum Wang Shuwen menguraikan empat tipe kekayaan/milik yang dapat diwariskan,

- 1) pendapatan resmi warganegara, rumah-rumah pribadi, uang simpanan di bank dan berbagai jenis benda yang dipakai dalam kehidupan pribadi dan keluarga
- 2) pendapatan pribadi anggota-anggota komune dari bidang-bidang tanah perseorangan mereka, jalur-jalur tanah partikelir di pegunungan, ternak piaraan perseorangan dan pekerjaan-pekerjaan sampingan keluarga
- 3) alat-alat produksi pekerja perseorangan
- 4) milik legal Hoakiau¹¹⁰

Apakah, demikian orang dapat bertanya, posisi kelas seorang individu yang hidup dari dividen-dividen dari penanaman modal warisan dari orang tua yang menumpukkan/mengakumulasi modal mereka dari saham-saham yang ditanamkan dalam suatu perusahaan milik-negara, sebidang tanah yang diolah dengan kerja bayaran dan suatu bengkel sepeda swasta yang mempekerjakan empat orang buruh? Bahkan kemungkinan timbulnya pertanyaan ini, karena perubahan-perubahan struktural yang penting di Tiongkok sejak 1978, dapat menguatkan keyakinan mereka yang mengemukakan pendapat bahwa Tiongkok telah meninggalkan sosialisme dan akan meningkatkan ketakutan mereka yang melihat problem-problem dengan pembedaan PKT antara kapitalisme dan sosialisme.

Kesimpulan

Berlawan dengan literatur sekunder yang langkah mengenai reformasi ideologis di Tiongkok sejak sidang Pleno Ke III, bab ini telah mengemukakan bahwa penilaian positif atas garis Kongres Partai Ke VIII telah langsung berubah dari saat rehabilitasinya. Pefrumusannya kembali melibatkan perkawinannya dengan suatu penafsiran fungsionalis atas pidato Mao Zedong *On the Correct Handling of Contradictions...* Garis Kongres Ke VIII mempunyai arti penting simbolik yang begitu mendasar sehingga kepemimpinan PKT pasca-1978 tidak dapat tidak

harus berdamai dengannya.

Proses reformasi ideologis ini berpusat pada masalah-masalah seperti kontradiksi-kontradiksi dasar dan pokok, perjuangan kelas dan tahapan-tahapan perkembangan dari sosialisme terbelakang pada sosialisme maju. Setelah melalui banyak perdebatan pada sidang-sidang Pleno Ke V dan Ke VI dari Komite Sentral Ke XI, suatu perumusan baru telah disepakati pada Kongres Ke XII tahun 1982. Namun, yang tampaknya tidak dapat mencapai persetujuan adalah suatu perumusan yang tepat mengenai apa yang merupakan sosialisme terbelakang dan bagaimana orang harus lakukan dari situ kepada bentuk majunya.

Bab ini telah mengedepankan bahwa, setelah melempar keluar teori mengenai “pelanjutan revolusi” dalam bentuk aslinya tahun 1960-an maupun dalam bentuk “revolusi yang tidak terputus-putus” yang sudah direvisi tahun-tahun 1976-78, PKT telah menegaskan suatu perbedaan yang sangat formalistik antara sosialisme dan kapitalisme yang jelas-jelas tidak mencukupi. Orang dapat memahami mengapa perbedaan yang kabur itu telah ditentang dan mengapa banyak orang di Tiongkok yakin bahwa kapitalisme sedang direstorasi. Selama dua tahun terakhir, suatu pukulan-balik (serangan balasan) telah terjadi dan mungkin sekali persoalan-persoalan mengenai struktur kelas akan kembali menjadi penting.

Catatan

¹ Stalin, (1936), Stalin, 1976, hal. 799-800.

² CCP., (1956), 1981, hal. 119-20.

³ RMRB., 5 April 1956, Bowie dan Fairbank (ed.), 1965, hal. 149-150.

⁴ Lihat Reglar, 1980.

⁵ CCP., (1956), 1981, hal. 120.

⁶ Stalin, (1938), Stalin, 1976, hal. 860-1.

⁷ Stalin, (1939), Stalin 1976, hal. 915.

⁸ CCP., (1956), 1981, hal. 120-1.

⁹ Mao Zedong, (1957), Mao, SW., V, 1977, hal. 384-421; lihat Young dan Woodward, 1978.

¹⁰ Mao Zedong, (1957), Mao, SW., V, 1977, hal. 492.

¹¹ *Ibid.*, hal. 492-3.

¹²

¹³ Mao Zedong, (1957), Mao, SW., V, 1977, hal. 384.

¹⁴ Mao Zedong, (1959), Mao, 1968-9.

¹⁵ Mao Zedong, (1961-2), Mao, 1974, hal. 299 dan Mao, 1977(a), hal. 107.

¹⁶ Mao Zedong, (1962), Schram (ed.), 1974, hal. 168; PR., 27, 7 Juli 1977, hal. 12.

¹⁷ Mao Zedong, (1962), Schram (ed.), 1974, hal. 189-90 dan 192.

¹⁸ CCP., 1969, hal. 113-4; 1973, hal. 62.

¹⁹ Yao Wenyuan, Hongqi, 3, 1975, SPRCM., 814, hal. 16-26; Zhang Chungqiao, Hongqi, 4, 1975, SPRCM., 819 hal. 2-11; Wang (ed.), 1977; Christensen dan Delman, 1981, hal. 2-15.

²⁰ PFLP., 1073, hal. 20.

²¹ Zhou Enlai, Xinhua, 31 Agustus 1973, SWB./FE/4387/C/1-2.

²² Mao Zedong, (1966), Schram (ed.), 1974, hal. 269.

²³ Yuexi yu Pipan, 4, 1976, SPRCM., 873, hal. 1-12; Hongqi, 8, 1976, SPRCM., 866, hal. 43-50; PR., 33, 12 Agustus 1977, hal. 28-32.

²⁴ Chi Hsin, 1977, hal.222.

²⁵ Liebrthal, 1978, hal. 11.

²⁶ Hua Guofeng, 1977, hal. 11.

²⁷ *Ibid.*, hal. 15.

²⁸ *Ibid.*, hal. 14.

²⁹ *Ibid.*, hal. 12.

³⁰ CCP., 1977, hal. 123; Hua Guofeng, NPC., 1978, hal. 1-118.

³¹ *Issues and Studies*, 2, 1979, hal. 88.

³² Deng Xiaoping, PR., 25, 23 Juni 1978, hal. 15.

³³ PR., 28, 14 Juli 1978, hal. 8.

³⁴ PR., 50, 15 Desember 1978, hal. 8.

³⁵ Hu Qiaomu, PR., 45, 10 November 1978, hal. 8.

³⁶ PR., 52, 29 Desember 1978, hal. 11.

³⁷ Hua Guofeng, BR., 27, 6 Juli 1979, hal. 5-31; You Yilin, BR., 38, September 1980, hal. 150-1.

³⁸ Deng Xiaoping, (1979), Deng, 1983, hal. 150-1.

³⁹ Gardner, 1982, hal. 141-53.

⁴⁰ RMRB., 7 September 1979, JPRS., 74250, 25 September 1979, hal. 45.

⁴¹ Sichuan Ribao, 28 Mei 1981, JPRS., 78505, 14 Juli 1981, hal. 55-8; Faxue Yanjiu, 23, Februari 1980, JPRS., 76141, 30 Juli 1980, hal. 36-9.

⁴² Lishi Yanjiu, 4, 1979, SWB/FE/6147/BII/4-5.

⁴³ *Ibid.*, BII/8.

⁴⁴ GMRB., 22 Augustus 1979, SWB./FE/6207/BII/4-5.

⁴⁵ Ye Jianying, BR., 40, 5 Oktober 1979, hal. 13.

⁴⁶ Saich, 1982, hal. 25.

⁴⁷ Lishi Yanjiu, 4, 1979, SWB/FE/6147/BII/6.

⁴⁸ Xueshu Yuekan, 7, 1979, JPRS., 74813m 21 Desember 1979, hal. 13 dan 15.

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 14.

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 15.

⁵¹ RMRB., 28 Augustus 1979, SWB/FE/6210/BII/3.

⁵² Deng Xiaoping, (1979), Deng, 1983, hal. 168.

⁵³ Hua Guofeng, BR., 27, 6 Juli 1979, hal. 9-11; lihat RMRB., 28 Augustus 1979, SWB/FE/6230/BII/13.

⁵⁴ Deng Xiaoping, (1979), Dweng, 1983, hal. 1688.

⁵⁵ Tianjin Ribao, 7 Agustus 1979; JPRS., 74552, 9 September 1979, hal. 3.

⁵⁶ Wenhui bao, 1 September 1979, JPRS., 74468, 29 Oktober 1979, hal. 6.

⁵⁷ Dong Biwu, CCP., 1956, hal. 79-97; RMRB. 10 Desember 1979, JPRS., 74974, 22 Januari 1980, hal. 6.

⁵⁸ Beijing Ribao, 14 September 1979, JPRS., 74748, 11 Desember 1979, hal. 14-5.

⁵⁹ Xueshu Yuekan, 3, 1979, JPRS., 9 Oktober 1979, hal. 12 dan 14.

⁶⁰ Dazhong Ribao, 1 April 1982, JPRS., 81260, 13 Juli 1982, hal. 23.

⁶¹ Xinhua RMRB, 22 Juli 1979, JPRS., 74012, 15 Agustus 1979, hal. 234-45.

⁶² Xu Dixin, Xu dkk., 1982, hal. 14.

⁷⁵ Chengdu Ribao, 16 Juni 1981, JPRS., 78678, 5 Agustus 1981, hal. 17.

⁷⁶ Minzhu yu Fazhi, 4, 1981, JPRS., 78450, 6 Juli 1981, hal. 29.

⁷⁷ BR., 16, 21 April 1980., hal. 20.

⁷⁸ *Ibid.*, hal. 19-20.

⁷⁹ *Ibid.*, hal. 20.

⁸⁰ BR., 27, 6 Juli 1981, hal. 17.

⁸¹ *Ibid.*, hal. 18.

⁸² *Ibid.*, hal. 26.

⁸³ Dittmer, 1983, hal. 110-11.

⁸⁴ Gardner, 1982, hal. 173-7.

⁸⁵ BR., 10, 10 Maret 1980, hal. 3.

⁸⁶ Dittmer, 1983, hal. 109.

⁸⁷ CCP., 1982, hal. 2.

⁸⁸ *Ibid.*, hal. 2-3.

⁸⁹ *Ibid.*, hal. 3.

⁹⁰ RMRB., 30 Agustus 1982, SWB/FE/7121/C/II.

⁹¹ CCP., 1982, hal. 94.

⁹² Jiefanjunbao, 28 Agustus 1982; dimuat kembali di Jiefang Ribao, 27 Agustus 1982, SWB/FE/7145/BII/4.

⁹³ Changsha, Hunan Provincial Service, 8 Mei 1981, SWB/FE/-6723/BII/19029.

⁹⁴ Kunming, Yunnan Provincial Service, 18 Mei 1981, SWB/FE/-6737/BII/4.

⁹⁵ Xinhua, 9 Juni 1982, SWB/FE/7052/BII/3.

⁹⁶ Nanfang Ribao, 13 Maret 1982, JPRS., 80773, 11 Mei 1982, hal. 22.

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ Xinhua, 1 Juli 1982, SWB/FE/7072/BII/2.

⁹⁹ Nanfang Ribao, 13 Maret 1982, JPRS., 80773, 11 Mei 1982, hal. 23.

¹⁰⁰ Shehui Kexue, 1, 1982, JPRS., 80794, 12 Mei 1982, hal. 73.

¹⁰¹ Xinhua, 20 September 1982, RMRB., 21 September 1982, SWB/FE/7137/C/1.

¹⁰² *Ibid.*, C/4.

¹⁰³ Minzhu yu Fazhi, 4, 1981, JPRS., 78450, 6 Juli 1981, hal. 29.

¹⁰⁴ GMRB., 19 Mei 1982, JPRS., 81041, 14 Juni 1982, hal. 24.

¹⁰⁵ Xin Shiqi, 6, 1981, JPRS., 78847, 27 Agustus 1981, hal. 30.

¹⁰⁶ Shanxi Ribao, 14 Agustus 1981, JPRS., 79320, 20 Oktober 1981, hal. 27.

¹⁰⁷ Xueshu Yuekan, 7, 1979, JPRS., 74450, 25 Oktober 1979, hal. 6-7.

¹⁰⁸ RMRB., 17 September 1979, SWB/FE/6225/BII/1-2; Fuzhou, Fujian Provincial Service, 27 Agustus 1981, SWB/FE/6817/BII/9; Guangzhou, Guangdong Provincial Service, 3 September 1981, SWB/FE/6823/BII/8; Xinhua, 25 Agustus 1981, SWB/FE/6814/BII/1-3.

¹⁰⁹ *Xinhua*, 27 April 1982, SWB/FE/7014/C1/5.

117 | Bill Brugger (peny.)

¹¹⁰ *Xinhua*, 9 Mei 1982, SWB/FE/7027/BII/5-6; kata-kata diubah untuk kepentingan gaya.

BAB TIGA

Sosialisme Terbelakang Dan Perkembangan Intensif*

Bill Brugger

Sosialisme Maju dan Sosialisme Terbelakang

Di tempat lain telah kulukiskan dua cara pemahaman sosialisme dalam tradisi Uni Sovyet dan tradisi Tiongkok: sebagai suatu proses atau sebagai suatu model.¹ Bab sebelumnya menunjukkan bahwa Mao Zedong, dalam satu setengah dasawarsa terakhir dari hidupnya, dan orang-orang yang terlibat dengan “Komplotan Empat” telah memperhatikan yang tersebut terdahulu, sekalipun secara agak membisingungkan. Karena sebab itu garis Kongres Partai Ke VIII, yang menganggap bahwa kontradiksi pokok di dalam masyarakat adalah antara “sistem sosialis yang maju” dan “tenaga-tenaga produktif yang terbelakang,” (akhirnya) ditolak untuk menyetujui yang tersebut sebagai “pandangan kelas generatif.”² Dalam karyaku terdahulu, aku menunjukkan bahwa sosialisme sebagai suatu proses dicapai karena secara progresif menegasikan hubungan-hubungan produksi kapital-is. Pengritik-pengritikku secara tepat menunjukkan bahwa perumus-an itu, yang terkait dengan “Komplotan Empat” tidak mencukupi. Proses penegasian itu dapat mengarah pada sejumlah jurusan – pada komunisme, pada suatu bentuk feodalisme atau bahkan pada barbarisme. Banyak dari diskusi-diskusi Tiongkok yang berlangsung akhir-akhir ini mengenai teori-teori tahun 1960-an dan awal 1970-an mempersoalkan akibat-akibat feodal dari petunjuk-petunjuk “Komplotan Empat” mengenai penegasian kapitalisme. Perhatian mengenai Kam-puchea di bawah Pol Pot jelas memperagakan kemungkinan barbarisme. Agar sosialisme masuk akal sebagai suatu proses orang kmemerlukan suatu pernyataan yang jelas mengenai suatu *telos* (tujuan), dan ini yang gagal diberikan oleh Mao dan “Komplotan Empat.”

* Sebuah versi bab ini telah diajukan pada konferensi Arah-arrah Baru dalam Ilmu-ilmu Sosial dan Humanoria di Tiongkok, Universitas Adelaide 20-22 Mei 1984.

Kaum Marxis-Leninis resmi lazimnya enggan untuk menegaskan suatu *telos* karena alasan-alasan teoritis dan praktikal. Pertimbangan-pertimbangan mengenai ortodoksi menjauhkan ahli-ahli teori dari noda “sosialisme utopian,” dan ingatan-ingatan akan “komunisme di satu negeri” Khrushchev, yang mesti dicapai menjelang tahun 1981,³ membuat politisi praktikal tidak bersedia memper-taruhkan leher mereka. Ini khususnya masalahnya di Tiongkok sekarang, di mana reaksi terhadap apa yang dianggap utopianisme menimbulkan serupa jenis pemujaan berlebihan yang anti-teori pada “dunia riil” yang dapat kita jumpai di kalangan sarjana-sarjana sosial barat yang semakin konservatif. Suasana yang berkuasa di kalangan ekonom-ekonom politik Tiongkok adalah suatu “scientisme” deterministik. Manakala transisi sosialis didiskusikan, keutamaan “tenaga-tenaga produktif” ditandaskan dan perkembangan tenaga- tenaga iitu pada tingkat-tingkat tertentu menyediakan kondisi- kondisi yang diperlukan (dan dalam argumen-argumen yang lebih kasar: yang secukupnya) bagi dicapainya momen-momen *sosialisme* yang ditentukan secara berubah-ubah. Bab Dua menjelaskan bahwa ini berada dalam tradisi dari “keberhasilan dasar” sosialisme Stalin pada tahun 1936⁴ dan “sosialisme maju” dari zaman Brezhnev.⁵

Sekalipun metodologinya sama, terdapat perbedaan jelas antara posisi-posisi Sovyet dan Tiongkok pada tingkat di mana momen- momen transisi sosialis dipancarkan. Juga terdapat perbedaan- perbedaan dalam bobot kausal yang diberikan pada tenaga-tenaga produksi. Banyak ekonom politik Tiongkok kini yakin bahwa perumusan Stalin tahun 1936 memancarkan sosialisme pada suatu tingkat yang terlalu rendah. Mereka juga merasa bahwa karyanya tahun 1952, *Economic Problems of Socialism in the USSR*, memberi teka-nan terlalu besar pada hubungan-hubungan produksi. Walaupun menyetujui kritisisme Stalin terhadap Yaroshenko yang telah meluruhkan hubungan-hubungan produksi ke dalam tenaga-tenaga produksi, mereka merasa bahwa Stalin kemudian melangkah terlalu jauh ke arah yang berlawanan.⁶ Pandangan-pandangan mereka menentang posisi Mao Zedong sebelum maupun setelah perumusannya mengenai pandangan kelas generatif.⁷

Walaupun ahli-ahli ekonomi-politik Tiongkok tidak lagi diwajibkan

untuk ikut-serta dalam suatu upacara pengecaman Uni Sovyet, terdapat suatu kebungkaman relatif mengenai versi Sovyet tentang “sosialisme maju” yang telah diklaim sebagai ciptaan Leonid Brezhnev. Namun begitu, klaim Sovyet tahun 1970-an yang lebih determinis bahwa suatu tahapan baru dalam perkembangan sosialisme bergantung pada integrasi produksi dengan “revolusi ilmiah dan teknologis” adalah menyamai pemikiran Tiongkok. Yang disangsikan adalah mengenai tingkat di mana tahapan baru itu tercapai. Ini dengan jelas ditunjukkan dalam posisi yang diambil oleh Su Shaozhi, seperti disinggung dalam Bab terdahulu, dan dalam sebuah karangan oleh Wang Guopiong di mana kedua-duanya memandang so-sialisme yang telah berkembang sebagai tidak kurang daripada “tahap pertama komunisme” sebagaimana yang dilukiskan oleh Marx di dalam *Critique of the Gotha Programme*. Di sini terdapat satu bentuk kepemilikan; masyarakat merupakan sebuah pabrik raksasa dan perencanaan adalah demikian sempurna sehingga distribusi menurut pekerjaan tidak lagi mengambil bentuk pembayaran upah. Dalam kata-kata Marx kaum buruh,

...menerima selebar sertifikat dari masyarakat yang menyatakan bahwa ia telah memberikan sekian jumlah kerja (setelah dikurangi kerjanya untuk dana umum), dan dengan sertifikat ini ia menarik dari persediaan sosial alat-alat konsumsi sebanyak harga jumlah kerja yang sama. Jumlah kerja yang sama yang telah ia berikan dalam suatu bentuk kepada masyarakat diterimanya kembali dalam bentuk lain.⁸

Upah dihapuskan karena pekerja itu menerima suatu dividen yang didasarkan pada pekerjaan. Tetapi ini bukanlah komunisme karena hukum nilai masih berlaku. Hukum nilai, demikian ditekankan, adalah suatu hukum dari semua produksi barang dagangan dan bukan, sebagaimana katanya dipertahankan oleh *Komplotan Empat*, semata-mata dari kapitalisme. Karena hukum itu bekerja untuk menjamin distribusi yang merata dari jumlah0-jumlah kerja yang tidak sama (yaitu, masih merupakan satu sumber ketidak-samaan), suatu langkah lebih jauh diperlukan sebelum komunisme dapat dicapai.

Di tempat lain telah kukemukakan, bahwa “status hukum nilai” sebagai suatu “hukum ekonomik obyektif” merupakan suatu masalah yang sangat menyangsikan.⁹ Kecuali jika ada suatu pemecahan bagi problem

transformasi, tidak akan pernah jelas bagaimana itu akan beroperasi. Namun, maksudku di sini bukan untuk mengkaji keberlakuan teoritisnya, melainkan untuk memeriksa akibat-akibat pandangan-pandangan ideologis sebagaimana ia dinyatakan akan beroperasi pada berbagai tahapan sosialisme yang berbeda. Dalam tradisi Marxis-Leninis resmi orang mesti membedakan tiga pandangan. Yang pertama adalah bahwa hukum nilai tidak beroperasi pada tahap masyarakat sosialis yang manapun dan orang harus segera menyusun suatu sistem perencanaan yang beroperasi semata-mata menurut nilai pakai dan kebutuhan-kebutuhan. Pandangan ini dewasa ini jarang dijumpai dan lazimnya dibangkit oleh pengkritik-pengkritiknya untuk mendiskreditkan suatu “kiri” yang padahal tidak pernah mempertahankannya. Pandangan kedua adalah bahwa hukum nilai mesti secara progresif dinegasi selagi orang bergerak menuju komunisme. Posisi ini masih mempunyai banyak pengikut Tiongkok, sekalipun orang-orang seperti itu mencemaskan kemungkinan bahwa posisi mereka dapat dibelokkan ke jurusan yang digunakan oleh “Komplotan Empat” untuk “membatasi hak burjuis.” Posisi ketiga adalah bahwa hukum nilai beroperasi lebih sempurna selagi orang bergerak menuju tahap terakhir produksi barang-dagangan. Dengan demikian, dapat diselipkan, sosialisme maju adalah suatu keadaan di mana hukum beroperasi dengan sempurna dan dapat digunakan oleh perencana yang serba-kuasa, dan sosialisme terbelakang adalah suatu keadaan di mana ia beroperasi secara tidak sempurna.

Pandangan ketiga menimbulkan sejumlah problem yang gawat. Adakah suatu peranan yang diperluas bagi pasar merupakan suatu kebijaksanaan sementara bagi sosialisme terbelakang, yang diperkenankan untuk memperlancar pengoperasian yang lebih sempurna dari hukum nilai? Atau adakah pengaturan pasar merupakan suatu ciri permanen dari semua bentuk sosialisme yang diarahkan oleh kebutuhan para perencana untuk memperoleh informasi yang sempurna? Aku menduga bahwa pandangan terakhir ini adalah yang lebih kuat. Maka pertanyaan kemudian timbul: bagaimana komunisme itu akan pernah dimungkinkan adanya? Apakah akan ada suatu lompatan transendental manakala pengoperasian hukum nilai yang “sempurna” secara ajaib ditransendenkan dan kerajaan Tuhan didirikan di atas bumi? Jika negasi-negasi benar-benar dinegasi, maka

penegasannya tidak akan semudah itu.

Karena problem transformasi itu masih tetap saja ada, maka apa jadinya dengan pandangan di atas di dalam praktek adalah salah satu dari dua posisi. Posisi pertama ialah sekedar membikin harga-harga lebih bersesuaian pada ongkos di mana harga kerja dianggap sudah ditentukan. Tetapi tentu saja tidak ada orang yang percaya akan “hukum-hukum ekonomik obyektif” yang akan puas dengan upah-upah yang sepenuhnya sewenang-wenang (selalu berubah-ubah = tidak medntentu). Posisi kedua adalah memperkenan-kan perkembangan parsial suatu pasar kerja (tenaga kerja). Tetapi, walaupun hubungan-hubungan barang-dagangan tidak mesti kapitalis, sifat barang-dagangan dari “tenaga kerja” adalah sentral bagi setiap dalil mengenai kapitalisme. Adalah cara berpikir yang semurnya menyesatkan (*sophistry* = cara berpikir yang menyesatkan) untuk mengklaim bahwa para pembeli dan penjual tenaga kerja tidak mempunyai makna kelas hanya karena berbedanya bentuk-bentuk legal. Lalu, apakah sosialisme maju suatu bentuk kapitalisme?

Sosialisme maju, didefinisikan menurut pengertian “komunisme tahap pertama” Marx, jelas tidak ada di manapun dan merupakan gagasan yang jauh lebih indah daripada versi Sovyet mengenai “sosialisme maju.” Karenanya, orang sama sekali tidak dapat memastikan apa yang dimaksudkan oleh Wang Guoping ketika ia mengklaim bahwa beberapa masyarakat sosialis, yang telah berkembang atas dasar kapitalisme matang/dewasa (seperti yang dibayangkan Marx), memang sudah mempraktekkan pembayaran (upah) menurut pekerjaan.¹⁰ Yang dimaksudkannya tentunya bukan negeri-negeri seperti Cekoslovakia yang mempunyai tingkat perkembangan kapitalis tertinggi ketika Partai Komunis memegang kekuasaan. Kita juga tidak dapat memastikan tepatnya kondisi-kondisi teknikal (tenaga-tenaga produksi) apakah yang diperlukan untuk melahirkan sosialisme maju ini. Ini mungkin sebabnya mengapa ekonom-ekonom politis Tiongkok menganjurkan studi mengenai futurologi (*weilaixue*). Semua ini memang menyenangkan sekali, tetapi orang harus mempunyai keyakinan khas pada teknologi untuk percaya bahwa suatu ekuivalen (kesetaraan) sosialis dari sebuah kartu kredit dapat memecahkan problem-problem teknis mengenai perhitungan menurut pekerjaan.¹¹

Tujuan banyak diskusi di Tiongkok mengenai sifat sosialisme maju jelas merupakan kebalikan dari diskusi-diskusi Sovyet. Ia bukan untuk merayakan apa yang ada tetapi untuk menunjuk pada kenyataan bahwa Tiongkok adalah suatu negeri terbelakang, dan bahwa terdapat keterbatasan-keterbatasan pada yang layak secara ekonomis. Sedikit yang tidak akan setuju dengan pandangan itu. Namun, besar sekali perbedaan antara ide mengenai pembangunan sosialisme di suatu negeri terbelakang (yang merujuk pada suatu proses) dan penciptaan suatu “tipe ideal” yang disebut sosialisme terbelakang. Unsur menentukan dari tipe ideal ini adalah sama dengan yang dari model Stalin tahun 1936 –koeksistensi berbagai bentuk kepemilikan– oleh “seluruh rakyat” (yaitu, negara), yang kolektif dan yang perseorangan. Orang mempertanyakan mengapa macam ortodoksi Stalinis ini masih diperlukan. Segera setelah diakui bahwa hubungan-hubungan barang-dagangan terdapat di dalam sektor negara dan bahwa alat-alat produksi itu sendiri adalah barang-barang dagangan (disangkal oleh Stalin) dan adalah demikian bahkan di dalam kondisi-kondisi sosialisme maju, maka mengapa perbedaan antara kepemilikan negara dan kepemilikan kolektif dipersoalkan?

Jawabannya tidaklah meyakinkan. Telah ditegaskan bahwa upah-upah di perusahaan-perusahaan negara ditentukan dengan melihat pada totalitas semua perusahaan negara, sedangkan upah-upah di perusahaan-perusahaan kolektif bergantung pada tanggung jawab perusahaan-perusahaan itu sendiri atas laba dan kerugian mereka sendiri. Karenanya, pekerja-pekerja pada tingkat-tingkat kidentikal yang termasuk pada perusahaan-perusahaan dengan sistem-sistem kepemilikan yang berbeda mungkin mendapatkan penghasilan-penghasilan yang berbeda.¹² Pernyataan seperti itu mengabaikan luar-biasa banyaknya varitas bentuk-bentuk perusahaan-perusahaan kolektif itu. Di beberapa “kolektif besar” upah-upah pokok disusun menurut norma-norma perumusan administratif yang tidak terlalu berbeda dari yang diterapkan di sektor negara. Namun, di banyak “kolektif-kolektif kecil” tingkat-tingkat penghasilan banyak sekali perbedaannya. Garis demarkasi yang sangat menentukan bukan antara unit-unit yang dimiliki-negara dan yang dimiliki secara kolektif tetapi pada titik di mana negara secara efektif dapat menjalankan pengawasan. Tetapi untuk menentukan perbedaan antara sosialisme

terbelakang dan sosialisme maju dalam batasan-batasan keserbagunaan pengawasan negara adalah secara teoritis agak mandul dan sama sekali tidak Marxis.

Bagaimana pun, di tempat lain telah kukemukakan bahwa garis demarkasi antara perusahaan-perusahaan milik-negara dan yang dimiliki secara kolektif sedang buyar.¹³ Peningkatan otonomi perusahaan selama tahun-tahun belakangan berarti bahwa, di perusahaan-perusahaan negara, proporsi pendapatan pekerja yang diderivasi (berasal) dari laba-laba telah meningkat secara mencolok. Dengan demikian, pembayaran (upah) menurut pekerjaan di perusahaan-perusahaan tertentu dengan laba berbeda akan mengaki-batkan disparitas-disparitas luas di seluruh negeri dalam pengu-pahan menurut pekerjaan. Diberlakukannya pajak pendapatan korporasi untuk sebagian menggantikan penyeteroran laba oleh perusahaan-perusahaan negara kepada negara (*yishuidaili*) telah berfaedah sekali dalam menempatkan perusahaan-perusahaan negara pada kedu-dukan yang sama dengan perusahaan-perusahaan kolektif.

Hukum Perkembangan Berencana dan Berimbang: Pertanian dan Industri

Telah dikemukakan di atas bahwa pertimbangan-pertimbangan mengenai hukum nilai dan mengenai struktur kepemilikan tidaklah banyak gunanya dalam membuktikan garis pemisah antara sosialisme terbelakang dan sosialisme maju. Suatu argumen yang lebih canggih menyangkut “hukum ekonomik obyektif” kedua yang dirayakan oleh Stalin. Ini adalah hukum mengenai perkembangan berencana dan berimbang yang oleh Stalin dianggap menjadi salah satu “hukum sosialisme” yang paling penting dan yang khusus bagi sosialisme. Tetapi, sebagaimana oleh ahli-ahli ekonomi politis Tiongkok telah ditunjukkan, sama sekali tidak ada sesuatu yang khusus sosialis padanya.¹⁴ Perekonomian apakah yang dapat berjalan untuk waktu lama jika mengandung ketimpangan-ketimpangan serius? Jika perkembangan berimbang benar-benar mau berlaku dengan status suatu hukum, maka harus ada beberapa petunjuk mengenai apa yang menentukan proporsi-proporsi yang layak pada berbagai tahapan perkembangan dan dalam kondisi-kondisi yang bagaimana; jika tidak, maka “hukum” itu tidak

lebih daripada suatu azas yang sederhana dengan “bubur tidak boleh terlalu manis ataupun terlalu asin.”

Di antara ahli-ahli ekonomi politis, baik yang Marxis maupun yang bukan-Marxis, diskusi-diskusi mengenai keseimbangan-keseimbangan mengambil bentuk suatu keanekaragaman yang membingungkan dari model-model pertumbuhan (ekonomi) selagi berbagai teoretikus berselisih mengenai variabel-variabel yang tidak mandiri dan yang mandiri. Di dalam tradisi Marxis-Leninistis, perdebatan mengenai masalah ini telah berlangsung pada tahun-tahun 1920-an. Keluhan-keluhan aliran “genetik” di Uni Soviet bahwa lawan-lawan “teleologis” mereka terjerumus dalam “utopianisme” dan keluhan yang tersebut belakangan bahwa aliran genetik adalah terlalu pasif atau terlalu konservatif telah diulangi di dalam perdebatan-perdebatan Tiongkok pada tahun-tahun 1970-an. Ahli-ahli ekonomi politis Soviet terdahulu, Bazarov dan Groman, menegaskan bahwa ekonomi Soviet ditentukan oleh mata-rantainya yang terlemah – pertanian. Laju pertumbuhan industrial bergantung pada “benteng yang tidak dapat didekati, di mana –sekalipun adanya arus-arus-balik dalam ekonomi berencana kita– kaum *mouzhik* bersembunyi bagaikan seekor siput dalam rumahnya, yang dengan mudah dan dengan begitu saja lolos dari semua upaya-upaya perencanaan untuk mencapainya.”¹⁵ Suatu ekstra-polisi dari “ekuivalen-ekuivalen alami” antara dipasarkannya surplus produk-produk pertanian dan industrial pra-perang membuat Groman menganjurkan diterapkannya rasio ajaib 37 : 63 pada Uni Soviet pertengahan tahun-tahun 1920-an. Jawaban Stalin pada *konservatisme* ini ialah dengan menyerang kaum *mouzhik* dan dengan paksa berupaya mengubah hubungan-hubungan produksi di sektor pertanian, Model-model pertumbuhan (ekonomi) ala Fel’dman, yang menekankan pada potensial masa depan bagi konsumsi investasi-investasi yang dilakukan dalam industri berat, menjadi *de rigueur* (dipaksakan).¹⁶ Hasilnya adalah dicapainya laju-laju pertumbuhan yang luar biasa dalam perindustrian Soviet di tengah stagnasi pertanian.

Dengan matinya aliran genetik di Uni Soviet, mengakibatkan teoritikus-teoritikus perencanaan Soviet tidak mempunyai kriterium “eksternal” yang dapat digunakan untuk memonitor pengoperasian

hukum perkembangan berencana dan berimbang.

Pada tahun-tahun 1930-an dan sesudahnya, seperangkat balans-balans material yang kompleks disusun dan diskusi-diskusi perencanaan mempersoalkan betapa berbagai balans itu lebih bersesuaian satu sama lain daripada determinasi eksternal. Bahaya bentuk obyektivisme ini tidak disangsikan lagi. Pemraktek-pemrakteknya memperoleh tingkat-tingkat kekuasaan yang semakin besar melalui pengetahuan mereka mengenai hubungan-hubungan teknologis hingga titik di mana *teknik* itu sendiri tidak dianggap hanya sebagai penentu mengenai bagaimana sistem itu beroperasi melainkan juga mengenai *telos*nya sendiri.¹⁷ Lagi pula, manakala sistem itu gagal berjalan dengan mulus, itu sepertinya Cuma hasil pengetahuan yang tidak sempurna.

Suatu diagnosis mengenai problem-problem dalam perencanaan Sovyet dalam hubungannya dengan pengetahuan yang tidak sempurna melahirkan dua jawaban pada pertengahan tahun-tahun 1960-an. Yang pertama berupaya memperbesar kekuatan-kekuatan pasar sebagai suatu cara melengkapi informasi para perencana. Yang kedua mencoba menggunakan perumusan-rumusan (dalil-dalil) matematis baru dan menggunakan komputer-komputer untuk merinci secara lebih cermat balans-balans yang segunung banyaknya yang merupakan sistem perencanaan itu. Kedua-dua cara pendekatan ini dirasakan menyangsikan secara ideologis. Yang pertama menimbulkan ketakutan-ketakutan akan perilaku kapitalis dalam diberlakukannya motif laba dan mengisyaratkan bahwa para perencana mungkin kehilangan kemampuan mereka untuk memetakan jalannya suatu balans baru. Cara pendekatan kedua menyangkut penggunaan dalil-dalil yang secara tersembunyi berarti bahwa faktor-faktor lain kecuali kerja dapat ditunjuk sebagai masukan-masukan produktif. Ini menantang ortodoksi yang diterima.¹⁸ Lebih penting bagi argumen di sini adalah, segera setelah sasaran ekonomi politis bergeser pada gagasan barat mengenai alokasi sumber-sumber langkah di antara pihak-pihak yang bersaing menurut suatu kalkulus utilitarian (perhitungungan kemanfaatan), maka betapapun canggihnya balans-balans itu dan betapapun "optimalnya" alokasi sumber-sumber itu, tujuan-tujuan perencanaan itu tampaknya selalu dipulangkan pada logika internal dari sistem yang ada. Hari-depannya adalah pertumbuhan

yang lebih besar dan yang lebih efisien. Orang boleh menamakan itu “sosialisme maju,” jika mau, tetapi orang bertanya-tanya makna apakah yang diberikan pada kata “sosialisme.”

Diskusi di atas mengenai perencanaan itu menjadi penting jika orang memperhatikan tuduhan bahwa hukum perkembangan berencana dan berimbang telah dikacaukan di Tiongkok selama “Lompatan Jauh Ke Depan.” Di tempat lain telah kukemukakan bahwa banyak sekali hukum-hukum ilmu onjektif telah dilanggar dalam Lompatan Besar itu; tetapi yang lazimnya dimaksudkan dengan pelanggaran terhadap hukum perkembangan berencana dan berimbang merujuk pada runtuhnya/ ambruknya perangkat balans-balans subyektif yang hingga kini secara relatif masuk akal, yaitu perangkat balans-balans subyektif yang merupakan rencana itu. Dengan kata-kata lain, subyektivitas yang tidak masuk akal telah menggantikan subyektivitas yang secara relatif masuk akal. Jika orang mau memahami klaim bahwa strategi-strategi Lompatan Besar telah mengabaikan realitas obyektif dalam suatu artian ekonomik yang berlawanan dengan suatu artian ilmiah yang wajar, maka orang harus memasukkan kembali suatu macam determinan eksternal yang terlebih dulu membuat masuk-akalnya balans-balans asli. Dan di sini kita kembali pada suatu ekuivalen Tiongkok untuk aliran genetik asli dari Uni Sovyet. Di kalangan ahli-ahli ekonomi politis Tiongkok dewasa ini, gantinya suatu ekstrapolasi dari suatu keadaan sebelum-perang “dan ekuivalen-akuivalen alami” sebelum-perang, kita dapatkan suatu ekstrapolasi dari awal tahun 1950-an dan “ekuivalen-ekuivalen alami tahun 1950-an.” Rasio-rasio awal tahun 1950-an dianggap layak dan penyimpangan-penyimpangan dari situ dianggap sebagai pemutarbalikan, yang unsur kuncinya adalah sifat yang relatif tidak berubah dari kaum tani Tiongkok. Dengan demikian, maka upaya-upaya untuk mengubah hubungan-hubungan produksi pada pertengahan dan akhir 1950-an adalah dangkal (*superficial*). “Benteng pertanian” itu telah diserbu, tetapi pada akhirnya terbukti menentang perubahan seperti yang menurut perasaan oleh Bazarov dan Groman telah terjadi di sektor pertanian di Uni Sovyet. Karenanya, teoritisi Tiongkok kini dengan aktif mendukung tindakan-tindakan untuk memulihkan hubungan-hubungan yang lebih “sehat” di sektor pertanian tahun 1950-an. Seperti yang dengan

panjang lebar didiskusikan dalam Bab terdahulu, ini dikatakan sesuai dengan “hukum” bahwa, “hubungan-hubungan produksi harus bersesuaian dengan tenaga-tenaga produktif.”¹⁹

Persis seperti Chen Yun, Barazov dan Groman akan berkata: “Telah kukatakan begitu.” Itu juga memang kesimpulan banyak teoretikus Sovyet di kemudian hari. Orang diingatkan pada suatu pengecaman Sovyet secara resmi yang ditulis oleh Mao Zedong pada awal 1970-an,

Mencoba menentukan hubungan-hubungan produksi baru tanpa bersandar pada suatu perkembangan tenaga-tenaga produktif berarti menetapkan hubungan-hubungan produksi itu cuma secara formal, tanpa satu-satunya landasan (substratum) di atas mana hubungan-hubungan produksi itu dapat dikonsolidasi dan dikembangkan.²⁰

Tetapi, apakah yang akan terjadi apabila anda mengakui telah melakukan kesalahan tersebut di atas? Apa anda membatalkan kolektivisasi, seperti yang tampaknya dieksperimentasi oleh Tiongkok, dan merehabilitasi ekonom-ekonom konservatif tahun 1950-an? Ataukah anda berjuang terus seperti cara Uni Sovyet hingga tiba saatnya bagi anda untuk melemparkan keburukan-keburukan anda sekarang pada pemimpin yang sudah mati, yang telah menjerumuskan anda ke dalam kesukaran itu, tanpa merehabilitasi ekonom-ekonom konservatif yang telah menentang cara berpikirnya? Sudah tentu kepemimpinan Sovyet tidak dapat merehabilitasi ide-ide dari aliran genetik. Itu akan berarti mengabaikan apa yang disebutkan sebagai ide “Lenin bahwa pengembangan industri merupakan landasan transformasi ekonomi nasional mengikuti garis-garis sosialis.” Adalah dengan dasar pikiran ini bahwa komentar-komentar resmi Sovyet mengritik penekanan “Mao” pada “pertanian sebagai landasan dengan industri sebagai faktor penentu.”²¹ Maka, jika dalam ekonomi Sovyet pertanian bukan merupakan penentu yang menetapkan objektivitas hukum perkembangan berencana dan berimbang, lalu apakah yang menjadi penentu (determinan) itu? Kecuali pertanyaan itu dapat dijawab, tidak ada gunanya berbicara tentang perkembangan berencana dan berimbang sebagai suatu hukum.

Di Tiongkok dewasa ini orang melihat suatu versi modern dari aliran genetik lama Uni Sovyet. Ini digandengkan dengan saran-saran pasar

sosialis yang mengumandangkan dan melampauisaran-saran Uni Sovyet dari pertengahan 1960-an. Saran-saran seperti itu juga disertai dengan suatu hasrat untuk menempuh jalan sofistikasi matematis yang ditempuh oleh Uni Sovyet kurang lebih dua dasawarsa yang lalu. Hingga kini masih belum ada suatu pukulan-balik ideologis, tetapi sejarah Sovyet mengisyaratkan bentuknya yang akan muncul. Cara pendekatan genetik akan dikritik sebagai “konservatif.” Kekuatiran-kekuatiran bahwa negara mungkin akan kehilangan kontrol atas suatu ekonomi yang didesentralisasikan sudah menyebabkan suatu modifikasi atas rencana-rencana desentralisasi bagi industri dan akan menyebabkan banyak lagi. Akhirnya, asumsi-asumsi non-Marxis dalam beberapa dari model-model matematis yang sedang dipelajari dapat menimbulkan kritisisme-kritisisme tajam. Kita cuma dapat berharap bahwa kritisisme-kritisisme itu tidak cuma timbul karena hasrat kuat akan ortodoksi yang mengenakan dan bahwa suatu cara pendekatan teleologis baru mengenai balans akan dicapai. Jika ini berarti meninggalkan unsur-unsur cara pendekatan Marxis-Leninis tradisional pada teori nilai, terserahlah; walaupun jalan utilitarian tidak merupakan satu-satunya jalan untuk ditempuh.

Perkembangan Ekstensif dan Intensif

Hukum perkembangan berencana dan berimbang bersifat pokok bagi perbedaan antara sosialisme terbelakang dan sosialisme maju. Di sini, dapat diperdebatkan, seperti halnya dengan hukum nilai, sosialisme maju menyiratkan suatu ekonomi di mana keseimbangan adalah lebih “sempurna” ketimbang sosialisme terbelakang. Tetapi itu tidak membantu kita untuk menentukan bilamana seorang telah bergerak dari satu tahap ke tahap lainnya. Untuk mengerti perbedaan itu, kita mesti menyimak suatu dikotomi lain yang disarankan oleh ahli-ahli ekonomi politis sosialis – antara reproduksi yang diperluas dengan ekstensif dan reproduksi yang diperluas secara intensif, (atau, untuk menyederhanakan persoalannya: antara perkembangan ekstensif dan perkembangan intensif).²²

Perkembangan ekstensif merupakan suatu jawaban pada keterbelakangan ekonomik. Persediaan sumber-sumber yang banyak dan suatu

persediaan tenaga kerja yang berlimpah-limpah menghasilkan suatu konsentrasi pada maksimisasi keluaran tinimbang efisiensi masukan-masukan. Pada satu tahap awal perkembangan ekonomik efisiensi tidak begitu penting artinya. Struktur administratif, yang layak bagi suatu masyarakat yang sedang mengalami perkembangan ekstensif seperti itu, adalah yang telah dikembangkan oleh Stalin. Suatu sistem yang terpusat diciptakan, yang mempertahankan laju-laju akumulasi yang tinggi (lazimnya, walaupun ada yang tidak sependapat, dengan lebih mengorbankan kaum tani daripada kaum buruh). Surplus pedesaan disedot oleh suatu sistem harga yang mendiskriminasi produk-produk pedesaan, dan “krisis gunting-gunting” dihadapi dengan paksaan-paksaan administratif. Pada tahap perkembangan ini, hukum perkembangan berencana dan berimbang dapat menenggang suatu tekanan lebih berat pada industri berat daripada industri ringan dan suatu konsentrasi lebih besar pada industri pada umumnya daripada pertanian. Suatu rasio pendapatan nasional yang tinggi diabdikan pada akumulasi dan suatu proporsi akumulasi yang tinggi diabdikan pada investasi dalam produksi. Dari investasi dalam produksi itu, suatu proporsi tinggi diabdikan pada pembangunan barang modal (*capital construction*).

Namun akan tiba saatnya di mana persediaan tenaga kerja mengering ataupun masalah-masalah persediaan material (dan energi) menjadi akut. Karenanya, terdapat suatu kebutuhan untuk beralih pada suatu strategi perkembangan yang lebih intensif dengan berkonsentrasi pada efisiensi faktor-faktor produksi. Pada titik ini, diperkirakan bahwa hukum perkembangan berencana dan berimbang menuntut suatu adonan berbeda. Laju akumulasi mesti diturunkan dengan memberikan perhatian lebih besar pada konsumsi; investasi-investasi non-produktif mesti diberi penekanan lebih besar dan lebih banyak perhatian diberikan pada renovasi perlengkapan daripada pada investasi dalam pembangunan barang modal. Dengan mendorong konsumsi terdapat insentif lebih besar bagi kaum buruh dan kaum tani untuk meningkatkan produktivitas kerja. Investasi lebih besar dalam industri kecil dengan laju-laju pergantian (*turnover*) yang lebih cepat meningkatkan efisiensi produksi (*output*), dan renovasi perlengkapan menghasilkan laba dengan lebih cepat daripada cuma memperluas pembangunan barang modal.

Pada tahun-tahun 1970-an, teoretisi di Uni Sovyet merasa bahwa transisi pada bentuk sosialisme maju mereka itu menyangkut peralihan pada perkembangan intensif. Dengan memakai metodologi reduksionis yang dilukiskan dalam Bab Satu, mereka menawarkan suatu pandangan linear mengenai perkembangan di mana titik transisi itu dengan sederhana dapat dibaca dari keadaan tenaga-tenaga produktif yang berlaku. Menjelang akhir 1960-an dan awal 1970-an, suatu keseimbangan baru dikatakan telah lahir antara pertanian dan industri, antara investasi dalam kemampuan produktif dan pertumbuhan dana-dana konsumsi, dan antara investasi dalam pembangunan barang modal dan dalam renovasi perlengkapan.²³ Perkembangan revolusi ilmiah dan teknikal merupakan suatu proses linear yang tidak dapat ditawar-tawar.

Namun begitu, sejumlah orang Eropa Timur, mengemukakan bahwa pola perkembangan linear tidaklah mencukupi sebagai suatu uraian mengenai yang sedang terjadi. Pergantian dari perkembangan ekstensif pada perkembangan intensif dan pada sosialisme maju semestinya dilihat dalam artian sejumlah siklus. Karya Kalecki patut diperhatikan di sini, dan McFarlane telah menganjurkan cara pendekatannya bagi analisis mengenai Tiongkok.²⁴ Tiga macam siklus diajukan. Yang pertama dari tiga itu –siklus ekonomik– menderivasi dari kenyataan bahwa sistem yang direncanakan secara sentral yang dikembangkan di bawah Stalin, disesuaikan bagui pertumbuhan yang sangat pesat dalam pembuatan/penghasilan (*manufacturing*) yang melebihi/melampaui kemampuan sektor primer untuk memproduksi bahan-bahan mentah dan energi. Secara berkala, karenanya, perencana-perencana pusat dipaksa mengatasi suatu krisis ukuran-ukuran (proporsi-proporsi) dengan membatasi pertumbuhan dan mencoba membuat suatu keseimbangan baru. Demikianlah, di Tiongkok dilihat adanya dua siklus menentukan: 1953-61 dan 1962-78. Penentu yang penting di sini bukan cuma pertanian saja (seperti yang ditegaskan aliran genetik lama) melainkan seluruh sektor utama yang memproduksi bahan-bahan mentah dan energi. Daur-daur seperti itu dapat diharapkioan berulang-jadi kecuali apabila sistem yang direncanakan secara terpusat secara drastik diubah dan jalan dibuka bagi perkembangan intensif, karena tanpa itu bentuk “sosialisme maju” apapun tidaklah mungkin.

Suatu tipe siklus kedua ditentukan oleh masukan-masukan teknologi. Pengimporan teknologi Sovyet di Tiongkok pada awal 1950-an melantik suatu siklus yang berakhir ketika masukan-masukan baru dari sumber itu telah mengering. Kemudian pada akhir 1950-an, suatu siklus baru mulai; teknologi Sovyet yang asli ditiru, tetapi juga terdapat suatu perkembangan massif dari teknologi menengah. Ketidak-efisienan teknologi menengah ini menimbulkan tuntutan-tuntutan untuk meningkat import-import dari Barat dan Jepang; dan proses ini, setelah permulaan-permulaan yang tersendat-sendat, melantik suatu siklus baru pada pertengahan 1970-an. Kali ini, ketidak-stabilan dalam penggunaan sepenuhnya teknologi baru itu dan dalam menyediakan dukungan infra-struktural yang diperlukan mengakibatkan suatu pembatasan siklus itu pada tahun-tahun 1979-80. Tipe siklus ketiga adalah suatu versi sosialis dari “siklus perdagangan politis” Kalecki. Dalam perumusan Kalecki yang asli, suatu penentu yang penting adalah pemilihan-pemilihan. Hal ini tidak terjadi di Tiongkok, sekalipun dalam kondisi-kondisi tertentu suatu kepemimpinan yang berorientasi pada pertumbuhan yang pesat akan menghimbau suatu khalayak massal; yaitu penganut-penganut yang ada atau, kalau bukan itu, pada mereka yang mau mengerahkan massa untuk mengembangkan suatu faktor *u* (motivasi) sintetik. Hal yang menentukan sekali, di mana suatu kepemimpinan seperti itu akan melantik suatu siklus, adalah manakala yang dirasakan sebagai suatu laju pertumbuhan yang tidak memuaskan bersiteguh pada suatu masa harapan-harapan yang membumbung tinggi. Demikian itulah halnya pada 1958, 1969-70 dan 1978. Orang harus menekankan bahwa upaya untuk melantik suatu dorongan radikal tidak dilakukan pada tahun-tahun krisis ekonomik atau politis (misalnya 1961 dan 1976), melainkan pada periode-periode harapan-harapan membumbung tinggi dengan membaiknya keadaan. Di tempat lain telah kukedepankan kesangsian-kesangsian metodologikalku mengenai yang oleh psikolog-psikolog sosial disebut “kehilangan aspirasional relatif.” Aku bahkan lebih skeptikal mengenai “kontradiksi utama” dalam masyarakat sosialis diungkapkan dalam artian-artian seperti itu.²⁵ Namun begitu, bersama McFarlane, aku yakin bahwa suatu penjelasan yang lebih lengkap mengenai problem-problem perpindahan dari perkembangan ekstensif pada perkembangan intensif dapat diperoleh

dengan mengintegrasikan tipe siklus ketiga ini dengan yang dua lainnya.

Dalam literatur Tiongkok akhir-akhir ini, hanya sedikit perhatian yang diberikan pada pandangan siklik ini. Orang dapat memahami mengapa pertimbangan-pertimbangan mengenai siklus politis itu mungkin akan menggelisahkan. Orang mungkin harus menyimpulkan bahwa “Komplotan Empat” telah lebih bereaksi pada momen-momen siklus yang berbeda-beda daripada tidak ubah-ubahnya menjadi “telur busuk.” Pandangan linear acapkali dipertimbangkan, sekalipun kebanyakan laporan Tiongkok mendiskusikan konsep-konsep mengenai perkembangan ekstensif dan perkembangan intensif tanpa rujukan apapun pada tahapan-tahapan historis.²⁶ Seakan-akan perkembangan intensif adalah karakteristik dari sosialisme bentuk apapun dan juga dari kapitalisme. Maka itu, ketika teoretisi Tiongkok berbicara tentang laju-laju (*rate* = tingkat) akumulasi yang tinggi, mereka lazimnya maksudkan yang di atas 30 persen tanpa memperhitungkan waktunya; manakala mereka berbicara tentang laju-laju (tingkat) investasi produktif yang tinggi dalam industri milik-negara, mereka lazimnya maksudkan yang di atas 20 persen tanpa memperhitungkan waktunya. Namun begitu, ada juga konsesi diberikan pada pandangan linear dalam mendiskusikan proporsi investasi yang diabdikan pada pembangunan barang modal di unit-unit milik-negara. Lazimnya diakui bahwa ini harus tinggi pada awal 1950-an, tetapi laju menurunnya adalah terlalu lamban

Tabel 3.1: Akumulasi dan Investasi per Rencana Lima Tahun

RLT ^{a)}	Tahun	Akumulasi	Laju investasi produktif dlm satuan	Balans	Proporsi investasi dlm Konstruksi Modal ^{b)}
1	1953-57	24.2	14.8	9.4	96.2
2	1958-62	30.8	23.3	7.5	92.3
	1963-65	22.7	14.0	8.7	84.5
3	1966-70	26.3	15.5	10.8	80.7
4	1971-75	33.0	20.6	12.4	77.5
5	1976-81	33.4	21.2	12.2	73.5

*) RLT = Rencana Lima Tahun

**) proporsi pada total investasi dalam satuan-satuan milik-negara

Sumber: State Statistical Bureau: Abstract, JPRS., 84111, 12 Agustus 1983, hal. 115, dan Liu Huiyong, *Jingji Yanjiu* 6, 1983, JPRS., 84013, 1 Agustus 1983, hal. 24.

Analisa Tiongkok konvensional atas angka-angka dalam tabel 3.I ini memuji periode Rencana Lima Tahun Pertama tetapi menunjukkan bahwa banyak kesulitan telah dialami sesudahnya dalam transisi dari perkembangan ekstensif pada perkembangan intensif. Sebagian hal ini disebabkan karena kesalahan-kesalahan “kekiri-kirian,” teristimewa selama Lompatan Jauh Kedepan, Revolusi Kebudayaan dan lompatan-semu tahun 1978. Kesalahan-kesalahan ini dipandang sebagai (dalam arti linear) penyimpangan-penyimpangan subyektif dari jalan yang benar, ataupun secara a-historis sebagai suatu produk dari “utopian-utopian” yang pandir. Tidak ada upaya untuk mencari sebab-sebab sistemik dari perilaku “kekiri-kirian” sebagai-mana yang dituntut oleh eksponen siklus-siklus.

Keterangan resminya adalah sebagai berikut. Dalam periode pertama gelora “kekiri-kirian” (1958-60) ada banyak dibicarakan mengenai tahap-tahap peneropongan perkembangan dan mengenai *pembebasan* tenaga-tenaga produktif yang sedang menanti untuk dilepaskan oleh perubahan-perubahan yang memadai dalam hubungan-hubungan produk-si. Pengerahan massa akan membereskan rintangan meterial-material dan orang dapat mendorong sektor itu *dan* industri berat dengan sekuat tenaga. Suatu faktor *u* yang sangat tinggi (moral) akan memperkenankan laju-laju akumulasi dan investasi yang sangat tinggi. Maka itu, laju akumulasi untuk tahun 1958 dikatakan sebesar 33.9 persen, naik menjadi 43.8 persen pada tahun 1959. Laju investasi dalam perusahaan-perusahaan milik-negara adalah 25 persen pada tahun 1958, naik menjadi 28.9 persen pada tahun 1959 dan 33 persen pada tahun 1960.²⁷ Sebagai akibatnya, sejumlah besar modal tersangkut dalam pekerjaan konstruksi dan pabrik-pabrik tidak dapat beroperasi pada kapasitas penuh.

Selama Revolusi Kebudayaan muncul suatu gambaran yang berbeda. Pada tahun 1966, pada saat pecahnya Revolusi Kebudayaan, laju

akumulasi adalah 30.6 persen dan selama bertahun-tahun ia tetap tinggi sekalipun adanya suatu laju pertumbuhan yang menurun, yang sebagian disebabkan oleh kacaunya Revolusi Kebudayaan. Kekhawatiran akan perang pada waktu itu menyebabkan suatu jumlah besar sekali investasi produktif di daerah pedalam (yang dinamakan “garis ketiga”), di mana infra-struktur tidak mencukupi dan karenanya, efisiensi rendah sekali. Namun, biarpun semua itu, laju investasi dalam perusahaan-perusahaan produktif yang dimiliki negara secara menyeluruh sebenarnya menurun hingga 10.8 persen pada tahun 1968 dan menjadi cuma 15.5 persen untuk Rencana Lima Tahun Ketiga.²⁸

Kita hanya dapat menyimpulkan dari ini bahwa terdapat investasi yang secara proporsional lebih besar dalam sektor-sektor non-produktif dan suatu penekanan lebih besar pada pembentukan cadangan-cadangan. Perhatian pada pertahanan dan kesiapsiagaan untuk perang disimpulkan dalam slogan “simpan gandum di mana-mana, gali terowongan-terowongan dalam-dalam dan waspadalah terhadap revisionisme.” Ini merupakan suatu jenis perkembangan ekstensif yang berbeda dari perkembangan akhir 1950-an, dan baru setelah “lompatan terbang” tahun 1970 ekses-ekses “kiri” Lompatan Besar itu mulai muncul kembali. Sekalipun lompatan terbang itu cuma berumur pendek, ketidakseimbangan ketidak-seimbangan yang berkaitan dengan suatu versi *kiri* mengenai perkembangan ekstensif bersiteguh hingga batas tertentu selama Rencana Lima Tahun Keempat dan sekali lagi diperburuk oleh lompatan semu tahun 1978. Hanya setelah pengalaman tersebut suatu perubahan fundamental dalam strategi terjadi. Upaya-upaya drastik dilakukan untuk mengurangi kesenjangan gunting-gunting dengan menaikkan harga-harga pertanian dan memupuk suatu pasar pedesaan, dan terjadi suatu pengalihan dramatik dalam investasi yang meninggalkan industri berat. Menjelang tahun 1981, telah kelihatan bahwa peralihan itu terlalu cepat dan suatu kebijaksanaan yang berhati-hati dalam penyesuaian kembali telah dijalankan. Walaupun begitu, kebijaksanaan yang berlaku sekarang adalah tetap menekan laju pertumbuhan untuk mencapai suatu keseimbangan baru.

Banyak ekonom telah menafsirkan dan menilai keterangan resmi di atas.²⁹ Tujuanku di sini, sebagai seorang yang mempelajari politik, hanya

untuk memunculkan implikasi-implikasi ideologisnya. Kecual apabila kata “kiri” dan “kanan” berkaitan dengan konfigurasi-konfigurasi tertentu dari tenaga-tenaga produktif atau dengan momen-momen khusus dari berbagai siklus, maka sulitlah untuk memberikan suatu arti obyektif kepadanya. “Kiri,” dalam Lompatan Besar, telah berarti suatu laju pertumbuhan yang tinggi, suatu laju akumulasi yang tinggi, suatu laju investasi yang tinggi dalam perusahaan-perusahaan milik negara dan suatu proporsi investasi pembangunan modal yang tinggi di dalam keseluruhan investasi. “Kiri,” pada Rencana Lima Tahun Ketiga berarti suatu laju pertumbuhan yang lebih rendah, suatu laju akumulasi yang tinggi, suatu laju investasi yang lebih rendah dalam perusahaan-perusahaan milik-negara dan investasi dalam jenis pembangunan modal (perusahaan-perusahaan “garis ketiga”) yang salah. Pada tahun 1982, laju akumulasi masih tetap 29 persen dengan suatu laju investasi dalam perusahaan-perusahaan milik-negara sebesar 19.8 persen. Ini mestinya diban-dingkan dengan suatu laju akumulasi ideal yang sudah ditetapkan sebesar kurang dari 30 persen dan suatu laju investasi sebesar 17-18 persen.³⁰ Pada penglihatan pertama, ini adalah kurang-lebih sama *kiri*-nya seperti pada puncak Revolusi Kebudayaan; namun tidak dianggap begitu karena kini ada suatu prioritas yang lebih besar diberikan pada pertanian dan tidak banyak investasi mubazir dalam perusahaan-perusahaan “garis ketiga.”

Sedangkan yang mengenai proporsi investasi total dalam unit-unit milik-negara yang dicurahkan pada pembangunan modal, ini secara teratur menurun dengan berlalunya tahun demi tahun. Ia adalah 74.9 persen pada tahun 1978, 1979 dan 1980, menurun hingga 66.4 persen pada tahun 1981 dan 65.7 persen pada tahun 1982. Namun, jika diperha-tikan dengan serius sebuah komentar resmi yang menyatakan bahwa tiga tahun “kiri” 1958, 1970 dan 1978 telah dikecualikan, sebagian karena investasi dalam pembangunan modal telah melampaui tahun sebelumnya dengan lebih dari 10 milyar Yuan, maka tahun 1982 mestinya juga suatu tahun “kiri,” karena ketika itu, investasi dalam pembangunan modal telah melebihi tahun sebelumnya dan jumlah yang dianggarkan dengan 11 milyar Yuan, mencapai 55.5 milyar Yuan.³¹ Bahkan yang lebih serius lagi, investasi dalam pembangunan modal untuk empat bulan pertama

tahun 1983 adalah 18.3 persen lebih tinggi daripada untuk periode sama tahun sebelumnya. Perkembangan eksekutif tampaknya menggejala. Yang pasti, perencana-perencana ekonomi Tiongkok melakukan segala yang dapat mereka lakukan untuk memerangi pembangunan modal yang eksekutif, namun mereka menghadapi suatu problem. Hingga akhir 1970-an, laju-laju hasil dari otonomi perusahaan yang diperluas, yang dimaksudkan untuk beralih pada suatu bentuk perkembangan “intensif.” Pertumbuhan dari dana-dana yang dianggarkan secara ekstra telah dramatik sekali. Pada tahun 1957, rasio dana-dana yang dianggarkan secara ekstra pada pendapatan keuangan negara adalah kira-kira 10 persen. Menjelang 1965, ini telah naik menjadi 17.7 persen. Pada tahun 1982, ia adalah 60 persen dan kemudian tidak mencakup pinjaman-pinjaman yang dibuat di luar rencana-rencana kredit resmi dan penerimaan-penerimaan dan pembayaran-pembayaran yang ditangani oleh unit-unit itu sendiri.³² Kenyataan bahwa banyak dari dana-dana yang dianggarkan secara ekstra ini tertuang dalam investasi-investasi modal baru telah menyebabkan negara menetapkan tindakan-tindakan pada tahun 1983 untuk mengetatkan penguasaannya atas perkreditan. Suatu Rencana Lengkap Untuk Kredit dan Keuangan telah disarankan untuk mencegah perluasan pembangunan modal secara membuta dan untuk memperlancar perencanaan bagi renovasi perlengkapan.³³ Tampaknya luar biasa sulitnya untuk keluar dari tahapan perkembangan ekstensif.

Paragraf-paragraf di muka menyiratkan bahwa kini terdapat suatu kesediaan untuk melihat pada sebab-sebab sistemik dari perilaku “kiri” di waktu sekarang (manakala kepemimpinan tidak dinyatakan sebagai “kiri”), melainkan suatu kecenderungan yang terus-menerus untuk mengabaikan sebab-sebab sistemik dari perilaku *kiri* dalam menganalisa berbagai lompatan-lompatan di waktu lalu. Cara pendekatan ini mengingatkan pada periode pasca-Stalin di Uni Sovyet, di mana gangguan-gangguan sistemik seringkali dapat direduksikan (dipulangkan) pada kebiasaan-kebiasaan khusus dari kepribadian Stalin.

Banyaklah pekerjaan yang harus dilakukan jika kita mau memahami cara pendekatan siklik Kalecki. Aku menduga bahwa siklus-siklus ekonomi yang terpenting yang digambarkan oleh McFarlane adalah terlalu luas. Penerapan cara pendekatan Kalecki pada negeri- negeri

Eropa Timur menunjukkan siklus-siklus yang berjangka waktu lebih singkat,³⁴ walaupun orang harus memperhatikan bahwa di kebanyakan negeri-negeri itu terdapat sektor manufaktur yang relatif besar dan suplai-suplai bahan mentah yang jauh lebih miskin. Lagi pula, aku sudah menunjukkan kekhawatiran metodologikalku mengenai siklus-siklus politis. Tetapi siklus-siklus teknologis itu memberikan banyak bahan pemikiran. Setiap dari tiga siklus yang diidentifikasi itu menekankan tipe-tipe teknologi yang berbeda-beda, dan teknologi-teknologi yang dilantik pada masing-masing dari ketiga siklus itu telah menghasilkan problem-problem yang berbeda-beda pula. Teknologi yang diperkenalkan selama siklus pertama, kini dikarakterisasikan oleh keusangan. Pada tahun 1982 telah dilihat bahwa dari 440 milyar Yuan kekayaan tetap yang dipegang oleh perusahaan-perusahaan, sepertiganya telah diperoleh pada 1950-an dan 1960-an. Tulang punggung industri berat masih tetap kurang lebih 400 perusahaan yang didirikan selama Rencana Lima Tahun Pertama. Perlengkapannya sudah usang dan konsumsi energinya tinggi. Pada *Anshan Iron and Steel Corporation*, perusahaan kunci dari Rencana Lima Tahun Pertama, misalnya, duapertiga dari perlengkapannya masih model tahun-tahun 1930-1950; karenanya, lembaran-lembaran baja tidak rata dalam ketebalan dan kekuatan internal dan eksternalnya berbeda-beda. Pada Changchun No.1, *Motor Vehicle Plant* (yang pertama dan paling bergengsi dari Tiongkok), lebih dari 60 persen dari perlengkapannya telah bekerja selama lebih dari duapuluh tahun dan telah mengalami sedikitnya dua hingga sepuluh reparasi besar. Perkakas-perkakas mesin kombinasi, yang di negeri-negeri industri maju cuma mempunyai umur dari 8 hingga 10 tahun, setelah bekerja limabelas hingga duapuluh tahun di Tiongkok sudahlah sangat aus. Begitu pula di tiga pabrik bantalan-peluru (*ballbearing*) terbesar (Harbin, Wangfangdian dan Luoyang), lebih dari 45 persen perkakas-perkakas mesin telah bekerja selama duapuluh tahun; di pabrik Harbin 60 persen secara resmi dinyatakan di bawah standar. Pabrik-pabrik kimia yang didirikan pada akhir 1950 secara mencolok tidak efisien. Pabrik Pupu Kimia Jilin, misalnya, telah meningkatkan kapasitas produksinya selama tahun-tahun itu dari 75.000 ton hingga 300.000 ton ammonia sintetik, tetapi untuk setiap ton yang dihasilkannya (17 - 18 juta kilokalori), konsumsi energinya adalah dua kali lipat dari

yang dihabiskan oleh pabrik-pabrik berukuran sama, yang diimport pada tahun 1970-an (9-10 juta kilokalori). Dari 1.56 juta kendaraan bermotor sivil di Tiongkok, 60 persen terdiri atas dua tipe truk yang didasarkan pada desain-desain tahun 1940 dengan konsumsi bahan bakar yang 20-30 persen lebih besar daripada kendaraan-kendaraan yang diimport dari luar negeri. Menurut ekonom industrial terkenal, Ma Hong, hanya 20 persen dari perlengkapan industrial teknikal di Tiongkok yang memenuhi standard tahun 1960-an dan 1970-an, 20-25 persen secara teknikal terbelakang namun dapat diperbaiki, 20-25 persen benar-benar sudah usang tetapi terpaksa diselamatkan untuk sementara waktu dan sisa 35 persen semestinya sudah dianggap besi tua (rongsokan).³⁵

Keadaan yang sangat menyedihkan dari pabrik-pabrik industrial yang lebih tua itu, demikian dikatakan, adalah disebabkan oleh pengaruh golongan yang berkelakuan seperti pembudidaya-pembudidaya sabet dan bakar. Strategi mereka adalah “menguras tambak ikan itu hingga kering” dan kemudian pindah ke tambak yang lainnya. Sebagai akibat dari pengaruh mereka, demikian ditegaskan, 90 persen dari devisa negara yang diperuntukkan pengimportan teknologi antara 1950-1979 dihabiskan untuk perangkat-perangkat peralatan secara lengkap (dan banyak lagi untuk pabrik-pabrik lengkap) dan bukannya untuk memajukan tingkat teknologis peralatan-peralatan yang ada.³⁶ Peneropongan a-historis perilaku “kiri” melintasi tiga siklus ini adalah menyesatkan sekali. Dalam siklus pertama (1950-an) tidak banyak perselisihan mengenai pengimportan perangkat-perangkat peralatan secara lengkap untuk secepatnya membangun suatu landasan industrial semasanya blokade ekonomi dan Perang Dingin. Struktur perencanaan sentral yang diterima ketika itu selalu dipandang sebagai suatu keharusan historis; namun yang harus diakui adalah, bahwa diselipkan ke dalamnya adalah suatu logika mengenai perkembangan ekstensif yang pasti akan menimbulkan problem-problem keusangan di kemudian hari. Kegagalan untuk mengubah peralatan yang ada bukan hanya suatu masalah pemikiran “kiri”; ia adalah juga konsekuensi dari cara keputusan-keputusan mengenai investisi dalam pembangunan modal itu diambil. Ia juga, secara paradoksal, merupakan akibat upaya-upaya untuk mengubah sistem sklerotik (*sclerotic* = berjangkan-kaku) yang

direncanakan secara sentral itu. Dengan desentralisasi wewenang kepada propinsi-propinsi (seperti yang dilakukan pada tahun 1957), maka pemerintahan-pemerintahan lokal berlomba untuk men-ciptakan perkembangan baru dan modern yang paling mengesankan dan, dengan berbuat begitu, memperbesar pengeluaran untuk pembangunan modal. Seperti telah kukemukakan di atas, dengan desentralisasi kekuasaan pada perusahaan itu sendiri, pertumbuhan dana-dana yang dianggarkan secara ekstra memperlemah cengkaman perencanaan-perencana pusat atas pengeluaran pembangunan modal.

Sesungguhnya, banyak pabrik-pabrik besar akhir-akhir ini telah dikritik karena memboroskan dana-dana yang diperuntukkan bagi transformasi teknikal pada proyek-proyek konstruksi modal; dan mereka telah berhasil meloloskan diri dari tanggung-jawab justru karena otonomi mereka yang diperbesar. Lagi pula, jelaslah bahwa negara tidak secukupnya mempercayai perusahaan-perusahaan untuk dilibatkan dalam transformasi peralatan-peralatan yang ada.³⁷

Karenanya, banyak dari industri Tiongkok terkunci dalam pola perkembangan ekstensif yang dilantik selama siklus teknologis pertama, betapapun “kiri”- atau “kanan”-nya para pemimpin.

Bagaimanakah sekarang dengan teknologi yang diperkenalkan selama siklus kedua? Ketika mereka diperkenalkan, “lima industri kecil” dari masa itu dipuji karena mereka lebih dekat pada bahan-bahan mentah dan membantu mengatasi masalah-masalah keburukan komunikasi dan transportasi. Sudah pasti, banyak dari mereka itu mencolok sekali ketidak-efisienannya jika diukur menurut aritmatika normal pada ekonom; tetapi jika orang benar-benar mau menilai kemanfaa-tannya, orang harus memperhitungkan efek-efek jangka panjang dari upaya mendidik rakyat dalam teknik-teknik industrial dan kenya-taan bahwa adakalanya industri-industri kecil berhasil memobilisasi dana-dana yang tidak akan pernah menjadi modal produktif dengan cara apapun lainnya. Menghitung produktivitas industri- industri seperti itu penuh dengan problema yang luar biasa beratnya. Tetapi bukan itu yang mau

kupersoalkan. Argumenku di sini adalah bahwa, sekalipun banyak di antaranya telah ditutup, sejumlah besar akan tetap ada untuk suatu jangka waktu yang lama, secara tidak bisa lepas lagi terkunci dalam suatu pola perkembangan bagi perusahaan- perusahaan besar untuk beralih pada suatu pola intensif, tidak ada kemungkinan orang akan melihatnya tumpah pada perusahaan- perusahaan kecil dan tidak-efisien di dalam *xian* di waktu menda-tang. Sedangkan yang mengenai perusahaan-perusahaan di wilayah garis ketiga, yang didirikan selama Rencana-rencana Lima Tahun Ketiga dan Keempat, di situ jelas terdapat suatu manifestasi yang mencolok mengenai problem-problem perkembangan ekstensif. Menurut Ma Hong, tingkat perlengkapan mekanikal per seorang buruh di perusahaan-perusahaan besar dan sedang di daerah-daerah itu adalah 27 prosen lebih tinggi tinimbang di daerah-daerah yang sudah lama diindustrialisasi (“garis pertama” dari Beijing, Shanghai, Tianjin, Liaoning dan Jiangsu), tetapi nilai produksi per seorang buruh adalah 52 prosen lebih rendah dan koefisien penggunaan kekayaan tetap (nilai produksi per 100 Yuan kekayaan tetap) adalah 54 prosen lebih rendah.³⁸ Karena kekurangan investasi modal baru secara besar-besaran dalam infrastruktur, tidak ada jalan untuk menanggulangi ini – dan negara bersikeras pada saat ini untuk menekan pengeluaran seperti itu serendah mungkin.

Adilkah mengkritik pendirian perusahaan-perusahaan “garis ketiga” ini sebagai “kiri”? Banyak yang bergantung di sini pada apakah tanggapan akan ancaman Sovyet tahun 1960-an dan awal 1970-an hanya merupakan suatu fantasi “subyektif” atautkah memang suatu realitas obyektif. Seandainya ada suatu konflik besar pada waktu itu, maka perusahaan-perusahaan ini pasti telah dianggap biaya- efektif. Seperti banyak dari “subyektivisme” yang dinyatakan positif (tapi tanpa bukti), kita baru dapat benar-benar menyatakannya begitu lama setelah peristiwanya sendiri.

Akhirnya kita sampai pada kesalahan “kiri” karena pengimportan perangkat-perangkat peralatan secara lengkap dan pabrik-pabrik lengkap dari Barat. Ini benar-benar meluncur pada 1970-an dan meletakkan landasan bagi siklus ketiga. Jika ini benar-benar mau dinamakan “kiri,” maka harus dipertimbangkan bahwa salah satu “kesalahan Komplotan

Empat” adalah “mengancam akan merusak perdagangan luar negeri” dengan bersikeras bahwa pabrik-pabrik asing mewujudkan hubungan-hubungan produksi kapitalis, dan bahwa mereka jangan diimport. Diungkapkan seperti itu, tampaknya seperti suatu kesalahan “kiri.” Tetapi kalau orang mengajukan masalah secara lain dan menunjukkan bahwa “Komplotan Empat” khawatir (seperti halnya dengan banyak ahli ekonomi politis di dunia ketiga), bahwa akan sulit untuk mengintegrasikan pabrik-pabrik lengkap ke dalam suatu ekonomi dualistik secara teknologis (“berjalan atas dua kaki”), maka para dedengkot “kiri” itu tampak sebagai di pihak kanan. Orang hanya dapat mengulangi: “kiri” dan kanan tidak mempunyai makna kecuali orang memerinci teknologi yang mana yang sedang dibicarakan dan pada waktu kapan ia diimpor.

Orang harus memperhatikan bahwa di suatu negeri seperti Tiongkok, di mana tingkat-tingkat produktivitas berbeda begitu jauh antara lokalitas dan industri, sungguh sulit sekali untuk menentukan pada titik mana seluruh ekonomi dapat dikatakan beralih dari tahap perkembangan ekstensif pada perkembangan intensif. Tabel-tabel 3.2 dan 3.3 memperlihatkan pola-pola pertumbuhan produktivitas yang sangat berbeda jauh.

Tabel 3.2: Pertumbuhan dalam Produktivitas

Tahun	Hasil dlm Yuan per pekerja/setahun	Indeks (1952 = 100)
1949	3.016	72.1
1952	4.184	100
1957	6.362	152.1
1965	8.979	214.6
1978	11.130	266.0
1979	11.838	282.9
1980	12.080	288.7

1981	11.863	283.5
1982	12.133	290.0

Tabel 3.3: Produktivitas menurut Industri (1952 = 100)

Industri	1957	1965	1978	1981	1982
Secara Keseluruhan	152.1	214.6	266.0	283.5	290.0
Metalurgi	208.2	303.1	233.6	250.8	257.1
Tenaga Listrik	156.3	248.9	386.0	336.2	322.8
Batu-bara	150.8	98.9	110.8	100.7	103.6
Petroleum	174.9	317.7	624.3	520.2	494.7
Kimia	231.7	501.2	552.4	654.6	694.5
Mesin	199.5	287.4	404.0	380.2	425.8
Bahan bangunan	171.1	313.5	328.1	341.3	365.9
Kehutanan	98.6	95.9	79.7	80.6	78.7
Makanan	141.7	162.5	158.2	176.2	175.5
Tekstil	114.5	168.9	208.7	238.9	213.6
Kertas	174.5	209.1	155.4	142.3	144.3

Sumber: State Statistical Bureau, Abstract, 1983, JPRS., 84111,
12 Agustus 1983, hal. 100-101.

Memang, orang akan mengharapkan tingkat-tingkat produktivitas yang tinggi dalam industri kimia, karena banyak pabrik-pabrik baru telah diimpor, dan orang akan mengharapkan industri batu-bara yang sudah kuno itu memperlihatkan suatu gambaran yang sebaliknya. Persoalannya adalah apa yang dilakukan di sektor-sektor itu. Orang dapat mengeluh tentang “mangkuk nasi besi” dan efek-efek pekerjaan selama hidup yang anti-ekonomi dan orang dapat mengambil tindakan-tindakan untuk mempekerjakan kebanyakan buruh baru atas dasar suatu kontrak. Namun, aku khawatir, bahwa efek-efek jangka pendek atas pekerjaan akan berarti bahwa perkembangan intensif akan dibayar dengan pencapaian suatu

masyarakat yang kurang sosialis, setidaknya-tidaknya dalam kaitan dengan “hukum” fundamental dari sosialisme Stalin – yaitu mengenai dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan dari jumlah rakyat yang terus menerus semakin bertambah. Tetapi di sini kita kembali pada hal yang telah dikemukakan dalam bagian pertama Bab ini dan masalah yang diangkat gerak kearah sosialisme maju memerlukan ditinggalkannya untuk sementara *telos* sosialis itu? Kalau ya, untuk berapa lama?

KESIMPULAN

Perluasan sistem kontrak dan diberikannya hak yang diperluas untuk mempekerjakan dan memecat kepada perusahaan-perusahaan membawa kita kembali pada argumen mengenai perkembangan pasar tenaga kerja di mana bentuk-bentuk kapitalisme telah lama muncul sebelum “sosialisme maju” yang manapun. Bagi banyak ekonom Barat yang ortodoks, kesimpulannya jelas; perkembangan intensif hanya mungkin di bawah kapitalisme di mana perusahaan-perusahaan menjadi bangkrut jika mereka mengabaikan efisiensi faktor-faktor atau produksi. Dengan demikian, transisi dari perkembangan ekstensif pada perkembangan intensif di Tiongkok akan terjadi apabila dan manakala Tiongkok kembali pada satu-satunya sistem ekonomi yang benar-benar efisien. Karena keyakinan ini, teoretisi “dunia riil” ini mengesampingkan perdebatan-perdebatan mengenai sosialisme maju dan sosialisme terbelakang sebagai suatu omong-kosong ideologis. Beberapa Mensheviki yang hanya duduk di belakang meja mengangkat bahu mereka, memutuskan bahwa transisi dari perkembangan ekstensif pada perkembangan intensif hanya mungkin terjadi “sebelum” dilakukan upaya apapun untuk mensosialisasi ekonomi. Pengkritik-pengkritik Bolshevik mereka akan menunjukkan bahwa betapapun tidak seimbang dan tidak efisiennya ekonomi Sovyet, ia telah mencapai suatu derajat perkembangan intensif yang, sekalipun tidak memenuhi standard bagi sosialisme maju yang disyaratkan oleh Su Shaozhi dan Wang Guoping, jelas-jelas mengkualifikasikan Uni Sovyet sebagai suatu negeri maju secara industrial; atas dasar ini mereka mempertahankan versi “sosialisme maju” dari zaman Brezhnev. Yang tersebut belakangan ini mengandung kebenaran! Hasil-hasil Uni Sovyet tidak patut diremehkan. Bahkan, banyak sekali yang dicapai di Uni Sovyet selama beberapa dasawarsa

perkembangan ekstensif. Betapapun, walau akan ada yang menyangkal bahwa Uni Sovyet adalah “maju,” banyak yang akan mendiskualifikasikannya sebagai sosialis. Kepemimpinan Tiongkok sekarang tidak dapat lebih lama lagi berbuat demikian, karena ia mengikuti dalil yang sama, yang menjadikan tenaga-tenaga produktif dan “satu” hubungan produksi (kepemilikan) sebagai titik pangkalnya. Sudah tentu terdapat hubungan-hubungan produksi lain dalam perumusan Marxian, di antaranya yang tidak kurang penting adalah hubungan antara orang-orang yang bekerja. Dan bagaimana tentang hubungan para produser dengan produkt-produkt pekeffrjaan itu, yang berada di luar perbedaan biasa antara tenaga-tenaga dan hubungan-hubungan produksi? Aku berbicara di sini tentang alienasi yang telah didis-kusikan untuk beberapa waktu lamanya di Tiongkok pada sekitar peringatan 100-tahun Marx dan kemudian dibungkam habis. Namun pasti ada banyak orang di Tiongkok yang mempertanyakan validitas suatu “logika industrialisme” model Clark Kerr, yang akan beroperasi seperti “suatu hukum ekonomik obyektif” hingga saat kerajaan Tuhan secara ajaib akan dihantar ke atas bumi. Karenanya, diperlukan lebih banyak lagi pemikiran mengenai ide sosialisme sebagai proses. Ini tidak mesti suatu “sosialisme kemiskinan”; melainkan setiap pemikiran tentang suatu *telos* memang melibatkan suatu batas tertentu pemikiran utopian yang pasti tidak akan disetujui oleh Engels; sedangkan bagi Marx, kita cuma dapat menerka-nerka belaka. Tetapi, apakah yang akan dipikir oleh Marx itu benar-benar menjadi soal?

Catatan

1. Brugger, 1981(b)
2. Brugger, 1978, hal. 20-7
3. CPSU., 1961
4. Stalin (1936), Stalin, 1976, hal. 799-800
5. Lihat Evans, 1977
6. Xiong Yingwu dan Wang Shaoshun, 1980, hal. 8-12

7. Ini tersebar dalam tulisan-tulisan Mao, 1974. Khususnya lihat kritik-kritik Mao mengenai Stalin pada tahun 1957 yang menyatakan bahwa Stalin tidak dapat melihat bahwa sosialisme dapat dinegasi, (hal. 49-50)
8. Wang Guoping, Shehui Kexue, 6, 1983, JPRS., 84330, 15 September 1983, hal. 7-14
9. Marx, (1875), Marx dan Engels, SW., III, 1970, hal. 18
10. Brugger, 1984(b)
11. Wang Guoping, Shehui Kexue, 6, 1983, JPRS., 84330, 15 September 1983, hal. 7-14
12. Xiong Yingwu dan Wang Shaoshun, 1980, hal. 81
13. Wang Guoping, Shehui Kexue, 6, 1983, dalam JPRS., 84330, 15 September 1983, hal. 7-14
14. Brugger, dalam Young (akan terbit)
15. Xiong Yingwu dan Wang Shaoshun, 1980, hal. 104-8
16. Lihat Dobb, 1948, hal. 328. Mengenai alasan-alasan Bazarov dan Groman, lihat Jasny, 1972, hal. 89-138
17. Lihat Dymar, 1957, hal. 223-61
18. Jenis argumen ini dapat dijumpai dalam Ellul, 1967
19. Lihat Campbell, 1968. Untuk diskusi terinci mengenai penggunaan ekonomi matematikal, lihat Ellman, 1973
20. Lihat Watson, 1983
21. Krivitsov dan Sidikhmenov, 1972, hal. 212
22. Ibid., hal. 237
23. Suatu diskusi klasik adalah Sik, 1967. Untuk suatu diskusi Tiongkok, lihat Xu Fulan, Shehui Kexue, 6, 1983, JPRS., 84404, 26 September 1983, hal. 19-24
24. Lihat Evans, 1977, dan Bergson, 1973
25. McFarlane, 1983; interpretasiku agak berbeda.
26. Brugger dan Hannan, 1983, hal. 45-8
27. A.I. Xu Fulan, Shehui Kexue, 6, 1983, JPRS., 84404, 26 September 1983, hal. 19-24
28. Liu Huiyong, Jingji Yanjiu, 6, 1983, JPRS., 84013, 1 Agustus 1983, hal. 19-25
29. Ibid.
30. Lihat a.I. Ishikawa, 1983

147 | Bill Brugger (peny.)

31. Jiang Wei, GMRB, 26 Juni 1983, hal. 4

32. State Statistical Bureau, Abstract, JPRS., 84111, 12 Agustus 1983, hal. 115

33. Duan Yun, Zhongguo Jinrong, 5, 1983, JPRS., 83989, 27 Juli 1983, hal. 76-82

34. Caizheng, 6, 1983, JPRS., 84388, 22 September 1983, hal. 64-7

35. Lihat a.l. Goldmann, 1968

36. Ma Hong, Zhongguo Jingji Nianjian, 1982, JPRS., 84059, 8 Agustus 1983, hal. 88-101

37. Ibid., hal. 94

38. Jingji Ribao, 25 Juli 1983, JPRS., 84188, 25 Agustus 1983, hal. 62-8

39. Caizheng, 6, 1983, JPRS., 84388, 22 September 1983, hal. 68-72

40. Ma Hong, Zhongguo Nianjian, 1982, JPRS., 84059, 8 Agustus 1983, hal. 92

41. Kerr dkk., 1962.

BAB EMPAT

Reform Ekonomi: Legitimasi, Efisiensi Dan Rasionalitas

Kate Hannan

Bab Dua mempersoalkan bahwa teori-teori Tiongkok mengenai “pelanjutan revolusi,” yang berlaku pada 1960-an dan awal 1970-an, sangat menekankan pada penghindaran kecenderungan-kecenderungan yang dapat mengakibatkan suatu restorasi kapitalisme. Sekalipun isi yang diberikan pada istilah “pelanjutan revolusi” telah berubah sesudah 1976, kemungkinan suatu restorasi kapitalisme masih merupakan suatu kekhawatiran besar. Kekhawatiran itu dapat diduga akan tetap berkanjang selama tenaga-tenaga produktif secara relatif masih terbelakang. Pada waktu itu ada diskusi mengenai apakah tenaga kerja terus merupakan suatu barang dagangan dan dengan cara apa sifat barang dagangan dari tenaga kerja itu dapat direproduksi dalam suatu masyarakat yang sedang mengalami transisi sosialis. Namun, setelah 1978, usaha-usaha dilakukan untuk menetapkan sosialisme tidak sebagai suatu proses melainkan sebagai model-model yang ditentukan secara ekonomis. Banyak sekali ketakutan akan suatu restorasi kapitalisme masih disuarakan oleh pengkritik-pengkritik posisi resmi yang merasa bahwa garis de-markasi antara kapitalisme dan sosialisme telah menjadi kabur. Namun begitu, posisi resmi tampil sebagai suatu rasionalisasi teoritis dalam mempromosikan perkembangan tenaga-tenaga produktif.

Dua Bab terdahulu menelusuri origin-origin Stalinis dari cara pendekatan model-pembangunan dalam menyimak tahapan-tahapan perkembangan sosialis. Adalah posisi 1936¹ Stalin yang coba disamai/ditirukan (sekalipun dianggap bahwa Stalin telah membubungkan model “sosialisme”-nya pada suatu tingkat yang terlalu rendah. Posisi Stalin tahun 1952² yang lebih fleksibel telah dikritik oleh sejumlah sarjana, justru karena Stalin tidak cukup determinis; ia agaknya memberi bobot yang terlalu berlebihan pada hubungan-hubungan produksi. Mao, tentu saja, sampai pada ekstremitas-ekstremitas yang lebih jauh dalam

peneropongan tahapan-tahapan perkembangan pada akhir 1950-an; dan “teori penepatan waktu (*timing-theory*)”-nya, yang dilukiskan dalam “*Reading Notes*-nya mengenai naskah pegangan *Political Economics*,”³ merupakan suatu usaha untuk mendamaikan/mempertemukan suatu perhatian mengenai tahapan-tahapan dengan ide sosialisme sebagai suatu proses yang fleksibel. Setelah 1978, pemikiran seperti itu disederhanakan (bahkan terlalu disederhanakan) dengan diterimanya model dua-tahapan sederhana yang diuraikan dalam Bab terdahulu.

Menjelang 1979 semakin diakui di kalangan resmi bahwa Tiongkok berada dalam suatu tingkat sosialisme terbelakang, yang dikarakterisasikan oleh koeksistensi pemilikan negara dan kepemilikan kolektif. Pada tahap ini produksi dan peredaran barang dagangan akan berlangsung terus dan akan tetap ada perbedaan-perbedaan mencolok dalam kondisi-kondisi kehidupan antara kaum buruh dan kaum tani. Jelas, dijalankannya suatu gagasan mengenai sosialisme terkebelakang yang ditentukan secara ekonomis adalah lebih berguna dalam merasionalisasi penguberan pertumbuhan ekonomik daripada gagasan sebelumnya mengenai sosialisme sebagai suatu proses transformasi tenaga-tenaga maupun hubungan-hubungan produksi. PKT berusaha memajukan legitimasinya dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan.

Menjelang akhir 1970-an, masalah legitimasi itu merupakan suatu masalah yang sangat konkret. Dugaan-dugaan Revolusi Kebudayaan bahwa “pelopor” telah mengakibatkan mundurnya revolusi telah memberikan suatu pukulan serius pada klaim otoriter Partai yang mempraktekkan dominasi atas nama “kediktaturan proletariat.” Adalah pada tahun-tahun penuh pergolakan itu, ketika setiap orang mengkalaim kesetiaan pada Mao, bahwa pandangan-pandangan Mao yang sesungguhnya, telah digumpil dari ideologi resmi yang disebut “Pikiran Mao Zedong.” Selama gerakan-gerakan politis awal 1970-an, banyak orang menjadi bingung mengenai apakah sebenarnya “Pikiran Mao Zedong” itu dan apakah Partai mengartikulasikannya. Kemudian, ketika orientasi fungsionalis yang diartikulasikan oleh pemimpin-pemimpin Partai berganti setelah hancurnya “Komplotan Empat,” secara resmi diumumkanlah bahwa Pikiran Mao Zedong adalah sangat berbeda dari yang dibayangkan oleh kebanyakan anggota Partai. Teoretisi Weberian

akan menjelaskan situasi itu dalam arti penggunaan fungsi penglegitimasi Pikiran Mao Zedong oleh pihak-pihak yang mencari dominasi politis. Teoretisi seperti itu hampir boleh dipastikan akan menunjuk pada kerusakan yang ditim-bulkan pada legitimasi PKT oleh faksionalisme Partai, oleh kritik terbuka sebelumnya mengenai kebijaksanaan dan bekerjanya Partai yang disebabkan oleh posisi teoritis Mao tahun 1960-an dan oleh kritik berikutnya mengenai “kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan-kepentingan” dan “orang-orang Partai yang berkuasa yang menempuh jalan kapitalis.”⁴ Posisi teoritis Mao pada tahun 1960-an, dan yang kemudian diartikulasikan oleh *aliran Shanghai* memandang sosialisme sebagai suatu periode transisi – suatu periode perubahan revolusioner. Suatu pandangan seperti itu tidak mengun-tungkan bagi pilihan (lebih disukainya) stabilitas politis yang terkandung di dalam penafsiran fungsionalis mengenai proses-proses sosial. Posisi teoritis Mao dan kemudian dari *Aliran Shanghai* mempredikasikan suatu gagasan mengenai kemajuan pada suatu visi mengenai “apa yang seharusnya.” Seorang Weberian tidak mempunyai gagasan mengenai “kemajuan” seperti itu. Teoretikus Weberian itu terbatas pada berusaha mengerti mengenai *apa yang ada*.

Dengan hancurnya dan sandiwara-pengadilan “Komplotan Empat” mungkin diperkirakan bahwa legitimasi PKT akan dipulihkan secukupnya. Namun, sebagaimana ditunjukkan oleh Bab-bab terdahulu, Partai merasakan kebutuhan akan suatu *keputusan strategik* yang akan mempercepat perbaikan itu.

Dengan latar-belakang ini peranan PKT dirumuskan kembali. Peranan Partai tidak lagi dipandang dalam pengertian untuk mencapai suatu masyarakat tidak-berkelas. Kini peranan Partai haruslah memajukan *modernisasi sosialis* dengan jalan suatu fokus primer pada perkembangan tenaga-tenaga produktif. Perkembangan tenaga-tenaga produktif diidentifikasi sebagai kepentingan-kepentingan objektif dari proletariat. Kebutuhan-kebutuhan ekonomik dari massa luas harus dimajukan. Sebagian besar perhatian kini lebih ditujukan pada problem-problem ekonomik langsung daripada pada persoalan-persoalan yang luas mengenai transisi sosialis. Perhatian perencana-perencana Tiongkok difokuskan pada yang di Bab terdahulu dilukiskan sebagai penguberan

“pengalokasian sumber secara optimal.” Dalam bahasa fungsional Weberian, PKT berhenti mengartikulasikan suatu tujuan substantif (tujuan yang berorientasi pada nilai). Ia telah merumuskan/menetapkan kembali orientasi fungsionalnya dalam artian rasionalitas formal atau rasionalitas bertujuan (cara-cara yang cocok untuk tujuan-tujuan tertentu).⁶

Penafsiran seperti itu mesti disesalkan oleh mereka yang menolak kecanduan teoretikus fungsionalis akan “yang ada” dan yang lebih menyukai suatu gagasan objektif *-a priori-* Marxis yang diberitahu mengenai “yang seharusnya.” Tetapi suatu kritisisme yang kurang jelas mengenai posisi Weberian mesti dibuat. Dari dalam paradigma (model pola) fungsionalis, telah dikemukakan bahwa rasionalitas yang semurnya bertujuan, dalam arti yang digunakan Weber, menawarkan suatu pendasaran yang tidak cukup bagi legitimasi. Di sini dikedepankan bahwa perlu adanya suatu konsensus umum yang didasarkan dalam suatu orientasi rasional pada nilai-nilai.⁷ Argumen ini dapat diperluas untuk menyiratkan bahwa rasionalitas bertujuan (*remunerative*) hanya dapat dipandang sebagai suatu bentuk rasionalitas substantif (yang sebenarnya) yang memburuk. Dalam bentuk murninya rasionalitas bertujuan tampil netral-nilai. Dengan begitu ia merupakan suatu bentuk rasionalitas yang menyimpang. Jika kritisisme tentang pembagian Weberian antara rasionalitas sebenarnya dan rasionalitas bertujuan itu berlaku, maka orang tidak dapat memahami posisi PKT pasca-1978 sebagai suatu pergantian mentah-mentah dari rasionalitas sebenarnya pada rasionalitas bertujuan (bahkan jika diperkenankan penggunaan “tipe ideal” secara Weberian). Itu adalah suatu perubahan dalam orientasi fungsional PKT dari sesuatu yang sesuai dengan pencapaian tujuan rasional sebenarnya akan suatu masyarakat tidak-berkelas pada sesuatu di mana orientasi fungsional itu bersesuaian dengan pencapaian tujuan rasional sebenarnya akan “modernisasi sosialis.” Kedua tujuan itu, sebaliknya, dapat dipandang sebagai bersandar pada wewenang yang diberikan pada PKT oleh yang mendominasinya berdasarkan pengetahuan dan kemampuannya untuk mengidentifikasi kepentingan-kepentingan objektif dari massa banyak. Tetapi, dalam hal tujuan “modernisasi sosialis” yang disebut belakangan, suatu reduksi yang memalukan telah

terjadi, dalam mana tujuan ini diungkapkan sebagai netral-nilai. Kemudian telah terjadi suatu reduksi berikutnya pada titik di mana cara-cara membenarkan/menghalalkan tujuan-tujuan dan tujuan-tujuan menghalalkan cara-cara. Dalam situasi ini, seperti ditunjukkan oleh Bab terdahulu, adalah merupakan kenyataan bahwa tujuan-tujuan perencanaan tampaknya selalu direduksi pada logika internal dari sistem yang ada. Jelas, perhatian dalam Bab ini pada legitimasi, dominasi dan rasionalitas adalah Weberian. Dengan demikian, maka yang oleh Dutton dan Healy disebutkan “pengistimewaan peristiwa (*instance*) ekonomik” mencerminkan suatu pengantian pada kebijaksanaan-kebijaksanaan menguntungkan yang diinginkan untuk mencapai dominasi absah. Ini berlawanan dengan himbauan-himbauan normatif tahun-tahun sebelumnya, yang dalam bahasa Althusserian dapat dipandang sebagai pengistimewaan peristiwa (*instance*) politis. Ia juga berlawanan dengan dilibatkannya himbauan-himbauan memaksa dalam memberikan keutamaan pada perjuangan kelas, yang kaum Althusserian lebih suka menyebutkannya sebagai pengistimewaan peristiwa politis. Dalam bahasa Weberian, penggunaan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang menguntungkan untuk mencapai legitimasi paling berhasil dicapai oleh bentuk-bentuk dominasi legal-rasional (semurninya bertujuan). Konsep-konsep Weberian seperti itu berguna sekali dalam memahami literatur Tiongkok akhir-akhir ini, yang berbicara tentang aspek-aspek “feodal” dari kekuasaan (otoritas) sebelum 1976. Lagi pula, seperti ditunjukkan Brugger,⁸ tidak ada orang Weberian yang akan terkejut bahwa sosialisme terbelakang pasti akan dinyatakan sebagai suatu “tipe ideal” segera setelah sosialisme ditegaskan sebagai suatu sistem dan kontradiksi-kontradiksi dijelaskan dalam artian-artian fungsional.

Aparat konseptual yang digunakan dalam Bab ini adalah Weberian, sekalipun kesimpulan-kesimpulannya tidak mesti akan begitu. Mari kita mulai, dalam tradisi Weberian asli, dengan mengusahakan suatu pemahaman mengenai mekanika kebijaksanaan-kebijaksanaan reformasi ekonomi Tiongkok, daripada cuma menghakimi bagaimana suatu program untuk reformasi itu seharusnya.

Strategi untuk Reformasi Ekonomi

Ketika perubahan-perubahan ekonomik mulai dijalankan setelah 1978, dimaksudkan bahwa ekonomi Tiongkok mesti berlandaskan “hukum-hukum ekonomik objektif.” Yang paling menonjol adalah hukum nilai, yang dipandang sebagai suatu ciri pokok ekonomi kapitalis maupun ekonomi sosialis. Hukum itu dapat dikatakan beroperasi apabila suplai suatu barang-dagangan memenuhi tuntutan/permintaan akan barang-dagangan itu; dalam keadaan-keadaan seperti itu harga barang-dagangan itu akan sesuai dengan nilainya (banyaknya waktu kerja yang diharuskan/diperlukan secara sosial yang terwujud dalam produksi dan distribusinya). Dalam kapitalisme, “hukum nilai” mengatur harga-harga secara spontan, dengan demikian mencerminkan kelangkaan. Dalam kondisi-kondisi sosialis, unsur spontanitas itu dikualifikasi. Spontanitas seringkali menghasilkan ketidak-seimbangan sementara karena kaum kapitalis terlibat dalam spekulasi. Kini peranan kapitalis itu digantikan oleh mekanisme perencanaan dan perilaku eksploitatif dianggap telah dilenyapkan. Dengan begitu, suatu struktur perencanaan yang fleksibel, yang menjawab kelangkaan dapatlah menjamin suatu keseimbangan yang mantap. Di dalam kondisi-kondisi sosialis, suatu rencana yang memenuhi hukum nilai dapat menjamin pendistribusian yang rasional dari tenaga kerja di antara berbagai departemen ekonomi dan akan memajukan produktivitas kerja.

Kapitalisme dan Sosialisme, kedua-duanya dinyatakan di sini sebagai tipe-tipe ideal. Tipe kapitalis yang ideal itu diambil dari pemahaman Marx atas Adam Smith. Seorang Weberian mungkin berkomentar bahwa Marx mengabaikan kenyataan bahwa harga-harga ditentukan secara historis sejauh harga-harga itu ditentukan oleh suplai dan permintaan. Ini semestinya berlaku juga dalam suatu ekonomi peralihan sosialis. Tipe sosialis yang ideal dibangun dengan membayangkan bagaimana akan jadinya suatu sistem barang-dagangan segera setelah eksploitasi disingkirkan dan dalam mana dianggap bahwa harga tenaga kerja itu sendiri bersesuaian dengan nilainya. Masalahnya dengan tipe ideal ini adalah, bahwa eksploitasi disingkirkan menurut ketentuan/perumusan (kaum buruh yang memiliki perusahaan tidak dapat mengeksploitasi diri mereka sendiri). Itu mengabaikan pernyataan Weber bahwa semua

konsep adalah khas secara historis dan di bawah suatu sistem birokratik yang menyatakan dirinya sosialis, eksploitasi mungkin saja mengambil bentuk-bentuk lain. Mungkin karena mempertimbangkan suatu kesimpulan seperti itu, bahwa ideolog-ideolog Partai tangkas sekali dalam membungkam setiap pembicaraan mengenai “alienasi” di bawah sosialisme. Sebab, tidakkah Weber berbicara tentang alienasi dari alat-alat administrasi/pemerintahan? Yang dianggap sebagai “hukum ekonomik objektif” kedua adalah “hukum identitas kepentingan-kepentingan antara negara, perusahaan dan individu.” Hanya apabila ia dipatuhi, barulah orang dapat mengharapkan produktivitas kerja optimum. Di masa lalu, dirasakan bahwa hukum itu telah dilanggar ketika kekuasaan vertikal (“administrasi dengan garis-garis”) maupun kekuasaan rangkap (“administrasi dengan bongkah-bongkah”) merajalela. Keduanya lebih merupakan alat-alat administratif daripada “ekonomik” dalam menjalankan suatu perekonomian dan kedua-duanya lebih menekankan secara berlebih-lebihan pada kepentingan-kepentingan negara daripada pada kepentingan-kepentingan perusahaan atau individu. Dipandang dari sudut perspektif perusahaan, kedua bentuk administrasi/pemerintahan di atas adalah bentuk-bentuk kekuasaan berdasar komando. Metode vertikal dalam pengalokasian sumber-sumber secara langsung mengakibatkan penumpukan persediaan secara tidak efisien dan penyelesaian yang lambat dalam proyek-proyek pembangunan modal. Kini harus diciptakan suatu sistem yang lebih efisien, yang memajukan kerja-sama horisontal antara perusahaan-perusahaan yang mesti melakukan pertukaran barang-barang dan jasa-jasa menurut suatu sistem kontrak yang dapat dilaksanakan secara legal. Reorganisasi industri secara administratif mesti menciptakan kondisi-kondisi bagi jenis kerja-sama horisontal ini dan juga mesti memajukan spesialisasi fungsi-fungsi. Bentuk-bentuk perusahaan lama yang “besar dan mencakup segalanya” atau yang “kecil dan mencakup segalanya” mesti diubah. Kepentingan-kepentingan perusahaan akan diperluas dengan memperkenankan suatu proporsi laba yang lebih besar ditahan dan memperkenankan kebebasan lebih besar untuk menjual di pasar terbuka; dan kepentingan-kepentingan kaum buruh akan terlayani dengan pembayaran bonus yang lebih besar dan suatu unsur demokrasi perwakilan. Hasilnya, demikian diharapkan, akan sangat

meningkatkan produktivitas kerja.⁹ Peneliti-peneliti Eropa Timur sudah terbiasa dengan saran-saran seperti itu. Penekanan Stalinis pada pembayaran menurut kerja dan anti-egalitarianisme pada umumnya telah digabungkan pada argumen- argumen tipe-1960-an mengenai peranan pengatur dari pasar.¹⁰

Agar industri berfungsi lebih ekonomis, disarankan agar mem-perkuat peranan sistem perbankan Tiongkok yang diawasi secara sentral. Daripada bersandar pada metode-metode masa lalu dalam pengalokasian dana-dana perusahaan oleh negara secara langsung, disarankan agar industri secara berangsur beralih pada suatu sistem di mana bank-bank memberikan dana-dana sesuai kemampuan perusahaan untuk memenuhi pembayaran-pembayaran kembali yang dijadwalkan dari laba-laba perusahaan. Perusahaan-perusahaan diharapkan mengadakan kontrak-kontrak dengan organ-organ negara dan ini akan dapat dilaksanakan menurut hukum; namun, perusahaan-perusahaan akan diberi kebebasan yang jauh lebih besar dalam merencanakan kegiatan-kegiatan di luar jangkauan kontrak-kontrak mandatori. Teristimewa dirasakan bahwa pendanaan proyek-proyek pembangunan modal melalui bank-bank akan merupakan suatu cara yang lebih efektif untuk mengurangi/membatasi dan mengawasi pengeluaran. Dengan mentrapkan pinjaman-pinjaman-proyek bagi pembangunan modal, bank-bank dapat menyamin bahwa pengeluaran pembangunan modal akan dibatasi oleh suatu kapasitas perusahaan yang diperkirakan akan menghasilkan masukan laba pada proyek- proyek pembangunan modal guna memenuhi pembayaran-pembayaran kembali. Lagi pula, suatu ikhtiar untuk membayar kembali pinja-man-pinjaman dapat doharapkan akan memberikan suatu insentif (perangsang) pada perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan laba-laba.

Untuk memperlancar peranan yang diperluas bagi sistem perbankan, bank-bank Tiongkok yang dispesialisasikan telah dirombak. Namun ditekankan bahwa bank-bank ini mesti diatur dan diawasi oleh Bank Rakyat yang langsung bertanggung-jawab pada Dewan Negara dan ditugaskan untuk mengatur peredaran uang. Dalam nada moneter, dikemukakan bahwa dengan mengendalikan persediaan uang maka inflasi dapat dibatasi. Lagi pula, Bank Rakyat diharapkan akan

memonitor keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran negara.¹¹

Gambaran di atas agak dimodifikasi oleh keputusan untuk menempatkan Bank of China, yang ditugaskan dengan hubungan-hubungan ekonomik seberang-lautan, langsung di bawah Dewan Negara daripada di bawah Bank Rakyat. Gagasan mengenai pertumbuhan yang dibina oleh ekspor, yang mengambang selama beberapa waktu semasa lompatan-semu tahun 1978, digantikan oleh suatu kebijaksanaan yang lebih wajar berupa pinjaman-pinjaman seberang-lautan dan investasi asing secara langsung dalam industri-industri ekspor (khususnya di “kawasan-kawasan ekonomi khusus”). Disadari bahwa sekalipun investasi asing tidak akan menghasilkan keajaiban-keajaiban yang diharapkan pada tahun 1978, ia akan membantu menghasilkan pendapatan-pendapatan devisa dan memperlancar pengimporan tek-nologi dengan suatu laju keuntungan atas investasi yang relatif cepat. Perkembangan perusahaan-perusahaan campuran, lagi pula, dapat membantu menaikkan tingkat ketrampilan-ketrampilan tenaga-kerja dan akan menjadi menarik karena secara relatif rendahnya ongkos kerja di Tiongkok menurut standard-standard internasional.¹²

Kebanyakan dari saran-saran di atas memiliki mandat-mandat Marxis-Leninis yang terhormat sekalipun semua itu merupakan suatu penyimpangan radikal dari kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diidentifikasi dengan Mao Zedong. Lenin sangat mengandalkan peranan pengatur dari bank-bank dan sebelum periode Komunisme Perang, ia tidak memusuhi investasi asing. Pengawasan perbankan atas suatu sistem ekonomi yang lebih didesentralisasi juga ada di antara saran-saran reformasi di berbagai negeri Eropa Timur. Kawasan-kawasan ekonomi istimewa, namun, merupakan suatu penyimpangan baru di suatu negeri sosialis, betapapun “terbelakangnya,” dan telah menimbulkan masalah-masalah fundamental mengenai orientasi Marxis Tiongkok. Hal-hal ini sudah didiskusikan dalam Bab Dua.

Dari suatu perspektif Weberian, orang mesti bertanya: bagaimanakah kemungkinan keberhasilan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dirancang oleh kaum birokrat untuk memerangi kekakuan birokrasi yang berlebihan? Pada pertengahan 1950-an, Krushchev memindahkan banyak

dari fungsi-fungsi aparat perencanaan dan pengawasan sentral kepada badan-badan lain, hanya untuk mendapati kenyataan bahwa badan-badan lain itu, dengan susunan kepegawaian yang terdiri atas golongan orang-orang yang sama, berkelakuan sepenuhnya sama. Apakah ada semacam logika birokratik yang menumbangkan perubahan struktural? Kini, setelah pada sistem perbankan diberikan fungsi-fungsi yang hingga kini dijalankan oleh departemen – departemen kementerian, akankah ia berlaku dalam cara yang dimaksudkan? Tidak ada jawaban yang mudah atas pertanyaan seperti itu. Di dunia kapitalis, departemen-departemen keuangan lazimnya masih mendengarkan kebijaksanaan-kebijaksanaan moneteris. Sekalipun dirangkaikan dengan suatu penekanan pada pemerintahan terbatu, ide bahwa aparat negara mampu mengemudikan perekonomian dengan cuma mengendalikan persediaan uang adalah menarik bagi yang secara birokratik naif. Bank-bank di negeri-negeri kapitalis, sebaliknya, sering bergantung dalam keberhasilan mereka pada tidak dikendalikannya persediaan uang. Jika kepada bank-bank sosialis diberikan fungsi pengendalian ini, apakah mereka tidak justru berkelakuan seperti perpanjangan dari departemen-departemen keuangan pemerintah? Selanjutnya, ide mengenai bank sentral yang memonitor keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran pemerintah menyiratkan suatu peranan aktivis yang hanya dapat dijalankan oleh sebuah badan yang bertindak seperti sebuah kementerian pemerintah? Untuk mengatakannya secara gamblang, jika bank-bank bertindak seperti bank-bank kapitalis, maka mereka tidak akan melaksanakan fungsi kontrol yang dialokasikan pada mereka; sebaliknya, jika mereka bertindak seperti departemen-departemen pemerintah, mereka bukanlah bank-bank jadinya.

Efisiensi dan Rasionalitas

Diskusi di atas telah memberi kesan bahwa birokrasi-birokrasi adalah selalu tidak efisien dan bahwa ketidak-efisienan itu selalu jelas-jelas merupakan hal yang buruk. Bagian pertama kalimat ini mungkin benar, tetapi bagian keduanya tidak mesti begitu. Dalam “Introduksi” kumpulan tulisan ini, telah ditunjukkan bahwa efisiensi kadang-kadang bertentangan dengan rasionalitas (formal) sesuatu sistem. Lagi pula, Bab terdahulu menunjukkan bahwa dalam keadaan-keadaan tertentu, sistem

yang tidak-efisien yang merupakan karakteristik perkembangan ekstensif mungkin lebih rasional daripada yang didasarkan pada perkembangan intensif. Maka itu, mari kita kembali pada persoalan yang dikemukakan dalam “Introduksi.” Adakah kemungkinan bahwa perencanaan-perencana Tiongkok, dalam tekad mereka mengejar efisiensi, akan menyumbang pada irasionalitas birokratik? Atau, mungkinkah pengejaran rasionalitas birokratik itu akan menjumbang pada inefisiensi-inefisiensi baru?

Pertimbangkan sejenak argumen-argumen tentang hukum nilai. Jika laba itu benar-benar merupakan suatu indikator efisiensi, maka harga-harga, demikian dikemukakan, mesti mencerminkan nilai. Ini menyangkut dihapuskannya subsidi-subsidi pada barang-barang dan jasa-jasa yang dianggap menjadi keperluan-keperluan pokok. Jika orang menghapuskan subsidi-subsidi itu, maka tujuan efisiensi dibeli dengan harga dislokasi-dislokasi gawat dalam tingkat hidup rakyat – kebalikan dari yang disangka oleh Stalin sebagai “hukum dasar sosialisme.” Karenanya, seorang birokrat rasional tidak akan membeli efisiensi dengan harga itu. Pertimbangan-pertimbangan seperti itu membuat perencanaan-perencanaan menarik suatu garis pemisah antara suatu pasar yang diatur oleh hukum nilai – “suatu pasar luas” – dan “suatu pasar yang diatur oleh rencana itu.” Hanya yang tersebut belakangan yang dipandang tidak merupakan ancaman bagi modernisasi sosialis yang rasional. Akibat-akibatnya mendasar sekali. Di satu pihak, pemerintah telah memutuskan bahwa, untuk sementara waktu, ia tidak mampu memberkan tingkat otonomi perusahaan yang diperlukan untuk menghasilkan perkembangan intensif. Di lain pihak, program-program yang ada bagi intensifikasi proses produksi bergantung pada meningkatnya produktivitas yang ditimbulkan oleh perangsang-perangsang kerja tanpa memakai suatu struktur penetapan harga-harga yang mencerminkan kelangkaan. Intensifikasi ini sangat terbatas dan akan tetap begitu selama kebijaksanaan penentuan harga-harga secara pusat merusak otonomi perusahaan.

Dewasa ini harga barang-barang dan jasa-jasa yang menandakan adanya pengaruh paling kuat atas perekonomian nasional dan kehidupan rakyat masih tetap/tidak berubah-ubah. Harga barang-barang itu dirumuskan sesuai struktur ongkos-plus yang stabil dari masa lalu. Untuk sebagian,

namun, ongkos-ongkos ini ditentukan secara historis, karena tindakan-tindakan telah diambil untuk menutup “gunting” antara harga-harga pertanian dan industrial setelah 1978, unsur subsidi telah meningkat. Harga-harga seperti itu sesuai dengan rasionalitas para perencana, namun jelas-jelas tidak efisien. Suatu kategori kedua adalah harga-harga yang dibiarkan berfluktuasi di dalam batas-batas di atas dan di bawah suatu median yang ditetapkan oleh negara. Suatu kategori ketiga adalah harga-harga yang dianggap ditentukan oleh persediaan dan permintaan, sekalipun di dalam kenyataannya adalah harga-harga yang ditentukan secara historis yang disesuaikan dengan tingkat perusahaan agar memungkinkan ongkos-ongkos plus suatu laba dari dua atau tiga prosen bagi perusahaan-perusahaan tertentu. Kategori ketiga ini lazimnya harga penjualan dari suatu perusahaan secara langsung pada konsumen(pemakai) setelah kuota negara dipenuhi dengan menggunakan harga-harga kategori satu atau dua. Cuma kategori keempat yang secara langsung ditentukan oleh persediaan dan permintaan. Kedua-dua kategori tiga dan empat, yang dimaksudkan untuk efisiensi, lebih dilukiskan sebagai “pelengkap” daripada sebagai dasar.¹³ Rasionalitas dinilai lebih tinggi daripada efisiensi. Jelas, karena mayoritas terbesar dari harga-harga berada dalam kategori-kategori yang lebih tinggi, maka pengaruh otonomi perusahaan menjadi terbatas. Perusahaan-perusahaan didesak agar mengintensifkan aspek-aspek akuntansi kualitatif, namun acapkali tidak diberikan alat-alatnya untuk melakukan itu. Rasionalitas menuntut agar penghibaan alat-alat itu dilakukan secara selektif.

Kategorisasi harga-harga di atas menentukan cara kategorisasi perusahaan-perusahaan industrial itu sendiri. Kelompok pertama adalah perusahaan-perusahaan yang, menempati kedudukan-kedudukan kunci dalam perekonomian nasional, teruis menjadi subjek langsung bagi rencana-rencana negara. Barang-barang yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan seperti itu dianggap vital bagi perekonomian dan bagi tingkat hidup kaum buruh industrial dan diatur dengan harga-harga yang tidak berubah-ubah/tetap. Sekalipun keaneka-ragaman barang-barang yang diproduksi perusahaan-perusahaan ini tidak banyak, nilai produksinya merupakan bagian lebih besar dari jumlah nasional. Kelompok perusahaan-perusahaan kedua bergantung pada kondisi-

kondisi yang sama dengan kelompok pertama, kecuali adanya ketentuan yang fleksibel bagi mereka untuk mengorganisasi produksi melebihi dan di atas kuota negara. Kelompok ketiga, lazimnya perusahaan-perusahaan kecil, bebas untuk menjual bagian terbesar produk-produknya di pasar terbuka dengan hanya suatu bagian kecil yang berada di bawah rencana ne-gara. Kelompok terakhir tidak terbelenggu oleh rencana negara dan beroperasi dengan kategori harga ke empat. Kedua kategori terakhir ini hanya memproduksi suatu prosentase kecil dari hasil produksi nasional.¹⁴

Jika “hukum nilai” mesti beroperasi dan agar otonomi perusahaan benar-benar berarti, maka sistem penentuan harga di atas mesti diubah. Tetapi bagaimana ini dapat dilakukan tanpa merusak “stabilitas dan kesatuan” yang menjadi tolok ukur bagi rasionalitas resmi? Pengalaman-pengalaman Eropa Timur sangat bermanfaat. Sebelum reform-reform ekonomik di berbagai negeri Eropa Timur, terdapat tingkat mobilitas yang besar sekali antara daerah-daerah perkotaan dan pedesaan. Kebijakan-kebijaksanaan perkembangan ekstensif memajukan arus ke kota-kota dari tenaga kerja pedesaan yang kekurangan-pekerjaan. Namun, faktor-desakan ini kalah penting dari faktor-tarikan. Karena harga-harga produk-produk pertanian rendah, pendapatan-pendapatan pedesaan juga tetap rendah dibandingkan dengan pendapatan-pendapatan perkotaan. Kehidupan kota sangat menarik bagi mereka yang menginginkan suatu tingkat hidup yang lebih baik — suatu tingkat kehidupan yang bergantung pada “gunting harga” yang relatif terbuka. Namun, pertimbangan-pertimbangan untuk mematuhi hukum nilai menyebabkan suatu kenaikan dalam harga bahan-bahan pokok pertanian dan suatu penurunan dalam upah-upah riil di sektor perkotaan. Bersamaan waktu dengan itu, pergantian pada pola-pola perkembangan yang lebih intensif membatasi peluang-peluang untuk memperluas lapangan pekerjaan di per kotaan. Kenaikan-kenaikan harga tidak cukup untuk memberikan suatu dis-insentif (pengurangan rangsangan) bagi kaum tani untuk pergi ke kota-kota dan pengendali-pengendali paksaan diperketat. Namun mereka cukup untuk menimbulkan kegelisahan di kalangan kaum buruh industrial. Baik kaum tani maupun kaum buruh marah! Di Polandia, kerusuhan perkotaan pada tahun 1970-an dimulai

dengan protes pekerja-pekerja industrial terhadap harga-harga makanan yang lebih ting-gi. Menjelang 1980-an, keluhan-keluhan sederhana mengenai harga-harga telah berkembang menjadi tuntutan kaum buruh akan alat-alat kelembagaan lewat mana mereka dapat mempengaruhi proses perencanaan. “Solidaritas” menjadi ancaman bagi legitimasi Partai! Dari sudut pandangan suatu Partai Komunis yang berkuasa, pengalaman-pengalaman Hungaria lebih mendorong lagi. Namun begitu, juga di sana, harapan-harapan kaum reformasi ekonomi telah dilunturkan ketika pemerintah memperkenankan “pertimbangan-pertimbangan kebijaksanaan sosial” beraksi terhadap (melawan) efisiensi perusahaan. Kaum buruh memperlihatkan perlawanan sengit terhadap apa saja yang akan merusak stabilitas harga. Mereka selalu memandang suatu kenaikan dalam harga-harga lebih penting daripada efisiensi ekonomik. Baik kaum buruh industrial maupun Partai bertindak rasional dan kedua-duanya mengiur pada ketidak-efisienan.¹⁵

Dalam tradisi Weberian, Zygmunt Bauman telah menunjukkan bahwa dalam masyarakat-masyarakat sosialis, problem-problem timbul karena kaum buruh industrial berorientasi pada rasionalitas formal (cara-cara – tujuan-tujuan), sedangkan Partai berorientasi pada rasionalitas substansial (atau nilai).¹⁶ Argumennya di sini berbeda. Sebagaimana telah diperlihatkan, di banyak masyarakat sosialis *telos* tampaknya telah dikesampingkan. Perpecahan antara Partai dan kaum buruh tampaknya telah direduksi pada rasionalitas formal. Suatu sistem ekonomik yang efisien yang berorientasi pada pertumbuhan, dalam jang pendek, menuntut pengurangan tingkat kehidupan kaum buruh industrial yang diistimewakan dengan menaikkan harga-harga pertanian. Ada rasional bagi kaum buruh untuk memprotes dan adalah rasional bagi pemerintah untuk menindas protes-protes mereka itu. Suatu sistem politis yang efisien, sebaliknya, menuntut ketertiban dan stabilitas dan di atas segala-galanya legitimasi. Karenanya, adalah rasional bagi pemerintah untuk menempatkan “pertimbangan-pertimbangan kebijaksanaan sosial” di atas efisiensi ekonomik.

Yang di atas ini menyiratkan mengapa kebijaksanaan-kebijaksanaan yang penuh keberhati-hatian dijalankan di Tiongkok dan mengapa reformasi struktur penentuan harga telah ditunda. Pada tahun 1978 yang lalu,

pemerintah secara berarti sekali menaikkan harga-harga perolehan produk-produk pertanian sedsuai dengan “hukum nilai.” Untuk menangkai setiap kerusuhan di daerah-daerah perkotaan, pemerintah kemudian meningkatkan subsidi-subsidi pada keperluan-keperluan dasar. Ini naik dari 7.6 persen dari pendapatan nasional pada tahun 1978 menjadi 32 proses di tahun 1981. Kaum tani secara relatif senang dan kaum buruh industrial tidak dikecewa-kan, namun setiap ekonom mesti memperhatikan bahwa program pen-subsidian adalah melanggar hukum nilai. Berbeda sekali dengan suatu situasi di mana hukum nilai bertindak untuk memajukan efisiensi, pengendalian harga terus diperketat. Tetapi dikarenakan sifat sistem harga yang bertingkat-tingkat, pengendalian ini terbatas pada suatu golongan/kelompok keperluan-keperluan pokok. Hukum nilai dapat dikatakan hanya beroperasi pada pinggiran- pinggiran perekonomian dan hanya dapat memajukan efisiensi di sektor-sektor yang paling tidak penting.

Pemerintah Tiongkok kini sangat cemas mengenai kenaikan subsidi-subsidi harga dan usaha-usaha dilakukan untuk membatasi itu. Tindakan pemerintah dirasa perlu tidak saja karena sesuatu komitmen teoritis bagi berlakunya “hukum nilai,” melainkan karena subsidi-subsidi sungguh-sungguh menciptakan problem-problem fiskal.¹⁷ Problem-problem ini menjadi semakin gawat karena menurun-nyanya pendapatan-pendapatan negara yang diakibatkan oleh keterba-tasan otonomi perusahaan. Namun dirasakan bahwa keuntungan-keuntungan bagi Partai, dalam arti legitimasi Partai, dari himb-nauan-himbauan baru yang memberi hasil mungkin akan hilang, segera setelah efek-efek dari puntiran inflatoar (*inflationary spiral*), yang dilahirkan oleh kenaikan-kenaikan harga pertanian, benar-benar menggerogoti tingkat kehidupan penduduk perkotaan. Rasionalisasi-rasionalisasi ideologis itu sangat membingungkan. Dikemukakan, misalnya, bahwa “inflasi sosialis” adalah lebih baik daripada inflasi kapitalis, karena pemerintah dapat mengenalkan harga-harga kebutuhan hidup. Argumen-argumen seperti itu, seperti telah dibuktikan, mengingkari argumen-argumen tentang hukum nilai. Inflasi sosialis juga dianggap tidak begitu serius, karena negara dapat mengendalikan persediaan uang. Memang, negara sosialis mempunyai kemampuan lebih besar untuk melakukan ini daripada suatu

negara kapitalis, tetapi tindakan seperti itu hanya menjadikan bank-bank lebih menyerupai lengan-lengan pemerintah, yang mengingkari keyakinan bahwa melepaskan bank-bank ke atas merupakan suatu tindakan sangat menentukan dalam pergantian dari metode-pengelolaan secara administratif pada cara ekonomik. Mungkin di sinilah akar-akar suatu krisis legitimasi.

Satu jawaban bagi suatu krisis legitimasi, yang ditunjukkan oleh beberapa sarjana politis Barat adalah menyampaikan pesan-pesan yang saling bertentangan pada khalayak-khalayak yang berbeda-beda. Demikian, khalayak ramai dapat diberitahu bahwa “subsidi-subsidi harga merapatkan wujud dari keunggulan ekonomi berencana sosialis” dalam mencega “kontradiksi-kontradiksi tajam” dalam kehidupan rakyat. Manajer-manajer perusahaan tertentu mungkin diberitahu bahwa subsidi-subsidi harga terbatas merupakan suatu cara dalam mengimbali perusahaan-perusahaan dengan pengelolaan yang baik, tetapi yang beroperasi dengan kerugian yang direncanakan.¹⁸ Namun, departemen-departemen keuangan mengentahui bahwa subsidi-subsidi harga menjadi sebab utama dari defisit-defisit anggaran Tiongkok dan diharapkan terhibur dengan tindakan-tindakan yang diambil untuk membatasinya dan dengan kenyataan bahwa Tiongkok tidak menderita penyakit sosial dari beberapa negeri sosialis lainnya. Namun, rakyat biasa di Xinjiang, uamg melihat bahwa harga gandum yang diangkut ratusan kilometer jauhnya dari bagian-bagian lain Tiongkok adalah lebih murah daripada gandum setempat, mungkin mempertanyakan aspek sistem sosialis yang “unggul” ini. Lagi pula, manajer-manajer pabrik-pabrik petrokimia yang sangat efisien, mungkin merasa bahwa industri batu-bara, yang tidak efisien menurut standard siapapun, dianak-emasan oleh sistem subsidi-subsidi yang ditujukan untuk, antara lain, membantu perusahaan-perusahaan yang yang efisien yang bekerja dengan rugi. Akhirnya, pejabat-pejabat dalam departemen-departemen keuangan, yang melihat subsidi-subsidi terus meningkat, mungkin akan sampai pada suatu kesimpulan yang secara bertolak-belakang bertentangan dengan pemikiran resmi. Sebaliknya daripada menangkali kekacauan, banyak dari kekacauan sosial sebenarnya mungkin disebabkan oleh pemahaman bahwa kuantitas-kuantitas yang berbeda-

beda dari barang-dagangan yang sama diatur/dikuasai oleh tingkat-tingkat subsidi yang berbeda-beda.

Problem-problem Sistemik dari Ekonomi Komando dan Pembangunan Modal yang Ekstensif

Bab ini telah mempersoalkan bahwa, jika orang menerima pandangan ekonomik fungsional dari perencana-perencana Tiongkok, maka niat tahun 1978 untuk beralih dari suatu bentuk perkembangan ekstensif (kuantitatif) pada suatu bentuk perkembangan intensif (kualitatif), ternyata tidak terlaksana. Ini disebabkan karena gagasan yang berkuasa mengenai rasionalitas administratif telah menangkal harga-harga yang mencerminkan kelangkaan (kekurangan). Tindakan-tindakan permulaan ke arah desentralisasi ekonomi telah menghadapi suatu kecenderungan pemusatan kembali. Ini menjadi jelas bila orang memperhitungkan bahwa cabang-cabang ekonomi yang menentukan kini dituntut untuk lebih memenuhi rencana-rencana negara yang dimandatkan, daripada rencana-rencana indikatif yang disarankan pada awal reformasi. Kategorisasi harga-harga dan tipe-tipe perusahaan, yang didiskusikan di muka, adalah yang lebih merupakan tipe ekonomi komando daripada tipe lainnya. Sekalipun insentif-insentif (perangsang-perangsang) dalam bentuk pembayaran-pembayaran moneter digunakan untuk mendukung komando-komando, “keberhasilan” pada jenjang perusahaan terutama masih diukur dengan pemenuhan sasaran kuantitatif. Dengan cara penentuan harga-harga seperti itu, laba masih belum dapat dipakai sebagai indikator dari penggunaan masukan-masukan yang paling ekonomis untuk mencapai hasil produksi yang terbaik.

Dengan adanya kecenderungan yang berkanjang untuk mengukur keberhasilan dalam artian kuantitatif, orang akan mengharapkan bahwa prioritas investasi akan kembali pada sektor industri berat. Tidak salah lagi, penekanan yang diberikan pada industri ringan setelah 1978 memang sudah dimodifikasi. Mungkin akan dibantah bahwa modifikasi tahun 1981 merupakan suatu langkah sementara yang diharuskan oleh dislokasi-dislokasi yang disebabkan oleh pergantian terlalu cepat dalam penentuan prioritas. Lebih mungkin lagi adalah bahwa kita sedang menyaksikan kembalinya pada pola yang lebih normal dari suatu

ekonomi komando yang diimplakkan oleh logika sistemik internalnya. Rasio modal-hasil produksi dalam industri ringan mungkin lebih tinggi tetapi ini tidak dapat dilihat, selama hubungan-hubungan cara dan tujuan masih harus dilihat dalam batasan-batasan kuantitatif.

Salah satu kelemahan dari ekonomi komando, yang coba diluruskan oleh reform-reform pasca 1978, adalah konsentrasi berlebih-lebihan pada pembangunan modal. Rencana-rencana investasi nasional di masa lalu sangat buruk pelaksanaannya dan luar biasa sulitnya untuk dikontrol. Ini dikarenakan perusahaan-perusahaan mempunyai suatu kepentingan dalam memperluas klaim-klaim mereka akan penda-naan pembangunan modal dengan tujuan untuk meningkatkan klaim-klaim mereka pada tahun-tahun mendatang. Ini merupakan gejala organisasi birokratik di mana-mana; jika orang dapat lolos dengan pengeluaran melampaui ketentuan pada tahun yang sedang berjalan, maka orang itu akan mempunyai peluang besar mendapatkan suatu sasaran (target) yang lebih tinggi tahun berikutnya. Apabila pengeluaran melampaui ketentuan itu berbentuk investasi dalam kapasitas baru, maka perencana-perencana yang berorientasi pada perkembangan ekstensif akan cenderung memaafkannya dengan harapan akan meningkatnya pertumbuhan di masa mendatang. Di waktu lalu, jarak penglihatan relatif pembangunan modal, dibandingkan dengan peningkatan teknologis, mengakibatkan pada suatu keadaan di mana peralatan yang ada menjadi semakin lama semakin usang. Bab terdahulu menunjukkan ketetapan hati untuk meluruskan keadaan itu; dan pada awal reformasi, tampaknya memang ada semacam penga-kuan bahwa penekanan ekksesif pada pembangunan modal adalah dikarenakan sebab-sebab sistemik. Namun, menjelang tahun 1984, sistem komando pusat tidak dipandang sebagai sebab prasangka investasi melainkan sebagai satu-satunya alat dengan mana prasangka itu dapat ditanggulangi. Sebaliknya daripada reform admin-istratif yang tuntas, ternyata cuma disarankan agar fungsi kontrol Dewan Negara diperkuat; mulai dari sekarang ... dan menurut tingkat laju pertumbuhan pendapatan nasional (kita harus) memutuskan suatu laju investasi yang rasional.¹⁹ Tetapi ... dapatkah birokrasi mengontrol birokratisme?

Bab Tiga mempersoalkan bahwa investasi pembangunan modal menjadi

tidak terkendali karena otonomi perusahaan yang diperluas. Sebenarnya, di dalam suatu ekonomi komando maka investasi pembangunan modal “selalu” cenderung menjadi tidak terkendali. Yang telah dilakukan oleh suatu otonomi perusahaan yang luasnya terbatas itu adalah cuma mengubah jenis proyek-proyek ke dalam mana investasi-investasi itu dituangkan. Di waktu lalu, pembangunan modal di atas tingkat yang direncanakan terjadi dalam proyek-proyek ukuran-besar di mana unit-unit administratif memiliki dukungan politis (*political muscle*) untuk memaksa perencana-perencana menerima keadaan-keadaan *de facto*. Kini, sebagai akibat pertumbuhan yang menjamur dari dana-dana yang dianggarkan ekstra, terjadi perkembangan pesat dari proyek-proyek pembangunan modal ukuran-kecil yang diprakarsai oleh perusahaan-perusahaan itu sendiri. Ini terjadi dengan mengorbankan proyek-proyek prioritas yang kadang-kadang telah dicukur/dilucuti dari dana-dana yang mereka perlukan.²⁰

Perencana-perencana Tiongkok kini menuntut agar pendanaan investasi Tiongkok yang terbatas dikonsentrasikan pada proyek-proyek kunci. Ini berarti bahwa pendanaan investasi pada daerah-daerah dan pada perusahaan-perusahaan individual mesti dikurangi. Departemen-departemen administratif diharuskan melaksanakan disiplin keuangan yang ketat dan bank-bank, yang bertindak lebih seperti departemen-departemen keuangan daripada yang diisyaratkan logika bankir akan menghasilkan laba yang lebih baik. Bagaimanapun, harus dicegah bertumbuhnya sejumlah besar proyek-proyek kecil, yang masing-masingnya memperebutkan bahan mentah yang langka, energi dan fasilitas-fasilitas pengangkutan. Para manajer didesak agar menyadari hubungan antara yang disebut kepentingan *parsial* dan kepentingan “dasar” (atau antara kepentingan-kepentingan daerah-daerah dan perusahaan-perusahaan di satu pihak, dan kepentingan-kepentingan bangsa di pihak lain). Para kader didesak agar selalu ingat bahwa, sekalipun banyak proyek kunci menuntut suatu jumlah pendanaan investasi yang relatif besar dibarengi suatu masa-persiapan sebelum bisa masuk dalam produksi, pada akhirnya mereka mesti diprioritaskan atas proyek-proyek kecil yang memerlukan modal lebih sedikit dan dengan masa-persiapan yang lebih pendek.

Dalam saran-saran reformasi pertama tahun 1978, pilihan pada proyek-proyek kunci juga ditekankan, sekalipun pada waktu itu alasannya adalah sehubungan dengan langkanya devisa. Pilihan ini kini dijabarkan dalam hasrat untuk membangun atas landasan industrial yang ada demi kepentingan nasional. Apabila dana-dana disebarkan, demikian dikemukakan, ekonomi nasional Tiongkok akan dilucuti dari “kekuatan keuangannya yang besar” dan suatu “tinju” industrial yang diperlukan untuk mendobrak hingga mencapai tujuan-tujuan modernisasi, tidak akan terbentuk. “Tinjau” ini harus berupa pemusatan pada kota-kota sedang dan besar yang ada; dan pada waktunya keuntungan akan mengalir pada kawasan-kawasan ekonomik yang berdasarkan pada kota-kota itu sesuai dengan azas-azas rasional secara ekonomis.²¹

Kebijaksanaan resmi di atas menyiratkan bahwa perencana-perencana Tiongkok tidak memperhitungkan dengan secukupnya argumen-argumen lama mengenai problem-problem yang menyertai teori-teori perkembangan “sedikit demi sedikit.” Namun, masalah yang perlu digaris-bawahi di sini adalah bahwa dalam membereskan yang dianggap sebagai ketidak-disiplinan keuangan, pemerintah telah memperkokoh struktur komando lama yang telah menimbulkan begitu banyak problem di masa lalu. Melucuti dana-dana dari proyek-proyek kunci, penghindaran pajak, penundaan pembayaran-pembayaran kembali dana-dana pada negara mesti dibereskan bukan dengan suatu perubahan sistem yang menimbulkan semua problem itu, melainkan dengan suatu pemberlakuan kembali kontrol administratif. Apabila kontrol yang dipusatkan kembali itu berhasil, bagaimana dapat dicegah timbulnya kembali problem lama tatkala mereka-mereka yang bertanggung-jawab atas proyek-proyek kunci “menganggap diri mereka sendiri penting dan menghambur-hamburkan uang tanpa batas?” Sekali lagi, pengalokasian secara sentral akan membuka jalan bagi perusahaan-perusahaan dan daerah-daerah untuk membumbungkan klaim-klaim akan dana-dana yang langka. Yang diperlukan adalah lebih daripada desakan-desakan belaka agar memperhatikan perbedaan antara kepentingan-kepentingan “dasar” dan kepentingan-kepentingan “parsial,” peraturan-peraturan pemanfaatan-tanah secara lebih baik dan “mendidik massa rakyat yang luas.” Problem lama itu pasti timbul kembali selama Rencana Lima

Tahun Keenam yang berfokus pada pengembangan proyek-proyek prioritas pembangunan sebagai *sine qua non*-nya kebangkitan kembali daya-hidup ekonomi pada tahun 1980-an.²²

Pengendalian yang Didesentralisasi atas Dana-dana yang Beredar

Sudah dikemukakan bahwa pemindahan pendanaan perusahaan-perusahaan dari kementerian-kementerian industri pada bank-bank cuma berarti mereproduksi sistem yang sama dengan nama-nama lain belaka. Namun, akan terdapat dua perbedaan. Bank Rakyat mempunyai kekuasaan untuk menerbitkan mata uang, dan bank-bank, pada umumnya, mempunyai kekuasaan untuk menetapkan suku-suku bunga. Mengingat hal ini, ekonom-ekonom kritis tertentu telah mengemukakan bahwa satu sistem tunggal pendanaan-bank sebenarnya dapat menciptakan suatu keadaan yang lebih buruk daripada yang ada. Sebagai-mana kenyataannya sekarang, pembangunan modal akan merupakan suatu tekanan atas keuangan yang tersedia, tetapi dalam keadaan baru itu bank-bank akan menjawab dengan memperbesar persediaan uang dan menciptakan inflasi. Dalam suatu keadaan sepeftri itu, ekonom-ekonom kritis menyangsikan kemampuan bank-bank untuk mengendalikan pembangunan modal dengan memanipulasi suku-suku bunga. Pandangan ini mengakibatkan mereka menganjurkan agar pendanaan pembangunan modal dan penyediaan dana-dana beredar dipisahkan.

Ahli ekonomi politis veteran Sun Yefang pernah mempersoalkan bahwa dilanjutkannya peranan negara bersifat menentukan dalam pengendalian “reproduksi yang diperluas,” sedangkan “reproduksi sederhana” mesti ditangani oleh perusahaan-perusahaan itu sendiri.²³ Karena pemerintah mengerahkan segala usaha untuk mengendalikan pembangunan modal yang membengkak (reproduksi yang diperluas), maka pendapat Sun ditekankan kembali. Secara lebih luas, tampaknya jika reform-reform utama telah ditunda karena kebutuhan untuk mempertahankan struktur harga yang ada atas nama stabilitas, maka paling tidak beberapa reform dapat dijalankan dalam penyediaan dana-dana beredar. Betapapun, otonomi relatif dalam penyediaan dana-dana beredar dapat membantu

manajemen perusahaan mencapai salah satu tujuan utama dari reformasi ekonomik - yaitu mobilisasi antusiasme pada jenjang perusahaan.

Ekonom-ekonom kritis tampaknya berkeinginan memadukan penekanan perencanaan-perencana pusat sekarang pada manajemen ilmiah dan pengendalian sentral dengan ide dasar (yang kini diperlemah) mengenai otonomi perusahaan yang dirayakan dalam saran-saran reformasi tahun 1978. Mereka ingin lebih jauh daripada kebijaksanaan sekarang dalam merampingkan struktur komando sentral dengan berkuat bahwa fungsi pengendalian dan fungsi pemberian kredit harus tetap pada bank-bank, tetapi dana-dana yang beredar harus dikeluarkan oleh suatu jaringan administratif terpisah.²⁴

Orang tidak dapat tidak skeptis mengenai keyakinan bahwa perubahan-perubahan administratif seperti itu akan benar-benar memajukan otonomi perusahaan. Reformasi itu tidak dapat diharapkan akan menanggulangi "manajemen berkepala-ganda," dengan otoritas yang keluar garis tanggung jawab dan pertengkaran yang diakibat-kannya. Bahkan jika problem itu dapat ditanggulangi, laba perusa-haan begitu tergantung pada struktur penentuan harga secara administratif sehingga penanganan dana-dana yang beredar pada tingkat perusahaan tidak akan banyak berarti dalam artian efisiensi.

Perusahaan-perusahaan dengan struktur harga yang mengun-tungkan tetap akan memperoleh laba-laba besar, dengan atau tanpa adanya efisiensi. Antusiasme pada tingkat poerusahaan tidak akan ditingkatkan apabila ketidak-adilan yang mecolok dari sistem penentuan harga itu digaris-bawahi.

Secara resmi disadari bahwa otonomi perusahaan dalam penggunaan dana-dana yang beredar akan ditingkatkan oleh sistem yang dijabarkan pada tahun 1983, dalam menggantikan penyerahan laba-laba pada negara oleh suatu pajak pendapatan korporasi. Bab Tiga memperlihatkan bahwa kebijaksanaan ini mungkin diterima sebagai suatu jawaban terhadap menurunnya pendapatan negara akibat otonomi perusahaan terbatas. Namun ia dipromosikan dengan klaim resmi bahwa ia bertujuan untuk meningkatkan prakarsa perusahaan untuk memperbesar laba dan menambah dana-dana yang beredar yang diperlukan untuk

mengembangkan produksi, membayar bonus-bonus dan menyediakan kesejahteraan kolektif. Ditegaskan bahwa proyek-proyek percontohan (*pilot projects*) yang menjalankan skema ini telah memperlihatkan peningkatan-peningkatan dalam produksi dan laba-laba; ini dihasilkan dari perangsang yang diberikan pada administrasi dan manajemen yang disempurnakan. Diperkirakan bahwa jika suatu perusahaan tidak memperlihatkan peningkatan dalam pendanaan modal-modal tetap (*fixed assets*) namun meningkatkan produksi, maka ia dapat mengharapkan bahwa kira-kira sepertiga dari nilai peningkatan itu dikembalikan untuk digunakan bagi keperluannya sendiri. Apabila produksi atau nilai keluaran (produksi) tetap sama tetapi ongkos-ongkos dikurangi, suatu perusahaan dapat mengharapkan penahanan hingga 50% dari laba yang meningkat itu. Dalam hal-hal tertentu, di mana suatu perusahaan telah mampu menurunkan penggunaan modal-modal tetapnya dan modal yang beredar, ia bahkan dapat menahan seluruh jumlah labanya yang meningkat. Sebaliknya, apabila produksi turun atau ongkos-ongkos naik, perusahaan itu akan harus menanggung kerugian-kerugian itu.²⁵ Tetapi, sungguhpun diakui bahwa,

..jika dibandingkan dengan penahanan laba dan tanggung-jawab tunggal atas laba-laba dan kerugian-kerugian, penggantian kontrak pembayaran pajak untuk penyerahan laba adalah lebih mampu mencerminkan suatu semangat dorongan pada perusahaan-perusahaan yang maju dan untuk memberi motivasi pada perusahaan-perusahaan yang terbelakang,

haruslah disimpulkan bahwa sebagai suatu akibat dari harga-harga yang tidak adil, perusahaan-perusahaan tertentu dapat sangat meningkatkan laba-laba tanpa kesulitan, sedangkan yang lainnya akan sulit sekali meningkatkan pendapatan-pendapatan tanpa berusaha keras.²⁶

Kita kembali lagi pada persoalan lama tentang harga-harga. Orang tidak akan terhibur oleh jaminan bahwa struktur penentuan harga akan “dilunakan melalui keseimbangan-keseimbangan dan penyesuaian-penyesuaian” selama subsidi-subsidi terus bertambah, selama masih terdapat penentuan harga yang berbeda-beda di berbagai daerah dan antara perusahaan-perusahaan dalam industri yang sama dan selama perusahaan-perusahaan komersial lebih mampu dalam mempertahankan laba-laba daripada perusahaan-perusahaan industrial. Lagi pula, ketika

diberlakukan, sistem pembayaran-pajak telah mengakibatkan perusahaan-perusahaan yang bekerja dengan kerugian yang direncanakan menerima pendapatan lebih banyak daripada yang bekerja dengan meraih keuntungan. Diperlukan bukti tertentu bahwa problem ini akan ditanggulangi dengan meningkatnya/bertambahnya pengetahuan ilmiah mengenai prosedur-prosedur ekonomik.

Bab terdahulu mempersoalkan bahwa diberlakukannya pajak pendapatan korporasi telah mempertanyakan ortodoksi Stalinis perihal adanya sesuatu yang secara kualitatif berbeda antara sektor-sektor ekonomi negara dan kolektif – suatu masalah yang diuraikan lebih lanjut dalam perumusan sosialisme terbelakang itu sendiri. Namun yang dilakukan adalah lebih daripada itu. Telah dinyatakan bahwa itu merupakan suatu metode tidak langsung dalam memaksakan disiplin pada perusahaan-perusahaan. Seorang Weberian tidak dapat tidak menyatakan bahwa diterimanya sistem itu mengandung arti bahwa tugas-tugas pengawasan yang ditingkatkan akan dijalankan oleh biro-biro pemungutan pajak. Mereka jelas memerlukan kekuasaan-kekuasaan pemeriksaan yang lebih besar daripada yang mereka miliki sekarang dan dukungan birokratik yang lebih besar pula. Yang akan mereka paksakan bukan disiplin tidak langsung melainkan “yang langsung.” Suatu pergeseran kearah kekakuan yang berlebihan mungkin yang menjadi akibatnya. Organ-organ pemerintah akan diberi kekuasaan-kekuasaan pemeriksaan yang lebih besar. Manakala alat-alat birokratik dipilih untuk membereskan birokratisme, maka kebijaksanaan ekonomik tidak dapat diharapkan.

Penggunaan Devisa

Yang dipersoalkan hingga sejauh ini adalah bahwa tindakan-tindakan yang diambil untuk memajukan produktivitas telah digerogoti oleh rasionalitas sistem yang berlaku. Rasionalitas formal, masih dapat kita ingat, dipandang sebagai pilihan cara-cara yang cocok untuk tujuan-tujuan dalam seperangkat peraturan. Bab ini telah mengemukakan bahwa tujuan produktivitas mungkin tidak dilayani oleh cara yang ada (harga-harga kelolaan yang ditetapkan sesuai peraturan-peraturan yang berorientasi pada stabilitas). Karenanya, irasionalitas hanya dapat dihindari dengan menetapkan kembali tujuan kegiatan ekonomik

menurut perumusan lama. Jika produktivitas benar-benar mau dikejar, maka peraturan-peraturan mesti diubah sehingga memungkinkan dipergunakannya cara-cara baru yang lebih “ekonomik.” Tetapi sayangnya, hanya sedikit dari peraturan-peraturan lama yang berubah.

Salah satu aspek dalam perubahan peraturan-peraturan itu adalah penggunaan modal asing. Sejak 1978, dana-dana asing yang dipakai dalam pengimporan teknologi baru sebagian besarnya telah dibayar kembali. Usaha-usaha patungan yang didirikan setelah studi-studi kelayakan, lagi pula, telah dengan berhasil memajukan ekonomi nasional tanpa merupakan suatu ancaman bagi kedaulatan ekonomi nasional. Tampaknya kebijaksanaan tahun 1978 mengenai pembatasan hutang hingga pada kemampuan pembayaran kembali dan dengan memusatkan investasi seberang lautan dalam perusahaan-perusahaan yang cepat memberikan keuntungan atas modal telah dipertahankan.²⁷ Tiongkok tidak perlu takut pada jebakan-hutang yang telah menjerumuskan beberapa masyarakat sosialis di Eropa Timur.

Arti penting perubahan dalam peraturan-peraturan di atas tidak dapat didremehkan. Sebelum tahun 1978, kekhawatiran-kekhawatiran sangat telah dinyatakan menyangkut kedaulatan nasional. Kini kekhawatirannya adalah bahwa peluang-peluang investasi bagi perusahaan-perusahaan asing mungkin tidak cukup menarik. Dengan demikian, keprihatian pada awal periode reformasi untuk mengembangkan daerah-daerah yang terbelakang secara industrial, telah digantikan dengan suatu perhatian untuk menarik investasi ke daerah-daerah yang menjanjikan laba terbesar²⁸ pada perusahaan-perusahaan asing.

Namun, pinjaman-pinjaman luar negeri dan investasi asing secara langsung, diduga hanya akan mempunyai pengaruh yang terbatas atas ekonomi Tiongkok yang raksasa itu. Sumber-sumber asing itu tidak dapat diharapkan akan memecahkan problem-problem keterbelakangan teknologi dan peralatan yang ketinggalan zaman. Jika tujuan Rencana Lima Tahun Keenam untuk menjamin bahwa 30 persen dari volume total impor berupa teknologi modern mesti dicapai, maka ekspor mesti meningkat secara dramatis. Tetapi, bagaimana layaknya perpaduan impor-ekspor itu? Dalam triwulan pertama 1983, nilai produk-produk

primer yang diekspor berjumlah 4.13 miliar Yuan dan nilai produk-produk industrial yang diekspor adalah 4.66 miliar Yuan. Nilai produk-produk primen yang diimpor berjumlah 2.8 miliar Yuan dan nilai barang-barang industrial yang diimpor berjumlah 6.1 milyar Yuan. Jelas, ekspor primer Tiongkok dimanfaatkan untuk mensubsidi pengimporan produk-produk industrial. Pola ini akan bertambah intensif jika pemimpin-pemimpin Tiongkok mampu melaksanakan niat untuk mengurangi impor-impor bahan pangan (terutama gandum).²⁹

Suatu kebijaksanaan seperti itu disyaratkan apabila Tiongkok mau secara dramatis meningkatkan impor-impor teknologinya. Namun orang harus menyimpulkan bahwa pensubsidian impor-impor industrial ioleh pertanian cuma merupakan suatu bentuk lain dari “pajak-super” secara tersembunyi yang mau diluruskan oleh perubahan-perubahan tahun 1978 pada “gunting harga.” Untuk gambangnya, rencana-rencana Tiongkok bagi impor-impor teknologi kembali tergantung pada pelanggaran “hukum nilai” yang banyak dibuahkan itu.

Dengan segala obrolan mengenai kepatuhan pada “hukum nilai,” digunakannya pertanian untuk membayar impor teknologi mempunyai latar-belakang (praktek-pondahulu) Stalinis. amun begitu, terdapat satu ciri baru yang sepenuhnya tidak ortodoks. Yaitu saran untuk mengeksport tenaga kerja ke negeri-negeri kapitalis. Tenaga kerja dianggap sebagai suatu sumber yang paling berharga. Tetapi dari semua kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah Tiongkok sekarang, itu adalah yang paling tidak Marxis.

Kebijaksanaan-kebijaksanaan Pertanian.

Penarikan suatu “pajak super” secara terus-menerus dari pedesaan adalah rasional dalam hubungan keperluan pembayaran untuk tekno-logi yang diperlukan bagi peningkatan produktivitas industrial. Ia menjadi kurang rasional apabila orang memikirkan kenaikan tingkat produksi pertanian. Di sini, orang telah menyaksikan ditinggalkannya sistem harga kelolaan lama secara mencolok. Pasar-pasar bebas tumbuh dengan suburnya dan walaupun dipandang hanya sebagai “pelengkap” pada ekonomi berencana, mereka merupakan sesuatu yang lumayan kuatnya.

Peningkatan pendapatan bagi banyak kaum tani telah menghasilkan suatu peningkatan dalam investasi dalam pertanian. Namun dilihat secara nasional, kegagalan untuk mengubah struktur penentuan harga secara menyeluruh masih berarti bahwa investasi yang berlebih-lebihan telah mengalir ke sektor industrial dan bahwa intensifikasi sektor pertanian telah mengambil suatu bentuk yang berbeda dari yang dimaksudkan pada tahun 1978.

Pada waktu reformasi-reformasi pada tahun 1978, intensifikasi proses kerja pertanian mestinya dimajukan melalui suatu peningkatan berarti dalam pendanaan investasi dalam ilmu dan teknologi yang relevan.³⁰ Namun, dengan dibendunginya penyaluran dana-dana investasi secara berarti ke sektor pertanian karena kegagalan untuk mengubah struktur penentuan harga, maka ketergantungan lebih besar diletakkan pada “ketepatan” kebijaksanaan di tingkat-dasar. Ini menjadi peralihan pada yang kini kita kenal sebagai “sistem pertanggung-jawaban ekonomik.”³¹ Menjelang 1981, produksi sampingan tidak lagi dirasakan sebagai tindakan sementara yang dipromosikan pada 1978 sebagai suatu cara untuk menambah pendapatan keluarga sampai efek-efek investasi ilmiah dan teknologis menjadi efektif dalam mengintensifkan produksi pedesaan. Diakui bahwa suatu kebijaksanaan pertanian yang dapat berjalan tidak akan menjadi kenyataan karena keuntungan-keuntungan yang “menitik sedikit demi sedikit” dari sektor industrial ke sektor pertanian. Hasilnya ialah suatu fokus pada produksi sampingan sebagai suatu cara yang dipimpin perangsang menuju pada intensifikasi proses pertanian yang dikembangkan sejak 1981 itu. Kebijakan pengontrakan rumah-tangga rumah-tangga secara langsung dianggap sesuai dengan azas “pembayaran (pengupahan) menurut kerja.” Ia dikatakan memajukan suatu pembagian kerja yang lebih dikhususkan/dispesialisasikan sebagai suatu cara membuka jalan bagi antusiasme pekerja pertanian.³² Sistem tanggung jawab rumah-tangga dinilai efisien. Benarkah begitu? Di sini kita kembali pada problem definisional yang didiskusikan di muka. Dalam logika ekonom mengenai pengukuran keluaran (produksi) dalam hubungannya dengan masukan-masukan, itu adalah efisien. Namun, jika kita menggunakan definisi efisiensi secara sosiologis –pencapai suatu tujuan dengan sesedikit mungkin merugikan

tujuan-tujuan lain— maka beberapa aspek efisiensi itu mesti diragukan. Ambil saja, misalnya, dampak atas penduduk yang sudah banyak diumumkan. Dengan pembagian tanah atas dasar besarnya keluarga dan tenaga kerja yang tersedia (ini merupakan masukan yang paling penting), terdapatlah suatu perangsang/insentif untuk memproduksi lebih banyak anak (terutama anak-anak laki-laki yang akan tetap merupakan bagian dari tenaga kerja keluarga). Ini bertentangan dengan kebijaksanaan Tiongkok “keluarga beranak satu,” yang ditujukan untuk mengoreksi suatu keadaan di mana perolehan-perolehan dalam produksi pertanian telah dikonsumsi oleh jumlah penduduk yang terus bertambah. Ini merupakan suatu “krisis gunting” tipe baru. Rumah-tangga itu dijebak di antara bilah-bilah kembar dari suatu perangsang untuk meningkatkan tenaga kerja dan tindakan drakonian (kejam) yang dijalankan oleh negara untuk membatasi kependudukan.³³ Kaum tani, didorong ke dalam suatu kalkulus kemanfaatan (utilitarian calculus), mustahil akan mengembangkan suatu moralitas sosialis.

Lagi pula, suatu sistem yang mendorong “... beberapa (pihak) lebih dulu menjadi kaya” akan membawa pada suatu keadaan yang rada-rada ganjil. Dekolektivisasi dipromosikan untuk mengembangkan tenaga-tenaga produktif. Uni-unit yang paling enggan melaksanakan de-kolektivisasi adalah komune-komune pinggiran-kota yang kaya raya, yang sudah mempunyai infrastruktur yang secara relatif telah maju dan yang mampu menghasilkan pendapatan tunai yang besar dari usaha-usaha industri ringan. Unit-unit ini telah berhasil baik di bawah sistem lama dan akan berhasil lebih baik lagi di bawah sistem baru, asal saja pihak-pihak lain yang melaksanakan dekollektivisasi itu. Karena berdekatan dengan kota, mereka akan sangat diuntungkan oleh kemudahan baru dalam pembuatan kontrak-kontrak dengan perusahaan-perusahaan industrial. Lagi pula, anggota-anggota mereka memiliki kelebihan dengan adanya jalan masuk kota tanpa terkena oleh kekurangan yang akut akan perumahan (di) kota. Sebanyak mereka menghasilkan pendapatan individual, terdapat suatu pasar bebas yang siap di kota-kota. Namun, unit-unit pedesaan jauh di daerah pedalaman tidak memiliki kelebihan-kelebihan ini. Pada sisi yang ekstrem adalah desa-desa yang hidup di bawah batas kemiskinan yang hampir tidak mempunyai surplus

(kelebihan) sedikitpun untuk menjadikan mereka kaya. Ironi dari semua ini adalah, tampaknya, bahwa sosialisme itu merupakan hak istimewa (prerogative) unit-unit kaya, yang akan menjadi semakin kaya di dalam kondisi-kondisi kolektif, sedangkan yang miskin gagal menghasilkan dana-dana secukupnya untuk mencapai peningkatan dalam tenaga-tenaga produktif dan kekurangan fasilitas-fasilitas kolektif untuk menyediakan pendidikan dasar dan penyediaan ketrampilan-ketrampilan dasar. Pada akhirnya, ketimpangan-ketimpangan seperti itu dapat menumbangkan stabilitas yang, seperti kita ketahui, merupakan salah satu tujuan pokok yang menjadi tolok ukur rasionalitas.

Sekalipun telah jelas bahwa dalam jangka pendek suatu perspektif menyeluruh, pertanian hingga kini adalah lebih efisien, tidak demikian halnya di bawah pengendalian pusat. Otonomi pada berbagai tingkat adalah jauh lebih nyata daripada di sektor industrial. Perencana-perencana pusat sibuk dengan persoalan-persoalan seperti itu. Pada suatu tingkat ekonomi-makro, perencana-perencana memikirkan bagaimana caranya menjalankan perintah untuk mengurangi kebutuhan akan impor gandum manakala kaum tani didesak agar melakukan diversifikasi dan berkonsentrasi pada tanaman-tanaman yang akan memberikan hasil terbaik secara tunai. Pada tingkat yang lebih prosaik, perencana-perencana pusat menghadapi segunung problem pengawasan rutin, seperti bagaimana memungut pajak di pasar-pasar pedesaan.³⁴

KESIMPULAN

Bab ini telah mengemukakan bahwa “pergeseran lunak” (*soft shou shuffle*) dalam perekonomian, yang diberlakukan oleh PKT sejak 1978, dapat dipandang sebagai suatu jawaban pada rusaknya legitimasi Partai. Segera sesudah program untuk reformasi ekonomik yang disahkan oleh sidang Pleno Ketiga Komite Sentral pada akhir 1978, perencana-perencana PKT telah mengikuti jalanm yang ditempuh oleh kaum “sosialis” Sovyet dan Eropa Timur. Mereka telah mengganti tujuan rasional substantif (nilai) mereka untuk pencapaian suatu masyarakat tidak-berkelas dengan memajukan “modernisasi” sosialis. Seperti pasangan-pasangan Sovyet dan Eropa-Timur mereka, mereka telah memperkenankan perumusan-kembali mereka mengenai suatu tujuan

substantif yang berorientasi secara fungsional direduksikan menjadi rasionalitas bertujuan/purposif (cara-tujuan) yang bebas-nilai. Mereka kemudian terjebak dalam perangkat suatu pereduksian lebih jauh, yang bahkan secasra teoritis kurang terhormat, hingga berbarengan dengan itu cara dan tujuan diartikan dalam hubungan satu sama lain.

Tentu saja orang dapat mengkritik fungsionalisme Weberian dari suatu posisi teoritis Marxis. Namun begitu, kritisisme bahkan dimungkinkan di dalam paradigma (modal pola) fungsionalis Weberian. Jika orang mengakui bahwa seseorang tidak dapat secara cermat memisahkan rasionalitas substantif dan purposif, maka kita mesti memperkirakan bahwa orientasi fungsional PKT, yang mereduksikan rasionalitas purposif menjadi rasionalitas fungsional, tidak akan memberikan dasar/alasan bagi perbaikan legitimasi Partai. Singkatnya, kita mungkin mempunyai alasan untuk mempertanyakan kesehatan legitimasi PKT yang sekarang dan di masa mendatang. Setelah membuat “keputusan strategik” itu, untuk menyetujui suatu fokus primer pada efisiensi ekonomik, cara telah menjadi tujuannya sendiri. Lagi pula, perencanaan-perencana Tiongkok telah gagal untuk secukupnya mengganti peraturan-peraturan yang diperlukan untuk menjamin agar cara yang layak akan ditemukan untuk merealisasi tujuan efisiensi.

Kekhawatiran-kekhawatiran bahwa jenis ketidak-stabilan yang sama yang telah terjadi di Eropa Timur juga akan terjadi di Tiongkok berarti bahwa hanya beberapa dari saran-saran reformasi tahun 1978 yang telah dilaksanakan. Usaha-usaha telah dilancarkan untuk memperluas otonomi perusahaan tanpa suatu perubahan dalam struktur penentuan harga yang akan memungkinkan otonomi itu mengiur pada efisiensi. Pertimbangan-pertimbangan mengenai *hukum nilai* mengakibatkan suatu peningkatan dramatik dalam harga gandum. Ketidak-stabilan di perkotaan kemudian ditebus dengan meningkatkan subsidi-subsidi negara, yang menjadikan hukum nilai itu tampak menertawakan. Peningkatan subsidi-subsidi menuntut peningkatan dalam pendapatan negara pada saat otonomi perusahaan yang terbatas menurunkan arus dana-dana pada negara. Usaha-usaha kemudian dilakukan untuk memperbesar pendapatan negara dengan mengubah sistem penyerahan keuntungan menjadi pajak pendapatan korporasi. Ini lebih lanjut memerlukan birokrasi yang dapat

komando dalam suatu lingkungan terbelakang yang bermusuhan. Dipandang dari perspektif akademisi Tiongkok, “socialisme terbelakang” adalah nama yang diberikan pada suatu berkas kebijaksanaan-kebijaksanaan yang masih dianggap berguna, tetapi yang oleh perencana-perencana Tiongkok dianggap membubarkan stabilitas.

Catatan

1. Stalin, (1936), Stalin 1976, hal. 799-800
2. Stalin, (1952), 1972
3. Mao, 1974, hal. 247-313; Mao, 1977(a).
4. Young, 1978
5. Lihat Christensen, 1983
6. Weberm 1968, hal. 809-38
7. Habermas, 1076
8. Brugger, 1981(b)
9. Hu Qiaomu, PR., 45, 10 November 1978, hal. 7-12; PR., 46, 17 November 1978, hal. 15-33; PR., 47, 24 November 1978, hal. 13-21; Xue Muqiao, 1981
10. Lihat Feiwei (ed.), 1968
11. Wu Qiyu, Jingji Guanli 2, 1980, JPRS., 75735, 20 April 1980, hal. 55-8
12. Untuk suatu tinjauan umum mengenai perubahan-perubahan yang diusulkan dalam perbankan, lihat Watson, 1980
13. Su Xing, 1982(a)
14. Zhao Ziyang, 30 November dan 1 Desember 1981, BR., 51, 21 Desember 1981, hal. 6-36
15. Lihat Szelenyi, 1979; Pravda, 1979; Haraszti, 1977
16. Bauman, 1974
17. Subsidi harga untuk penjualan produk-produk agrikultural secara eceran telah diakui menyumbang pada defisit anggaran 1979 sebesar 17.06 milyar yen dan defisit anggaran 1980 sebesar 12.75 milyar yen. Lihat

Wang Bingqian, 1 Desember 1981, BR., 2, 11 Januari 1982, hal. 14-23. Lihat juga Xu Yi dan Chen Baosen, 1981; Huang Da, 1981; Li Kehua, Wenhui bao (Hongkong), 5, 6, 7 Juli 1982, JPRS., 84310, 13 September 1983, hal. 28-36; Sichuan Ribao, 26 Mei 1983, JPRS., 84188, 25 Agustus 1983, hal. 14-16

18. Li Kehua, Wenhui bao (Hongkong), 5, 6, 7 Juli 1983, JPRS., 84310, 13 September 1983, hal. 31

19. Xinhua, 15 Juni 1983, JPRS., 83816, 5 Juli 1983, hal. 3304; Liu Huiyong, Jingji Yanjiu, 6, 1983, hal. 19-25; Jingji Ribao, JPRS., 84316, 17 Agustus 1983, hal. 31-3

20. Zhejiang Ribao, 5 Juli 1983, JPRS., 84356, 19 September 1983, hal. 33-4

21. Tao Zengji, GMRB., 29 Mei, JPRS., 84356, 19 September 1983, hal. 61-5

22. Jingji Ribao, 9 Juni 1983, 11 Juli 1983, hal. 8-12; Jingji Ribao, 10 Juni 1983; Ibid., hal. 13-14

23. Sun Yefang, (1963), Sun, 1979, hal. 239-45. lihat diskusi oleh Liu Guouang, Lie (ed.), 1980, hal. 7

24. Lin Anjun, Zhongguo Jinrong, 7, 1983, JPRS., 84310, 13 September 1983, hal. 10-16

25. Zheng Wei dan Cai Yan, jiefang Ribao, 12 Juli 1983, JPRS., 84244, 1 September 1983, hal. 63-4; Jingji Ribao, 15 Juli 1983, JPRS., 84244, 1 September 1983, hal., 75-6; Yao Guogang, Jingji Ribao, 27 Mei 1983, JPRS., 84356, 19 September 1983, hal. 66-7; Sui Zong, Jingji Ribao, 11 Juli 1983, JPRS., 84356, 19 September 1983, hal. 74-6; Luo Wenjia, Nanfang Ribao, 30 Mei 1983, JPRS., 84356, 19 September 1983, hal. 77-80

25. Shehui Kexue, 3, JPRS., 83816, 5 Juli 1983, hal. 21

27. Chen Jiaqin, Caimo Jingji, 5, 1983, JPRS., 84244, 1 September 1984, hal. 118-26

28. Wenhui bao, (Hongkong), 17 Mei 1983, JPRS., 84310, 13 September 1983, hal. 37-8

29. Wen Sijia, Ernhibao, (Hongkong), 22-3 Juni 1983, JPRS., 84244, 1 September 1983, hal. 146-9

30. Xinhua Ribao, 1 April 1982, hal: 9-13

31. Lihat Watson, 1983

32. Lihat Su Xing, 1982(b)

33. Lihat O' Leary, 1983

34. Xining, Qinghai Provincial Service, 22 Agustus 1983, JPRS., 84310, 13 September 1983, hal. 17.

B A B L I M A

TRANSISI SOSIALIS DAN CARA PRODUKSI SOSIALIS

Greg McCarthy

Fokus Bab ini adalah pada teori mengenai transisi sosialis sebagaimana yang berlaku bagi Tiongkok. Pendiskusian teori ini akan dibagi dalam dua bagian yang terpisah namun saling berhubungan. Bagian pertama akan berkonsentrasi pada argumen-argumen teoritis yang menopang *periode reformasi ekonomi* di Tiongkok. Periode ini dapat dikarakterisasi sebagai suatu titik-waktu eksperimentasi dan perubahan.¹ Periode reformasi ekonomi itu dapat dibagi menjadi dua fase. Fase pertama adalah di mana eksperimen-eksperimen masih berada di dalam struktur-struktur tradisional dari sosialisme Tiongkok. Argumen-argumen teoritis yang mendukung fase pertama ini mesti dicari dalam buku *China's Socialist Economy*, yang ditulis oleh teoretikus terkemuka, Xue Muqiao.² Fase kedua periode reformasi ekonomi itu telah diberi persetujuan politis pada sidang Pleno Keenam Sentral Komite PKT pada Juni 1981³, dan dikenal karena perubahan-perubahan ekonomi yang pesat dalam pertanian. Bagian pertama Bab ini akan mempelajari pandangan-pandangan Xue, sebagaimana pandangan-pandangan itu berlaku pada fase pertama periode reformasi itu, dan kemudian akan menganalisa argumen-argumen teoritis yang mendukung periode perubahan yang dipercepat sekarang.³

Bagian kedua Bab ini memperluas kritisisme atas teori yang mendasari seluruh periode reformasi ekonomi. Argumen itu beralih dari suatu kritik atas pandangan sosialisme ortodoks dan transisi sosialis pada penyajian suatu cara pendekatan berbeda dalam konseptualisasi masyarakat-masyarakat pasca-revolusioner. Dikemukakan bahwa metode analisis yang paling cocok untuk memahami transisi sosialis adalah yang diberikan oleh Marx yang mempergunakan konsepsi/gagasan teoritis – cara produksi.

Metodologi ini diringkaskan oleh Skocpol dalam pengantar bukunya *States and Social Revolutions* dalam kata-kata berikut,

Segera setelah berhasil, suatu revolusi menandai transisi dari cara produksi dan bentuk dominasi kelas sebelumnya pada suatu cara produksi baru, di mana hubungan-hubungan produksi sosial baru, bentuk-bentuk politis dan ideologis baru, dan, pada umumnya, hegemoni kelas revolusioner yang baru menang, menciptakan syarat-syarat/kondisi-kondisi yang cocok bagi perkembangan masyarakat selanjutnya.⁴

Akan diperlihatkan bahwa analisis di atas sangat berguna sekali untuk memahami perkembangan revolusioner dari Tiongkok dan untuk menilai eksperimen-eksperimen yang sekarang berjalan.

Masalah-masalah Ortodoksi Sekarang

Buku Xue Muqiao ditulis dalam kerangka ortodoks yang dikemukakan oleh Stalin, terutama dalam monografinya tahun 1952, *Economic Problems of Socialism in the USSR*. Xue, dengan mengikuti teladan Mao, secara kreatif menerapkan *azas-azas* Stalin pada perekonomian Tiongkok.⁵ Tiongkok dikarakterisasi sebagai suatu “sistem sosialis yang belum matang” – dirujuk dalam Bab-bab terdahulu sebagai “sosialisme terbelakang.”⁶

Transisi dari tingkat ini pada sosialisme matang (sosialisme maju) dianggap memerlukan suatu periode waktu yang berlarut-larut. Seperti ditunjukkan dalam Bab Tiga, Tiongkok dianggap sebagai pada pokoknya sosialis karena pemilikan atas alat-alat produksi adalah umum dan tidak perseorangan. Ini adalah sosialisme terbelakang karena kepemilikan umum tidaklah tunggal (unitari), melainkan terbagi antara “pemilikan oleh seluruh rakyat dan kepemilikan kolektif.”⁷

Kepemilikan menentukan watak rejim. Namun, transisinya difahami dalam hubungan dengan perkembangan tenaga-tenaga produktif. Untaian teoritis itu –kepemilikan umum dan kemajuan tenaga-tenaga produktif– menjadi unsur penentu dalam transisi sosialis. Mengikuti argumen yang didiskusikan dalam Bab-bab di muka, Xue menunjukkan bahwa hukum dasar pertumbuhan ekonomi adalah bahwa “hubungan-hubungan produksi itu mesti sesuai dengan tingkat tenaga-tenaga produktif⁸; lagi

pula, hubungan-hubungan produksi tidak akan pernah melewati tingkat tenaga-tenaga produktif.⁹ Xue, seperti halnya Stalin, memandang keutamaan tenaga-tenaga produktif dan keharusan persesuaian hubungan-hubungan produksi dengan tingkat tenaga-tenaga produktif sebagai hukum-hukum universal.

Tetapi, Xue menambahkan, terdapat asas-asas tertentu yang memandu transisi sosialis. Yang paling jelas di antaranya ialah, bahwa asas kerja adalah “kepada masing-masing menurut kerjanya.”¹⁰ Xue yakin bahwa asas ini akan berlaku bahkan dalam sosialisme maju. Ia akan tetap berlaku sampai tenaga-tenaga produktif mencapai suatu tingkat yang sedemikian rupa hingga terdapat kelimpahan umum. Pada tahap transisi ini, Xue mengira bahwa asas “kepada masing-masing menurut kebutuhan” akan terwujud. Dengan demikian maka asas-asas kerja juga ditentukan oleh tingkat tenaga-tenaga produktif.

Xue menunjukkan bahwa hukum-hukum pertumbuhan ekonomi ini telah terbukti di dalam praktek. Ia mengemukakan bahwa usaha-usaha di masa lalu untuk melampaui (transcend) hukum-hukum seperti itu, seperti dalam Revolusi Kebudayaan, membawa akibat-akibat gawat bagi perkembangan Tiongkok.¹¹ Di sini Xue mengumandangkan sejarah baru Partai yang menegaskan bahwa Revolusi Kebudayaan bertang-gung-jawab atas,

.... kemunduran-kemunduran paling hebat dan kerugian-kerugian paling berat yang diderita oleh Partai, negara dan rakyat sejak pendirian Republik Rakyat.¹²

Tidak pelak lagi, penemuan-penemuan sejarah baru Partai terbuka bagi kritisisme atas penulisan kembali sejarah demi untuk keperluan praktek sekarang.¹³ Persoalannya di sini adalah bahwa keuta-maan tenaga-tenaga produktif telah digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai masa lalu. “Praktek” adalah “benar” manakala ia memajukan tenaga-tenaga produksi.

Orang mungkin berkeberatan, karena dengan menganggap tenaga-tenaga produktif sebagai yang utama berarti menyamakan sosialis-me dengan modernisasi belaka. Bettelheim telah mengemukakan bahwa tesis “keutamaan” mengakibatkan terjadinya suatu pergeseran ideologis.¹⁴

Sosialisme tidak lagi dinilai dalam hubungan kelas, seperti “kediktaturan proletariat,” melainkan menjadi diidentifikasi dengan kemajuan menyeluruh dari tenaga-tenaga produktif.¹⁵ Lagi pula, untaian tenaga-tenaga produktif dan kepemilikan umum juga menyesatkan karena hubungan-hubungan produksi tidak dapat dengan begitu saja direduksi menjadi hubungan-hubungan milik (kepemilikan).¹⁶ Hubungan-hubungan produksi tidak hanya menyangkut kepemilikan melainkan juga seluruh sistem produksi sosial termasuk kontrol yang dijalankan di dalamnya dan bentuk pengambilan surplus dari kaum pekerja produktif.

Bagi Xue, hubungan-hubungan produksi ditentukan oleh kepemilikan yang, demikian dikemukakannya, bersesuaian dengan tingkat tenaga-tenaga produktif. Lagi pula, ia menunjukkan bahwa tenaga-tenaga produksi di Tiongkok adalah “terbelakang.” Karena itu dapat didiperkirakan, bahwa hubungan-hubungan produksi juga akan berada pada suatu tingkat yang rendah. Dalam hal ini pertanian dikecualikan untuk perhatian khusus. Perumusan “saling bersesuaian” memungkinkan penetapan suatu perbedaan antara industri dan pertanian. Industri negara telah ditentukan pada tahun 1956 sebagai sektor ekonomi yang dominan dan sepenuhnya dikonsolidasikan pada tahun 1967, dengan penghapusan pembayaran-pembayaran dividen pada kaum kapitalis. Industri kini berkemampuan maju melalui investasi-investasi negara secara berencana.¹⁷ Kaum buruh telah disatukan dengan alat-alat produksi yang mereka miliki.

Tetapi dalam pertanian, demikian dikemukakan Xue, tenaga-tenaga produktif berada pada suatu tingkatan yang sangat rendah dan perkembangannya tidak merata. Bentuk kepemilikan bukanlah kepemilikan negara (kepemilikan oleh “seluruh rakyat”), melainkan kepemilikan kolektif yang dijalankan melalui komune-komune, brigade-brigade dan team-team. Bagi Xue, team itu merupakan tingkat kepemilikan dasar dan merupakan tingkat dasar akuntansi dalam pertanian.¹⁸ Yaitu, tiga tingkatan kepemilikan umum telah ditentukan menjelang akhir 1950-an, tetapi organ yang berfungsi bagi kepemilikan atas atas, manajemen tenaga kerja dan pendistribusian pendapatan adalah team itu. Kaum pekerja tidak terutama dibayar dengan upah, melainkan

menerima bilangan-bilangan kerja dan dibayar secara kolektif. Menurut Xue, sistem bilangan-kerja itu pada pokoknya sama dengan yang diberlakukan dalam industri.

Xue yakin bahwa untuk memajukan tenaga-tenaga produktif, perlu menyalurkan investasi-investasi melalui bentuk-bentuk kepemilikan yang bersesuaian dan memperkenankan diberikannya insentif-insentif secara perseorangan. Misalnya dalam pertanian, Xue mengungkapkan pandangan bahwa “bantuan” negara secara berarti (substansial) penting sekali untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi perkembangan produksi.¹⁹ Yaitu, Xue memandang suatu peranan negara yang ditingkatkan dalam penyaluran investasi-investasi pada pertanian melalui kolektif-kolektif sebagai suatu cara untuk memajukan tenaga-tenaga produktif.

Dalam hal ini, posisi Xue mencerminkan fase pertama dari periode reformasi ekonomi itu. Seperti telah dikemukakan dalam Bab terdahulu, pada periode itu dianggap bahwa produksi pertanian dapat didorong dengan peningkatan investasi-investasi dan mekanisasi. Modernisasi akan dicapai melalui suatu strategi investasi baru. Namun, menjelang sidang Pleno Keenam pada bulan Juni 1981 ternyata bahwa strategi ini mesti ditinggalkan.²⁰

“Swa-sembada” pertanian telah ditekankan bersamaan dengan kebijaksanaan baru untuk memajukan produktivitas melalui sistem tanggung-jawab kontrak. Yaitu, bukan kolektif-kolektif tetapi rumah-tangga rumah-tangga yang akan menjadi fokus dalam peningkatan produktivitas. Penekanannya adalah pada peningkatan produktivitas tanah dengan mengizinkan kaum tani menyewa tanah sebagai imbalan untuk kuota-kuota kontrak pada kolektif dan dengan memperkenankan kaum tani untuk mema-sarkan semua surplus di atas kuota itu.

Perhatian akan peningkatan-peningkatan produktivitas dalam pertanian Tiongkok adalah murni dan dapat dimengerti. Ekonomi pertanian Tiongkok menderita karena sejumlah problem ekonomi yang mendasarinya. Misalnya, Barker, Sisler dan Rosa memperhitungkan bahwa,

Pertumbuhan dalam produksi gandum selama dua dasawarsa yang lalu hanya sedikit sekali di atas laju pertumbuhan/pertambahan penduduk dan mendekati rata-rata performans negeri-negeri sedang-berkembang lainnya.²¹

Lagi pula, dalam artian produktivitas pertanian, Barker dan Sinha, berkomentar bahwa,

Dengan catatan pertumbuhan yang menguntungkan sekalipun, efisiensi produksi pertanian, diukur menurut pertumbuhan dalam keluaran dihubungkan dengan pertumbuhan dalam masukan, telah menurun.... tidak jelas apakah efek (pengaruh) bersih dari kolektivisasi atas efisiensi pertanian telah bersifat positif atau negatif.²²

Keperluan akan perubahan dalam kebijaksanaan pertanian terbukti bagi semua pihak; namun mengenai bentuk perubahan itu masih terbuka bagi perdebatan. Seperti telah ditunjukkan, Xue menganjurkan suatu peningkatan dalam investasi negara untuk menaikkan tingkat tenaga-tenaga produktif, dan ini harus disalurkan melalui kolektif-kolektif. Perpektifnya di sini berkanjang dengan pene-kanannya pada “saling persesuaian” antara tenaga-tenaga produktif dan hubungan-hubungan produksi. Betapapun, ada kemungkinan untuk mempergunakan untaian teoritis ini untuk membenarkan penekanan pada pertanian kontrak rumah-tangga sebagai cara untuk menaikkan tingkat tenaga-tenaga produktif. Kebijakan-kebijaksanaan sesudah sidang Pleno Keenam mencerminkan pandangan bahwa rumah-tangga rumah-tangga merupakan satu bagian integral dari produksi dan akan tetap begitu, selama pertanian Tiongkok itu “terbelakang.”

Wan Li, misalnya, telah menyatakan bahwa pertanian Tiongkok telah berhenti berkembang (stagnate) selama suatu “jangka waktu yang panjang,” bahwa perekonomian pedesaan telah didominasi oleh pertanian di bawah garis kemiskinan dan setengah-kemiskinan; sehingga kebijakan-kebijaksanaan baru akan membangkitkan “antusiasme dan prakarsa kaum tani.” Apabila tenaga-tenaga produktif sudah berkembang, maka “hubungan-hubungan produksi dan bangunan-atas juga mesti disesuaikan kembali dan diubah.” Sekalipun begitu, ia menambahkan,

Diperlukan kebijaksanaan manakala mendekati reformasi lembaga-lembaga komune. Kita jangan menuntut setiap tingkat berubah dari atas ke bawah dengan menentukan suatu batas waktu

pelaksanaannya. Sebelum bentuk-bentuk organisasional baru yang cocok dapat menggantikan brigade-brigade dan team-team produksi, kita jang secara membuta mengubah bentuk-bentuk yang ada dan (dengan begitu) menimbulkan suatu situasi penuh kekacauan.²³

Di sini Wan Li menyuarakan kebijaksanaan periode baru dari reformasi ekonomi itu. Tingkat persesuaian antara tenaga-tenaga produktif dan kepemilikan adalah lebih rendah daripada yang diperbolehkan dalam struktur-struktur komune, brigade atau team. Bentuk lama kepemilikan “tiga tingkat” harus menjalani perubahan mendasar dan, berkanjang dengan tuntutan-tuntutan sosialisme terbelakang, suatu persesuaian baru harus ditemukan pada tingkat rumah-tangga. Wan Li mengajukan pandangan bahwa sistem pertanian yang sedang berubah itu sedang berkembang menjadi satu cara produksi baru, yang disesuaikan pada “produksi barang-dagangan yang disosialisasikan,”

Cara produksi ini sesuai dengan tingkat-tingkat kebudayaan, teknologikal dan manajemen jumlah besar sekali penghasil-penghasil pertanian di negeri kita dan memberikan syarat-syarat bagi kaum tani Tiongkok untuk mengerahkan kebijaksanaan dan inteligen-si mereka. Ia juga menghasilkan keuntungan dalam pemanfaatan jumlah-jumlah besar pekakas produksi ukuran kecil dan sederhana dan fasilitas-fasilitas. Dengan menggunakan lebih sedikit dana-dana investasi dan dengan menyerap lebih banyak tenaga kerja, ia dapat memperoleh keuntungan-keuntungan segera dan faedah-faedah besar.....

Pemakaian energi juga dapat diturunkan untuk menghin-dari kemudaratan (*drawbacks*) uang dinamakan “pertanian petroleum.” Koeksistensi (keberadaan bersama) perekonomian perseroangan dan perekonomian kolektif yang didasarkan pada diterimanya rumah-tangga rumah-tangga atau kelompok-kelompok rumah-tangga ke dalam unit-unit kerja dan produksi dan operasi, karenanya, mungkin cocok bagi kebanyakan wilayah negeri kita dan mungkin bersesuaian dengan karakteristik-karakteristik bagian terbesar pertanian wilayah..... Singkatnya, cara produksi dari yang berukuran kecil, yang berangsur-angsur berkembang menuju spesialisasi, mungkin suatu cara yang baik untuk mengembangkan suatu pertanian sosialis gaya Tiongkok.²⁴

Posisi Wan Li didukung oleh Du Runsheng yang juga menganjurkan suatu sistem tiga-deretan-bertingkat produksi pertanian. Deret paling penting adalah ekonomi rumah-tangga. Menyertai ini adalah kemungkinan bagi kombinasi-kombinasi (perpaduan-perpaduan) rumah-tangga rumah-tangga secara sukarela untuk mempergunakan alat-alat produksi. Akhirnya, adalah kolektif-kolektif yang mem-pertahankan

fungsi-fungsi tertentu pemerintahan tetapi yang telah kehilangan kendali mereka atas proses kerja. Dengan *legerdemain* (permainan sulap), Du Runsheng menggunakan teori Marxis untuk mendukung perekonomian rumah-tangga sebagai unit dasar dari produksi. Ia menegaskan bahwa,

....satu azas Marxisme adalah, bahwa setiap perubaghan dalam hubungan kepemilikan merupakan satu akibat tak terelakkan dari perkembangan tenaga-tenaga produktif baru yang tidak lagi dalam kecocokan dengan hubungan-hubungan kepemilikan lama.²⁵

Bilamana tenaga-tenaga produktif telah “berkembang sepenuhnya,” maka usaha-usaha rumah-tangga akan maju pada suatu tahap sosialis yang lebih tinggi.

Du Runsheng menunjukkan bahwa perekonomian rumah-tangga tidaklah sama seperti pertanian keluarga sebelumnya,

Usaha-usaha rumah-tangga dewasa ini berbeda sekali dalam sifatnya. Karena tanah telah menjadi milik umum, mereka dalam banyak hal dibatasi oleh perekonomian kolektif. Mereka mewakili suatu tingkat manajemen di dalam perekonomian kooperatif, dan merupakan suatu bagian komponen organik dari seluruh ekonomi sosialis.

Namun, Du Runsheng menambahkan suatu peringatan pula,

Ada kekhawatiran bahwa sistem pengontrakan rumah-tangga akan memajukan ide pemilikan perseorangan yang konservatif di kalangan kaum tani. Kekhawatiran ini bukannya tanpa dasar. Namun, kita harus mampu melihat sisi lain dari persoalan ini, yang juga merupakan aspek yang lazim terdapat. Kaum tani dewasa ini berbeda dari kaum tani masa lalu. Mereka sekarang adalah pekerja tipe-baru di bawah sistem kooperatif sosialis.²⁶

Fase kedua dari periode reformasi ekonomi, yang dikuatkan oleh sidang Pleno Keenam, berbeda dari fase pertama itu karena struktur pertanian telah mengalami perubahan mendasar. Kebijakan-kebijaksanaan, yang dibela oleh Xue Muqiao dalam *China's Socialist Economy*, tidak lagi berlaku bagi pertanian Tiongkok. Namun, pembenaran teoritis yang mendasari kebijakan-kebijaksanaan itu masih sama. Wan Li maupun Du Runsheng menganjurkan “saling bersesuaian” dan keutamaan tenaga-tenaga produktif.

Mereka juga menegaskan bahwa pertanian tetap sosialis karena tanah

tetap dimiliki secara umum dan tidak lagi menjadi milik perseorangan rumah-tangga rumah-tangga kaum tani.

Ortodoksi Stalinis dipergunakan di sini sebagai pembenaran ideol-ogikal bagi kebijaksanaan. Namun kebijaksanaan talmudik (Talmud = kumpulan hukum dan legenda yahudi/talmudik=menganut itu) Stalin tak dapat menyembunyikan perubahan-perubahan gawat yang berlang-sung dalam pertanian. Ortodoksi, sebagaimana yang diungkapkan oleh teoretisi Tiongkok, tidak mampu mengonsep-tualisasi watak/sifat perubahan-perubahan itu karena ia mengabaikan bentuk pengambilan/openarikan surplus. Sekalipun perubahan-perubahan dalam bentuk penarikan surplus itu diperhatikan, mereka tidak diwujudkan menjadi suatu penilaian dari “ekonomi sosialis” itu. Hubungan-hubungan pengambilan surplus digolongkan di bawah hubungan-hubungan milik dan karenanya, tidak dipandang menentukan bagi argumen mengenai sosialisme di Tiongkok.²⁷ Tetapi tidak mungkin bagi teoretisi ini untuk sama sekali mengabaikan bentuk produksi surplus dan penguasaan yang terdapat di Tiongkok. Xue semula mengemukakan bahwa dikarenakan alat-alat produksi itu adalah umum, maka eksploitasi pada dasarnya telah dlenyapkan.²⁸ Belakangan, dalam bukunya, ia mengungkapkan pandangan ortodoks bahwa kerja selama transisi itu mempunyai sifat rangkap. Kaum pekerja memproduksi “nilai” yang sebagian dikonsumsi oleh masyarakat bagi keperluan-keperluannya dan sebagian dimiliki oleh kaum pekerja dalam bentuk barang-barang konsumsi. Kaum pekerja bekerja untuk masyarakat dan dirinya sendiri.²⁹ Dengan demikian, selagi *nilai* diciptakan, dan sebagian dari padanya dikuasai oleh masyarakat, hal ini tidaklah bersifat eksploitatif karena masyarakat bekerja untuk kepentingan kaum pekerja. Artinya, tidak ada eksploitasi karena surplus itu dikuasai melalui pemilikan umum.

Lagi pula, surplus itu juga membantu reproduksi kekayaan itu dan menghasilkan dana kesejahteraan negara.

Posisi di atas ini adalah tradisional karena ia membincangkan proses pengambilan surplus dalam hubungan dengan cara penggunaannya. Namun, ia melihat pada penggunaan surplus itu secara tidak kritis dan tidak mempermasalahkan pengendalian yang dijalankan atas produksi

dan penguasaan surplus itu. Masalah penting mengenai pengendalian atas surplus tetap tidak diteorikan dalam pandangan ortodoks mengenai sosialisme. Dengan diabaikannya masalah pengendalian itu, tidaklah mengherankan jika permasalahan hubungan-hubungan kelas yang berkaitan dengannya juga tidak diangkat kepermukaan.

Wan Li dan Du Runsheng menutup-nutupi kelemahan posisi Xue dengan mengecilkan arti perubahan-perubahan yang berlangsung dalam proses penarikan surplus dalam pertanian. Kedua mereka itu menga-kui bahwa pergantian pada sistem tanggung-jawab rumah-tangga meninggalkan struktur bilangan-kerja kolektif dalam pengupahan kerja. Bagi Xue, sistem bilangan-kerja adalah sama dengan imbalan-imbalan dalam industri. Namun kini dibawahkannya pada pere-konomian rumah-tangga merupakan suatu perubahan penting dalam produksi dan penguasaan surplus pertanian. Wan Li sependapat bahwa negara masih dapat mengendalikan sistem rumah-tangga melalui cara-cara legal dan administratif,

Keberadaan ekonomi perseorangan bukanlah sesuatu yang mengerikan, karena negara dapat secara memadai menghadapinya dengan mempergunakan alat-alat legislatif dan administratif. Negara dapat mengendalikan atau menyesuaikan produksi, operasi dan pendapatannya – dengan mempergunakan pengungkit-pengungkit ekonomik seperti penentuan harga dan pemajakan (termasuk pemajakan progresif), sehingga ia akan menjadi suatu pelengkap organik dari sistem ekonomi sosialis.³⁰

Du Runsheng menegaskan bahwa sistem tanggung-jawab pengontrakan merupakan suatu bentuk tidak murni dari “sifat rangkap” kerja dan masih diselaraskan dengan azas “kepada masing-masing menurut pekerjaan,”

Dengan sistem pengontrakan sekarang, dengan pembayaran yang dikaitkan pada keluaran, metode pendistribusian menurut kontrak diberlakukan. “Setelah menjamin kebutuhan-kebutuhan negara dan setelah memberikan suatu jumlah yang secukupnya kepada kolektif, porsi yang tersisa adalah milik kita.” Di sini, “porsi yang tersisa” juga mencakup imbalan-imbalan bagi investasi perseorangan. Sejauh yang menyangkut bentuknya, kita tidak dapat mengatakan bahwa itu adalah pendistribusian menurut pekerjaan dalam bentuk semurnya. Namun, karena ia menetapkan bahwa yang melakukan pekerjaan lebih banyak dan menanamkan lebih banyak dapat memperoleh lebih banyak pula, dan karena yang ditanamkan itu masih merupakan bentuk yang dimaterialisasi dari kerja seseorang, kita tidak dapat mengata-kan bahwa itu bertentangan dengan azas distribusi menurut pekerjaan.³¹

Maka itu, Du Runsheng maupun Wan Li tidak menteorikan perubahan dalam sifat penarikan surplus itu; mereka cuma mencari dukungan ideologis, dengan mempergunakan Marxisme sebagaimana yang dirumuskan oleh Stalin, untuk membenarkan kebijaksanaan-kebijaksanaan dewasa ini. Keberkanjangan mereka dan Xue Muqiao dalam mempergunakan teori dapat lebih kita nyatakan dalam penggunaan ortodoksi, sebagai suatu alat metodologikal untuk mewujudkan perubahan, daripada dalam penjelasan mereka mengenai pergantian-pergantian dalam praktek. Tidak dapat kesatuan dalam teori dan praktek, dan ini tidaklah mengherankan, karena ketiga-tiga orang itu menerima pandangan bahwa “praktek merupakan pengkajian kebenaran.” Namun tersembunyi di dalam kalimat itu adalah gagasan bahwa pengkajian kebenaran bukanlah sosialisme tetapi modernisasi – dimajukannya/ditingkatkannya tenaga-tenaga produktif. Sebagai kesimpulan, teori sosialisme yang diterima oleh PKT tidaklah berguna untuk menjelaskan perubahan-perubahan yang berlangsung sekarang atau perkembangan historis Tiongkok. Karena itu, mesti ditolaklah ortodoksi ini dan kembali pada gagasan-gagasan pra-Stalin mengenai transisi sosialis. Pada tugas inilah bagian kedua Bab ini ditujukan.

Perbincangan dalam bagian kedua Bab ini berpusat pada konsep teoritis itu – cara produksi. Telah dikemukakan bahwa transisi sosialis di Tiongkok dapat difahami sebaik-baiknya dengan menggunakan aspek metodologi Marxian ini. Berkaitan dengan penggunaan suatu cara produksi untuk menjelaskan sejarah revolusioner Tiongkok adalah suatu penekanan pada hubungan-hubungan produksi. Alasannya adalah karena melalui hubungan-hubungan produksi, yang difahami dalam artian suatu proses sosial dari produksi dan penguasaan surplus, akan dapatlah kelas di Tiongkok dikonseptualisasikan.^{3 2}

Kearah Suatu Teori mengenai Transisi Sosialis yang Berbeda

Susunan argumen dalam bagian kedua akan sebagai berikut. Akan ada suatu diskusi mengenai pembentukan historis dan pengkonsolidasian cara produksi sosialis di Tiongkok. Stabilisasi cara sosialis berarti berakhirnya transisi sosialis, tanpa kemungkinan untuk bergerak langsung pada komunisme; yaitu tanpa penggantian cara produksi sosialis

secara fundamental. Pengkonsolidasian cara sosialis merupakan unsur menentukan dalam pembentukan sejarah Tiongkok pasca-1949. Ia adalah pembentangan kontradiksi- kontradiksi pembawaan dalam cara produksi ini yang menentukan parameter-parameter bagi keputusan-keputusan kebijaksanaan. Karena itu, perspektif yang ditawarkan adalah dinamik dan tidak bersandar pada suatu analisis linear seperti yang dilakukan oleh tanggapan berdasarkan keutamaan tenaga-tenaga produktif.

Pemaparan akan dimulai dengan suatu pemikiran mengenai prakiraan-prakiraan dan penjelasan-penjelasan tentang transisi sosialis. Tujuan bagian ini adalah membuktikan suatu posisi teoritis mengenai cara-cara produksi dan transisi sosialis; posisi ini kemudian akan diterapkan pada Tiongkok. Segera setelah pengkajian transisi dari satu cara produksi pada cara produksi lain di Tiongkok pasca-revolusioner telah dibuat, maka akan mungkin untuk kembali pada kebijaksanaan-kebijaksanaan di Tiongkok sekarang. Sejumlah kesimpulan akan dibuat mengenai perkembangan cara sosialis di masa mendatang negeri itu.

Konsep suatu transisi berarti suatu proses yang mempunyai suatu awal tertentu dan suatu akhir yang dapat diidentifikasi. Seperti sudah ditunjukkan, maka dalam teori Marxis gagasan mengenai suatu transisi telah dipandang dalam pengertian cara-cara produksi. Teristimewa demikianlah halnya dengan transisi yang paling dikenal oleh Marx, yaitu dari feodalisme kepada kapitalisme. Namun begitu, ketika Marx mendiskusikan transisi pada komunisme, ia mengemukakan bahwa basis material bagi komunisme terkandung dalam dinamika perkembangan kapitalis,³³ dan bahwa keharusan utamanya adalah agar proletariat merampas kekuasaan negara dan menetralisasi kekuasaan politis dari burjuasi.³⁴

Bab-bab terdahulu telah dengan panjang-lebar membicarakan komentar Marx yang termashur dalam *Critique of the Gotha Programme*,

Antara masyarakat kapitalis dan komunis tergelar periode transformasi revolusioner dari yang satu pada yang lainnya. Bersesuaian dengan ini terdapat juga suatu periode transformasi politis di mana negara tidak dapat lain kecuali "kediktaturan revolusioner dari proletariat."³⁵

Konsep Marx mengenai "kediktaturan proletariat" merupakan suatu

ungkapan mengenai bentuk historis dari negara selama periode transformasi revolusioner pada komunisme tidak berkelas.³⁶ Dalam *Civil War in France*, Marx menunjukkan bahwa negara proletarian harus berlaku sebagai suatu pengungkit untuk membongkar landasan-landasan ekonomikal yang menopang keberadaan kelas-kelas, dan karena itu keberadaan kekuasaan kelas. Kediktaturan proletariat dipandang oleh Marx sebagai satu bentuk transisi politis dari negara kapitalis pada komunisme tanpa-negara.³⁷

Demikianlah, ketika Marx mendiskusikan transisi pada komunisme, ia mengalihkan perdebatan itu dari cara produksi pada perjuangan kelas dan peranan negara proletar. Marx menegaskan bahwa menjadi peranan “kediktaturan proletariat” untuk menghancurkan “landasan-landasan” kelas-kelas; tetapi masalahnya, yang tidak dilihat oleh Marx, adalah bahwa di dalam proses “membongkar” landasan kelas-kelas itu, “negara proletar” dapat mendirikan landasan-landasannya sendiri. Walaupun “negara proletar” dapat menghancurkan landasan bagi kapitalisme, yaitu cara produksi kapitalis, itu tidak mesti berarti bahwa negara akan “hilang melayu.” Marx tidak memikirkan kemungkinan bahwa dalam menggunakan negara proletar untuk menumbangkan cara produksi kapitalis, kekuasaan negara akan dikonsolidasikan dan negara akan menjadi suatu bagian integral dari satu cara produksi baru.

Dalam pengertian ini, transisi dari kapitalisme pada komunisme dapat dipandang sebagai, pertama-tama, negasi dari cara produksi kapitalis. Negara memainkan suatu peranan menentukan dalam aksi ini. Namun, transisi itu melangkah lebih jauh daripada negasi kapitalisme dan, dalam proses ini, negara menjadi terintegrasi kedalam suatu sistem produksi yang sama sekali baru, sebagaimana yang telah menjadi jelas sekali dalam diskusi alam Bab terdahulu. Namun yang tidak dilihat oleh Bab-bab terdahulu adalah, bahwa yang tersebut belakangan itu tidak hanya menyangkut negasi kapitalisme, tetapi penciptaan suatu cara produksi yang berbeda dan tiada duanya.³⁸ Cara produksi ini dapat dianggap sosialis. Gagasan mengenai suatu cara produksi sosialis ini bertalian secara khusus dengan proses terintegrasi dari negasi dan konstruksi. Karenanya, ia secara mendasar meninggalkan konseptualisasi Marx mengenai transisi pada komunisme.

Teori yang dilukiskan dalam garis-besarnya di atas mempunyai arti-arti penting bagi transisi pada komunisme tidak-berkelas.

Penegakan cara produksi sosialis berla-ku sebagai suatu perintang bagi pengembangan komunisme. Cara sosialis mengandung kontra-diksinya sendiri antara hubungan-hubungan produksi yang teknis dan yang sosial. Lebih lanjut, antagonisme dalam hubungan-hubungan produksi sosial, teristimewa mengenai penarikan/pengambilan suatu surplus, menjadi dasar bagi struktur kelas di dalam formasi sosial. Yaitu, suatu kelas adalah sekelompok orang yang diidentifikasi oleh kedudukannya dalam seluruh sistem produksi sosial, ditentukan terutama oleh hubungannya dengan alat-alat dan kerja produksi dan dengan kelas-kelas lain. Lagi pula, kelas dikonseptualisasikan dalam artian penguasaan sebagian dari produk kerja orang-orang lain (eksploitasi). Dominasi kelas menyangkut kontrol (penguasaan-/pengendalian) atas surplus yang diproduksi oleh kerja orang-orang lain. Yaitu, kelas dan cara produksi bertautan secara integral. Cara produksi sosialis, dan kelas-kelas yang bersangkutan dengannya, membentuk perkembangan negeri dalam artian logika mereka sendiri. Yaitu, tepat sebagaimana cara kapitalis mempengaruhi negeri-negeri di mana ia telah berkembang, demikian pula cara sosialis mempengaruhi negeri-negeri di mana ia telah ditegakkan.

Pengkonsolidasian cara produksi sosialis di satu negeri tidak membangun/meletakkan dasar bagi transisi pada komunisme. Di negeri-negeri sosialis, transisi pada komunisme harus dikonseptualisasikan dalam artian penggantian cara produksi ini dan struktur-struktur kelas dan negara yang bertautan dengannya. Dengan kata-kata lain, tidaklah mungkin memikirkan transisi pada komunisme sebagai sekedar suatu perluasan cara produksi ini. Perkembangan tenaga-tenaga produktif dari cara sosialis tidak dapat membawa pada komunisme, karena perluasan tenaga-tenaga produktif tidak akan mengubah cara produksi itu. Perkembangan tenaga-tenaga produktif dapat, seperti dikemukakan Marx mengenai kapitalisme, mempertajam kontradiksi-kontradiksi yang terkandung di dalam cara produksi itu, tetapi ia tidak dapat secara langsung membawa pada suatu masyarakat tidak berkelas, masyarakat tanpa negara. Suatu transformasi yang jauh lebih revolusioner

diperlukan; yang vital adalah mengubah bentuk penarikan surplus, sebelum suatu transisi pada komunisme menjadi dimungkinkan.³⁹ Transformasi ini mengharuskan penggantian cara produksi sosialis dan menumbangkan kelas-kelas yang berdominasi selama perluasan dan repro-duksinya. Sedangkan Marx mengemukakan bahwa sosialisme akan merupakan suatu masyarakat tidak-berkelas, masyarakat-masyarakat sekarang yang menyebut diri mereka sosialis, mempunyai suatu struktur kelas dengan ciri-ciri tersendiri yang didasarkan pada cara produksi sosialis.

Cara Produksi dan Transisi Sosialis di Tiongkok

Sebelum kemenangan *politis* Komunis,⁴⁰ cara-cara produksi lama di Tiongkok telah mengalami perubahan-perubahan yang luas yang disebabkan oleh pengaruh penetrasi asing. Hal ini paling nyata di kota-kota dan daerah-daerah sekelilingnya.⁴¹ Secara umum diakui bahwa daerah-daerah ini didominasi oleh kapitalisme. Tetapi, sebaliknya, di dalam literatur banyak diperdebatkan mengenai watak produksi di selebihnya daerah-daerah pedesaan. Pandangan umumnya adalah bahwa produksi di daerah-daerah itu sangat berbeda dengan yang di kota-kota. Seiring dengan argumen ini adalah anggapan bahwa sifat produksi di kebanyakan daerah pedesaan adalah secara geografikal sangat terisolasi dari pengaruh-pengaruh kapitalisme perkotaan dan imperialisme. Pertanian seringkali digambarkan dalam pengertian kategori-kategori endapan, yaitu sebagai “tradisional” atau “feodal.”⁴²

Namun gagasan mengenai suatu perekonomian rangkap di Tiongkok sebelum revolusi telah disanggah oleh bukti-bukti baru. Studi yang dilakukan oleh Meyers mengenai perekonomian petani, mengungkapkannya meluasnya sifat hubungan-hubungan barang-dagangan di daerah pedesaan.⁴³ Juga terdapat bukti yang menunjukkan komersialisasi perkreditan dan pengaturan-pengaturan keuangan dalam abad ke duapuluh.⁴⁴ Hak milik atas tanah sedang berubah dan sebagaimana ditunjukkan oleh Riskin, banyak pemantau pada tahun 1930-an percaya bahwa *lembaga-lembaga sosio-ekonomik di pedesaan* sedang bertumbuh bahkan semakin eksploitatif dan memberatkan bagi kaum tani ...⁴⁵

Watak cara produksi ti dalam pertanian Tiongkok dengan rapih terbungkus dalam yang berikut ini,

Bentuk dominan dari produksi pedesaan di Tiongkok yang diwarisi oleh PKT adalah produksi barang-dagangan sederhana. Sewa tanah dikapitalisasi dan suatu volume penting dari produksi kaum tani dijual di pasar. Ini jelas suatu bentuk kapitalisme. Yang dapat dilukiskan sebagai *feodal* mengenai keadaan itu hanyalah nilai-nilai hierarkikal, patrarkal dan komunal yang menopang ideologi yang berkuasa.⁴⁶

Singkatnya, menjelang 1949 seluruh produksi Tiongkok didominasi oleh kapitalisme. Namun begitu, sebagaimana halnya di negeri-negeri Asia lainnya (misalnya, India), metode dominasinya itu berbeda-beda dan pertumbuhan dan potensinya tidaklah merata. Ketidak-merataan ini teristimewa terdapat di Tiongkok karena ukurannya yang luar-biasa luasnya dan diversitas regionalnya. Lagi pula, cara produksi kapitalis di Tiongkok tidak mencerminkan kapitalisme Eropa secara sederhana.⁴⁷ Cara itu terintegrasi dalam suatu masyarakat yang mempunyai nilai-nilai yang berbeda dan strsduktur-struktur historis yang berbeda (misalnya, hubungan pengayom-kawulo= patron-client). Diperkenalkannya kapitalisme mempertajam antagonisme kelas dan membantu menumbangkan suatu kelas berkuasa yang secara politis bangkrut.

Baginya sendiri, PKT, berkepentingan untuk menentukan “musuh-musuh pokok” dalam perjuangan revolusioner itu adalah “imperialisme” dan “feodalisme.”⁴⁸ Strategi PKT adalah menghimbau/menyentuh perasaan-perasaan nasionalisme revolusioner dan untuk mengakhiri “eksploitasi feodal.” Partai memandang transformasi Tiongkok itu terjadi dalam dua tahap yang berbeda namun bertautan; yang pertama men-yangkut perjuangan terhadap imperialisme dan feodalisme, dan ini mesti disusul oleh transisi dari kapitalisme pada komunisme melalui fase sosialisme.

Kemenangan PKT atas Pemerintah Nasionalis pada tahun 1949, memberikan kekuasaan negara pada Partai dan dengan itu ia dapat melaksanakan programnya di seluruh Tiongkok. Tindakan-tindakan pertama yang dilakukan oleh Partai adalah menstabilkan suatu perekonomian yang dirusak-peperangan. Segera setelah stabilitas relatif

dicapai, PKT memalingkan perhatiannya pada pensitaan kekayaan imperialis dan pada perubahan pola penguasaan atas perusahaan-perusahaan yang secara resmi dimiliki oleh Pemerintah

Nasionalis; yang tersebut belakangan ini disebut “kapital birokratik” oleh Partai. Sumber-sumber ini memberikan suatu landasan yang kokoh bagi nasionalisasi industri. Namun, Partai menjalankan suatu program berangsur-angsur dengan mempergunakan tekanan ekonomik maupun politis untuk memindahkan kekayaan industrial perkotaan ke dalam tangan negara.

Kedudukan dominan dari negara di dalam perekonomian, yang telah diwarisi dari pemerintah sebelumnya, membantu Partai melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaannya. Perusahaan-perusahaan milik-negara merupakan kira-kira dua-per-tiga dari seluruh modal industrial. Pemerintah Nasional sebelumnya telah menguasai 90% dari keluaran/hasil produksi besi dan baja negeri itu, 33% dari produksi batu-bara, 67% dari tenaga listriknya, 45% dari semennya, dan semua petroleum dan metal non-ferros. Tambahan lagi, modal negara menguasai bank-bank terpenting, transportasi, komunikasi dan penerbangan. Telah diperkirakan bahwa, “menjelang akhir 1949, perusahaan-perusahaan industrial negara dari rejim baru akan merupakan 41.3% dari produksi industrial Tiongkok.”⁴⁹

Dengan pensitaan milik kapitalis asing dan kedudukan kepemilikan negara yang aman, PKT kemudian dapat mengarahkan perhatiannya pada transformasi hak-milik perseorangan dari burjuasi Tiongkok. Partai menjalankan suatu pendekatan menyeluruh untuk mengalahkan kapitalisme industrial. Milsanya, ia menyusun kebijaksanaan-kebijaksanaan perpajakannya sedemikian rupa sehingga laba-laba industrial membayar suatu bagiasn yang ditingkatkan secara berarti. Suatu serangan ideologis dilancarkan terhadap praktek-praktek cari-untung yang tidak jujur dalam kampanye Lima-Anti. Partai menentukan sederetan tindakan untuk memperoleh kekuasaan atas perbankan dan menggunakan Bank Rakyat yang dipusatkan untuk melakukan tekanan atas industri perseorangan (swasta). Lagi pula, PKT membedakan antara mereka yang telah mendukung rejim sebelumnya, “kaum kapitalis

birokratik,” dan mereka yang tidak, yaitu “kaum kapitalis nasional”; Partai bertindak langsung terhadap yang disebut lebih dulu sedangkan terhadap yang tersebut belakangan dilakukan pendekatan secara berangsur-angsur (gradualis).

Korporasi-korporasi negara bergerak ke daerah-daerah eceran dan secara berdayahasil mampu mendominasi penjualan-penjualan (perdagangan) eceran di seluruh negeri. Perusahaan-perusahaan swasta merasa dirinya terus-menerus terkurung dan dibatasi oleh negara. Negara mempergunakan kebijaksanaan-kebijaksanaan investasinya untuk menarik modal swasta kedalam perusahaan-perusahaan patungan negara-swasta. Menjelang tahun 1954, 33% dari nilai total produksi (output=hasil produksi) industrial berasal dari perusahaan-perusahaan seperti itu. Menjelang 1955, ini telah diperluas hingga mendekati 50% dari nilai total produksi industrial.⁵⁰

Pada tahun 1956, peningkatan tekanan politis dan ekonomik dilakukan untuk mengubah bentuk-bentuk produksi sosial di seluruh Tiongkok, dan modal swasta segera merasakan pemaksaan itu. Seperti telah dikemukakan dalam Bab-bab terdahulu, tahun 1956 merupakan suatu titik-balik; berbagai bentuk kepemilikan perseorangan diubah menjadi dua tipe pokok - kepemilikan negara itu sendiri dan perusahaan-perusahaan patungan negara-swasta.⁵¹ Mao mengedepankan bahwa yang tersebut belakangan tidak lagi bersifat kapitalis melainkan mempunyai suatu “watak sosialis.”⁵²

Di dalam perusahaan-perusahaan patungan, mantan pemilik-pemilik mula-mula dibagi sebagian dari laba yang tidak diperkenankan melebihi seperempat (25%) dari jumlah pendapatan bersih. Tetapi, mulai 1956 dan seterusnya, mantan pemilik-pemilik itu dibayarkan bunga untuk saham-saham mereka dengan suku-suku bunga tertentu yang umumnya dite-tapkan sebesar 5% setahunnya. Kebijakan baru ini diistilahkan “pembelian” dan berarti suatu transformasi secara damai dari kepemilikan swasta pada kepemilikan negara. Tujuan kebijakan ini adalah bahwa, menjelang 1962, negara akan memiliki perusahaan-perusahaan itu secara sepenuhnya. Namun pada akhirnya, adalah Revolusi Kebudayaan yang memastikan/menjamin bahwa tujuan itu dicapai.

Hal yang penting adalah, bahwa menjelang tahun 1956, watak hak-milik swasta telah diubah secara mendasar. Modal perseroangan telah ditundukkan pada negara. Ini mempunyai arti bagi struktur kelas. Seperti dinyatakan oleh Breth,

Orang-orang bisnis (para pengusaha), melihat kecenderungan umum peristiwa-peristiwa, tampak pasrah menerima nasib mereka. Pada akhir tahun itu, perusahaan-perusahaan industrial patungan swasta-negara merupakan 99% dari seluruh perusahaan-perusahaan industrial swasta, dan 99.6% dari nilai total produksi industrial.^{5 3}

Pada akhir tahun 1956 telah menjadi jelas bahwa imbalan antara modal swasta dan negara telah berpindah pada yang tersebut belakangan.

Negara mempunyai kekuasaan atas industri, baik secara langsung atau melalui kebijaksanaan-kebijaksanaan investasinya dan pemilikan patungan. Sifat laba telah berubah. Kaum kapitalis tidak lagi memperoleh surplus dalam bentuk tenaga kerja yang diwujudkan dalam barang-dagangan barang-dagangan. Gantinya itu, para pemilik patungan menerima suatu pembayaran dari negara untuk nilai milik mereka. Negara kini menguasai produk-produk kerja yang dimilikinya dan didistribusikannya. Bentuk produk surplus dengan demikian berubah. Tambahan pula, suplai tenaga kerja dialokasikan oleh pemingkah melalui biro-biro tenaga kerja, dan ini menumbangkan pasar tenaga kerja yang bersaing.^{5 4} Selanjutnya, perluasan kepemilikan negara memajukan perluasan campur-tangan dan perencanaan pemerintah. Pada periode permulaan, administrasi tenaga kerja dan modal terlampau dipusatkan dan kaku. Sejak 1957 dan seterusnya, ada usaha-usaha untuk mendesentralisasi dan meluweskan perencanaan, melengkapi kebijaksanaan umum beralih pada swa-sembedada regional dan tanggung-jawab regional.

Perubahan-perubahan dalam pemilikan perseorangan dan bentuk surplus mendorong transformasi hubungan-hubungan teknis dari produksi di dalam perindustrian Tiongkok. Periode antara 1949 dan 1956 adalah periode di mana Tiongkok memakai suatu model Sovyet untuk menegasi kapitalisme dan memperkenalkan produksi sosialis. Misalnya, pemerintah memberlakukan suatu sistem upah yang dibakukasn, yang

Hubungan-hubungan produksi kapitalis bahkan semakin ditindas dengan keputusan pemerintah untuk menggunakan kader-kader Partai dalam pengaturan dan peningkatan produksi. Hubungan-hubungan antara perencana-perencana, manajer-manajer perusahaan dan penghasil-penghasil langsung dimonitor oleh komite-komite Partai. Ketegangan-ketegangan yang terdapat di dalam hubungan-hubungan teknis produksi ini sekarang ditengahi oleh kader-kader Partai. Sistem Sovyet “manajemen satu orang” digantikan oleh komite-komite yang terdiri atas wakil-wakil Partai dan ahli-ahli teknis, termasuk manajer-manajer. Modal manajemen Sovyet, yang diperkenalkan di Tiongkok, kepada perusahaan diperkenankan suatu tingkat otonomi atas besarnya dana upah, bonus-bonus dan produktivitas.^{5 8} Namun begitu, otonomi ini dibatasi oleh pengawasan-pengawasan ketat atas masukan-masukan dan keluaran-keluaran perusahaan. Betapapun itu tidak mencukupi menurut ortodoksi dari tahun 1980-an, reformasi-reformasi 1957-58 memberikan kewenangan lebih besar atas produksi kepada perusahaan-perusahaan di Tiongkok. Sasaran-sasaran (*targets*) kuantitatif diturunkan dari duabelas menjadi empat; ini adalah, produksi barang-dagangan barang-dagangan terpenting, laba total, ukuran rata-rata tenaga kerja dan upah total. Sasaran-sasaran ini paling penting dalam hubungan surplus yang dihasilkan. Peranan Partai dalam perusahaan-perusahaan ialah mengawasi unsur kuantitatif dari produksi dan untuk menekankan tujuan-tujuan kuantitatif. Hasil akhirnya adalah bahwa kontradiksi-kontradiksi dalam hubungan-hubungan teknis produksi—yaitu antara perusahaan-perusahaan, produser-produser langsung dan perencana-perencana negara—ditengahi oleh Partai. Ini memungkinkan keluwesan lebih besar dan desentralisasi perencanaan. Partai menjadi terintegrasi ke dalam hubungan-hubungan teknis yang membantu menstabilisasi cara sosialis dalam perindustrian. Surplus yang diambil dari perusahaan-perusahaan industrial Tiongkok diwujudkan dalam produk-produk kerja. Ini merupakan metode mutlak maupun metode relatif dalam memperoleh surplus dari produksi. Dalam periode antara 1952 dan 1957, menurut Hoffman, perluasan industri disebabkan karena efek rangkap dari peningkatan kaum pekerja dan peningkatan dalam produktivitas. Hoffman menulis bahwa, “kira-kira 45% dari ... pertumbuhan industrial disebabkan oleh peningkatan-peningkatan dalam produktivitas, dan

54% disebabkan oleh meningkatnya jumlah kaum buruh.”⁵⁹ Tetapi, sebagaimana ditambahkan oleh Hoffman, laju-laju produktivitas tertinggi terdapat di pabrik-pabrik industri berat, pabrik-pabrik prioritas. Ia menunjukkan bahwa,

Dari tahun 1952 hingga 1956/7, dalam industri-industri batu-bara, besi, baja, semen dan tekstil katun, statistik-statistik resmi memperlihatkan peningkatan-peningkatan di dalam keluaran per seorang pekerja (secara berturut-turut menurut urutan di atas) sebesar 46, 138, 93, 74 dan 8 persen ... Laju peningkatan yang sangat lebih rendah dalam produktivitas bagi tekstil katun berkanjang dengan prioritas-prioritas Rencana Lima Tahun Pertama.⁶⁰

Howe melanjutkan perspektif ini dan mengemukakan bahwa peningkatan produktivitas kerja bertanggung-jawab atas 40 hingga 50 proses dari pertumbuhan industrial Tiongkok.⁶¹ Wang Haibo dan Wu Jiajun memperkirakan bahwa, antara 1952 dan 1979, jumlah kaum buruh industrial telah meningkat dari 12.46 juta menjadi 53.4 juta orang. Mereka menambahkan bahwa tingkat kekayaan tetap per seorang pekerja adalah 2.101,9 Yuan pada tahun 1952 dan 10.577,3 Yuan pada tahun 1979, suatu peningkatan sebesar 400% lebih.⁶² Bab Tiga sudah menunjukkan bahwa, menurut angka-angka resmi tahun 1983, produktivitas kerja naik dari 3.016 Yuan pada tahun 1949 menjadi 12.133 Yuan pada tahun 1982, suatu kenaikan sebesar 300%.⁶³ Keberhasilan cara produksi baru dalam industri itu merupakan suatu tekanan berat sekali pada transformasi pertanian. Ini terutama disebabkan karena peningkatan dalam produktivitas industrial berlangsung bersamaan dengan intensitas modal.⁶⁴ Sangat penting sekali bahwa produktivitas pertanian bertumbuh dan bahwa ia mampu menyerap tenaga kerja. Keharusan rangkap ini mungkin kelihatan paradoksal, karena yang sering terjadi adalah bahwainknya tingkat produktivitas mengakibatkan penggantian tenaga kerja. Namun pertanian Tiongkok menderita kekurangan pekerja-pekerja terampil (*skilled* = terdidik) dan pemakaian tenaga kerja secara tidak efisien. Ditambah lagi dengan adanya suatu kekurangan umum akan modal. Mobilisasi massa dianggap sebagai suatu cara untuk menanggulangi problem-problem ini sambil mengekang pengangguran dan kekurangan pekerjaan. Lagi pula, vital sekali bagi seluruh cara produksi itu bahwa produktivitas pedesaan meningkat dan tenaga kerja diserap dalam wilayah pertanian. Sebabnya yalah, kecuali jika

produktivitas pedesaan diperluas, maka kesenjangan perkotaan-pedesaan akan melebar, dan dengan demikian menciptakan suatu ketidakseimbangan struktural dalam cara produksi sosialis. Ketimpangan ini, seperti halnya di Uni Sovyet, akan mengakibatkan suatu pengurusan atas surplus (teristimewa surplus industrial) dan menciptakan ketidakstabilan. Dengan kenyataan bahwa bagian terbesar penduduk tinggal di daerah-daerah pedesaan, semakin pentinglah bahwa suatu keseimbangan diciptakan antara industri dan pertanian; karena itulah banyaknya pembicaraan tentang “hukum perkembangan berencana dan berimbang.” Sebelum menyimak bagaimana caranya mencapai ini, penelitian itu perlu mengkaji transformasi cara produksi dalam pertanian. Cara produksi kapitalis dalam pertanian Tiongkok pra-1949, tidak merata dalam perkembangannya dan sangat kompleks sekali. Kekompleksan hubungan-hubungan kapitalis (misalnya pengaturan hak milik atas tanah, bagi hasil, kontrak-kontrak persewaan dsb.) telah diremehkan oleh PKT. Ini tambah dipersulit oleh penandasan Partai mengenai watak “feodal” dari eksploitasi pedesaan. Partai Komunis melebih-lebihkan peranan tuan-tanah dan salah menilai bertumbuhnya kekuatan kaum tani kaya dan sedang. Pada mulanya PKT percaya bahwa tuan-tanah dan kaum tani kaya merupakan kira-kira 10% dari jumlah penduduk dan memiliki lebih dari 70% jumlah tanah yang dapat digarap.⁶⁵ Walaupun begitu, sebagaimana juga dalam industri, Partai berhati-hati dalam praktek strategiknya dan bergerak secara berangsur-angsur. Ini memungkinkannya untuk menaggulangi banyak dari kelemahan-kelemahan dalam teorinya. Kampanye besar pertama dalam melaksanakan transformasi adalah reform tanah. Ini terutama ditujukan pada tuan-tanah tuan-tanah dan bentuk-bentuk eksploitasi “feodal” mereka dan mengecualikan kaum tani kaya dan metode-metode “kapitalis” dari eksploitasi tuan-tanah. PKT yakin bahwa suatu serangan atas eksploitasi “feodal” akan mempunyai arti mendasar bagi transisi. Dua masalah timbul dengan berkembangnya program reformasi tanah. Kesulitan pertama adalah mengekang kaum tani miskin ketika mereka berniat memperluas serangan mereka pada kaum tani kaya itu sendiri. Persoalan kedua timbul pada waktu rampungnya reform tanah. Hasil-hasil transformasi itu jangkauannya tidak sejauh yang diharapkan. Sebab kekecewaan ini adalah karena Partai telah melebih-lebihkan hak-milik

kaum tuan-tanah. Menurut Schran, secara rata-rata, kaum tuan-tanah dan kaum tani kaya memiliki sekitar 46% dari tanah (tidak 70%) dan mereka merupakan kurang-lebih 12% dari keluarga-keluarga pedesaan.⁶⁶ Reform tanah itu membagikan kembali sekitar 40% dari tanah di Tiongkok kepada kurang-lebih 60% dari kaum tani. Schran memperkirakan bahwa lebih dari dua-per-tiga dari tanah ini datang dari tuan-tuan tanah dan kurang dari sepertiga dari kaum tani kaya.⁶⁷ Dalam artian pembagian kembali tanah maka reform tanah itu kecil (*marginal*). Seperti dikemukakan Shue: reform tanah telah membuat secara relatif beberapa orang lebih miskin, dan sejumlah besar orang agak lebih berada. Tetapi tidak ada yang dibikin kaya.⁶⁸ Lagi pula, Domes memperhitungkan bahwa perbedaan antara milik kaum tani kaya, sedang dan miskin seringkali cuma marginal (tipis), antara setengah dan satu acre (4.072 m²).⁶⁹ Banyak pemilikan tanah adalah terlalu kecil bagi pertanian sebagai sumber/pemberi nafkah. Walaupun begitu, masih terdapat suatu pembagian yang mencolok di daerah pedesaan, seperti dikemukakan Donnithorne,

...kaum tanih kaya dan sedang masih memiliki tanah yang luasnya di atas rata-rata, maupun peralatan dan hewan lebih baik dan lebih banyak. Mereka, juga, lebih banyak yang berpendidikan daripada sesama mereka yang miskin...⁷⁰

Selanjutnya, banyak dari kaum tani yang lebih berada yakin bahwa kini mereka tinggal mengkonsolidasikan kelebihan-kelebihan mereka dan menjadi makmur. Tetapi, Partai Komunis memandang reform tanah itu hanya sebagai “pertempuran permulaan dari suatu perang yang berlarut-larut.”⁷¹ Reform tanah telah menyaksikan kekuasaan ekonomik dan politis kaum tuan-tanah dihancurkan, tidak hanya di desa melainkan di seluruh masyarakat. Langkah pertama dalam transformasi pedesaan adalah pelenyapan kaum tuan-tanah. Tetapi, PKT tidak bergerak langsung ke arah suatu “revolusi” mengkonsolidasikan kemenangan-kemenangannya. Partai menjalankan suatu program gradualis (berangsur-angsur = selangkah demi selangkah) untuk menyerap surplus pedesaan dan memajukan transformasi lebih lanjut.

Terdapat tiga unsur pokok dalam mempercepat transisi setelah reform tanah. Yang pertama adalah pemajakan progresif, yang istimewa berat

atas pengaturan hak milik atas tanah, dan dengan demikian menyerang suatu aspek pokok dari eksploitasi kapitalis pedesaan. Yang kedua, negara mulai memperluas penyalur-penyalar perdagangan grosir dan eceran melalui perusahaan-perusahaan dagang negara, dan dengan begitu menumbangkan perdagangan swasta. Yang terakhir, kaum tani didorong untuk membentuk kelompok-kelompok saling-bantu. Ini terutama populer di kalangan kaum tani miskin, karena alat-alat produksi yang tersedia bagi petani-petani seperti itu seringkali tidak mencukupi untuk pertanian yang efisien. Dengan menjadi semakin berperannya negara dalam pasar, konflik-konflik antara negara dan pedagang swasta menjadi semakin sengit. Para pedagang swasta terutama berurusan dengan kaum tani yang “lebih berada.” Kaum tani miskin cenderung menanda tangani kontrak-kontrak pembelian di muka dengan pemerintah, dengan begitu memperoleh kredit sebelum-panen (tatkala kredit itu paling dibutuhkan) dengan pembayaran berupa kuota-kuota pasca-panen kepada koperasi-koperasi perdagangan negara. Kaum tani yang “lebih berada” siap berpekulasi di pasar untuk harga-harga gandum yang tinggi. Dengan melakukan praktek ini, mereka menggerowoti sistem negara dalam penentuan harga dan suplai/persediaan gandum. Pada tahun 1953, konflik mencapai puncaknya. Administrasi negara terdesak oleh permintaan-permintaan akan gandum oleh kota-kota dan keadaan diperburuk lagi oleh spekulasi dalam harga-harga gandum. Menjadi jelas bahwa pemerintah mensubsidi perdagangan gandum swasta. Jumlah gandum yang dijual oleh negara pada tahun 1953 adalah 38.42% lebih banyak daripada yang dibelinya.⁷² Negara bergerak cepat dan tegas terhadap perdagangan swasta ini. Semua penjualan gandum dimonopoli oleh negara, dengan demikian memaksa semua petani menjual surplus-surplus mereka kepada pemerintah dengan harga-harga yang ditentukan. Ini ditetapkan pada harga pasar yang berlaku dan pasar gandum; tetapi kekuasaan mereka bahkan lebih dikurangi lagi oleh pertumbuhan Koperasi-koperasi Produsen Pertanian. Dengan menggunakan insentif-insentif (perangsang-perangsang) ekonomi dan politis, Partai memajukan pengkoperasian. KPP-KPP (Koperasi Produsen Pertanian) pemula, yang tumbuh dari kelompok-kelompok saling-bantu, tidaklah stabil. Ini dikenal sebagai koperasi-koperasi tingkat lebih rendah, karena bertambahnya bagian pendapatan kepada anggotanya, setelah obligasi-

obligasi negara dan investasi telah dipenuhi, terutama didasarkan pada hak milik perseorangan. Rasionya ditetapkan 70% untuk tanah yang diiurkan oleh keluarga petani pada koperasi dan 30% berdasarkan pekerjaan yang dilakukan.⁷³ Unsur paling penting dalam ketidak-stabilan KPP-KPP itu adalah kemampuan kaum tani kaya dan yang “lebih berada” untuk secara efektif bersaing dengan mereka. Menjelang 1955, Mao sangat mence-maskan ancaman pada proses transformasi itu dan karenanya, memu-tuskan untuk meningkatkan momentum pengkoperasian. Pinjaman- pinjaman diberikan kepada kaum tani miskin untuk bergabung dalam KPP-KPP, dan tekanan politis dan ekonomik dikenakan pada kaum tani sedang agar mereka pun masuk ke dalam koperasi-koperasi. Sangat menentukan sekali bahwa kaum tani dengan alat-alat produk-si lebih besar bergabung dalam koperasi-koperasi karena ini akan menaikkan tingkat produktivitas mereka hingga ke titik di mana perekonomian tani perseorangan tidak dapat lagi bersaing secara efektif terhadap mereka. Lagi pula, dengan semakin bertumbuhnya gerakan koperasi, kekuatan sektor swasta akan diperlemah. Yaitu, kaum tani kaya akan mendapatkan diri mereka tanpa tenaga kerja untuk menggarap ladang-ladang mereka. Menjelang akhir 1956, titik balik itu telah dicapai. KPP-KPP kini sudah berdiri kokoh dan mampu bersaing terhadap produser-produser perseorangan. Menjelang akhir 1956, 87.8% dari kaum tani telah bergabung dalam KPP-KPP dan pada tahun 1957 angka ini naik menja-di 93.5%.⁷⁴ Kaum tani kaya telah juga ditarik ke dalam koperasi- koperasi dan imbangannya kini telah berubah secara mendasar ke pihak negara. KPP-KPP didirikan pada suatu tingkat lebih tinggi daripada pendahulu-pendahulunya, dengan hak milik perseorangan dilampaui oleh kerja yang dilakukan oleh kaum tani. Yaitu, koperasi-koperasi membayar pada petani terutama dalam *natura*, atas dasar pekerjaan, dan hak milik tidak lagi menjadi landasan bagi kekayaan atau kedudukan. Seperti ditulis oleh Brugger, KPP-KPP tingkat lebih tinggi menyerupai *kolkhoz* karena,

... semua tanah, hewan-hewan tarik, bahan-bahan pokok produksi, dsb. diserahkan kepada kolektif dan petani-petani perseorangan menahan sebidang tanah, beberapa hewan dan perkakas. Ketentuan masih dibuat bagi dana-dana patungan yang ditentukan menurut hak milik dan kedudukan tenaga kerja, tetapi pembayaran kini semata-mata menurut pekerjaan, tidak menurut sumber-sumber

yang semula dikumpulkan. Namun begitu, kompensasi diberikan untuk hilangnya hak-milik.⁷⁵

Dengan pengkonsolidasian KPP-KPP maka hubungan-hubungan produksi kapitalis digantikan oleh kepemilikan baru koperatif dan proses baru dalam penarikan/pengambilan surplus. Namun, KPP-KPP perlu diintegrasikan lebih lanjut ke dalam hubungan-hubungan teknis produksi bentukan-baru. Timbul banyak kebingungan dalam hubungan-hubungan teknis atas tingkat-tingkat otonomi yang berbeda-beda dan kekuasaan dan kontrol yang harus dijalankan di sepanjang rangkaian surplus. Semula, kepada koperasi-koperasi diberikan kedudukan kunci dalam pengorganisasian dan pengawasan tenaga kerja dan tanah. Tetapi timbul tekanan pada titik produksi, yang diungkapkan melalui kelompok-kelompok, akan tanggung-jawab yang lebih besar atas alokasi tenaga kerja dan pengupahan. Lagi pula, sulit sekali bagi KPP-KPP untuk mengkordinasikan tanah dan seringkali terlampau sempit untuk mengerjakan ladang-ladang itu secara efisien. Demikianlah, walaupun bentuk baru dari produk surplus itu ditetapkan, hubungan-hubungan teknis berada dalam suatu keadaan ketidak-serasian. Lagi pula, KPP-KPP itu masih tidak efisien jika dibandingkan dengan industri, dan kesenjangan antara kedua sektor itu terus semakin lebar. Mao memutuskan untuk memecahkan kontradiksi-kontradiksi mikro dan makro ini dengan mengubah pertanian lebih lanjut. Lompatan Jauh Ke Depan diperkenalkan dan salah satu petunjuk kebijaksanaan dasarnya adalah mengendalikan produksi pertanian melalui komunesasi. Komune-komune dibangun dari sejumlah KPP dan mereka bahkan lebih jauh memperluas revolusi dalam hubungan-hubungan produksi. Penggabungan KPP-KPP meningkatkan penguasaan atas tanah per unit pertanian, dan dengan begitu memungkinkan komune-komune merencanakan penggunaan tanah secara lebih efektif. Tetapi pengaruh paling penting dari gerakan komune adalah dalam meningkatkan suplai tenaga kerja; Ini terutama sekali dilaksanakan melalui pemindahan kaum wanita dari peranan-peranan “tradisional” (keluarga) ke ladang-ladang. Di daerah-daerah tertentu, ini telah mempunyai pengaruh yang mendasar atas keluarga petani.⁷⁶ Lagi pula, bidang-bidang tanah perseorangan dikomunesasi dan kelompok-kelompok mulai bergerak dari ladang ke ladang dengan cara yang menyerupai praktek-praktek kerja industri

konstruksi negara. Manajemen (pengelolaan) komune diberi tanggung-jawab lebih besar dan menjadi sebuah organ pelingkup dari administrasi pertanian pemerintah. Dengan demikian, komune-komune menjadi lebih daripada sekedar unit-unit ekonomi yang meneruskan petunjuk-petunjuk ke-bawah dan yang memastikan bahwa surplus disalurkan ke atas kepada negara. Komune-komune itu kini menjadi lembaga-lembaga politis yang mempunyai kekuasaan untuk memutuskan banyak persoalan, termasuk kesehatan, pendidikan dan kebijaksanaan investasi. Hubungan-hubungan teknis dari produksi diperluas jauh melampaui perbatasan-perbatasan *kolkhoz*. Sementara kaum “radikal” memandang komune-komune sebagai perwujudan visi Marx dalam Komune Paris. Menurut orang-orang seperti itu negara akan segera “melayu hilang.” Tetapi, telah menjadi jelas bahwa masih terdapat kontradiksi-kontradiksi dalam hubungan-hubungan produksi teknis. Tim-tim menuntut lebih banyak kewenangan atas produksi dan poin-poin kerja. Dengan bubarnya perekonomian keluarga, para pengusaha pertanian hendak memastikan bahwa mereka memiliki peningkatan kontrol atas kerja mereka dan organisasinya. Pada awalnya, tekanan ini dilawan oleh pengelola komune. Demikianlah, ketegangan bertumbuh mengenai ukuran surplus dan di antara tingkat-tingkat otoritas di dalam proses kerja. Lagi pula, komune itu sendiri agak bingung mengenai hubungannya dengan perencanaan-perencana negara. Dalam studi mereka mengenai Komune Yanyi, Crook & Crooks mencatat bahwa komune menahan suatu surplus yang tinggi karena para kader memandangkan kepentingan-kepentingan komune berada di atas kepentingan negara.⁷⁷ Namun, Brugger telah mengindikasikan, bahwa komune-komune lain menjadi pendukung-pendukung penuh antusiasme dari kuota-kuota negara dan cenderung melebihi kapasitas mereka, dengan selalu menaikkan kuota-kuota mereka. Akhirnya ini juga menggerogoti perencanaan negara yang teratur mengenai produksi komune.⁷⁸

Konflik-konflik tentang wewenang di dalam hubungan-hubungan produksi pedesaan dan kegagalan untuk menaikkan tingkat produktivitas pertanian telah dikritik di dalam Partai Komunis. Perpecahan di dalam PKT telah dipertajam oleh serentetan bencana alam yang mengakibatkan kekurangan pangan yang meluas sekali. Pengaruh Mao dalam

pengarahan kebijaksanaan merosot; terjadi suatu penjarahan diri dari kebijaksanaan—kebijaksanaan Lompatan Jauh dan suatu model Sovyet yang dimodifikasi diperkenalkan. Kekuasaan otoritas hierarkikal ditekankan dan ini dibarengi dengan dipro-mosikannya perangsang-perangsang perseroangan untuk meningkat-kan produktivitas pada titik produksi. Dalam pertanian, kebijaksanaan-kebijaksanaan baru ini mempunyai pengaruh berbeda-beda atas berbagai tingkat produksi. Sistem perencanaan yang didesentralisasi diberi wewenang-wewenang lebih besar, tetapi komune-komune dilucuti dari kewenangan, istimewa dalam mengambil keputusan mengenai investasi. Kelompok (tim) menjadi unit pengkoordinasi dan pertanggung-jawaban tenaga kerja. Kelompok yang melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan perencanaan negara yang menyangkut produksi dan penarikan surplus pertanian. Komune-komune menjadi suatu mata-rantai dari para perencana pada para produsen. Bidang-bidang tanah perseorangan dan produksi perseorangan diperkenalkan kembali. Bagi banyak petani, bidang-bidang tanah perseorangan menambah pendapatan mereka dari kolektif dan menjadi suatu medan bagi persaingan akan perhatian mereka. Pengunduran itu dengan demikian memperkuat kelompok dan merugikan komune. Namun, swa-sembada regional dan disentralisasi memberikan kekuasaan lebih besar pada lembaga-lembaga negara lokal dan Partai. Produksi bangkit kembali dan ancaman kelaparan terhindari. Ada perasaan bahwa pengunduran itu meninggalkan hubungan-hubungan produksi pertanian dalam satu keadaan ketidak-lengkapan. Pengunduran dari komune-komune tidak menghasilkan suatu pembangunan kembali struktur KPP-KPP secara lengkap; tetapi komune-komune itu dalam frustrasi karena berkurangnya kemampuan investasi untuk meningkatkan produksi lewat peningkatan mekanisasi. Tingkat-tingkat produktivitas dengan demikian tertahan oleh kenyataan bahwa pengorganisasian tenaga kerja terutama dilakukan oleh kelompok (tim). Konflik-konflik masih tetap berada di dalam hubungan-hubungan produksi dan baru setelah Revolusi Kebudayaan dilakukan upaya-upaya untuk memulihkan komune-komune pada suatu posisi kewenangan (istimewa atas mesin-mesin berat). Setelah Lompatan Jauh Ke Depan, PKT, yang tidak terlalu dipengaruhi lagi oleh Mao, memutuskan untuk menstabilkan hubungan-hubungan produksi. Swa-sembada dan

desentralisasi dipertahankan dan dilengkapkan oleh keputusan untuk memperkenankan pertanian menahan suatu tingkat kenaikan surplusnya yang lebih tinggi. Diperkirakan, dengan cara pendekatan ini, perindustrian akan bertumbuh di samping pasar pertanian dan pengurusan atas surplus industrial akan menjadi seminim mungkin. Dengan demikian, tingkat relatif dari otonomi atas produksi dalam pertanian dilengkapi dengan peningkatan dalam pengawasan team atas surplus mereka. Yaitu, team-team itu merupakan unit-unit dengan wewenang yang lebih besar ketimbang pasangan-pasangan industrial mereka dan mereka kini diberi suatu insentif tambahan untuk memperluas produksi. Namun begitu, negara akan tetap memperoleh bagiannya dari surplus pertanian. Diharapkan bahwa ini akan meningkatkan produktivitas pertanian dan juga memungkinkan industri untuk menahan surplusnya bagi perluasan. Paine mengedepankan bahwa tujuan strategi ini adalah,

...dengan memberikan suatu perangsang material kolektif pada tingkat paling bawah, untuk mencapai suatu hasil produksi dan surplus yang dipasarkan yang lebih tinggi daripada yang sebaliknya, dan untuk mendorong dipergunakannya sebagian besar surplus tambahan seperti itu untuk produksi pedesaan dari masukan-masukan pertanian secara kecil-kecilan. Yang penting adalah bahwa, hingga batas keberhasilan kebijaksanaan ini, ia menjauhkan lebih sedikit sumber-sumber dari investasi dalam barang-barang penghasil untuk industri daripada jika yang sebaliknya terjadi.⁷⁹

Lagi pula, Paine percaya bahwa program ini sangat berhasil dan industri negara menjadi sangat dominan dalam menghasilkan pendapatan-pendapatan negara. Ia menunjukkan bahwa,

Pendapatan-pendapatan negara telah bertambah semakin banyak dari laba-laba dan pajak-pajak dan perusahaan-perusahaan industrial negara—ini merupakan 90% dari pendapatan-pendapatan negara pada tahun 1974 dibandingkan dengan 34% pada tahun-tahun awal pasca-pembebasan.⁸⁰

Angka-angka akhir-akhir ini mendukung argumen Paine bahwa telah ada suatu perbedaan mencolok antara industri dan pertanian, baik dalam artian produktivitas maupun tersedianya surplus bagi negara. Menurut Wang Haibo dan Wu Jiajun,

Selama 1950-79, nilai produksi total dari industri meningkat dengan rata-rata sebesar 13.3% setahunnya, sedangkan nilai produksi pertanian cuma meningkat dengan 4.3% setahunnya.⁸¹

Dalam karangannya mengenai *Agricultural Employment and Technology*, Rawski memperhitungkan bahwa antara 1957 dan 1975, pertanian telah menyerap hampir 100 juta pekerja baru.⁸² Ia memperkirakan bahwa selama periode ini, produk rata-rata dari tenaga kerja dalam pertanian Tiongkok tidak menurun. Lagi pula, jumlah rata-rata hari kerja meningkat sangat, dari 159 hari kerja setahunnya per seorang pekerja pada tahun 1957, menjadi 207 pada tahun 1975.⁸³ Ia menyimpulkan bahwa,

Apabila produktivitas diukur berdasarkan nilai produksi per orang-sehari, maka hasil-hasil juga jelas sekali. Produksi per orang-sehari turun dengan tajam antara 1957 dan 1975, dengan penurunan sebesar 15% hingga 36%, tergantung pada perkiraan-perkiraan mana yang dipilih dalam hubungannya dengan intensitas kerja pengolahan dan persiapan pemupukan.⁸⁴

Di situ Rawski mengidentifikasi suatu kelemahan kritis dalam pertanian Tiongkok antara 1957 dan 1975. Sekalipun penyerapan tenaga kerja dan jumlah jam kerjanya naik, efisiensi kerja menurun. Kesimpulannya, dari 1949 hingga 1960, transformasi cara kapitalis menjadi cara sosialis diwujudkan dalam suatu proses revolusioner terus-menerus. Hak milik kapitalis dan penarikan surplus dinegasi dan kepemilikan sosialis, dibarengi suatu bentuk baru produk surplus, telah diperkenalkan/diberlakukan. Namun, merupakan keharusan bagi unsur-unsur pokok cara produksi itu untuk diintegrasikan ke dalam suatu perangkat hubungan-hubungan teknis yang berangkaian dan stabil. Lompatan Jauh Ke Depan memainkan suatu peranan penting dalam proses terakhir dengan menumbangkan kemungkinan kapitalisme dan memperluas hubungan-hubungan produksi sosialis. Tetapi Lompatan Jauh Ke Depan memperluas transformasi itu hingga suatu titik ketidak-stabilan. Pengunduran memperkuat cara sosialis dan kelas-kelas yang dihubungkan dengan reproduksinya.

Cara Sosialis Setelah 1960

Sejak pengkonsolidasiannya, cara produksi sosialis telah membentuk perkembangan struktur-struktur ekonomik, politis dan sosial Tiongkok. Kontradiksi-kontradiksi yang terkandung di dalam cara sosialis telah menimbulkan perpecahan-perpecahan tajam dalam PKT, dan telah

merangsang perdebatan-perdebatan mengenai landasan perjuangan kelas di Tiongkok. Kebijakan-kebijaksanaan Partai telah berusaha, dengan berbagai cara, menengahi kontradiksi-kontradiksi intern dari cara produksi itu. Revolusi Kebudayaan memajukan pengikut-sertaan kaum buruh, campur-tangan Partai dan Tentera dalam perekonomian dan pembatasan-pembatasan atas perangsang-perangsang material sebagai suatu cara melunakkan kontradiksi-kontradiksi itu. Awal 1960-an dan kebijakan-kebijaksanaan “Komplotan Empat” telah beralih pada imbalan-imbalan material dan perangsang-perangsang material untuk meningkatkan produktivitas dan penarikan surplus dari penghasil-penghasil langsung. Kebijakan-kebijaksanaan di bawah Deng Xiaoping menekankan individualisme dan perangsang-perangsang material. Deng telah menandakan bahwa “kepemilikan negara” menjamin transisi sosialis menuju komunisme dan bahwa tenaga-tenaga produktif akan menjadi hakim terakhir dari transisi itu.⁸⁵ Ia telah menambahkan bahwa kriterium yang memadai mengenai pengupahan adalah azas “pembayaran menurut pekerjaan.” Seperti telah didiskusikan dalam Bab-bab terdahulu, pandangan-pandangan Deng itu “ortodoks,” sebagaimana yang dirumuskan oleh Stalin. Tetapi kepemilikan negara, seperti dibuktikan, cuma satu aspek dari transisi itu. Deng mengabaikan perubahan-perubahan dalam bentuk surplus dan menyamakan proses penarikan surplus dibalik klaim-klaim bahwa ini mewakili “hak burjuis.” Namun ini bukan berarti kembali pada kapitalisme sebagaimana yang diartikan oleh komentator-komentator tertentu.⁸⁶

Tak pelak lagi, kebijakan-kebijaksanaan Deng akan memperlebar kesenjangan pendapatan di Tiongkok.⁸⁷ Tetapi egalitarianisme (faham sama-rata sama-rasa) bukan suatu karakteristik dari cara produksi sosialis, juga bukan dari tahap perkembangan Tiongkok sekarang. Kebijakan-kebijaksanaan Deng mempunyai, sudah tentu, percabangan-percabangan politis dan berarti suatu penjarahan dari pendapatan-pendapatan yang diatur dan kebijakan-kebijaksanaan yang menekankan perangsang-perangsang politis.⁸⁸ Penekanan pada individualisme secara relatif cocok dengan cara produksi sosialis. Tetapi kebijakan-kebijaksanaan sekarang mengancam bentuk lama penarikan surplus yang mungkin berpengaruh atas hubungan-hubungan

hak milik dari cara sosialis. Kebijakan-kebijaksanaan Deng mencerminkan kenyataan bahwa Tiongkok tidak berada dalam suatu peralihan ke komunisme, Perkembangan tenaga-tenaga produktif tidak dapat dengan cara linear apapun membawa pada komunisme. Strategi Deng akan mempertajam kontradiksi-kontradiksi di dalam hubungan-hubungan produksi yang pada gilirannya akan meningkatkan antagonisme-antagonisme kelas. Di masa lalu, konflik-konflik kelas ini diungkapkan melalui Partai; tetapi itu juga telah mengalami suatu perubahan dan kini mencerminkan pandangan bahwa persoalan yang paling menentukan adalah menaikkan tingkat produksi, yaitu empat modernisasi.⁸⁹ Kelas birokratik kolektif, yang mengendalikan proses penarikan surplus, penguasaan dan pendistribusian, akan diuntungkan dengan suatu peningkatan dalam produksi. Kekuasaannya, namun, terancam oleh perpindahan tanggung-jawab atas produktivitas dan pengupahan kepada tingkatan-tingkatan yang lebih rendah. Pemindahan tanggung-jawab pada penghasil-penghasil langsung dirasakan paling kuat dalam pertanian karena sektor ini sudah didasarkan atas suatu tingkat/derajat otonomi yang lebih tinggi dalam hubungan-hubungan produksi. Walaupun sistem tanggung-jawab kontrak menggerowoti perekonomian kolektif, hasilnya masih tetap tidak menentu. Konflik-konflik dalam hubungan-hubungan produksi pertanian masih berlangsung; tetapi kecenderungannya adalah ke arah suatu transformasi penting dari kolektif-kolektif, dengan pengawasan atas tanah dan tenaga kerja beralih dari team-team, brigade-brigade dan komune-komune kepada rumah-tangga rumah-tangga yang dikontrak. Surplus akan dikendalikan melalui sistem kontrak itu dan tidak lagi melalui bilangan-bilangan-kerja kolektif. Kelas birokratik masih memperoleh sebagian dari surplus pekerja-pekerja pertanian dan ia mengarahkan yang harus diproduksi; tetapi tampaknya mungkin sekali bahwa ketegangan-ketegangan akan timbul antara kekuasaan kelas birokratik atas yang diproduksi dan berapa banyak yang dikuasainya, dan penghasil-penghasil rumah-tangga yang akan berkeinginan sekali mempertahankan sebanyak mungkin kekuasaan atas produk mereka dan cara memproduksinya. Dalam skala lebih luas, sistem rumah-tangga mempunyai potensialitas untuk berbenturan dengan cara produksi sosialis. Ini khususnya akan terjadi apabila industri negara tidak dapat memperoleh pasokan-pasokan yang direncanakan secara

langgeng dan jika harga-harga produk-produk naik terlalu tinggi. Yaitu, ada bahaya bahwa hubungan-hubungan produksi pertanian, yang beroperasi melalui pasar, akan memaksakan suatu kenaikan dalam harga-harga barang-barang pertanian; dan yang mempunyai arti penting kritis di sini adalah harga gandum, karena kenaikannya akan meningkatkan tekanan atas tingkat-tingkat upah yang akan mengganggu hubungan—hubungan industri yang direncanakan. Bab terdahulu sudah menunjukkan bahwa peningkatan pensubsidian telah merupakan suatu cara sementara dan mahal dalam menghadapi bentrokan itu. Dengan berkembangnya bentrokan, demikian pula halnya dengan kontradiksi-kontradiksi intern kelas antara fraksi-fraksi kelas birokratik dan di kalangan kelas pekerja (misalnya, antara buruh permanen, sementara dan yang menganggur) dan di kalangan kaum tani. Kesimpulannya, Tiongkok tidak berada dalam keadaan transisi pada komunisme, tetapi telah menegakkan suatu cara produksi sosialis. Dapat dimengerti bahwa cara produksi ini dapat digantikan, tetapi ini tampaknya tidak akan terjadi pada waktu ini. Hubungan-hubungan pemilikan masih didominasi oleh kepemilikan negara, dan bentuk penarikan surplus, yang karakteristik bagi cara sosialis, masih bertahan dengan kokohnya walaupun ia berubah dengan cepatnya di daerah pedesaan. Apabila unsur-unsur ini sudah berubah secara mendasar, maka tibalah waktunya untuk mengkonseptualisasikan suatu transisi baru pada suatu cara produksi yang lain, mungkin pada komunisme.

Catatan

¹ Contoh-contoh perdebatan-perebatan mengenai eksperimen-eks-perimen itu adalah Zhao Renwei dan Xiang Qiyuan, Xue Muqiao (ed.), 1982, hal. 947-56; Lin, 1981; Feuchtwang dan Hussain (ed.) 1983

² Xue Muqiao, 1981.

³ Untuk argumen-argumen yang menyokong tahap kedua periode perombakan ekonomi, lihat Wan Li, RMRB., 23 Desember 1982, SWB/FE/7228/CI-18.

⁴ Skocpol 1979, hal. 8ao, 1977(b).

⁵ Lihat Mao, 1988(b).

⁶ Xue Muqiao, 1981, hal. 14.

⁷ Ibid. hal 16

⁸ Ibid., hal 5.

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid., hal. 17.

¹¹ Ibid., hal 311.

¹² CCP.CC., 27 Juni 1981, BR., 27, 6 Juli 1981, hal. 20.

¹³ Brugger, 1984(b).

¹⁴ Bettelheim, 1971, hal. 22.

¹⁵ Corrigan, Ramsay dan Sayer, 1978, hal. 153.

¹⁶ Ibid., hal. 148-54. Sejumlah sarjana Barat mempertahankan keutamaan tenaga-tenaga produktif. Yang paling terkemuka adalah Cohen, 1978. Lihat tinjauan-tinjauan kritikal oleh Elster, 1980, dan Ruben, 1981.

¹⁷ Xue Muqiao, 1981, hal. 13.

¹⁸ Ibid., hal. 5.

¹⁹ Ibid., hal. 101.

²⁰ Soalnya di sini adalah bahwa reform-reform ekonomis tidak cuma bersifat ideologis, melainkan mempunyai suatu basis yang nyata. Untuk perdebatan itu, lihat Christensen, 1983m dan Zhao Renwei dan Ciang Qiyuan, Xue (ed.) 1982, hal. 947-56.

²¹ Barker, Sisler dan Rose, 1982, hal. 179.

²² Barker dan Sinha, 1982, hal. 200.

²³ Wan Li, RMRB., 23 Desember 1982, SWB/FE/7228/C8; kata-kata diubah untuk tujuan-tujuan stilistika.

²⁴ Ibid., C/9; kata-kata diubah untuk tujuan-tujuan stilistika.

²⁵ Du Runsheng, RMRB., 7 Maret 1983, SWB/FE/7228/BII/6.

²⁶ Ibid., BII/7-8.

²⁷ Untuk alasan-alasan mengenai hak properti legal dan kepemilikan sesungguhnya, lihat Bettelheim, 1976(a).

²⁸ Xue Muqiao, 1981, hal. 14.

²⁹ Ibid., hal. 68-9.

³⁰ Wan Li, RMRB., 23 Desember 1982, SWB/FE/7228/C/7-8. kata-kata diganti demi alasan stilistik.

³¹ Du Runsheng, RMRB., 7 Maret 1983; SWB/FE/7228/BII/11.

³² Pengertian mengenai klas ini diteorikan secara lebih penuh dalam karya De Ste.Croix, 1981. Lihat juga Dupre dan Rei, 1973; Rey., 1973.

³³ Marx, (1867) Marx I, 1954, hal. 458-9.

³⁴ Marx, (1864), Marx dan Engels, SW., II, 1970, hal. 17.

³⁵ Marx, (1875), Marx dan Engels, SW., III, 1970, hal. 26.

³⁶ Marx, (1871), Marx dan Engels, SW., III, 1970, hal. 223.

³⁷ Gagasan-gagasan untuk seksi ini mengenai pandangan-pandangan Marx tentang komunisme diadaptasi dari Barbalet, 1977).

³⁸ Pandang ini di sini menjangkau komentar-komentar Brugger ketika ia berbicara mengenai negasi dari beberapa, tetapi tidak pernah semua, dari cara kapitalis dan memberikan suatu alat untuk konseptualisasi cara sosialis. Lihat Brugger, 1981(b), hal. 318.

³⁹ Lihat Marx, III, 1959, hal. 782-813. Setelah Marx telah banyak perhatian mengenai transisi itu. Baru-baru ini perdebatan mengenai transisi pada kapitalisme telah dipertimbangkan dalam dua tahap dengan dua fokus geografikal dan teoretikal yang berbeda. Fokus pertama adalah pada Inggris dan Perancis. Seorang perintis dalam hal ini adalah Dobb (1946), 1975. Ini mendorong suatu pertukaran pandangan, yang direproduksi dalam Hilton, 1976. Fokus kedua adalah pada persoalan perkembangan dan keterbelakangan, memandang ke luar Eropa dan teristimewa pada India. Lihat Foster-Carter, 1978, dan McEachern, 1967. Sumbangan-sumbangan berisikan paralel-paralel berguna untuk peralihan sosialis adalah Mayer, 1981 dan Mayer, 1982.

⁴⁰ Mengenai pengertian tentang suatu revolusi politis yang sempit versus suatu revolusi sosialis yang luas,

lihat Claudin, 1975.

⁴¹ Feuerwerker, 1968.

⁴² Untuk suatu tinjauan singkat mengenai kekurangan-kekurangan yang bertautan dengan kategori-kategori endapan dari Tiongkok feodal atau tradisional.. lihat Brugger, (1981(a), hal. 17. Dalam introduksi singkat ini, tidak mungkin meliputi semua perdebatan mengenai terbukti-tidaknya suatu 'cara produksi negara' atau 'cara Asiatik' yang lebih berdominasi dalam periode ini. Mengenai yang tersebut belakangan, lihat Anderson, 1975, hal. 462-549. Melotti, 1977, hal. 105-13, menerima bahwa cara Asiatik terbukti dan berada di bawah tekanan penyusupan Barat. Untuk suatu kritik mengenai ini, lihat Dirlik, 1982.

⁴³ Myers, 1970.

⁴⁴ Feuerwerker, 1968; Donnithorne, 1967, hal. 31-6.

⁴⁵ Riskin, 1975.

⁴⁶ Bruigger, 1984(b), hal. 174-5.

⁴⁷ Lihat Dirlik, 1982.

⁴⁸ Mao Zedong, (1939), Mao, SW., II, 1965, hal. 315.

⁴⁹ Breth, 1977, hal. 231.

⁵⁰ Ibid., hal. 27]

⁵¹ Eckstein, 1977, hal. 75-6.

⁵² Mao Zedong, (1953), Mao, SW.,V, 1977, hal. 101.

⁵³ Breth, 1977, hal. 28.

⁵⁴ Lihat Howe, 1971.

⁵⁵ Howe, 1973, hal. 28-54.

⁵⁶ Ibid. hal. 63-115 dan 142.

⁵⁷ Donnithorne, 1967, hal. 205; Brugger, 1967, hal. 265.

⁵⁸ Brugger, 1967, hal. 146-83.

⁵⁹ Hoffman, 1974, hal. 56.

⁶⁰ *Ibid.*, hal 60.

⁶¹ Howe, 1978, hal. 95-6. Howe memperhitungkan bahwa antara 1952 dan 1960 barang-barang produksi maju dengan 25.3%, sedangkan barang-barang konsumsi baik dengan hanya 8.3%.

⁶² Wang Haibo dan Wu Jiajun, Xue (ed.), 1982, hal. 444.

⁶³ State Statistical Bureau, Abstract, 1983, JPRS., 84111, 12 Agustus 1983, hal. 100-101.

⁶⁴ Howe, 1971, hal. 109.

⁶⁵ Chao, 1977; Schran, 1969, hal. 14.

⁶⁶ Schran, 1969, hal. 18. Lihat juga Shue, 1980, hal. 47-66.

Shue membandingkan pemilikan-pemilikan tanah di Hunan dengan daerah Selatan Tengah. Tabel-tabel 4-10 dalam buku ini meng-ungkapkan keaneka-ragaman pemilikan tuan-tanah di Hunan dan di antara dua daerah itu. Shue berargumentasi bahwa perkiraan asli dari Partai mengenai pemilikan tuan-tanah didasarkan pada Hunan, dan tidak memperhitungkan keaneka-ragaman regional (hal. 57). Lihat juga Lippitt, 1974; *Modern China I*, 1978.

⁶⁷ Schran, 1969, hal. 35.

⁶⁸ Shue, 1980, hal. 90.

⁶⁹ Domes, 1980, hal. 10-11.

⁷⁰ Donnithorne, 1967, hal. 37

⁷¹ Shue, 1980, hal. 96. Shue dengan rapi mengikhtisarkan strategi CCP: menjelang 1949-50, secara pasti ditekankan pada pengu-rangan jumlah musuh-musuh kelas secara otomatis, dan pada penyerapan sebanyak mungkin unsur revolusioner yang potensial di pedesaan, sekalipun pada waktu mereka dikerahkan pendapat-pendapatnya tidak dapat disebut progresif (hal. 18)

⁷² *Ibid.* hal 21.

⁷³ Domes, 1980, hal. 13.

⁷⁴ Eckstein, 1977, hal. 71.

⁷⁵ Brugger, 1981(a), hal 124).

⁷⁶ Schurmann, 1966, hal. 472.

⁷⁷ Crook dan Crook, 1966, hal. 100.

⁷⁸ Brugger, 1981(a) hal. 195.

⁷⁹ Paine, 1967, hal. 285.

⁸⁰ Ibid., hal 299.

⁸¹ Wang Haibo dan Wu Jiajun, Xue (ed.), 1982, hal. 445.

⁸² Rawski, 1982, hal. 121.

⁸³ Ibid., hal. 130.

⁸⁴ Ibid., hal 131-2.

⁸⁵ Lihat Watson, 1978; Watson, 1980.

⁸⁶ Lihat Bettelheim, 1978, hal. 115.

⁸⁷ Lihat O'Leary dan Watson, 1982-3; O'Leary dan Watson, 1980; O'Leary, 1979.

⁸⁸ O'Leary, 1979, hal. 18.

⁸⁹ Lihat Young, 1980.

BAB ENAM

Perdebatan MENGENAI HUKUM NILAI

-

SUATU PENGHORMATAN PADA ALMARHUM SUN YEFANG*

Steve Reglar

Pada tahun 1983, Sun Yefang, ahli ekonomi politis Tiongkok yang paling kontroversial, meninggal. Sudah sejak pertengahan-1930-an, Sun merupakan seorang protagonis (pelaku utama) penting dalam perdebatan-perdebatan tentang bagaimana seharusnya Tiongkok memodifikasi konsepsi Stalinis tentang organisasi ekonomi. Sejak lama merupakan ujung-tombak kaum ultra-kiri di Tiongkok dan disebut sebagai *Liberian* Tiongkok,¹ dan dijadikan sasaran kecaman umum sebagai seorang pembela “restorasi kapitalis” selama Revolusi Kebudayaan,² Sun akhirnya pada masa senjanya meraih penghormatan yang sepatutnya diberikan pada dirinya. Bukunya *Theoretical Questions of the Socialist Economy*, yang memuat banyak bahan yang ditulis sebelum pecahnya Revolusi Kebudayaan, akhirnya diterbitkan pada tahun 1979.³ Dalam suasana yang dilahirkan oleh reformasi-reformasi sidang Pleno Ketiga pada akhir 1978, gagasan-gagasan Sun telah memperoleh penilaian baru. Menyusul kematiannya, Sun dipuji sebagai salah seorang ekonom paling terkemuka di Tiongkok. Bab ini akan menyimak sumbangsih Sun pada serangkaian perdebatan yang sangat menentukan yang telah dilangsungkan sejak tahun 1978. Bab ini akan membandingkan pandangan-pandangan Sun dengan pandangan-pandangan ahli-ahli ekonomi politis terkemuka lainnya. Khususnya, pandangan-pandangan He Jianzhang, Ma Jiaju, Liu Guo-guang, Zhao Renwei dan Jiang Yiwei akan dikaji. Ahli-ahli ini telah mengemukakan pandangan-pandangan

*Suatu versi dari bab ini disajikan pada konferensi ‘New Directions in the Social Sciences and Humanities in China’, Aderlaide University, 20-22 Mei 1984.

dan telah menganjurkan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang sangat berlawanan dengan pandangan-pandangan Sun, dan banyak dari program merfeka membawakan suatu perpisahan (pemutusan hubungan) yang lebih dramatik dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan masa lalu.

Walaupun penilaian secara menyeluruh mengenai Sun dalam Bab ini akan bersifat positif, karyanya tidaklah bebas dari kekurangan. Argumen-argumen Sun dalam mempertahankan bahwa hukum nilai semestinya mengatrrur produksi selama transisi sosialis bersifat per-suasif. Perumusannya yang tersusun secara ketat mengenai jang-kauan hukum nilai sangat mendasar. Lagi pula, Sun mengedepankan suatu hal yang paling mendasar dengan mengaitkan hukum nilai pada hukum perkembangan berencana dan berimbang. Bab ini, dengan demikian menentang posisi yang diambil oleh Brugger dalam Bab Tiga, yang mengingkari objektivitas hukum-hukum ekonomik ini. Bekerjanya/berlakunya hukum-hukum seperti itu mestinya diakui/dikenali dan ketentuan-ketentuannya dipatuhi jika mau mencapai kemajuan ekonomi yang paling pesat dan paling tidak menggoncangkan (traumatik). Pandangan-pandangan Sun, karenanya, tidaklah esotorik (diketahui/difahami oleh orang-orang tertentu saja) ataupun efemeral (berlaku singkat). Seperti dinyatakan oleh *Introduksi* kumpulan tulisan ini, jenis perdebatan-perdebatan yang melibatkan Sun mempengaruhi dunia nyata secara mendalam. Ia secara langsung mempengaruhi peluang-peluang penghidupan dan organisasi sosial dan politis rakyat Tiongkok. Ia mempunyai arti-penting praktis maupun merupakan perhatian hakiki mengenai bidang ekonomi politis dan teori sosialis yang lebih abstrak.

Bab ini akan menolak posisi-posisi yang memandang perdebatan itu dalam artian perencanaan dan pasar. Ada banyak macam tipe perencanaan yang beroperasi di dunia dan dalam banyak kejadian suatu perekonomian itu tidaklah sepenuhnya direncanakan ataupun sepenuhnya diintegrasikan oleh pasar. Sulit diduga apakah tepatnya yang dimaksudkan dengan pengertian ekonomi yang sepenuhnya direncanakan itu. Sedangkan mengenai suatu pasar yang mengatur-harga, dalam artian yang dirumuskan oleh Polanyi, haruslah diperhatikan bahwa sangat sedikit transaksi-transaksi ekonomi di dunia yang diatur oleh pasar. Polanyi, sesungguhnya, menyatakan bahwa pengaturan pasar hanyalah

karakteristik untuk suatu jangka waktu pendek dalam sejarah.⁴ Sedangkan Marx memandang konsentrasi ahli-ahli ekonomi politis sezamannya pada kegiatan-kegiatan pasar dan perilaku harga sebagai contoh-contoh dari ekonomi *vulgar*. Ekonom-ekonom seperti itu lebih berkonsentrasi pada bentuk-bentuk fenomenal tinimbang pada hubungan-hubungan yang mendasarinya, yang menurut Marx semestinya diperhatikan oleh ilmu ekonomi. Argumen yang sama berlaku bagi analisa yang berkon-sentrasi pada rencana. Fokusnya semestinya bukan pada ada atau tidak adanya perencanaan melainkan semestinya pada pertimbangan apakah yang menentukan rencana itu dan hubungan-hubungan apakah yang diwujudkan atau dicerminkannya. Betapapun, rencana-rencana mempunyai bentuk bentuk, dari perencanaan komando Stalinis hingga perencanaan indikatif atau panduan (untuk memakai ideom Tiongkok).⁵ Mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang isi dan bentuk perencanaan menuntut suatu pengkajian mengenai hubungan-hubungan sosial dan ekonomik yang lebih mendasar. Seperti halnya dengan mengkaji hubungan-hubungan yang mendasari pasar, ini mengharuskan analisis tentang produksi dan pertukaran barang-dagangan; ia menuntut suatu pengkajian teori nilai.

Yang di atas ini adalah hasil-hasil besar Sun Yefang. Walaupun begitu, Bab ini akan menegaskan bahwa terdapat beberapa kekurangan dalam pendekatan Sun, khususnya keyakinan bahwa suatu sistem atau cara produksi sosialis sudah ada. Analisis ini akan melanjutkan analisa Bab-bab terdahulu, yang menolak cara berpikir itu. Dengan melakukan ini, ia akan melancarkan suatu argumen yang secara bertolak-belakang berlawanan dengan argumen McCarthy dalam Bab Lima.

Konteks Historis

Untuk memahami arti penting Sun Yefang dan seluk-beluk cara pendekatannya, perlu menguraikan dalam garis besarnya ciri-ciri tertentu yang menonjol dalam metodologi Marx, yang tercakup dalam *Capital* - sebuah karya yang dibaca dan diulang-baca oleh Sun selama tujuh tahun dirinya dalam kejatuhan. Analisis Marx tidak menyangkut penyusunan suatu tipe ideal – “sintesis dari sejumlah besar sekali gejala yang kabur, sederhana, yang kurang-lebih ada dan kadangkala tidak ada, yang disusun

menurut ... pandangan -pandangan yang berat-sebelah menjadi suatu konsep analitis yang utuh.”⁶ Sebagaimana ditunjukkan oleh Bab Satu, Marx menegaskan bahwa analisisnya dalam *Capital* tidak dimulai dari konsep-konsep, seperti nilai tukar dan nilai pakai, melainkan dari suatu analisis mengenai barang-dagangan. Maka itu analisisnya didasarkan atas suatu realitas historis tertentu. Marx dengan berhati-hati sekali menunjukkan bagaimana lahirnya produksi barang-dagangan kapitalis atas dasar produksi barang-dagangan yang sudah ada sebelumnya. Cara produksi kapitalis bukan cuma suatu konsep yang secara teoretikal terpisah dari lain-lain cara produksi; ia merupakan suatu perkembangan historis dari cara-cara sebelumnya. Titik-pangkal Marx adalah realitas historis, sebagaimana jelas sekali dalam pengakuannya bahwa ikhtisar Adam Smith mengenai *laissez faire* lebih merupakan suatu program daripada suatu uraian historis. Cara pendekatan Marx tentang kapitalisme dikumandangkan oleh Sun Yefang dalam mempersoalkan sosialisme.

Karena itu, perhatian Marx pada sejarah, membuatnya mencemoohkan ahli-ahli ekonomi politis yang memandang kategori-kategori ekonomi sebagai “abadi.” Gantinya memandang kategori-kategori ekonomik sebagai abstraksi-abstraksi yang menyatakan “hubungan-hubungan sosial riil, sementara, historik,” ahli-ahli ekonomi politis seperti itu, “berkat suatu transposisi (perubahan) mistik,” memandang hubungan-hubungan riil sebagai perwujudan-perwujudan abstraksi-abstraksi.⁷ Bagi Marx, studi ekonomi politis berlangsung di dunia riil; berkonsentrasi pada makhluk-makhluk manusia “yang sungguh-sungguh aktif” atas dasar “proses-proses kehidupan riil mereka.” Dari suatu analisis mengenai realitas, Marx dan Engels bermaksud mendemonstrasikan “perkembangan refleks-refleks dan gema-gema ideologis proses kehidupan ini” Namun, metodologi ini tidaklah bebas dari premis-premis (dasar- pikiran/alasan). Ia memulai dengan “premis-premis riil” dan tidak “meninggalkan mereka untuk sejenak pun.” Premis-premisnya diderivasi dari makhluk manusia “tidak dalam sesuatu isolasi dan keterpancangan fantastik bagaimanapun, melainkan dalam proses perkembangan mereka yang sesungguhnya, yang secara empirikal dapat ditang gapi, di dalam keadaan-keadaan tertentu.”⁸

Dalam artian yang paling umum, cara produksi Marx itu dapat dipandang sebagai perangkat (tatanan) hubungan-hubungan sosial di dalam mana produksi manusia berlangsung. Hubungan-hubungan produksi yang diselenggarakan oleh makhluk-makhluk manusia adalah “tidak dapat tanpanya dan tidak bergantung pada kemauan mereka.” Hubungan-hubungan seperti itu bersesuaian dengan satu “tingkat perkembangan tertentu dari tenaga-tenaga produktif material mereka.” Totalitas hubungan-hubungan itulah yang merupakan “struktur ekonomik.” Cara produksi mempunyai dua tingkat yang berbeda tetapi saling bertautan – cara penguasaan (*appropriation* = penguasaan/ perampasan/diambil sebagai milik) “alam” dan cara penguasaan “produk.” Dalam penguasaan alam manusia bergabung dalam seperangkat hubungan-hubungan tertentu yang bersumber dari perkembangan teknik-teknik produksi secara historis, organisasi proses produksi, pembagian kerja, karakteristik-karakteristik kebudayaan dan pola-pola otoritas. Penguasaan atas alam, dilihat oleh Marx sebagai hasil hubungan-hubungan sosial. Tidak ada makhluk-makhluk manusia abstrak yang berada dalam suatu “keadaan alami.”

Cara penguasaan atas produk-produk dari penguasaan atas alam berbeda-beda dalam setiap cara produksi. Di bawah perbudakan dan feodalisme, produk surplus dikuasai secara langsung, sedangkan di bawah kapitalisme ia dikuasai secara tidak langsung. Ini dikarenakan kerja surplus diambil alih dalam bentuk nilai lebih, yang diproduksi dalam keadaan-keadaan di mana tenaga kerja manusia dipertukarkan dengan barang-barang dagangan, dan sendiri dibeli dan dijual sebagai suatu barang-dagangan. Itulah ciri penentu kapitalisme sebagai suatu cara produksi. Dalam pada itu, kedua cara penguasaan tidak dapat direduksikan yang satu pada yang lainnya. Hukum-hukum gerak yang dapat diberlakukan pada cara produksi kapitalis bersumber dari interaksi antara kedua tingkat yang secara relatif otonom itu. Hubungan-hubungan dalam pertukaran dalam kapitalisme lahir karena terdapat suatu isi umum/bersama yang mendasari pertukaran itu – yaitu nilai yang merupakan suatu ungkapan dari kerja yang diwujudkan pada barang-barang dagangan. Pertukaran terjadi karena perkembangan-perkembangan dalam cara penguasaan alam, penciptaan kerja sosial melalui perkembangan pembagian kerja

sosial, perkembangan historis dari proses kerja dan perkembangan teknologi. Karenanya, untuk menjadi ungkapan/ Pernyataan universal dari nilai, kerja haruslah kerja abstrak dan bukan kerja konkret. Mengatakan bahwa cara produksi kapitalis ditentukan oleh adanya tenaga kerja sebagai suatu barang-dagangan tidaklah membubarkan perbedaan antara kedua tingkat penguasaan itu. Adanya tenaga kerja sebagai suatu barang-dagangan terjadi karena interaksi kedua tingkat itu, yang telah berkembang dan akan terus berkembang secara relatif otonom.

Penyelidikan mengenai cara produksi kapitalis, karenanya, bertopang atas suatu analisis mengenai nilai yang merupakan “rahasia” mengapa ada pertukaran barang-dagangan. Maka itu Marx mengemukakan bahwa,

Dalam masyarakat burjuis bentuk barang-dagangan dari produk kerja – atau bentuk nilai dari barang-dagangan itu – adalah bentuk sel ekonomik. Bagi peneliti yang dangkal, analisis dari bentuk-bentuk ini tampaknya diarahkan pada hal-hal tidak berarti (*minutiae*). Sebenarnya ia berurusan dengan *minutiae*, tetapi ini adalah dari pangkat yang sama seperti yang dihadapi dalam anatomi mikroskopik.⁹

Seluruh anatomi kapitalisme, ini untuk memperluas analogi Marx pada yang dari periode historis kemudian, bersandar pada suatu analisis mengenai ekuivalen D.N.A. yang memberikan suatu anatomi tertentu suatu kehidupan tertentu pula. Sudah tentu, cara orang mengenal/ mengakui kekuatan kehidupan hakiki adalah melalui kekuatanan abstraksi. Abstraksi itu adalah teori nilai.

Dari penciptaan nilai, yang dilahirkan oleh interaksi cara-cara penguasaan alam dan produk, bersumber/ berasal tingkat-tingkat kegiatan lainnya. Penarikan (*extraction*=pengambilan/pemungutan) produk surplus dalam bentuk nilai lebih berada di pusat kontradiksi dasar dalam kapitalisme, yaitu antara mereka yang memonopoli pemilikan atas alat-alat produksi dan mereka yang hanya dapat hidup dengan menjual tenaga kerja mereka. Ini dimanifestasikan sebagai suatu kontradiksi kelas antara burjuasi dan proletariat. Karena keberadaan kerja sosial dan pertukaran barang-dagangan, kontradiksi itu muncul sebagai beribu-ribu hubungan antara individu-individu melainkan dalam kepentingan-kepentingan yang kontradiktori (bertentangan) dan

praktek-praktek berlawanan (oppositional) pada tingkat kolektivitas-kolektivitas yang ditentukan secara historis dan struktural.

Bagi Marx, adalah dari kontradiksi-kontradiksi kelas itulah munculnya negara. Negara itu diperlukan untuk mengabadikan hubungan-hubungan penguasaan itu dalam hukum. Demikian, proletariat memenangkan hak untuk mangalienasi tenaga kerjanya dan burjuasi memenangkan hak atas pemilikan. Secara sederhananya, bentuk-bentuk legal burjuis mencerminkan pertukaran-pertukaran barang-dagangan yang bersifat dasar dalam cara produksi kapitalis.

Bentuk-bentuk distribusi tertentu muncul dari konfigurasi histor-ikal dari – di satu pihak, hubungan-hubungan antara cara-cara penguasaan atas alam dan atas produk dan, di lain pihak, dari keadaan perjuangan kelas dan praktek-praktek kelas pada umumnya. Distribusi, lagi pula, bertopang pada struktur investasi yang sendiri bergantung pada komposisi organik dari modal di berbagai departemen produksi, kestabilan uang maupun kekuatan-kekuatan persediaan dan permintaan. Distribusi, karenanya, merupakan suatu ruang lingkup yang berbeda dari pertukaran. Sejauh ia timbul dari hubungan-hubungan penguasaan atas alam dan penguasaan atas produk-produk proses itu, distribusi bergantung pada mereka. Namun begitu, distribusi juga mendesakkan kembali suatu hubungan pada proses produksi, dengan memberikan kondisi-kondisi sehingga investasi dapat bergerak dari satu departemen pada departemen lain dan dengan memelihara reproduksi sederhana dan yang diper-luas di dalam suatu departemen. Distribusi, lagi pula, mempunyai suatu hubungan yang relatif otonom dengan tingkat perjuangan kelas; ia dapat memelihara/menentukan perjuangan kelas maupun ditentukan oleh perjuangan kelas itu. Dengan alasan itulah Marx menegaskan bahwa terdapat suatu hubungan timbal-balik antara distribusi dan produksi. Ruang lingkupan distribusi secara rela-tif otonom; ia tidak harus dipandang sepenuhnya bebas atau sepenuhnya bergantung, juga tidak dapat dianggap sepenuhnya menentu-kan. Seperti dinyatakan oleh Marx,

Jika anda memulai dari produksi maka anda mesti meperhatikan kondisi-kondisi riil produksi itu dan mengenai kegiatan produktif orang-orang. Tetapi, jika anda memulai dari konsumsi, maka anda dapat

menenangkan pikiran anda dengan hanya menyatakan bahwa konsumsi itu pada saat ini tidak *manusiawi*, dan dengan mendalil-kan *konsumsi manusiawi*; pendidikan konsumsi sebenarnya, dan seterusnya. Anda dapat berpuas diri dengan ungkapan-ungkapan seperti itu, tanpa menghiraukan sedikitpun tentang keadaan-keadaan kehidupan riil dan kegiatan orang.¹⁰

Marx tidak terutama mengritik kapitalisme karena praktek-praktek distributifnya. Bahkan, ia menegaskan bahwa kaum sosialis terdahulu sebenarnya salah dengan memusatkan kritik mereka pada bi-dang-bidang peredaran dan distribusi. Eksploitasi di bawah kapi-talisme tidaklah terletak pada kegiatan-kegiatan kaum pedagang yang “membeli dengan harga murah dan menjual dengan harga mahal,” juga tidak terletak pada praktek-praktek lintah-darat. Dan sesungguhnya, laba juga tidak berasal dari “perampokan” oleh kaum kapitalis. Dalam sanggahannya atas penjulukan ide itu oleh Wagner kepada dirinya, Marx berkata,

Sebenarnya, dalam penyajianku, laba “tidak” hanya sekedar suatu “pemotongan (deduksi)” atau “perampokan” terhadap pekerja. Sebaliknya, aku mengajukan kapitalis itu sebagai fungsionaris penting dari produksi kapitalis dan secara panjang lebar menunjukkan bahwa kapitalis itu tidak hanya “memotong” atau “merampok” melainkan memaksakan “produksi nilai lebih,” karenanya pemotongan itu hanya membantu untuk memproduksi; lagi pula, aku secara terperinci menunjukkan bahwa, bahkan jika dalam pertukaran barang-barang dagangan “hanya ekuivalen-ekuivalen” yang dipertukarkan, maka kapitalis itu –segera setelah ia membayar kepada pekerja itu nilai sebenarnya dari tenaga kerjanya– akan mendapatkan “nilai lebih” dengan sepenuh haknya, yaitu hak menurut cara produksi itu.¹¹

Maka itu, keadilan distributif adalah suatu hak yang sesuai dengan suatu cara produksi tertentu. Kaum buruh menjual tenaga- kerja mereka sebagai satu barang-dagangan menurut nilai suatu jangka waktu dari hari-kerja kepada kelas kapitalis. Kenyataan bahwa kelas kapitalis memperoleh nilai lebih dari transaksi ini bukanlah perampokan. Pertukaran (jual-beli) yang terjadi itu adalah pertukaran (jual-beli) ekuivalen-ekuivalen. Kapitalis itu telah membeli tenaga kerja sesuai harganya; yang dilakukan dengan buah tenaga kerja itu tidak mempunhai hubungan/sangkut-paut dengan pertukaran sebelumnya itu. Seperti dikatakan oleh Marx, ini secara khusus merupakan kemujuran bagi kapitalis, dan bukan ketidakadilan bagi pekerja itu.¹² Sesungguhnya, kaum kapitalis tidak pelak lagi akan meninggalkan bisnis seandainya tidak ada penarikan nilai lebih.

Dengan demikian kita sampai pada hukum nilai. Ini merupakan kunci untuk memahami kontradiksi-kontradiksi cara kapitalis. Komentar-komentar Marx patut dikutib secara lengkap,

Bahkan seandainya tidak ada bab mengenai *nilai* di dalam bukuku, analisis mengenai hubungan-hubungan riil yang kuberikan pasti akan memuat bukti dan peragaan mengenai hubungan nilai yang riil. Semua omong-kosong tentang keharusan pembuktian konsep nilai datang dari ketidak-mengertian total mengenai hal ikhwal yang dipersoalkan maupun mengenai metode ilmiah. Setiap anak mengetahu bahwa sesuatu bangsa yang berhenti bekerja –aku tidak akan mengatakan selama setahun, melainkan bahkan untuk beberapa minggu saja, – akan musnah. Setiap anak juga mengetahui, bahwa jumlah besar sekali produk-produk yang sesuai dengan berbagai-bagai kebutuhan memerlukan jumlah besar sekali kerja total masyarakat yang berbeda-beda dan ditentukan secara kuantitatif. Bahwa “keharusan” mengenai “distribusi” kerja sosial dalam proporsi-proporsi tertentu ini tidak mungkin dihilangkan oleh suatu “bentuk khusus” produksi sosial, melainkan hanya dapat mengubah “cara (gaya) penampilannya,” tidaklah meragukan lagi. Tidak ada hukum-hukum alam yang dapat dlenyapkan. Yang dapat berubah dalam keadaan-keadaan yang berbeda secara historis hanya “bentuk” dengan mana hukum-hukum itu menyatakan dirinya. Dan bentuk dengan mana distribusi proporsional dari kerja itu menyatakan hanyalah bentuk dirinya, dalam suatu keadaan masyarakat di mana antar-hubungan kerja sosial itu dimanifestasikan dalam “pertukaran secara perseorangan” produk-produk kerja individual itu, adalah justru “nilai tukar” produk-produk itu. Yang disebut ilmu adalah justru yang mendemonstrasikan “bagaimana” hukum nilai itu menyatakan dirinya sendiri. Sehingga, jika orang sejak awal bermaksud *menjelaskan* semua gejala yang tampaknya bertentangan dengan hukum itu, maka orang mestilah menyajikan ilmu “di depan” ilmu.¹³

Suatu penilaian atas posisi di atas ini merupakan kekuatan Sun Yefang. Sejumlah proposisi penting menyusul dari situ. Yang menonjolkan penekanan Marx bahwa suatu pemahaman “ilmiah” mengenai ekonomi menyaratkan penggunaan abstraksi-abstraksi yang menerangkan hubungan-hubungan riil yang mendasarinya. Namun, abstraksi-abstraksi seperti itu mempunhai suatu landasan ontologikal. Marx menganggap sudah jelas bahwa masyarakat-masyarakat harus menguasai alam, jika tidak mereka akan mati kelaparan. Namun proporsi-proporsi kuantitatif dalam mana pembagian kerja sosial itu dialokasikan, mempunyai dua aspek. Ada suatu keharusan bagi kerja total masyarakat untuk dialokasikan di antara berbagai produk, namun ada juga kenyataan bahwa berbagai barang memerlukan kuantitas-kuantitas kerja yang berbeda-beda. Sekalipun distribusi kerja senantiasa terjadi, pola distribusi itu

beraneka-ragam pada waktu-waktu yang berbeda dalam sejarah. Karenanya, hukum-hukum yang menguasai distribusi kerja dapat berubah dari zaman ke zaman. Di bawah kapitalisme, hukum-hukum yang menguasai distribusi kerja dalam penguasaan alam harus sesuai dengan perubahan-perubahan dalam cara produk-produk dikuasai dan dipertukarkan. Karenanya, proporsi-proporsi faktor harus mengikuti ketentuan-ketentuan nilai tukar.

Karena itu, problemnya bagi Marx adalah menentukan apakah nilai itu dan bagaimana hukum nilai itu bekerja. Ia menolak cara-cara pendekatan Ricardo dan Proudhon dan juga, dengan melihat ke belakang, cara pendekatan Weber yang tipe-tipe idealnya menganggap, sebagai sudah pasti, kategori-kategori yang mestinya muncul kemudian di dalam analisis (yaitu, “menyajikan ilmu di depan ilmu”). Marx menegaskan bahwa karena nilai-nilai pakai tidaklah tetap dalam masyarakat-masyarakat yang historis berbeda¹⁴ dan tidak dapat menentukan nilai-nilai tukar barang-barang yang pada pokoknya tidak berguna dengan nilai-nilai tukar yang tinggi atau yang sebaliknya, maka nilai-nilai haruslah ditentukan oleh sesuatu yang lain. Satu-satunya faktor umum yang terlibat (yang bersangkutan) dalam semua pertukaran adalah, tentu saja, perwujudan kerja manusia. Yang demikian itulah dasar hukum nilai.

Hingga sejauh ini aku telah mengemukakan bahwa bagi Marx, terdapat suatu otonomi relatif antara cara penguasaan alam dan cara penguasaan produk-produk dari proses itu. Yang kedua, walaupun produksi mempunyai prioritas ontologikal, segera setelah distribusi terjadi, ia berada dalam suatu hubungan timbal-balik dengan produksi dan pertukaran. Suatu logika dari hubungan-hubungan internal terdapat antara semua bidang kegiatan di dalam cara produksi itu. Yang ketiga, hubungan antara bidang-bidang itu bersifat bertentangan (kontradiktori); karenanya suatu cara produksi tidak dapat dipandang sebagai suatu *sistem*. Hukum-hukum geraknya justru ada karena terdapat kontradiksi-kontradiksi di dalam totalitas itu. Karena semua bidang (lingkungan) saling- bertautan (inter-connected) dan saling-bertentangan (kontradiktori), maka suatu pengkajian harus memperhatikan semua aspek totalitas itu.

Maka, hukum nilai itu adalah suatu hukum yang meliputi semua aspek dan tingkat cara produksi kapitalis. Tetapi, apakah yang terjadi jika orang bergerak menuju sosialisme? Bab Tiga mendiskusikan pandangan-pandangan Marxis-Leninis mengenai keberadaan hukum nilai dalam keadaan-keadaan seperti itu. Yang terawal telah diringkaskan dalam diktum Trotsky yang terkenal pada tahun 1920, “organisasi produksi sosialis dimulai dengan likuidasi pasar ... produksi akan disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat lewat suatu rencana ekonomi yang dipersatukan.”¹⁵ Hukum nilai dan pertukaran barang-dagangan diingkari.¹⁶ Begitu pula adalah posisi Bukharin ketika, pada zaman ultra-kirinya, ia menulis *Economics of the Transformation Period*.¹⁷ Pemindahan-pemindahan produk-produk dari satu pabrik ke pabrik lainnya di dalam suatu organisasi tunggal adalah seperti seseorang yang memindahkan uang dari kantong yang satu ke kantong lainnya; pemindahan-pemindahan dalam ekonomi cuma merupakan pekerjaan-pekerjaan pembukuan. Menjelang tahun 1930-an, setiap orang yang berpendapat lain menghadapi suatu masa depan yang berbahaya.

Namun, telah jelas sekali bahwa sangatlah sulit untuk memelihara pembukuan itu. Pada tahun 1920, Trotsky mengajukan idealnya bagi peranan-peranan perencanaan dan integratif Dewan Tertinggi Perekonomian Nasional,

Ini menyaratkan ... bahwa (Dewan Tertinggi) mengatur/-menyediakan suatu aparat ideal untuk pertanggung-jawaban dan pengalokasian sumber-sumber ... bahwa baginya tersedia sebuah papan tombol yang ideal sehingga, dengan menekan sebuah tombol, dapat dipindahkan sejumlah tertentu batu-bara, kayu-bakar, tenaga kerja, ke suatu tempat di mana timbul keperluan akan barang-barang itu. Tentu saja, kita masih belum mempunyai suatu papan tombol ideal seperti itu di biro atau lembaga yang manapun.¹⁸

Seperti dinyatakan dalam Bab Tiga, tidak saja tidak ada papan tombol, bahkan tidak ada niat untuk mengembangkan satupun ekonomi matematikal yang dapat menantang indahny kesederhanaan bayangan administratif itu. Tidak adanya pengetahuan tentang statistik merupakan suatu keuntungan positif dalam perencanaan; statistik agaknya dianggap atau merupakan sesuatu yang anti-Marxis.¹⁹ Perencanaan *ad hoc* (khusus) menjadi keharusan.

Pada tahun 1952, sekilas terang diberikan oleh Stalin dalam *Economic Problems of Socialism in the USSR*.²⁰ Dengan menghidupkan kembali posisi yang dikemukakan tigapuluhdua tahun berselang oleh Obolensky,²¹ Stalin —masih dapat diingat— telah menetapkan suatu teori mengenai pertukaran barang-dagangan antara dua tipe kepemilikan (oleh *seluruh rakyat* dan oleh kolektif-kolektif). Hukum nilai beroperasi antara kedua sektor ini dan diperkirakan ditentukan oleh pertukaran nilai-nilai yang sama -- sekalipun jelas bahwa di bawah Stalin hal itu tidak pernah demikian adanya.

Konsesi-konsesi terbatas Stalin pada hukum nilai dengan penuh gairah disergap oleh ekonom-ekonom Tiongkok yang baru-baru ini memulai perencanaan yang menggunakan hukum nilai. Menjelang pertengahan 1950-an, sejalan dengan pelunakan Sovyet menyusul diumumkannya “pidato rahasia” Khrushchev pada Kongres Ke XX PKUS, banyak aspek perencanaan Stalinis diteliti secara cermat. Satu demi satu, aspek-aspek ortodoksi Stalin ditantang/diragukan. Lin Lifu menggunakan suatu perspektif Marxian dalam mempersoalkan cepatnya kolektivisasi pertanian. Ma Yinchu menuntut pertumbuhan yang lebih seimbang, lebih didasarkan pada keseimbangan dan mengajukan persoalan penuh duri tentang pengaruh-pengaruh ekonomi dari tekanan kependudukan. Chen Chenhan bahkan lebih jauh lagi menganjurkan digabungkannya aspek-aspek ilmu pengetahuan Barat yang non-Marxis. Suasana zaman itu lebih mengingatkan pada *Rencana Ekonomi Baru* Lenin ketimbang pada rencana-rencana lima tahun Stalin, suatu kenyataan yang tidak mengejutkan/mengherankan karena, seperti dicatat oleh Brugger, ada kebingungan tertentu mengenai model Sovyet yang manakah presisinya yang mestinya diikuti.²²

Seorang ekonom yang lebih memilih kebijaksanaan-kebijaksanaan N.E.P.(New Economic Plan =Rencana Ekonomi Baru) seperti itu adalah Gu Zhun. Gu, bersama dengan Ying Chengwang, menyerukan agar hukum nilai dipatuhi di bawah sosialisme untuk memperlancar pertanggung-jawaban ekonomi dan keuangan dan untuk melanjutkan pengelolaan hingga baik keadaannya. Perusahaan-perusahaan harus mempunyai otonomi keuangan sepenuhnya dan harus bertanggung-jawab atas laba-laba dan kerugian-kerugian mereka sendiri.²³ Tidak

terdapat, demikian dikemukakan, keganjilan antara perencanaan dan hukum nilai. Bahkan, beberapa ekonom sampai sejauh menganjurkan desentralisasi gaya-Yugoslavia, sekalipun mengajukan pendapatnya dari premis-premis yang berbeda. Untuk beberapa waktu lamanya, tampaknya, beberapa dari saran-saran itu mendapatkan persetujuan resmi. Hal ini jelas dalam pidato yang di luar kebiasaan diucapkan Chen Yun pada Kongres Partai Ke Delapan, yang sudah dibicarakan dalam Bab Dua.²⁴

Namun, Tiongkok memiliki kaum voluntarisnya (*voluntary*) juga, yang, untuk beberapa waktu lamanya, cukup berpengaruh. Voluntaris-voluntaris seperti itu tidak jauh bedanya dengan aliran teleologis tahun 1920-an. Dalam gaya ‘puncak-gunungisme’ (*mountain-top-ism*), yang menandingi ucapan-ucapan Trotsky seperti yang dibicarakan di muka, Chen Boda menyatakan bahwa zaman produksi barang-dagangan sudah berakhir dan bahwa hukum nilai adalah berlebih-lebihan.²⁵ Pernyataan seperti adalah terlampau jauh bahkan bagi PKT selama Lompatan Jauh Ke Depan, dan usaha Chen untuk menyamai Raja Canute [Raja Canutus dari Denmark (1040-1086), yang berusaha memajukan peradaban dan keadilan Kristen, namun karena tindakan-tindakan keuangannya yang menguntungkan kultus itu ditentang keras. Raja Canutus mati sebagai korban amukan massa rakyat] ditolak mentah-mentah.

Sebaliknya dari mendukung gagasan-gagasan ekonomik Chen Boda, Mao Zedong berpendapat bahwa perumusan Stalin menenai hukum nilai tidak memadai. Mao tidak bersedia menerima pengecualian Stalin atas alat-alat produksi dari keberlakuan hukum nilai. Stalin melakukan ini sebagai suatu rasionalisasi ketidak-percayaannya terhadap kaum tani. Secara menyeluruh, Mao melihat adanya suatu peranan positif bagi hukum nilai. Pada tahun 1959, Mao menyatakan bahwa ia adalah “suatu aliran yang besar; hanya apabila kita menggunakannya, mengajar berjuta-juta kader” dan massa mengenainya, dapatlah kita membangun sosialisme dan komunisme.²⁶

Pada tahun itu juga, Mao, dengan mengikuti suatu arah yang berkanjang dalam pikirannya sejak pidatonya *On the Ten Major Relation* pada tahun 1956, mengemukakan bahwa prioritas-prioritas perencanaan haruslah

dibalikkan.²⁷ Sebaliknya dari menekankan industri berat yang disusul oleh industri ringan dan pertanian, pertanian yang kini harus diberi prioritas, disusul oleh industri ringan, industri berat, komunikasi dan perdagangan. Mao kembali pada posisi Chen Yun,

Kawan Chen Yun mengatakan "kita mesti mengatur pasar sebelum kita menjalankan pembangunan modal." Banyak kawan tidak sependapat. Tetapi kini kita menyadari bahwa Kawan Chun Yun benar. Kita harus mengatasi masalah-masalah sandang, pangan, papan, keperluan-keperluan hidup sehari-hari dan perjalanan lebih dulu, karena itu semua menyangkut kehidupan yang stabil dari 650 juta rakyat.... Ini akan menguntungkan pembangunan kembali, dan negara akan dapat mengakumulasi sumber-sumbernya.²⁸

Mao melihat adanya suatu peranan positif bagi hukum nilai dalam memperlancar pembalikan susunan prioritas perencanaan Stalinis. Namun, bab-bab terdahulu telah menunjukkan bahwa susunan prioritas tidaklah mudah untuk dibalikkan, dan ini menimbulkan ketidakseimbangan ketidak-seimbangan besar dalam perekonomian.

Kritisisme Sun Yefang terhadap Stalin

Bab-bab terdahulu telah memikirkan hingga seberapa jauh sebenarnya Mao telah meninggalkan/menjauhi Stalin. Cukuplah dikatakan di sini bahwa Mao gagal menarik kesimpulan-kesimpulan dari penegasannya mengenai status barang-dagangan dari alat-alat produksi. Mao mencerminkan ortodoksi dari kebanyakan ahli ekonomi politis Tiongkok yang mengikuti Stalin dalam memandang bekerjanya hukum nilai dalam artian pertukaran barang-dagangan antara dua lingkup kepemilikan. Sun Yefang, sebaliknya, menolak landasan teori itu sendiri.²⁹

Sun menegaskan bahwa konsepsi Stalin ada sama dengan menyatakan bahwa produksi dan pertukaran barang-dagangan telah lahir ketika dua komune primitif bertemu untuk menukarkan barang-barang. Ini tidak memadai. Berargumentasi atas landasan-landasan Marxis yang kokoh, Sun mempertahankan bahwa produksi barang-dagangan hanya terjadi ketika serangkaian kondisi yang lengkap dipenuhi. Kesalahan pokok Stalin adalah dipisahkannya kepemilikan dari aspek-aspek hubungan-hubungan produksi lainnya. Kepemilikan, demikian kata Sun,

tidak dapat dipisahkan dari produksi, pertukaran, distribusi dan konsumsi. Dengan demikian, dengan memperlakukan kepemilikan sebagai suatu keutuhan disjuntif (bersifat menceraikan/memisahkan), Stalin membuat suatu analisis mengenai hak milik yang menyerupai analisis Proudhon. Sun menganggap komentar-komentar Marx mengenai teori hak milik Proudhon sangat indstruktif,

Kategori terakhir dalam sistem Proudhon terbentuk oleh "hak-milik." Dalam dunia nyata, sebaliknya, pembagian kerja dan semua kategori M.Proudhon lainnya adalah hubungan-hubungan sosial yang dalam keseluruhannya membentuk yang dewasa ini dikenal sebagai "hak-milik"; di luar hubungan-hubungan ini hak-milik burjuis bukan apa-apa kecuali suatu ilusi metafisikal atau legal. Hak-milik dari suatu zaman lain, hak-milik feodal, berkembang dalam serang-kaian hubungan-hubungan sosial yang sama sekali berbeda.

M.Proudhon, dengan menetapkan hak-milik sebagai suatu hubungan yang berdiri sendiri, melakukan lebih daripada sebuah kesalahan dalam metode; ia jelas-jelas membuktikan bahwa dirinya tidak memahami ikatan yang menyatukan semua bentuk produksi "burjuis," bahwa ia telah tidak memahami watak "historis" dan "sementara" (transitori) bentuk-bentuk produksi pada suatu zaman tertentu.³⁰

Dengan mengikuti Marx, Sun Yefang menegaskan bahwa hak-milik berkembang sebagai suatu keutuhan tersendiri (abstrak) yang khusus bagi setiap zaman historis, karena ia merupakan produk dari suatu tatanan hubungan-hubungan sosial yang sepenuhnya baru. Karenanya, Marx berkereas bahwa dalil mengenai hak-milik burjuis haruslah diderivasi dari seluruh lingkungan/lingkupan hubungan-hubungan produksi sosial burjuis.³¹ Hubungan-hubungan produksi seperti itu berasal dari persekutuan-persekutuan produktif di dalam mana orang menguasai alam, dan mencakup hubungan-hubungan pertukaran dan distribusi. Karena, menurut pendapat Sun, "untuk menetapkan jenis kepemilikan apapun, langkah pertamanya adalah suatu analisis tentang bagaimana faktor-faktor manusia dan material dipadukan di dalam produksi, bagaimana orang mempertukarkan produk-produk mereka dan bagaimana produk-produk itu didistribusikan."³² Menurut pandangan Sun, memisahkan hak-milik dari hubungan-hubungan produksi lainnya menghasilkan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang timpang. Karenanya, perumusan Stalin berakibat-banyak dari kelemahan-kelemahan strategi perkembangan Tiongkok. Adalah fokus pada hak-milik yang

membawa pada pembentukan komune-komune dengan kecepatan yang berlebih-lebihan dan usaha-usaha yang salah-arah dalam menaikkan tingkat kepemilikan umum. Suatu pemusatan pada bentuk-bentuk kepemilikan baru yang lebih tinggi mengakibatkan pengabaian terhadap hubungan-hubungan produksi lainnya, dan landasan produksi riil yang ditentukan oleh hukum nilai dilupakan. Kebijakan-kebijaksanaan seperti itu adalah voluntaris!³³

Stalin juga salah, demikian pendapat Sun, dalam mengingkari peranan pertukaran di sektor yang ditetapkan sebagai dimiliki “oleh seluruh rakyat.” Dengan demikian, peredaran digantikan oleh pengalokasian negara, dan pertukaran digantikan oleh penjatahan. Walaupun Sun sependapat dengan Stalin (dan tidak dengan Mao) dalam mengingkari sifat barang-dagangan dari alat-alat produksi, ia tidak menganggap pengingkaran itu sebagai pembatalan peranan hukum nilai. Ini dikarenakan oleh masih berlangsungnya suatu “pertukaran produk-produk” yang semestinya mewakili suatu pertukaran nilai-nilai yang sama (setara). Kesalahan pokok dari Stalin adalah karena tidak memastikan bahwa pertukaran barang-barang dagangan antara sektor-sektor kepemilikan yang berbeda-beda sebenarnya menyangkut-/melibatkan nilai-nilai setara. Sebaliknya, negara memungut (menarik) suatu upeti dari kolektif-kolektif. Hubungan yang tidak merata antara daerah-daerah perkotaan dan pedesaan merupakan satu akibat langsung dari suatu pelanggaran terhadap hukum nilai. Mengabaikan hukum nilai melahirkan keti-dak-adilan distributif!³⁴

Sun berpendapat bahwa konsepsi Stalin mengenai asal-usul hukum nilai merupakan salah-pemahaman secara mendasar. Bagi Sun hukum nilai merupakan suatu ciri dari semua produksi dalam skala-besar. Di bawah sosialisme, ia berlanjut karena produksi nilai dasar masih tetap jumlah rata-rata waktu kerja yang diperlukan secara sosial untuk memproduksi suatu produk. Sekalipun produksi barang-dagangan telah berhenti di sektor milik-negara, ongkos produksi dari produk-produk untuk memenuhi nilai pakai sosial masih harus diukur dalam artian waktu kerja yang diperlukan secara sosial.³⁵ Dalam pengertian inilah Sun menafsirkan pernyataan Engels yang termashur,

Nilai adalah hubungan ongkos produksi dengan kegunaan. Penerapan nilai pertama adalah keputusan mengenai apakah sesuatu barang memang perlu diproduksi; yaitu, apakah kegunaan mengimbangi ongkos produksi. Baru setelah itulah orang dapat berbicara tentang penerapan nilai pada pertukaran. Dengan setaranya ongkos produksi dua jenis barang, maka faktor penentu yang menetapkan nilai komparatif (perbandingan) mereka adalah kegunaan.³⁶

Namun begitu, satu masalah penting dalam tulisan-tulisan Marx dan Engels, yang ditemukan Sun setelah penelitian yang cermat dan terinci, adalah pengabaian mereka –kadang kala– terhadap perbedaan antara nilai tukar dan nilai pada umumnya.³⁷ “Menegasi pengaruh nilai,” Sun menduga, adalah merujuk pada nilai tukar dan bukan pada nilai pada umumnya. Kurangnya kejelasan pada Marx dan Engels menimbulkan banyak kebingungan dalam Marxisme-Leninisme.

Nilai tukar, yang mencerminkan hubungan-hubungan produksi barang-dagangan di bawah ekonomi kapitalis perseorangan adalah, Sun menegaskan, yang akan menjadi berlebihan setelah reorganisasi produksi secara sosial. Ini disebabkan karena harga-harga dalam kapitalisme kompetitif (yang bersaing) dibentuk oleh pengaruh persediaan dan permintaan. Karenanya, jumlah waktu kerja yang diperlukan secara sosial yang diwujudkan dalam suatu barang-dagangan tidak dimanifestasikan secara langsung. Manifestasi itu dirata-ratakan melalui sejumlah amat banyak pertukaran. Lagi pula, harga barang-barang dagangan dinyatakan dalam hubnungan dengan suatu barang-dagangan lain –uang– yang dapat berubah karena spekulasi, pencatutan, inflasi dan deflasi. Komunisme akan menyingkirkan kondisi-kondisi di atas dan akan menghapuskan nilai tukar. Tetapi nilai pada umum akan tetap penting. Sesungguhnya-lah, di bawah komunisme, nilai (waktu kerja yang diperlukan secara sosial) dapat dinyatakan secara langsung. Tetapi, sudah tentu, Sun merasa bahwa situasi seperti itu masih jauh di masa depan, sebagian karena tidak memadainya ketentuan-ketentuan statistikal dan akuntansi.³⁸

Perbedaan antara nilai tukar dan nilai pada umumnya adalah penting sekali bagi ketidak-cocokan antara Bab ini dan Bab Tiga. Dalam Bab Tiga pemecahan/jalan keluar bagi problem transformasi jika hukum nilai mesti mempunyai dampak atas kebijaksanaan. Dengan mengatakan ini,

Brugger meluruhkan nilai pada umumnya menjadi nilai tukar – suatu kesalahan yang dengan tajam ditunjukkan oleh Sun Yefang. Demikian, bagi Brugger, hukum nilai ditugaskan/-diperuntukkan semata-mata pada suatu mekanisme penentuan harga dan dianggap bergantung pada hubungan-hubungan pasar. Ini lebih menyiratkan suatu peranan untuk distribusi daripada hubungan timbal-balik (Marx) antara produk dan pertukar-ang di satu pihak dan distribusi di pihak lain.

Keberatan kedua Brugger, yang diungkapkan di tempat lain,³⁹ adalah bahwa upah-upah dalam bentuk uang yang diterima kaum buruh di Tiongkok ditetapkan oleh negara. Karena upah-upah itu merupakan bagian dari ongkos produksi dan merupakan harga tenaga kerja, maka harga produk-produk tidak mencerminkan hukum nilai. Ini disebabkan oleh karena, demikian diklaim, suatu hubungan pasar mesti ada antara penjual dan pembeli tenaga kerja sehingga tenaga kerja itu, seperti barang-dagangan lainnya, dapat mencerminkan nilainya. Masalahnya di sini adalah rangkap dua. Tidak saja kepada pasar, yang mengatur distribusi, lebih diberikan status dominan daripada timbal-balik tetapi, sekali lagi, hukum nilai dipandang hanya menentukan nilai tukar. Dalam kedua-dua hal itu analisis Brugger tidak memulai dari titik pandangan produksi, ia juga tidak mengakui logika dari hubungan-hubungan internal yang mengikat/mengaitkan konsepsi Marx mengenai cara produksi kapita-lis menjadi satu.

Arti Praktis Posisi Sun

Menyimpulkan sumbangan Sun Yefang pada ilmu ekonomi, sebuah karangan berpengaruh oleh Sun Shangqing dan lain-lainnya, menguraikan lima bidang pokok yang dipengaruhi oleh pandangan-pandangan Sun mengenai berlakunya hukum nilai. Bidang-bidang itu adalah: maksimalisasi efisiensi dalam proses produktif, penyempurnaan perencanaan, peranan peredaran (sirkulasi), laba sebagai suatu tolok-ukur wewenang pada tingkat perusahaan dan penggunaan ongkos produksi sebagai suatu dasar penentuan harga.

Bab Empat menunjukkan kecenderungan, dalam kebijaksanaan konvensional, untuk memaksimalkan banyaknya barang yang diproduksi. Ini menyebabkan diabaikannya ongkos produksi barang-barang tertentu

dan dicampur-adukkannya konsumsi dalam hal-hal tertentu dengan konsumsi pada umumnya. Apakah nilai produk-produk dapat direalisasikan dalam proses peredaran tidaklah banyak diperhatikan. Sun menghadapi ini dengan berusaha menghitung ongkos-ongkos berdasarkan hukum nilai; sasaran utamanya ialah efisiensi pada titik produksi. Dalam usaha mencapai pertukaran nilai-nilai setara, Sun juga menekankan realisasi nilai dalam peredaran; ini akan mengurangi pemborosan. Di sini Sun mencari bantuan suatu unsur yang amat menentukan dari teori nilai kerja Marx –perbedaan antara kerja *konkret* dan kerja “abstrak” –suatu perbedaan yang diabaikan oleh banyak ahli ekonomi politik Sovyet dan Tiongkok. Bagi Marx, kerja konkret individu-individu perseorangan menjadi kerja sosial melalui pertukaran nilai-nilai, perubahan dari uang menjadi barang-barang dagangan lain. Kerja abstrak menyaratkan suatu bentuk produksi, organisasi sosial dan pembagian kerja yang khusus; ia selanjutnya menyaratkan suatu proses pertukaran berdasarkan pertukaran nilai-nilai setara. Karenanya, kerja abstrak direalisasikan melalui proses pertukaran.⁴⁰ Dengan demikian, Sun menegaskan, adalah sama pentingnya mengkaji proses-proses pertukaran dan distribusi seperti pentingnya pengkajian produksi. Setiap aspek berkaitan secara tidak terpisahkan, satu dengan yang lainnya.

Aspek kedua dari sumbangan Sun Yefang, yang ditunjukkan oleh Sun Shanqing dan lain-lainnya, adalah penegasannya bahwa perencanaan harus didasarkan pada hukum nilai. Hal ini telah disinggung di atas. Sun tidak hanya menyerang pihak-pihak yang mengingkari perana hukum nilai itu, melainkan juga pihak-pihak yang mencoba memanipulasinya melalui perencanaan.

Bagi Sun, *hukum* adalah hukum – suatu hukum dari realitas objektif.

Ia tidak seperti gadis budak di Grand View Garden dalam novel klasik *A Dream of Red Mansions*, yang dapat “diperintah,” “dipergunakan” dan disuruh enyah semau-maunya.⁴¹ Agar hukum itu dipatuhi, banyak “pembuat putusan” harus didesentralisasi hingga ke tingkat perusahaan. Perencanaan harus berkonsentrasi pada sasaran-sasaran (target) “yang tergolong pada kategori kerja abstrak dan nilai.” Namun, sasaran-sasaran khusus yang tergolong pada kategori kerja konkret dan nilai pakai, harus

ditangani oleh badan-badan tingkat lebih rendah. Di atas segala-galanya, pembuatan-keputusan mengenai desain dan keaneka-ragaman produk-produk harus diserahkan pada tingkat-tingkat lebih rendah. Integrasi antara unit-unit tingkat lebih rendah harus dicapai melalui kontrak-kontrak.⁴²

Sumbangan Sun yang ketiga adalah serangannya terhadap kecenderungan untuk mencampur-adukkan peredaran barang-barang dagangan dengan pendistribusiannya. Sekali distribusi merupakan bagian dari proses peredaran, ia tidaklah identikal dengannya. Distribusi cuma merujuk pada pengalokasian barang-barang dagangan. Sedangkan peredaran merujuk pada cara barang-barang dan sumber-sumber mengalir melalui perekonomian dan melahirkan reproduksi yang diperluas. Peredaran bergantung pada cara produksi massal disosialisasikan dan pada gilirannya membentuk cara sumber-sumber dapat dialokasikan secara efisien. Ia juga membentuk perkembangan pembagian kerja di masa depan. Perencana-perencana pusat mungkin merasa bahwa mereka memiliki kebebasan tertentu dalam menentukan pola-pola distribusi. Jika masalahnya sampai pada peredaran, dalam suatu ekonomi yang berkembang yang terdiri atas sejumlah unit-unit akuntansi yang berdiri sendiri-sendiri, maka kebebasan mereka harus dipandang dibatasi oleh hukum-hukum objektif.

Memperlakukan masalah peredaran seakan-akan itu cuma suatu masalah distribusi mengingkari bahwa suatu pembagian kerja yang kompleks terdapat di antara dan di dalam perusahaan-perusahaan. Gantinya peredaran yang efisien, orang cuma mendapatkan pengalokasian dan penjatahan sewenang-wenang; hasilnya adalah ketidak-seimbangan antara produksi, persediaan dan penjualan. Akar-akar kekacauan itu berasal langsung dari terxtbook Bogdanov tahun 1919 di mana ilusi (bayangan) akan suatu perekonomian alami, berswa-sembeda yang tidak berputar, yang melambangkan produksi yang disosialisasikan, telah diajukan. Stalin, dalam mengabaikan pertukaran dengan dalilnya uang terbatas mengenai hubungan- hubungan produksi, meneruskan kekacauan itu; di sini terdapat suatu mata-rantai antara Stalin dan Bogdanov, tambahan pada yang epistimologis yang ditunjukkan dalam Bab Satu. Hasilnya semua ini adalah gejala yang didiskusikan dalam

Bab Empat – usaha menggunakan penentuan harga sebagai suatu alat sewenang-wenang untuk mendistribusikan kembali pendapat nasional, khususnya antara industri dan pertanian.⁴³

Orang dapat melihat di sini mengapa, dalam Revolusi Kebudayaan, Sun dikecam bersama Liu Shaoqi. Pada awal 1960-1n, Liu telah mengemukakan bahwa suatu pertukaran dari nilai-nilai setara mestinya terdapat antara industri dan pertanian. antara perusa-haan-perusahaan milik negara dan perusahaan-perusahaan yang dimiliki secara kolektif, antara industri berat dan industri ringan. Tanpa itu, ekonomi kehilangan keseimbangan.⁴⁴ Memang benar, Sun membuktikan bahwa manipulasi harga-harga secara subjektif telah berkali-kali menimbulkan suatu keadaan seperti itu dan bahwa, dalam hal-hal seperti itu, reproduksi sederhana maupun reproduksi yang diperluas telah terhambat dengan hebat sekali.

Selanjutnya, penggunaan penentuan harga-harga sebagai suatu alat penjatahan dapat mengakibatkan dipindahkannya masalah-masalah perusahaan yang satu kepada perusahaan lainnya, dengan akibat menurunnya performans (penyelenggaraan pekerjaan) secara menyeluruh. Manakala laba menjadi kriterium bagi keberhasilan perusa-haan, maka perusahaan-perusahaan satu demi satu meningkatkan produksi dan memberikan lebih banyak kerja surplus pada negara. Namun sistem harga Tiongkok sekarang adalah “sebuah cermin yang timpang” yang secara salah menyajikan jumlah rata-rata kerja yang diperlukan secara sosial; harga-harga tidak mencerminkan hukum nilai. Karenanya, perusahaan-perusahaan berusaha meningkatkan laba hanya dengan mengintensifkan peredaran dan men-distribusikan bonus-bo-nus tanpa memperdulikan perusahaan-perusahaan lain. Di sini kita jumpai problem klasik mengenai komposisi; yang dianggap baik bagi perusahaan-perusahaan sendiri-sendiri akhirnya merugikan keseluruhan jaringan.⁴⁵

Untuk memecahkan masalah-masalah seperti itu, Sun mendesak agar lebih banyak perhatian diberikan pada skema-skema bagi reproduksi sederhana dan yang diperluas yang digariskan oleh Marx dalam *Capital* Volume II dan agar itu dipergunakan dalam perencanaan dan pengorganisasian. Peredaran yang layak diperlukan untuk mencipta-kan

keseimbangan antara bahan mentah dan kebutuhan-kebutuhan manufaktur dan permintaan akan produk-produk. Penambahan material dan penggantian peralatan, lagi pula, mengharuskan bahwa alat-alat produksi juga ditundukkan pada peredaran. Kesimpulannya, terdapat satu kebutuhan akan kordinasi yang direncanakan antara produksi, persediaan dan penjualan, yang akan dicapai oleh pertukaran nilai-nilai setara sebagaimana ditentukan oleh hukum nilai.⁴⁶

Suatu masalah yang bertautan adalah yang dicatat dalam Bab Empat. Suatu perbedaan antara reproduksi sederhana dan reproduksi yang diperluas mesti dipertahankan pada tingkat perusahaan. Dengan argumen-argumen Sun mengenai keseimbangan, dana-dana untuk pembaruan asset-asset tetap (dana-dana depresiasi) mesti dipisahkan dari dana-dana untuk investasi baru. Lagi puia, prioritas mesti diberikan pada yang tersebut terdahulu jika orang mau mengelakkan kemerosotan yang menyedihkan dari peralatan-peralatan yang didiskusikan dalam Bab Tiga. Terlampau sering, di masa lalu, usaha-usaha untuk melakukan ini telah dihambat oleh pihak-pihak yang mengklaim bahwa perbedaan antara reproduksi sederhana dan reproduksi yang diperluas hanya suatu abstraksi. Pemikiran seperti itu menyebabkan Wen Ping mengemukakan,

Dalam praktek sesungguhnya, suatu proyek pembangunan didaftar di bawah pembangunan modal makakala tersedia dana-dana cukup bagi pembangunan modal, dan diperas habis dan menjadi suatu proyek renovasi teknikal manakala terjadi kekurangan dana-dana untuk pembangunan modal.⁴⁷

Bagi Sun, malpraktek seperti itu di dalam akuntansi, walaupun memang biasa berlaku, tidak seharusnya digunakan sebagai suatu pembenaran untuk menyembunyikan perbedaan antara reproduksi sederhana dan reproduksi yang diperluas. Pernyataan-pernyataan seperti yang diungkapkan Wen Ping menyiratkan keper-luan akan reform-reform dalam pengelolaan keuangan, bukan mening-galkan teori dasar.⁴⁸

Sun, karenanya, menekankan pentingnya reproduksi sederhana pada tingkat perusahaan. Tingkat depresiasi bagi asset-asset tetap harus dinaikkan. Dengan mendorong transformasi teknikal atas perusahaan-perusahaan yang lebih tua, tempo perkembangan akan dipercepat. Transformasi teknikal atas perusahaan-perusahaan yang ada sedikitnya akan menghemat sepertiga ongkos pembangunan perusahaan-

perusahaan baru, setengah waktu pembangunan dan akan menggunakan hanya 60% dari bahan-bahan dan energi yang diperlukan.⁴⁹ Jelas, penekanan Sun pada perbedaan antara reproduksi sederhana dan reproduksi yang diperluas mempunyai kepenadatan (relevansi) konkret bagi dunia riil.

Jawaban Sun pada persoalan di atas melukiskan pemahamannya mengenai metodologi ekonomik Marxian. Ia sangat mengandalkan pernyataan Marx yang sering dikutip bahwa “dalam analisis bentuk-bentuk ekonomik mikroskop-mikroskop maupun reagen-reagen kimia tidak berguna. Kekuatan abstraksi mesti menggantikan keduanya.”⁵⁰ Karenanya, studi mengenai ekonomi sosialis mesti dilakukan dengan mengumpulkan sebanyak mungkin data, penganalisaan gejala-gejala ekonomik dan delineasi (penggambaran) unsur-unsur esensial. Unsur-unsur esensial itu,, harus diulangi, dinyatakan sebagai hukum-hukum ekonomik objektif.

Penekanan Sun Yefang pada hukum nilai jelas menerangi diskusinya mengenai hukum-hukum ekonomik objektif lainnya yang beroperasi dalam suatu perekonomian sosialis. Salah satu yang paling penting dari semua ini adalah, tentu saja, hukum perkembangan berencana dan berimbang. Bagi Sun, sebagaimana halnya bagi Marx, itu adalah suatu hukum dan bukan, seperti diklaim Bab Tiga, cuma suatu truisme (kebenaran yang tidak dapat disangkal). Argumen-argumen Marx, yang diungkapkan garis-garis besarnya di atas dan diuraikan lebih lanjut oleh Sun Yefang, jauh lebih kompleks daripada yang digambarkan Brugger. Hukum itu sama sekali tidak dapat direduksi-pada pernyataan “bubur jangan terlalu manis ataupun terlalu asin.” Marx menegaskan bahwa perkembangan yang berimbang bukanlah suatu konstan (ketetapan) untuk selamanya. Baik cara penguasaan alam dan cara penguasaan produk berkembang bersama berlalunya waktu. Dengan demikian, perkembangan berimbang mempunyai arti-arti berbeda-beda pada berbagai tahapan sejarah. Perkembangan yang berimbang di bawah kapitalisme mencerminkan tingkat perkembangan dari tenaga-tenaga produktif, perkembangan hubungan-hubungan produksi tertentu dan hubungan timbal-balik antara ini semua dan pola-pola distribusi. Marx memandang perkembangan yang berimbang sebagai sejenis titik

keseimbangan, yang selalu dirobahkan oleh sifat kontradiktori cara produksi kapitalis. Di bawah kapitalisme, perkembangan yang berimbang merupakan suatu titik datum yang tidak pernah dicapai dalam aktualitas. Ini disebabkan oleh keterbagian-keterbagian antara kelas kapitalis dan proletariat maupun antara fraksi-fraksi kelas kapitalis, belum lagi menyebutkan kelas-kelas lainnya dalam masyarakat kapitalis. Perkembangan berimbang di bawah kapitalisme, lagi pula, disesuaikan pada akumulasi modal secara maksimal. Perkembangan berimbang disesuaikan kearah tujuan-tujuan lain dalam masyarakat-masyarakat lain di mana terdapat cara-cara produksi lain.

Walaupun tidak sependapat dengan Brugger mengenai hal-hal di atas, aku sepenuhnya setuju bahwa perkembangan berimbang dalam suatu masyarakat dalam transisi sosialis mesti disesuaikan ke arah suatu tujuan yang berbeda dari yang dalam kapitalisme perseorangan dan monopoli. Sun Yefang menyadari hal itu, dan perdebatan-perdebatan akhir-akhir ini di Tiongkok, yang menyertai perdebatan mengenai hukum nilai, telah dipusatkan pada masalah itu. Tujuan produksi sosialis dinyatakan berbeda dengan tujuan produksi kapitalis. Perumusan Stalin bahwa tujuan produksi sosialis semestinya untuk memenuhi “kebutuhan-kebutuhan material dan kultural yang terus meningkat dari seluruh rakyat melalui perluasan dan penyempurnaan terus-menerus dari produksi sosial atas dasar teknik-teknik” yang “lebih tinggi” telah dipakai sebagai suatu titik pangkal. Namun begitu, secara luas telah diakui bahwa di dalam kenyataan, azas yang menguasai organisasi Stalinis adalah produksi demi untuk produksi itu sendiri - posisi yang menjadi sasaran Stalin sendiri ketika ia mengritik Yaroshenko pada tahun 1952.

Tetapi, kalau orang mau berbicara tentang tujuan produksi sosialis, maka orang itu mesti menyimak apakah yang dimaksudkan dengan kebutuhan. Walaupun usaha-usaha sebelumnya untuk mendiskusikan kebutuhan di kalangan akademisi setelah 1978 tampaknya memberi harapan, namun perkembangan-perkembangan akhir-akhir ini, seperti pencemaran/diburuk-burukkannya diskusi Marx mengenai alienasi telah mengingkari/membelakangi harapan itu. Yang jelas, masalah-masalah timbul dalam menyusun suatu teori tentang kebutuhan untuk menyertai hukum tentang perkembangan berencana dan berimbang, dikarenakan

logika hubungan-hubungan internal yang menguasai kegiatan produktif, tetapi yang seperti itu tetap suatu keharusan. Marx tegas sekali mengenai hal itu,

Masyarakat... harus mendistribusikan waktunya secara terarah, untuk mencapai suatu produksi yang memadai bagi kebutuhan-kebutuhannya yang menyeluruh... Karenanya ekonomi (berhemat) waktu, bersama dengan distribusi waktu kerja yang berencana di antara berbagai cabang produksi, tetap merupakan hukum ekonomik pertama berdasarkan produksi komunal. Ia menjadi hukum, di situ, bahkan hingga suatu tingkat lebih tinggi. Namun, ini secara hakiki berbeda dengan suatu pengukuran nilai-nilai tukar (kerja atau produk-produk) berdasarkan waktu kerja.⁵¹

Karenanya, Marx menegaskan bahwa perkembangan berencana dan berimbang akan terus ada sekalipun ia akan disesuaikan untuk mencapai tujuan-tujuan baru; lagi pula, ia tidak lagi lahir dari nilai tukar, melainkan berdasarkan penghitungan waktu kerja secara langsung, yang telah kehilangan perbedaan-perbedaan kualitatifnya (yaitu, ia tidak lagi kerja abstrak).⁵² Jelas sekali, hukum perkembangan berencana dan berimbang sangat menentukan bagi Marx dan konsepsi Sun mengenai produksi komunal. Lagi pula, di bawah sosialisme, suatu hukum yang secara kualitatif berbeda yang akan menyatakan/mengungkapkan hubungan-hubungan yang berbeda dari zaman-zaman sebelumnya.

Tetapi, adakah disadari oleh Sun Yefang bahwa ia telah menundukkan hukum perkembangan berencana dan berimbang dan hukum-hukum ekonomik objektif lainnya pada hukum nilai? Sun mengakui bahwa ia pernah berbuat begitu. Tetapi ini adalah suatu pernyataan yang terlalu keropos (berluang), yang diucapkan pada suatu rapat yang mengkritik pandangan-pandangannya,

Sebenarnya, pengkritik-pengkritikku memaksaku mempertajam nadaku dan melontarkan hal-hal agar membuat tuan-tuan "kekiri-kirian" itu menyadari bahwa mereka semestinya agak lebih jujur di hadapan hukum-hukum objektif. Aku menentang mem-peringkat-peringkatkan hukum-hukum, dengan mengatak-an bahwa hukum yang satu adalah penting dan yang satu lainnya kurang penting, atau bahwa yang satu primer dan yang lainnya sekunder. *Capital* tidak memberi peringkat-peringkat pada hukum-hukum. Ia berbicara dengan sangat jelasnya tentang setiap hukum di dalam perkembangan masyarakat kapitalis melalui analisa atas proses produksi, proses peredaran dan proses menyeluruh dari produksi sosial. Dalam meriset hubungan-hubungan produksi sosialis, kita juga harus menjadikan

sebagai topik kita proses-proses ekonomi objektif, dalam perkembangan historisnya. Kita harus memulai dari fakta konkret dan mengungkapkan hakekat masalah-masalah itu.⁵³

Maka itu, cara Sun mendekati hukum nilai adalah dengan memandangnya dalam konteks suatu totalitas. Walaupun Sun menyanggahnya dengan keras, hukum nilai merupakan inti pokok cara pendekatannya.⁵⁴ Sekalipun nilai tidak akan ada tanpa kuantitas, ia juga menyangkut kualitas; hal ini jelas dalam konsepsi Marx mengenai kerja yang diperlukan secara sosial. Lagi pula, konsepsi itu menyangkut kontradiksi antara kerja konkret dan kerja abstrak dan antara kerja individual dan kerja sosial. Ia menyangkut perbandingan ongkos dan hasil-hasilnya. Di sinilah, demikian Sun menegaskan, terletak “sifat ganda dari kerja dan produk-produk.”⁵⁵ Demikian juga, reproduksi sederhana dan reproduksi yang diperluas adalah komponen-komponen dari suatu totalitas yang saling-bergantung, seperti halnya hukum-hukum yang menguasai nilai, peredaran, pertukaran dan distribusi. Metodologinya jelas; karena semuanya saling-berhubungan, maka hanyalah dengan mengakui tempat masing-masing itu di dalam proses produktif dan sekaligus melihat bagaimana masing-masing konsep dapat dipisahkan secara analitis, dapatlah orang berusaha mengatasi hukum gerak ekonomi. Dengan demikian, maka reproduksi sederhana selalu merupakan suatu komponen dari reproduksi yang diperluas. Ia adalah,

.... suatu faktor aktual yang berwujud dalam yang disebut bela-kangan. Titik pangkal reproduksi yang diperbesar didasarkan pada skala reproduksi sederhana. Maka itu mungkin untuk membuat suatu analisis terpisah mengenai reproduksi sederhana itu sendiri.⁵⁶

Pendekatan pada totalitas ini merupakan suatu contoh yang indah sekali dari metodologi Marxis yang dilukiskan dalam “Introduksi” kumpulan tulisan ini dan pada awal Bab ini - suatu metodologi yang gagal difahami oleh banyak diantara pengritik pengritik Sun yang kekiri-kirian.

Sumbangan keempat Sun pada ekonomi transisi sosialis adalah penekanannya pada peranan laba sebagai suatu tolok-ukur kemampuan/kewenangan manajemen perusahaan. Laba memberikan suatu ukuran kualitatif sebagai lawan dari suatu ukuran yang cuma bersifat kuantitatif. Penggunaan kuota-kuota keluaran (output), demikian dikemukakan oleh Sun, adalah lebih bagaikan menyuruh seekor sapi jantan bergerak dengan

mengangkat sepasang kakinya, sedangkan penggunaan laba adalah lebih bagaikan “menarik sapi jantan itu pada hidungnya.”⁵⁷ Ini dikarenakan keseimbangan menyeluruh dalam ekonomi harus berlandaskan pada nilai pada umumnya daripada penggunaan nilai. Tidak saja tidak mungkin bagi perencana-perencana pusat untuk menyusun keseimbangan-keseimbangan yang banyak sekali dalam perekonomian itu, itu juga tidak dikehendaki. Kemustahilan tugas itu telah diisyaratkan oleh Novekyang menunjukkan bahwa di Uni Sovyet, orang mesti mengidentifikasi 12 juta produk yang berbeda-beda, yang diproduksi oleh 50.000 perusahaan industrial dan ribuan pertanian kolektif atau pertanian negara; semua ini dikirim, dan diedarkan oleh ribuan perusahaan angkutan, keagenan-keagenan grosir dan pengecer.⁵⁸ Bahkan seandainya mungkin untuk secara memadai mengontrol produksi dan peredaran semua barang-dagangan itu, hal itu hanya dapat dicapai dengan mengorbankan kontrol produksi yang demokratik oleh penghasil-penghasil langsung. Menyadari masalah itu, dengan agak positif Sun menunjuk pada usaha-usaha Yugoslavia kearah demokratisasi.⁵⁹

Perbincangan Sun mengenai laba membawa kita kembali pada diskusi sebelumnya mengenai efisiensi. Suatu penekanan pada laba memini-malkan ongkos-ongkos dan itu menghasilkan suatu peningkatan dalam kerja surplus masyarakat. Dengan harga-harga yang tetap dan rasional, maka pengurangan ongkos merupakan unsur utama dalam profitabilitas - ujian sebenarnya atas kemampuan/-kewenangan. Laba sosialis berbeda dari laba kapitalis, atau dalam hal itu (setidak-tidaknya pada tahun 1964) dari laba “revisionis” Liberman.⁶⁰

Seperti ditekankan dalam Bab Empat, daya-hasil laba sebagai suatu tolok-ukur kewenangan bergantung pada rasionalitas harga-harga. Karenanya, sumbangan kelima Sun adalah desakannya agar harga-harga yang direncanakan mencerminkan ongkos-ongkos produksi. Lebih tepatnya, harga barang-barang mesti mencerminkan ongkos produksi rata-rata di cabang industri tertentu ditambah pengambilan laba yang lazimnya didasarkan pada tingkat laba rata-rata untuk industri tertentu itu. Praktek seperti itu akan memajukan penggunaan sumber-sumber secara efisien dan memajukan produktivitas kerja sesuai dengan hukum nilai.⁶¹ Perusahaan-perusahaan dengan komposisi modal organik yang lebih

tinggi akan lebih mudah merealisasikan suatu surplus; dan dengan demikian kebijaksanaan itu akan mendorong perusahaan-perusahaan menggunakan teknologi baru. Dari sudut pandangan keseluruhan perekonomian, praktek ini akan memperlancar reproduksi sederhana maupun reproduksi yang diperluas dan akan menjamin keseimbangan antara berbagai departemen produksi, antara berbagai sektor dan antara berbagai daerah.

Pendekatan Sun pada penentuan harga, karenanya, adalah lebih halus daripada dari banyak ahli ekonomi Tiongkok dan Barat yang secara gampang mengemukakan bahwa harga-harga harus merupakan hasil dari persediaan dan permintaan. Begitu itulah cara ahli ekonomi politis Xue Muqiao yang terkenal itu menjelaskan hukum nilai. Xue, namun, mengkualifikasi pandangan-pandangannya dengan menyatakan bahwa harga-harga hanya akan *cenderung* mencerminkan bekerjanya hukum nilai.⁶² Pendekatan Sun sangat berbeda. Dengan mengikuti Marx, Sun tidak menganggap bahwa persediaan dan permintaan bertindak sendiri dalam pengontrolan harga-harga; lain-lain faktor seperti komposisi modal secara organik, distribusi investasi antara berbagai departemen produksi, stabilitas mata uang dan tingkat upah-upah dalam menghadapi semua di atas itu, kesemuanya mempengaruhi harga-harga. Sun pasti sangat tidak senang dengan sugesti dalam Bab Empat bahwa efisiensi cuma mengikuti harga.

Mempertimbangan penalaran dalam tulisan-tulisan Marx dan Sun Yefang mendorong aku mempertanyakan argumen-argumen yang hanya berbicara tentang harga-harga sebagai jawaban pada kekurangan/kelangkaan. Kekurangan, betapapun, adalah relatif secara historis. Ada banyak alasan mengapa harga-harga di Tiongkok tidak mencerminkan kekurangan. Salah satunya adalah, bahwa suatu pelanggaran terhadap hukum perkembangan berencana dan berimbang telah memilih industri berat (*Departemen I* Marx) dengan mengorbankan industri ringan (*Departemen II*). Ini telah menciptakan suatu kekurangan dalam barang-barang konsumsi. Jika mau menghindari kesulitan-kesulitan, maka harga-harga barang-barang konsumsi mesti dikendalikan. Pengendalian harga tidak hanya suatu masalah mempertahankan tatanan sosial. Suatu sebab lain adalah bahwa tingkat-tingkat depresiasi telah ditetapkan

terlalu rendah. Kecuali jika tingkat-tingkat depresiasi itu realistis dan kecuali diambil tindakan-tindakan untuk menjamin/memastikan bahwa dana-dana depresiasi digunakan untuk renovasi peralatan, orang tidak dapat mengharapkan harga-harga akan mencerminkan kekurangan. Harga-harga akan tetap mencerminkan ongkos-ongkos yang dibumbungkan oleh pembangunan modal yang berlebih-lebihan. Ini merupakan masalah yang berulang kali dikemukakan oleh Sun Yefang. Perencana-perencana telah gagal memahami hubungan antara reproduksi sederhana dan reproduksi yang diperluas.

Di sini orang tergoda untuk melangkah lebih jauh daripada Sun dalam mengupas struktur harga. Menurut pendapatku, yang merupakan satu kesalahan penting adalah anggapan bahwa penggantian modal untuk kerja berkembang secara berkanjang; dengan meningkatnya tingkat-tingkat laba, suatu pola penggantian yang teratur akan dibuahkan. Dalam kenyataannya, berbagai campuran kerja dan modal dapat secara rasional dipergunakan pada tingkat laba yang berbeda. Mungkin sekali, misalnya, bahwa suatu perpaduan tertentu dari kerja dan modal memberikan suku laba terbaik pada tingkat-tingkat rendah dan pada tingkat-tingkat tinggi, namun tidak pada tingkat-tingkat sedang. Modal jangan selalu diperlakukan sebagai suatu variabel penambahan. Sebagai balasan atas serangan aliran Cambridge dari ilmu ekonomi neo-Ricardian ini, jawaban “ortodoks” adalah menyiratkan bahwa modal menyerupai “dempul,” yang menimbulkan celetukan Joan Robinson bahwa *ektoplasma* adalah penamaan yang lebih cocok.⁶³ Masalahnya bagi para perancang adalah bahwa, sebenarnya, modal itu bukan dempul; modal itu memiliki kekonkretan yang sangat mempersulit pergantian teknik-teknik. Para perancang mesti menghadapi konsep-konsep yang nyata. Karena itu, permasalahan mereka untuk mendasarkan harga-harga pada ongkos-ongkos sebenarnya adalah rasional sekali; itu bukan cuma suatu persoalan mengenai ketidak-luwesan birokratik. Tetapi di sini aku melantur jauh dari persoalan-persoalan Sun Yefang!

Suatu Kelemahan Penting dalam Posisi Sun - Cara Produksi Sosialis

Segera telah menjadi jelas dari uraian di atas bahwa terdapat suatu ketidak-mantapan antara kritisisme Sun terhadap perlakuan Stalin

mengenai hak-milik dan perlakuannya mengenai pertukaran barang-dagangan. Sun secara tepat mengkritik Stalin karena Stalin memisahkan hak-milik dari hubungan-hubungan produksi lainnya. Namun, kemudian, dalam esai yang sama itu, Sun mempertahankan bahwa pertukaran barang-dagangan tidak terjadi di dalam sistem milik-negara karena barang-barang tidak mengubah kepemilikan. Sun justru melakukan yang menjadi sasarannya ketika ia mengkritik Stalin. Sun, misalnya, cuma menegaskan bahwa produk-produk dari industri pertahanan bukanlah barang-barang dagangan, tanpa memandang hubungan-hubungan yang terlibat dalam pemindahan produk.⁶⁴ Tetapi, jika produk-produk industri pertahanan itu bukan barang-barang dagangan dan apabila nilai diciptakan, dipertukarkan dan direalisasikan, lalu apakah produk-produk itu? Padahal, apakah perbedaan antara pertukaran barang-dagangan dan pertukaran produk? Sun, lagi pula, telah dengan sikap menggampangkan melewati masalah penting yang didiskusikan oleh kaum Marxis Barat mengenai apakah industri pertahanan mengiur pada produksi ataukah cuma merupakan suatu pemakai (konsumen) surplus.⁶⁵

Pada akar ketidak-mantapan di atas itu terdapatlah kepatuhan Sun pada pandangan Stalinis bahwa sosialisme adalah suatu cara produksi yang berbeda. Marx tidak pernah memberikan suatu kedudukan seperti itu kepada sosialisme. Bagi Marx, “tahap komunisme lebih rendah” (sosialisme) adalah suatu periode transisi di mana hubungan-hubungan produksi komunis mulai timbul (lahir) dan hubungan-hubungan kapitalis secara progresif ditanggulangi. Lagi pula, suatu cara produksi melahirkan kelas-kelas atas dasar bentrokan-bentrokan kepentingan-kepentingan objektif yang timbul dari kontradiksi-kontradiksi antara hubungan-hubungan produksi dan tenaga-tenaga produktif. Apakah kelas-kelas dalam cara produksi sosialis Sun itu dan apakah kepentingan-kepentingan yang bersifat bertentangan dan praktek-praktek berlawanan yang berkonflik, yang menimbulkan kontradiksi-kontradiksi itu? Ini adalah pertanyaan yang sama yang dapat diajukan kepada McCarthy setelah membaca Bab terdahulu. Secara logikal Sun tidak dapat mencari bantuan perumusan Stalin pada tahun 1936 mengenai dua kelas bersahabat dan satu stratum/lapisan (kaum buruh kota, kaum pekerja

kolkhoz dan kaum intelektual). Terlepas dari absurditas non-Marxis yang menentukan kelas-kelas dalam artian lain daripada antagonisme, kelas-kelas Stalin justru diderivasi dari konsepsi disjunktif- (yang memisah-misahkan)nya mengenai hak-milik yang dengan susah-payah mau dibongkar oleh Sun. Singkatnya, Sun harus menjelaskan mengapa hubungan-hubungan produksi sosialis berbeda dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan-kepentingan objektif dari penghasil-penghasil langsung. Sun gagal melakukan ini dan Bab Lima kumpulan tulisan-tulisan ini cuma sekedar menyentuh hal-ikhwal itu.

Kritisisme Tiongkok terhadap Sun: Pergeseran ke Kanan

Bagi Sun, salah satu karakteristik dari cara produksi sosialis Tiongkok adalah bahwa mata-uang Tiongkok, yaitu *Renminbi*, tidak lagi merupakan ekuivalen universal seperti halnya uang di dalam perekonomian kapitalis; ia telah menjadi suatu “tolok-ukur nilai dan suatu sertifikat kerja.”⁶⁶ Tidak ada pembenaran diberikan pada pernyataan ini dan sudah dapat diramalkan bahwa ia mendapat sanggahan. Seorang pengkritik, Li Chonghuai, mengemukakan bahwa *Renminbi* justru sama seperti lain-lain bentuk uang kertas yang tidak ditopang dengan emas.⁶⁷ Ia memang menjalankan fungsi sebagai pengukur nilai; tetapi ia tetap suatu “ekuivalen universal.” Dengan demikian, pengaturan *Renminbi* harus ada dalam hubungan yang sama dengan nilai barang-barang dagangan seperti halnya dengan uang Barat. Li membenarkan klaim Xue Muqiao bahwa indeks harga barang-dagangan menjadi standard bagi pengkajian nilai mata-uang. Meninjau kebijaksanaan moneter sejak 1949, Li mengemukakan bahwa rasio antara jumlah uang yang beredar dan volume penjualan eceran mesti lebih tinggi daripada yang hingga kini dianggap yang tert-inggi, yaitu 1 : 8,5 atau 1 : 8.⁶⁸ Alasan-alasan yang diberikan sangat berguna,

1. Perkembangan ekonomi pedesaan mengharuskan suatu per-gan-tian (turnover) tunai yang besar.
2. Perkembangan industri, perdagangan, komunikasi dan jasa-jasa mengharuskan suatu peningkatan (penambahan) uang yang banyak sekali.
3. Alat-alat produksi tertentu yang dialokasikan di waktu lalu dengan cara memindahkan rekening-rekening telah dibiasakan/ dipasarkan, dengan demikian sangat meningkatkan permintaan akan uang.

Mengingat yang di atas, pernyataan tegas Sun Yefang berkenaan dengan peranan uang itu tidak tahan kritik. Orang cenderung sependapat dengan Li Chonghuai dan Xue Muqiao mengenai status *Renminbi* sebagai suatu ekuivalen universal. Ini juga posisi yang diambil oleh studi Lavigne mengenai uang Sovyet yang menyiratkan bahwa peranannya adalah sama seperti dalam suatu ekonomi kapital-is; kredit yang diciptakan oleh Bank Negara, lagi pula, adalah sama dengan yang diciptakan oleh bank-bank kapitalis.⁶⁹

Jika kritisisme di atas mengenai Sun itu benar, maka uang di suatu perekonomian sosialis itu sendiri masih merupakan suatu barang-dagangan. Kita kembali pada diskusi sebelumnya mengenai kebingungan Sun tentang apakah presisnya barang-barang dagangan itu.. Mungkinkah disangkal bahwa barang-barang dagangan terdapat di lingkupan-lingkupan penting tertentu dalam pekonomian dan tetap mempertahankan bahwa hukum nilai beroperasi di dalamnya? Dapat orang memisahkan hukum nilai dari produksi barang-dagangan? Pengritik-pengritik Sun dari “kiri” selalu menyangkal kemungkinan itu. Namun, pada tahun-tahun belakangan ini kritisisme-kritisisme seperti itu telah datang dari “kanan.” Pengritik seperti itu, Ma Jiaju, menunjukkan bahwa Sun sebenarnya berbicara tentang dua hukum nilai – yang satu menyangkut produksi barang-dagangan dan yang satu lagi menyangkut suatu perekonomian produk.⁷⁰ Itu adalah menyesatkan. Ma mengemukakan bahwa perusahaan-perusahaan di sektor yang dimiliki-oleh-negara benar-benar melaksanakan pertu-karan pertukaran “hanya menurut produksi dan peredaran barang- dagangan dan bahwa produk-produk perusahaan-perusahaan itu hanya dapat diproduksi dan dipertukarkan sebagai barang-barang dagangan.”⁷¹ Ini disebabkan karena pola pembagian kerja sosial pada tingkat sejarah sekarang. Nilai harus mengambil bentuk nilai tukar.⁷² Kesalahan Sun adalah mengacaukan/mencampur-adukkan konsep nilai dengan isi (kandungan) nilai. Ia tidak mempelajari kyang secara konvensional diterima sebagai hukum nilai, yaitu hukum nilai “barang-barang dagangan.”⁷³ Adalah satu hal, Ma menegaskan, untuk mengalokasikan kerja sosial bagi produksi berbagai barang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial menurut proporsi-proporsi yang rasional. Tetapi adalah suatu hal yang berbeda sekali untuk

memperkenankan waktu kerja yang diperlukan secara sosial dalam produksi itu menentukan nilai suatu barang-dagangan. Mungkin terdapat suatu pertautan, seperti dalam kapitalisme kompetitif, hanya apabila suplai suatu barang-dagangan tertentu berada dalam keseimbangan dengan permintaan akan barang-dagangan itu; hanya dalam keadaan seperti itu dapatlah barang-dagangan itu dijual menurut nilainya. Namun, mengatakan bahwa mungkin terdapat suatu pertautan tidaklah berarti bahwa itu selamanya ada. Menurut pandangan Ma, dalam masyarakat komunis masih akan diperlukan untuk mengukur kerja sosial yang terlibat dalam memproduksi suatu produk tertentu dan untuk membandingkan ini dengan nilai pakai yang diharapkan dari produk itu dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial. Namun ini jangan dipandang sebagai suatu contoh mengenai bekerjanya hukum nilai, karena nilai yang diberikan oleh kerja yang rata-rata diperlukan secara sosial tidak akan diubah menjadi nilai tukar. Waktu kerja yang diperlukan secara sosial mungkin saja substansi nilai, tetapi ia tidak sama dengan konsep mengenai nilai.⁷⁴ Kekiacaun Sun dalam masalah ini, demikian Ma dan lain-lainnya merasa. Berdasarkan pada satu salah-penafsiran pasase-pasase tertentu dalam karya-karya Marx dan Engels.⁷⁵

Menurut Ma, kekurangan-kekurangan teoretikal Sun mempunyai percabangan-percabangan kebijaksanaan yang penting. Sekalipun Sun menyarankan banyak reformasi berdasarkan profitabilitas dan otonomi perusahaan, ia mengabaikan masalah kepentingan material. Sekalipun menekankan laba perusahaan, Sun menuntut agar laba seperti itu diserap oleh negara. Dengan demikian, “kriterium tepat” untuk menilai performans tidak menyediakan suatu perangsang yang memadai bagi performans perusahaan-perusahaan itu. Pendidikan politis dan ideologitidak menyediakan perangsang yang memadai di waktu lalu; karenanya setiap reformasi sekarang mesti secara langsung menjawab pertanyaan mengenai perangsang material. Sun memang sudah menentukan banyak “mekanisme yang masuk akal bagi operasi-operasi ekonomi sosialis.” Tetapi “ia mengabaikan daya-dorong (impetus) ekonomik internal untuk menggerakkan seluruh mesin perekonomian. Hasilnya adalah sebuah lonceng yang terakit baik dengan pegas-utama

yang belum terpasang.”⁷⁶

Pengabaikan kepentingan material oleh Sun, menurut pandangan Ma, diderivasi dari pengingkarnya mengenai produksi dan pertukaran barang-dagangan di sektor negara - dalam pengingkarnya terhadap pentingnya pasar. Dengan demikian, Sun meremehkan proses berop-erasinya hukum nilai dalam perencanaan sosialis. Ia memberikan penekanan terlalu besar pada sisi ongkos dari persamaan (*equation*) itu dan tidak secukupnya pada sisi permintaan. Kritisisme seperti itu sungguh ironikal jika diingat pembubuhan Sun oleh Revolusi Kebudayaan sebagai “Liberman-nya Tiongkok.” Kritisisme Ma Jiaju dari *kanan* itu mestinya diperhatikan oleh komentator-komentator Barat yang menganggap Sun sebagai pengibar panji sosialisme pasar.

Anggapan bahwa hubungan-hubungan barang-dagangan terdapat di dalam sektor negara kini sangat merata di Tiongkok, seperti juga pandangan bahwa mengakhiri eksploitasi secara teknikal dengan suatu perubahan dalam kepemilikan tidak meliputi berakhirnya bentrokan-bentrokan kepentingan. Pandangan yang disebut belakangan ini membangkitkan kenangan-kenangan pada aliran ekonomi-politik Shanghai yang “kekiri-kirian” – sebuah aliran yang mendapatkan kecaman paling getir dari Sun Yefang.⁷⁷ Tetapi dewasa ini, diskusi Marx mengenai “hak burjuis” dipakai untuk maksud-maksud yang sangat berbeda. Liu Guoguang dan Zhao Renwei, misalnya, tampaknya sepen-dapat dengan aliran Shanghai bahwa kepentingan-kepentingan yang bertentangan timbul dari sistem distributif yang memberikan upah sama untuk pekerjaan sama; karena orang-orang yang berbeda mem-punyai kemampuan-kemampuan berbeda-beda, maka mereka memperoleh imbalan-imbalan yang berbeda-beda, dan perbedaan-perbedaan ini dinyatakan dalam performans-performans yang berbeda-beda pada tingkat perusahaan. Tetapi di situ pula berakhir persamaannya! Gantinya “pembatasan hak burjuis,” Lie dan Zhao menegaskan bahwa performans yang berbeda mesti dicerminkan dalam struktur-struktur imbalan; yang efisien harus diuntungkan dan yang tidak efisien harus dihukum. Justru nexus (mata-rantai) perolehan/keuntungan material ini yang menjadi “faktor penyumbang langsung” bagi kehadiran barang-barang dagangan dan pasar di bawah sosialisme. Karena kondisi-

kondisinya masih belum ada di Tiongkok untuk memberlakukan azas pertukaran kerja setara (yang sama), dan karena itu juga pertukaran nilai setara, maka kerja sebagai suatu tindak sosial langsung tidak dapat diungkapkan/dicerminkan kecuali melalui suatu pasar yang berencana.⁷⁸ Dalam menuntut peningkatan integrasi pasar, Liu dan Zhao melangkah lebih jauh daripada Sun Yefang. Sebenarnya, mereka menyatakan secara tidak langsung bahwa pembelaan Sun mengenai pemberlakuan hukum nilai sebagai landasan perencanaan masih belum dapat dilaksanakan dengan mudah.

Penekanan pada sifat produksi barang-dagangan yang meliputi-segalanya dan kebutuhan akan perangsang-perangsang material menyatakan ditinggalkannya Stalin secara lebih radikal daripada yang Sun Yefang bersedia melakukannya. Hal ini bahkan secara lebih jelas diungkapkan oleh Fan Jigang yang menegaskan bahwa produk-produk masyarakat, tanpa kecuali, adalah barang-barang dagangan.⁷⁹ Itu benar bagi alat-alat produksi maupun bagi alat-alat distribusi, tanpa menghiraukan apakah mereka diproduksi di bawah pemilikan negara atau kolektif. Fan tidak saja menolak pandangan Stalinis bahwa produksi barang-dagangan berasal dari dua lingkupan kepemilikan yang berbeda, tetapi bahkan lebih jauh menentang posisi Liu Guogang dan Zhao Renwei yang diuraikan garis-besarnya di atas. Bukan azas distribusi menurut pekerjaan yang menentukan keberadaan barang-barang dagangan. Terus beradanya “perbedaan-perbedaan kualitatif dalam kerja” yang menentukan produksi barang-dagangan dan kepentingan-kepentingan ekonomik yang berbeda-beda yang berkembang di dalam sistem kepemilikan yang sama. Distribusi produk-produk masyarakat tidak menentukan hubungan-hubungan produksi sosial. Sebaliknya, Marx mempertahankan bahwa struktur distribusi sepenuhnya ditentukan oleh struktur produksi; cara tertentu dalam keikut-sertaan dalam produksi menentukan bentuk tertentu dari distribusi. Penekanan Fan pada sifat barang-dagangan yang serba-mencakup – segala di bawah sosialisme tidak terhindari lagi membawanya pada suatu kritisisme terhadap Sun Yefang. Ia menolak gagasan-gagasan seperti yang dianut Sun bahwa kategori-kategori nilai dan waktu kerja yang diperlukan secara sosial akan terus ada bahkan di bawah komunisme ketika produksi dan pertukaran barang-dagangan

sudah berakhir. Di sini Fan mencari bantuan kritisisme Ma Jiaju bahwa Sun mengacaukan konsep mengenai nilai dengan isi (substansi) nilai. Tetapi penalaran Fan berbeda. Sebagaimana yang dipahami oleh Fan, tesis Sun meluruhkan konsep mengenai waktu kerja yang diperlukan secara sosial menjadi/ke dalam waktu kerja individual sesungguhnya. Ia juga memisahkan “barang-dagangan” dari “nilai,” yang dianggap oleh Fan sebagai bentuk dan isi dari barang yang satu dan sama itu. Waktu kerja, demikian Fan menegaskan, merupakan dasar nilai, tetapi nilai tidak dapat dipulangkan pada waktu kerja. Ini disebabkan karena nilai mewakili suatu konsepsi yang lebih luas mengenai waktu kerja; ia adalah suatu tolok ukur sosial rata-rata, historis relatif, dan karenanya juga tidak akurat dari waktu kerja individual yang sebenarnya. Kerja sosial dan keberadaan nilai didasarkan pada perbedaan-perbedaan kualitatif antara masukan-masukan kerja yang telah berkembang sejak awal produksi barang-dagangan. Hanya apabila perbedaan-perbedaan kualitatif seperti itu telah lenyap, akan menjadi mungkin untuk mengukur waktu kerja secara langsung tanpa merujuk pada gejala-gejala yang ditimbulkannya dalam masyarakat-masyarakat yang memproduksi barang-dagangan. Dengan demikian Fan menyatakan bahwa produksi barang-dagangan dan nilai akan menghilang secara serentak.⁸⁰

Bergeser bahkan lebih jauh lagi dari Sun Yefang, Zhang Chaozun, Xiang Qiyuan dan Huang Shenqi, sambil mengokohkan arti penting hak-milik, bahkan memberikan penekanan yang lebih besar pada sifat pembagian kerja dalam menentukan keberadaan produksi barang-dagangan.⁸¹ Sambil menyajikan suatu uraian mengenai hak-milik sebagai produk suatu gabungan hubungan-hubungan secara menyeluruh, yang sama seperti Sun punya, mereka sampai pada suatu kesimpulan yang berbeda. Karena berbagai perusahaan di dalam sektor yang dimiliki-negara mempunyai suatu tingkat otonomi dan konflik kepentingan-kepentingan, mereka mesti dipandang sebagai “produser-produser barang-dagangan yang relatif bebas/berdiri sendiri.” Dari suatu perspektif ideologis yang sepenuhnya berlawanan, penulis-penulis ini telah sampai pada kesimpulan yang banyak persamaannya seperti Bettelheim yang mengemukakan bahwa keberadaan kalkulasi ekonomik antara perusahaan-perusahaan berarti bahwa perusahaan-perusahaan seperti itu

mesti dianggap sebagai tempat-tempat “ibukota-ibukota terpisah.”⁸² Jelas, secara ideologis adalah terlalu berbahaya untuk berargumentasi dalam pengertian-pengertian ini; sekalipun posisi itu sama saja artinya.

Dari suatu posisi yang menyamai posisi Fan, Zhang dan kawan-kawan mengemukakan bahwa bentrokan-bentrokan kepentingan timbul berdasarkan suatu perkembangan tenaga-tenaga produktif yang tidak rata, kewenangan manajerial yang berbeda-beda pada tingkat perusahaan, pembayaran (pengupahan) menurut pekerjaan dan ciptaan yang dihasilkannya yang diperlukan secara sosial gantinya penghitungan (kalkulasi) langsung menurut kerja. Hasilnya adalah suatu pembagian kerja secara sosial yang menentukan maupun ditentukan oleh kebutuhan akan pertukaran dan peredaran barang-dagangan. Karena hak-milik adalah produk dari semua hubungan-hubungan itu, orang harus mengakui tingkat-tingkat hak-milik riil yang berbeda-beda di dalam sektor-sektor yang secara legal diberi status hak-milik yang sama.⁸³

Kita telah bergeser jauh sekali dari Stalin! Bagian penting terakhir dalam tesis Stalin tahun 1952 telah dipatahkan. Analisis Zhao dan lain-lainnya telah sepenuhnya membuang gagasan mengenai dua tingkat kepemilikan. Kita juga telah bergeser jauh dari Sun Yefang. Secara tidak langsung, tesis di atas menantang pengesahan parsial oleh Sun atas pandangan-pandangan Stalin mengenai peredaran dan pertukaran produk di sektor negara. Implikasi-implikasi kebijaksanaan bahkan lebih mendasar lagi. Zhang dan kawan-kawan mulai mempertanyakan perlunya mengarahkan kehidupan ekonomi secara ketat oleh negara. Otonomi perusahaan-perusahaan lahir dari bekerjanya hukum-hukum objektif. Karena itu, otonomi itu mesti diakui jika hukum nilai mau diberi kebebasan dan daya-hasil yang lebih besar.

Salah satu pembela yang paling terkemuka bagi otonomi perusahaan yang diperluas adalah Jiang Yiwei yang mengemukakan bahwa organisasi-organisasi pemerintah pada tingkat-tingkat pusat atau lokal mesti dipisahkan dari organisasi-organisasi ekonomi.⁸⁴ Pemerintah mesti bertanggung-jawab dalam penilikan menyeluruh tetapi jangan terlibat dalam pengelolaan ekonomi secara langsung. Unit-unit pemerintah adalah geografis sedangkan unit-unit ekonomi tidak mesti

begitu. Dengan demikian, argumen-argumen tentang sentralisasi atau desentralisasi geografis tidak menenai sasarannya. Pembuatan-keputusan dalam perekonomian tidak dapat ditentukan menurut pembagian-pembagian administratif. Perusahaan bersifat dasar, dan kombainai perusahaan-perusahaan lebih baik ditentukan menurut kriteria ekonomik daripada menurut kriteria geografis. Seperti ahli-ahli teori yang didiskusikan di muka, Jiang yakin akan sifat-meliputi-segalanya dari sistem barang-dagangan; ini menuntut kebebasan relatif perusahaan-perusahaan, bahkan yang di sektor negara. Otonomi perusahaan bukan sekedar masalah memperluas daya-daya beli dan penjualan. Ia adalah, di atas segala-galanya, suatu masalah mengenai “manajemen bebas dan perkembangan.” Lagi pula, itu diharuskan jika demokrasi ekonomi sosialis akan dilaksanakan sepenuhnya.

Pengawasan yang dijalankan oleh negara atas perusahaan-perusahaan yang relatif bebas, demikian anggapan Jiang, mestinya terutama bersifat legislatif dan fiskal (mempergunakan pengungkit ekonomik). Sebagai pembeli terpenting, lagi pula, negara dapat mengendalikan arah umum perekonomian melalui kon-trak-kontrak dan subsidi-subsidi. Sekalipun ini berarti sangat dikurangnya kekuasaan negara, Jiang menegaskan bahwa itu tidak membahayakan sasaran-sasaran sosialis. Sosialisme, demikian ditegaskannya lagi, adalah perpaduan kepemilikan umum dengan penghapusan eksploitasi dan dengan distgribusi menurut pekerjaan. Semua azas lainnya adalah derivatif. Dengan kepemilikan umum, tenaga kerja berhenti menjadi suatu barang-dagangan; karena itu produksi barang-dagangan tidak akan melahirkan eksploitasi. Lagi pula, sosialisme merupakan suatu jaringan dari banyak unit-unit ekonomi, dan bukannya suatu keutuhan monolitik. Jika sosialisme mesti menjadi “suatu persekutuan dari produser-produser bebas dan sederajat,” maka suatu monolit impersonal sebenarnya menghambat pelaksanaannya. Di sini Iang terang-terangan menantang gagasan Stalinis yang menyatakan bahwa kepemilikan kolektif adalah kurang sosialis daripada kepemilikan negara. Karena alasan-alasan itu Jiang yakin bahwa selama suatu perusa-haan memenuhi kewajiban-kewajibannya pada negara, tidak ada yang harus ditakutkan apabila perusahaan itu mengejar keuntungan. Manakala sebuah perusahaan mendapatkan laba, hal itu

tidak hanya menguntungkan stafnya sendiri, melainkan juga perekonomian secara keseluruhan. Tetapi kebebasan untuk membuat laba itu harus diser-tai tanggung-jawab penuh kaum buruh dan para manajer penuh atas setiap kerugian yang diderita. Karena negara melepaskan kekuasaan atas alat-alat produksi pada suatu perusahaan tertentu, ia harus dapat menuntut pertanggung-jawaban dari perusahaan itu, selama hal ini berada dalam lingkup hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan secara hukum. Sekalipun Jiang mengakui bahwa suatu derajat tertentu ketimpangan pendapatan dan material dapat terjadi sebagai akibat anjurannya itu, Jiang menegaskan bahwa egalitarianisme tidaklah sama dengan sosialisme. Sosialisme dibatasi oleh azas distribusi menurut pekerjaan — suatu azas yang mengakui akan adanya ketimpangan- ketimpangan. Namun negara mesti bertindak untuk menjamin bahwa ketimpangan-ketimpangan besar tidak menjadi berakar; negara dapat melakukan hal ini dengan menggunakan kekuasaan legislatif atau kekuasaan ekonomik secara tidak langsung. Bagi Jiang, reformasi berdasarkan perusahaan merupakan perwujudan azas-azas ekonomoi dan organisasi ekonomi Komune Paris. Ia merupakan suatu persekutuan produser yang bebas dan sederajat dalam industri dan mansu-faktur skala-besar yang tidak hanya didasarkan pada “persekutuan kaum buruh di setiap pabrik,” melainkan juga “perpaduan dari semua persekutuan itu dalam satu perserikatan besar.”⁸⁵

Bergesernya perdebatan dari pemikiran-pemikiran Sun pada suatu “perekonomian yang didasarkan pada perusahaan” telah menghasilkan banyak gagasan baru mengenai peranan perencanaan. He Jianzhang, misalnya, mengemukakan bahwa walaupun perencanaan itu perlu untuk menanggulangi spontanitas kapitalisme yang anarkik, perencanaan mandatori (bersifat perintah) harus dibatasi.⁸⁶ Namun, jelas itu harus dipertahankan sehubungan dengan bahan-bahan penting yang persediaannya kurang, namun yang bersifat menentukan bagi kebutu-han-kebutuhan rakyat dan ekonomi nasional. Dalam keadaan-keadaan sepefti itu, hukum perkembangan berencana dan berimbang harus lebih diutamakan tinimbang hukum nilai. Demikian pula halnya di daerah-daerah yang tingkat perkembangan tenaga-tenaga produktif-nya rendah. Tetapi penyimpangan-penyimpangan jangk-

panjang dari nilai-nilai dan harga-harga harus dielakkan karena itu menyumbang pada berbagai ketidak-seimbangan. Sebagaimana yang menjadi pendirian He, rencana-rencana yang bersifat perintah merupakan tindakan-tindakan darurat atau penutup-kesenjangan yang akan hilang secara bertahap dengan membaiknya kondisi-kondisi perekonomian. Orang jangan berilusi bahwa penekanan di waktu lalu pada perencanaan yang bersifat perintah itu adalah suatu warisan dari mentalitas ekopnomi patriarkal skala kecil yang berswa-sembada. Produser kecil selalu bersikap bermusuhan terhadap perkembangan suatu perekonomian barang-dagangan dan seringkali merasionalisasi sikap permusuhannya itu dengan mendukung sosialisme utopian. Demikian itulah landasan dukungan pada Proudhon dan Duhring yang tidak mendapatkan sedikitpun belas kasihan (tidak mendapatkan sedikitpun simpati) Marx dan Engels. Orang harus mengakui pengaruh cara berpikir patriarkal skala-kecil pada usaha-usaha awal Uni Sovyet maupun Tiongkok untuk membangun sosialisme. Kini, orang harus melaksanakan ajakan Lenin untuk belajar teknik-teknik bisnis dan menjalankan “perdagangan dengan cara yang beradab.” Hanya dengan cara itu orang dapat mencegah bertukar-tukarnya (bolak-baliknya) daur-daur desentralisasi (untuk membereskan ketidak-seimbangan yang disebabkan oleh perekonomian patriarkal) dan resentralisasi (dengan penegasan kembali pemikiran patriarkal).

Pernyataan Lenin bahwa “setiap rencana tidak lebih daripada sebuah tolok-ukur”⁸⁷ telah dikerahkan untuk membenarkan diperkenalkannya perencanaan bimbingan. Semula hal ini mestinya diterapkan (diberlakukan) pada produk-produk yang tidak terlalu penting, tetapi ruang-lingkup operasinya semestinya terus-menerus diperluas. Di bawah sistem ini, perusahaan-perusahaan akan menerima target-target yang hanya dimaksudkan sebagai rujukan saja. Lagi pula, harga-harga akan diperkenankan berfluktuasi dalam batas-batas tertentu. Departemen-departemen perdagangan akan menempatkan pesanan-pesanan pada departemen-departemen industrial untuk sejumlah tertentu produk, yang kualitasnya akan ditentukan bersama oleh rencana-rencana bimbingan dan permintaan pasar. Manfaat perencanaan bimbingan ini adalah sifatnya yang tidak langsung.

Diperkenalkannya perencanaan indikatif (penunjukan) berarti bahwa bidang utama perencanaan beralih pada perusahaan. Gagasan-gagasan baru mengenai hubungan antara negara dan perusahaan telah didiskusikan dalam Bab Empat. Perencanaan perusahaan, harus dipandu tidak saja oleh kewajiban-kewajiban pada negara berdasar kontrak melainkan juga oleh kekuatan-kekuatan pasar. Agar kontrak-kontrak itu berlaku (berdaya-hasil) dan secara hukum dapat dilaksanakan, negara harus mengakui hak-hak dan kepentingan-kepentingan perusahaan-perusahaan itu. Jika orientasi pasar harus berdaya-hasil dan prakarsa perusahaan dipertahankan, maka kepada perusahaan-perusahaan harus diberikan kekuasaan lebih besar atas pengeluaran dana-dana, kekuasaan untuk menjual asset-asset tetap, kekuasaan atas penentuan upah dan bonus (menurut norma-norma negara) dan hak untuk memindahkan “kaum buruh surplus” ke perusahaan-perusahaan lain. Kepada perusahaan-perusahaan harus diberikan kekuasaan lebih besar atas penentuan harga, sehingga harga-harga dapat secara lebih akurat mencerminkan persediaan dan permintaan.

He Jianzhang juga mengajurkan agar berbagai jenis perusahaan didirikan untuk memperlancar intensifikasi pembagian kerja lebih lanjut, untuk meningkatkan spesialisasi, untuk meningkatkan kemajuan teknologikal dan untuk meningkatkan kuantitas maupun kualitas barang-barang, sambil memperbaiki produktivitas dan me-ngurangi ongkos-ongkos. Perusahaan-perusahaan itu dapat mengambil bentuk sindikat atau trust sebagaimana yang dapat dijumpai di Yugoslavia atau di Rumania. Bahkan pola organisasi kapitalisme monopoli dapat dipelajari.

KESIMPULAN

Program-program He Jianzhang dan Jiang Yiwei merupakan suatu penyimpangan penting dari Marxisme-Leninisme ortodoks, khususnya yang diinterpretasikan oleh Stalin. Mereka juga sangat menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang disusun garis-besarnya oleh Sun Yefang. Program-program itu mendemonstrasikan derajat hingga seberapa jauh ahli-ahli ekonomi politik Tiongkok siap mempertanyakan dalil-dalil ortodoksi yang diterima dalam pemikiran ekonomi politis, maupun untuk mengajukan kebijaksanaan- kebijaksanaan yang akan mengubah

wajah organisasi “sosialis” di Tiongkok. Dengan membatasi peranan negara dalam pembuatan- keputusan ekonomik secara langsung, He dan Jiang menuntut suatu pemisahan yang lebih tajam dari negara dan masyarakat sivil. Mereka menantang statisme (nagaraisme) yang telah diterima sebagai bagian proyek Marxis sejak zaman Kautsky. Suatu konsep berbeda mengenai apakah demokrasi itu telah diartikulasikan dalam program-program itu. Persoalan-persoalan lain yang mempunyai konsekuensi politik yang luar biasa juga telah timbul. Penilaian kembali mengenai tujuan produksi sosialis, apa yang dituntut dalam mengubah sistem kepemilikan, dalam kondisi-kondisi apa keberadaan produksi dan pertukaran barang-dagangan itu dan azas-azas keadilan distributif menysasar pada inti/jantung kehidupan politis itu sendiri. Apakah isu-isu yang mendasarinya kitu akan terus didiskusikan secara terbuka adalah suatu hal yang agak meragukan. Kampanye-kampanye akhir-akhir ini untuk membasmi “pencemaran spriritual” dan untuk menginfuskan teori Marx mengenai alienasi mungkin akan terbukti tidak terjelaskan. Walaupun begi-tu, perdebatan-perdebatanb itu telah mengangkat isu-isu yang mempunyai arti begitu luas sehingga mereka patut digolongkan sejajar dalam arti pentingnya dengan perdebatan-perdebatan besar pada tahun 1920-an di USSR.⁸⁸

Isu-isu ini berasal dari suatu analisis mengenai masyarakat Tiongkok yang membangkitkan kembali metodologi yang dipergunakan oleh Marx sendiri. Sebagai seorang pionir dalam menggunakan metodologi Marxian dalam keadaan seperti itu, Sun Yefang patut dihormati sebagai katalisator suatu penilaian kembali yang begitu luas jangkauannya. Sun Yefang telah membuktikan bahwa metode Marxian dapat diterapkan secara berguna sekali pada pendiskusian masalah-masalah masyarakat dalam transisi sosialis, dan bahwa metode Marx bukan sesuatu yang hanya dapat dibatasi pada textbook-textbook kersang “diamat” atau “histomat.” Yang lebih penting lagi, Sun menggunakan Marx untuk menembus yang sedang menjadi suatu religi sekular.

Sun mampu melakukan ini dengan berkonsentrasi pada ciri-ciri esensial kehidupan ekonomi politis dan dengan menunjukkan secara jelas hukum-hukum objedktif yang menguasai kehidupan itu. Ia menolak cara-cara pendekatan *ad hoc* maupun fundamentalisme. Analisisnya

menghidupkan kembali ajaran-ajaran Marx mengenai peranan teori nilai dan mengenai antar-hubungan yang kompleks yang dimasuki/ditempuh manusia untuk menguasai alam dan mengkoordinasi produksi. Sun mengenakan praktek-praktek dan teori-teori Stalinisme pada pengkajian yang ketat dan mendapatkan bahwa praktek-praktek dan teori-teori itu tidak memadai. Tetapi, dengan segala bakatnya yang tidak diragukan itu, uraian Sun menjadi cacat karena diterima olehnya pandangan mengenai sosialisme sebagai suatu cara produksi yang bijaksana (berhati-hati). Penerimaannya itu merupakan suatu ketidak-mantapan pokok bahkan di dalam paradigma (model pola)-nya sendiri. Isu-isu yang telah timbul dalam perdebatan-perdebatan sekitar teori-teori Sun mengangkat masalah-masalah fundamental mengenai sifat masyarakat-masyarakat dalam transisi sosialis seperti Tiongkok. Semua itu merupakan isu-isu di mana kategori-kategori dan metodologi Marxian mempunyai daya-penerapan yang dapat dibuktikan dalam mengungkap ciri-ciri esensial dari realitas konkret. Sebagai seorang yang berusaha melaksanakan proyek Marx dan yang patuh pada metodologinya, Sun akan bahagia sekali melihat kecanggihan yang diperlihatkan ahli-ahli ekonomi politik Tiongkok dalam mendekati masalah-masalah dalam menyusun suatu kritik radikal berdasarkan karya Marx. Mungkin inilah tugas Sun Yefang.

Catatan

¹ Lihat Sun Yefang, (1964), Sun, 1979, hal. 297

² Lihat RMRB., 9 Agustus 1966, SCMP., 3765, 22 Agustus 1966, hal. 4-13

³ Sun Yefang, 1979. 16 dari esai dalam buku itu ditulis sebelum Revolusi Kebudayaan dan diedarkan sebagai dokumen-dokumen internal (neibu) untuk kritisisme. Beberapa dokumen penting telah hilang, justru karena kurang-tepat-waktu untuk dikritik, (lihat *ibid.*, hal 16). Rujukan-rujukan pada buku ini dalam bab itu telah ditambahkan.

⁴ Polanyi, (1944), 1957, hal. 68-76.

⁵ Lihat Lie Suinian, 1982, hal. 49-50

⁶ Weber, (1904), 1949, hal. 90

⁷ Marx, (1846), Marx dan Engels, SW., II, 1970, hal. 522.

⁸ Marx dan Engels, (1845-6), CW., V, 1976, hal. 37.

⁹ Marx, (1867), I, 1954, hal. 8.

¹⁰ Marx dan Engels, (1845-6), CW., V, 1976, hal. 518.

¹¹ Marx, (1879-80), Carver (ed.), 1975, hal. 186

¹² Marx, (1867), I, 1954, hal. 194.

¹³ Marx, (1868), Marx dan Engels, SW., II, 1970, hal. 418-9.

¹⁴ Marx, (1879-80), Carver (ed.), 1975, hal. 189-209

¹⁵ I.B. Trotsky, (1920), dikutip dalam Smolinsky, 1967, hal. 113.

¹⁶ Leontiev, n.d., hal. 67-91.

¹⁷ Bukharin, (1920), 1971.

¹⁸ Trotsky, (1920), dikutip dalam Smolinsky, 1969, hal. 114.

¹⁹ Smolinsky, 1967, hal. 123

²⁰ Stalin, (1952), 1972.

²¹ L. Obolensky mungkin adalah N. Osinsky (yang nama aslinya adalah V.V. Obolensky). Ia manajer Bank Negara setelah Revolusi Oktober dan kemudian Ketua I dari Dewan Tertinggi Ekonomi Nasional. Lihat Szamuely, 1974, hal. 34.

²² Brugger, 1976; teristimewa hal. 76-7.

²³ Lin, 1981, hal 18.

²⁴ Chen Yun, CCP, 1956, II, hal. 157-76.

²⁵ Lihat Lin, 1981, hal. 19. Sun dengan penuh semangat membenarkan kritisme Mao pada tahun 1959; lihat Sun Yefang, (1978), Sun, 1979, hal. 347.

²⁶ 29. Dikutip dalam Lin, 1981, hal. 19. Lihat komentar-komentar Sun mengenai ini; Sun Yefang, (1964-5), Sun 1979, hal. 306-13.

²⁷ Lihat Reglar, 1980.

²⁸ Mao Zedong, (1959), Mao, 1974, hal. 183.

²⁹ Sun Yefang, 1980.

³⁰ Marx, (1846), Marx dan Engels, SW., I, 1970, hal. 521-2; Kutipan dalam Sun agak berbeda, (1980, hal. 159).

³¹ Marx, (1847), dikutip dalam Sun Yefang, 1980, hal 159.

³² Ibid., hal. 160

³³ Ibid., hal. 159-60.

³⁴ Ibid.

³⁵ Ibid., hal. 156.

³⁶ Engels, (1843), Marx dan Engels, CW., III, 1975, hal. 426; dikutip dalam Sun Yefang, 1980, hal. 164; Kata-kata Sun agak berbeda; lihat juga Lin, 1981, hal. 14.

³⁷ Sun Yefang, 1980, hal 162. Sun menggunakan kata 'nilai'; Aku menggunakan kata-kata 'nilai pada umumnya' untuk menghindari kekaburan. Untuk diskusi selanjutnya, lihat juga Lin, 1981, hal. 14; Meek (1956), hal. 256-84; Rosdolsky, 1977, hal. 428-36.

³⁸

³⁹

⁴⁰

⁴¹

⁴² Sun Shangqing dkk., BR., 24, 13 Juni 1983, hal. 17.

⁴³ Ibid. hal. 17-8.

⁴⁴ Sun Yefang, 1980, hal. 167.

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Sun Shangqing dkk., BR., 24, 13 Juni 1983, hal. 18.

⁴⁷ Wen Ping, RMRB., 25 Juli 1980, hal. 5, dikutip dalam Sun Yefang, 1982, hal. 232.

⁴⁸ Sun Yefang, 1982, hal. 233.

⁴⁹ Sun Yefang, BR., 9, 28 Februari 1983, hal. 23.

⁵⁰ Marx, (1867), I, 1954, hal. 8.

⁵¹ Marx, (1858), 1977, hal. 173.

⁵² Ibid.

⁵³ Sun Yefang, 1980, hal. 170; penerjemahan dari Zhongguo Shehui Kexue, 4, 1980, hal. 36.

⁵⁴ Agar hal ini jelas, lihat Sun Yefang (1978), Sun, 1979, hal. 371-6.

⁵⁵ Sun Yefang, 1980, hal. 171.

⁵⁶ Sun Yefang, 1982, hal. 233.

⁵⁷ Sun Shangqing dkk. BR., 24, 13 Juni 1983, hal. 18.

⁵⁸ Nove, 1983, hal. 33.

⁵⁹ Sun Yefang, 1980, hal. 169.

⁶⁰ Sun Shangqing dkk., BR., 24, 13 Juni 1983, hal. 18. Lihat Sun Yefang, (1978), Sun, 1979, hal., 354-5.

Lihat juga argumen-argumen Sun Yefang (1978), Sun, 1979, hal. 354-5. Juga lihat argumen-argumen Sun dalam menjauhkan dirinya dari Liberman; Sun Yefang (1964), Sun, 1979, hal. 297-8

⁶¹ Sun Shangqing dkk. BR., 24, 13 Juni 1983, hal. 19.

⁶² Xue Muqiao, 1981, hal. 135-41.

⁶³ Dikutip dalam Dobb, 1973, hal. 251.

⁶⁴ Sun Yefang, 1980, hal. 161.

⁶⁵ Baran dan Sweezy, 1966; Poulantzas, 1975.

⁶⁶ Sun Yefang, 1980, hal. 157.

⁶⁷ Li Chonghuai, 1982, hal. 28.

⁶⁸ Ibid, 1980, hal. 157.

⁶⁹ Ibid., hal. 35.

⁷⁰ Xue Muqiao, 1981, hal. 125.

⁷¹ Lavigne, 1978.

⁷² Ma Jiaju, *Jingji Yanjiu*, 5, 1979, *Chinese Economic Studies*, 4, 1980, hal. 64-70.

⁷³ 79, *Mai Jiaju*, 1980, 223.

⁷⁴ Ma Jiaju, *Jingji Yanjiu*, 5, 1979, *Chinese Economic Studies*, 4, 1980, hal. 70-83.

⁷⁵ Ibid., hal. 64-70. Lihat juga Dong Dasheng, *Jingji Yanjiu*, 5, 1979, *Chinese Economic Studies*, 4, 1980, hal. 84-8.

⁷⁶ Ma Jiaju, 1980, hal. 244.

⁷⁷ Sun Yefang, (1977), Sun, 1979, hal. 333-345.

⁷⁸ Liu Guohuang dan Zhao Renwei, *jingji Yanjiu*, 5, 1979, *Chinese Economic Studies*, 4, 1980, hal. 3-31.

⁷⁹ Fan Jigang, 1980.

⁸⁰ Ibid., hal; 223.

⁸¹ Zhang Chaozun, Xiang Qiyuan dan Huang Shenqi, *Jingji Yanjiu*, 4, 1979, *Chinese Economic Studies*, 3, 1980, hal. 58-68.

⁸² Bettelheim, 1976(a).

⁸³ Zhang Chaozun dkk., *Jingji Yanjiu*, 4, 1979, *Chinese Economic Studies*, 3, 1980, hal. 58-68.

⁸⁴ Jiang Yiwei, 1980.

⁸⁵ Engels, (1891), Marx dan Engels, SW.,II. 1970, hal., 186. dikutip dalam Ibid. hal 69.

⁸⁶ He Jianzhang, *Jingji Yanjiu*, 5, 1979, *Chinese Economic Studies*, 4, 1980, hal. 32-62; He, 1982.

⁸⁷ Lenin, (1921), (1921), CW., XXXII, 1965, hal. 323, dikutip dalam Ibid., p. 58.

⁸⁸ Bandingkan perdebatan ini dengan yang dinarasikan dalam Erlich, 1960.

Bibliografi

- Alavi, H., Burns, P., Knight, G., Mayer, P. dan McEachern, D., *Capitalisme and Colonial Production*, London, Croom Helm, 1982.
- Albrow, M., *Bureaucracy*, London, Pall Mall Press, 1970.
- Althusser, L., *Lenin and Philosophy and Other Essays*, New York Monthly Review Press, 1971
- Althusser, L., *Essays in Self-Criticism*, London, New Left Books, 1967.
- Althusser, L., *For Marx*, London, Verso, 1979.
- Althusser, L. dan Balibar, E., *Reading Capital*, London, Verso, 1979.
- Anderson, P., *Lineages of the Absolutist State*, London, New Left Books, 1975.
- Bahro, R., *The Alternative in Eastern Europe*, London, New Left Books, 1978.
- Balibar, E., "From Bachelard to Althusser: the Concept of *Epistemological Break*," *Economy and Society*, Vol.iii, No.3, 1978, hal.207-38.
- Balletrem, K., "Lenin and Bogdanov," *Studies in Soviet Thought*, Vol. IX, 1969, hal. 283-310.
- Baran, P., dan Sweezy, P., *Monopoly Capital*, New York, Monthly Review Press, 1966.
- Barbalet, J., "The Development of Marx's Social and Political Theory," Ph.D. thesis, University of Adelaide, 1977.
- Barker, R. dan Sinha, R. bersama Beth, R. (eds.), *The Chinese Agricultural Economy*, London, Croom Helm, 1982.
- Barker, R., dan Sinha, R., "Epilogue," dlm. *Ibid.*, hal. 199-204.
- Barker, R., Sisler, D. dan Rose, B., "Prospects for Growth in Grain Production," dlm. *Ibid.*, hal. 163-81.
- Bauman, Z., "Officialdom and Class: Bases of Inequality in Socialist Society," dlm. Parkin (ed.), 1974, hal. 129-48.
- Bergson, A., "Towards a New Growth Model," *Problems of Communism*, Vol. XXII, No.2, 1973, hal.1-9.
- Bettelheim, C., "On the Transition Between Capitalism and Socialism," dlm. Sweezy dan Bettelheim, 1971, hal. 15-24.
- Bettelheim, C., *Economic Calculation and Form of Property*, London, Routledge dan Keegan Paul, 1976 (a)

- Bettelheim, C., *Class Struggles in the U.S.S.R.: Second Period, 1923-1930*, Sussex, Harvester, 1976(b).
- Bettelheim, C. dan Burtom, N., *China Since Mao*, New York, Monthly Review Press, 1978.
- Bogdanov, A., "Proletarian Poetry," *The Labour Monthly*, No.4, 1923, Hal.275-85; 357-62.
- Bowie, R. dan Fairbank, J. (eds.), *Communist China, 1955-59: Policy Documents with Analysis*, Cambridge Mass., Harvard University Press, 1965.
- Boyne, R., "Breaks and Problematics," *Philosophy and Social Criticism*, Vol. VI, No.2, 1979, hal. 203-5.
- Breth, R., *Mao's China: A Study of Socialist Economic Development*, Melbourne, Longmen Cheshire, 1977.
- Brugger, W., *Democracy and Organisation in the Chinese Industrial Enterprise: 1948-53*, Cambridge University Press, 1976.
- Brugger, B., *Contemporary China*, London, Croom Helm, 1977.
- Brugger, B., (ed.), *China: The Impact of the Cultural Revolution*, London, Croom Helm, 1978.
- Brugger, B., (ed.), *China Since the Gang of Four*, London, Croom Helm, 1980.
- Brugger, B., *China: Liberation and Transformation*, London, Croom Helm, 1981(a)
- Brugger, B., "Soviet and Chinese Views on Revolution and Socialism – Some Thoughts on the Problems of Diachrony and Synchrony," *Journal of Contemporary Asia*, Vol. XI, No.3, 1981, hal. 311-32(b).
- Brugger, B., "Alienation Revisited," makalah disampaikan pada "Asian Studies Association of Australia, Konferensi Nasional ke-V," Adelaide University, 13-19 Mei, 1984(a).
- Brugger, B., *Once Again Making the Past Serve the Present – A Critique of the Chinese Communist Party's New Official History*, in Maxwell and McFarlane (eds.), 1984, hal. 169-81 (b).
- Brugger, B., "Democracy and Organisation in Chinese Industry – New Directions," in Young (ed.), akan terbit.
- Brugger, B. dan Hannan, K., *Modernisation and Revolution*, London, Croom Helm, 1983.
- Bukharin, N., *Economics of the Transformation Period, (1920)*, New York, Bergman Publishers, 1971.
- Callinicos, A., *Althusser's Marxism*, London, Pluto Press, 1976.
- Cambell, R., "Marx, Kantorovich and Navozhilov, Staimost versus Reality," in Feiwel (ed.), 1968, hal. 261-77.
- Carver, T. (ed.), *Karl Marx: Texts on Method*, Oxford, Basil Blackwell, 1975.

Castells, M. dan de Ipola, E., "Epistemological Practice and the Social Sciences," *Economy and Society*, Vol.V, No.2, 1976, hal. 111-44.

Chao, Kuo-chun, *Agrarian Policy of the Chinese Communist Party, 1921-1959*, Westport, Conn., Greenwood Press, 1977.

Ch'en, J. (ed.), *Mao Papers: Anthology and Bibliography*, Englewood Cliffs, N.J., Prentice Hall, 1969.

Cheng Renqian, "Some Questions on the Reassessment of Rosa Luxemburg," dalam Su *et.al.*, 1983, hal. 96-123.

Chi Shin, *The Case of the Gang of Four*, Hongkong, Cosmos Books, 1977.

C.C.P., "Eight National Congress of the Communist Party of China," Documents, (1956), BFLP., 1981.

C.C.P., "Eight National Congress of the Communist Party of China Vol.II," Speeches, PFLP., 1956.

C.C.P., "Ninth National Congress of the Communist Party of China," Documents, PFLP., 1969.

C.C.P., "The Tenth National Congress of the Communist Party of China," Documents, PFLP., 1973.

C.C.P., "The Eleventh National Congress of the Communist Party of China," Documents, PFLP., 1973.

C.C.P., "The Twelfth National Congress of the Communist Party of China," Documents, BFLP., 1982.

Christensen, P., "The Shanghai School and Its Rejection," dalam Feughtwang and Hussain (eds.), 1983, hal.74-90.

Christensen, P. dan Delman, J., "A Theory of Transitional Society; Mao Zedong and the Shanghai School," *Bulletin of Concerned Asian Scholars*, Vol.XIII, No.2, 1981, hal. 2-15.

Claudin, F., *The Communist Movement, From Comintern to Cominform*, New York, Monthly Review Press, 1975, 2 vols.

Clausen, S., "Chinese Economic Debates after Mao and the Crisis of Official Marxism," dalam Feughtwang and Hussain (eds.), 1983, hal.53-74.

Cohen, G., *Karl Marx's Theory of History: A Defence*, Princeton University Press, 1978.

Collier, A., "In Defence of Epistemology," dalam Mephram and Ruben, 1979, hal. 55-106.

C.P.S.U., *History of the Communist Party of the Soviet Union (Bolshevik): Short Course*, Moscow, Foreign Languages Publishing House, 1939.

C.P.S.U., *Programme of the Communist Party of the Soviet Union* 31 October 1961, Moscow, Foreign Languages Publishing House, 1961.

- Corrigan, P., Ramsay, H. dan Sayer, D., *Socialist Construction and Marxist Theory: Bolshevism and its Critique*, New York, Monthly Review Press, 1978.
- Corrigan, P., Ramsay, H. dan Sayer, D., *For Mao: Essays in Historical Materialism*, London, Macmillan, 1979.
- Crook, I. And D., *The First Years of the Yangyi Commune*, London, Routledge and Kegan Paul, 1966, dicetak kembali 1979.
- Cutler, A., Hindess, B., Hirst, P. and Hussain, A., *Marx's Capital and Capitalism Today*, London, Routledge and Kegan Paul, 2 vols., 1977 dan 1978.
- Deng Xiaoping, *Wenxuan, (Selected Works), 1975-1982*, Beijing, Renmin Chuanshe, 1983.
- De Ste. Croix, G., *The Class Struggle in the Ancient Greek World*, London, Duckworth, 1981.
- Dirlik, A., "Chinese Historians and the Marxist Concept of Capitalism," *Modern China*, Vol.VIII, No.1, 1982, hal. 105-32.
- Dittmer, L., "The 12th Congress of the Communist Party of China," *The China Quarterly*, 93, 1983, hal. 108-24.
- Dobb, M., *Studies in the Development of Capitalism*, (1946), direvisi edisi ke-2, London, Routledge and Kegan Paul, 1975.
- Dobb, M., *Soviet Economic Development Since 1917*, New York, International Publications, 1948.
- Dobb, M., *Theories of Value and Distribution since Adam Smith: Ideology and Economic Theory*, Cambridge University Press, 1973.
- Domar, E., *Essays in the Theory of Economic Growth*, New York, Oxford University Press, 1957.
- Domes, J., *Socialism in the Chinese Countryside*, London, Hurst, 1980.
- Donnithorne, A., *Chinese Economic System*, London, George Allen and Unwin, 1967.
- Dupre, G. and Rey, P., "Reflections on the Pertinence, of a Theory of the History of Exchange," *Economy and Society*, Vol.II, No.2, 1973, hal. 131-63; Terjemahan oleh Hindess, B. dari aslinya dalam *Cahiers Internationaux de Sociologie*, 46, 1968, hal. 132-62.
- Dutton, M., "The Crisis of Marxism in China," Brisbane, Griffith University, *Griffith Asian Papers*, No.9, 1983.
- Eckstein, A., *China's Economic Revolution*, Cambridge University Press, 1977.
- Edgley, R., "Marx's Revolutionary Science," dalam Mephram and Ruben (eds.), 1979, hal. 5-26.
- Ellman, M., *Planing Problems in the U.S.S.R.: The Contribution of Mathematical Economics to their Solution: 1960-1971*, Cambridge University Press, 1973.

Ellul, J., *The Technological Society*, New York, Knopf, 1967.

Elster, J., "Cohen and Marx's Theory of History," *Political Studies*, Vol. XXVIII, No. 1, 1980, hal.121-8.

Erich, A., *The Soviet Industrialization Debate, 1924-1928*, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1960.

Evans, A., "Developed Socialism in Soviet Ideology," *Soviet Studies*, Vol. XXIX, No.3, 1977, hal. 409-28.

Fan Jigang, "The Cause of the Emergence and Existence of Commodities," *Social Sciences in China*, 2, 1980, hal. 213-26.

Feiwel, FG. (ed.), *New Currents in Soviet-Type Economics*, Scranton, Pa., International Textbook Co., 1968.

Feughtwang, S. and Hussain, A (eds.), *The Chinese Economic Reforms*, London, Croom Helm, 1983.

Feuerwerker, A., "The Chinese Economy: 1912-1949," Ann Arbor, University of Michigan, *Michigan Papers in Chinese Studies*, No.1, 1968.

Foster Carter, A., "The Modes of Production Controversy," *New Left Review*, 107, 1978, hal. 47-77.

Gardner, J. *Chinese Politics and the Succession to Mao*, London, Macmillan, 1982.

Geras, N., "Althusser's Marxism: An Assessment," dalam *New Left Review*, (ed.), hal. 232-72.

Gluckmann, A., "A Ventriloquist Structuralism," dalam *New Left Review*, (ed.) 1977, hal. 282-314.

Goldmann, J., "Fluctuations and Trend in the Rate of Growth in Some Socialist Countries," dalam Feiwel (ed.), 1968, hal. 122-22.

Gray, J. and White, G. (eds.) *China's New Development Strategy*, London, Academic Press, 1982.

Habermas, J., *Legitimation Crisis*, London, Heinemann, 1976.

Haraszti, M., *A Worker in a Worker's State*, Harmondsworth, Penguin, 1977.

He Jianshang, "More on Planned Economy and Market Regulation," *Social Sciences in China*, 4, 1982, hal. 46-59.

Hilton, R. (ed.), *The Transition from Feudalism to Capitalism*, London, New Left Books, 1976.

Hindess, B., *Philosophy and Methodology in the Social Sciences*, Sussex, Harvester, 1977.

Hindess, B. and Hirst, P., *Pre-Capitalist Modes of Production*, London, Routledge and Kegan Paul, 1975.

Hindess, B. and Hirst, P., *Mode of Production and Social Formation*, London, Macmillan, 1977.

Hirst, P., *On Law and Ideology*, Atlantic Islands, N.J., Humanities Press, 1979 (a).

- Hirst, P., "The Necessity of Theory," *Economy and Society*, Vol.VIII, No.4, 1979, hal. 417-45(b).
- Hoffman, C., *The Chinese Worker*, Albany, State University of New York Press, 1974.
- Howard, M. and King, J. (eds.), *The Economics of Marx: Selected Readings of Exposition and Criticism*, Harmondsworth, Penguin, 1976.
- Howe, C., *Employment and Economic Growth in Urban China: 1949-1957*, Cambridge University Press, 1971.
- Howe, C., *Wage Patterns and Wage Policy in Modern China, 1919-1972*, Cambridge University Press, 1973.
- Howe, C., *China's Economy: A Basic Guide*, London, Granada Publishing, 1978.
- Hua Giofeng, *Continue the Revolution Under the Dictatorship of the Proletariat to the End*, PFLP, 1977.
- Huang Da., "Some Problems Concerning Pricing," *Social Sciences in China*, 1, 1981, hal. 136-56.
- Hussain, A., "Marc's Notes on Adolph Wagner: An Introduction," *Theoretical Practice*, 5, 1972, hal. 18-34.
- Ishikawan, S., "China's Economic Growth Since 1949 – An Assessment," *The China Quarterly*, 94, 1983, hal. 242-81.
- Jasny, N., *Soviet Economists of the Twenties: Names to be Remembered*, Cambridge University Press, 1972.
- Jiang Yiwei, "The Theory of an Enterprise-Based Economy," *Social Sciences in China*, 1, 1980, hal. 48-70.
- Kerr, C., Dunlop, J., Harbison, F and Myers, C., *Industrialism and Industrial Man*, London, Heinemann, 1962.
- Konrad, G. and Szelenyi, I., *The Intellectuals on the Road to Class Power*, New York, Harcourt, Brace, Jovanovich, 1979.
- Krivitsov, V. and Sidikhmenov, V., *A Critique of Mao Tse-tung's Theoretical Conceptions*, Moscow, Progress Publishers, 1972.
- Lavigne, M. "The Creation of Money by the State Bank of the U.S.S.R.," *Economy and Society*, Vol.VII, No. 1, 1978, hal.29-55.
- Lecourt, D., *Proletarian Science? The Case of Lysenko*, London, New Left Books, 1977.
- Lenin, V., *Collected Works (CW)*, Moscow, Progress Publishers; Vol.V, 1961; Vol. XIV, 1962; Vol. XV, 1963; Vol.XX, 1964; Vol.XXXII, 1965, Vol.XXXIII, 1966, Vol. XXXVIII, 1972.
- Leontiev, A., *Political Economy: A Beginner's Course*, San Francisco, Proletarian Publishers, n.d. Li Chonghuai,

- "On the New Stage in the Development of Monetary Forms," *Social Sciences in China* 4, 1982, hal. 14-45.
- Lieberthal, K., "Central Documents and Politburo Politics in China," Ann Arbor, University of Michigan, *Michigan Papers in Chinese Studies*, No. 33, 1978.
- Lin, C., "The Reinstatement of Economics in China Today," *The China Quarterly*, 85, 1981, hal. 1-48.
- Lippitt, V., *Land Reform and Economic Development in China*, White Plains, N.Y., M.E. Sharpe, 1974.
- Luo Guoguang (ed.), *Guomin Jingji Guanli Tizhi, Gaige de Ruoguan Lilun Wenti*, Beijing, Zhongguo Shehui Kexue Chubanshe, 1980.
- Liu Suinian, "Economic Planning," dalam Xu Dixin *et.al.* 1982, hal. 28-51.
- Lukacs, G., *History and Class Consciousness*, (1923), London, Merlin Press, 1971.
- Ma Jiaju, "A Pioneer Work on Economic Reform: Notes on Sun Yefang's Theoretical Questions of the Socialist Economy," *Social Sciences in China*, 1, 1980, hal. 216-27.
- McEachern, D., "The Mode of Production in India," *Journal of Contemporary Asia*, Vol. VI, No. 4, 1976, hal. 444-57.
- McFarlane, B., "Political Economy of the Class Struggle and Economic Growth in China, 1980-1982," *World Development*, Vol. XI, No. 8, 1983, hal. 659-72; juga dlm. Maxwell dan McFarlane (eds.) 1984, hal. 21-34.
- Macherey, P., *A Theory of Literary Production*, London, Routledge and Kegan Paul, 1978.
- Macherey, P. and Balibar, E., "Literature as an Ideological Form: Some Marxist Propositions," *The Oxford Literary Review*, Vol. III, No. 1, 1978, hal. 4-12.
- Mao Zedong, *Selected Works*, BFLP, Vol. I, 1965; Vol. II, 1965; Vol. III, 1965; Vol. IV, 1961; vol. V, 1971.
- Mao Zedong, *Selected Readings*, PFLP, 1971.
- Mao Zedong, *Miscellany of Mao Tse-tung Thought*, (1949-68), 2 vols., JPRS., 61269:1 dan 1, 20 Februari 1974.
- Mao Zedong, "On the Origins of Machine Guns and Mortars (etc.)," *Chinese Law and Government*, Vol. I, No. 4, 1968-9, hal. 73-4.
- Mao Zedong, *A Critique of Soviet Economics*, anotasi dari R. Levy, terj. M. Roberts dengan pengantar oleh J. Peck, New York, Monthly Review Press, 1977(a). Ada sebuah terjemahan bahan yang sama dalam Mao, 1974.

- Mao Zedong, *Mao on Stalin*, Edinburgh, Proletarian Publishing, 1977(b)
- Marx, K., *Capital*, Moscow, Progress Publishers, Vol.I (1867), 1954; Vol.II, 1956, Vol.III, 1959.
- Marx, K., *A Contribution to the Critique of Political Economy*, 1857), Moscow, Progress Publishers, 1970.
- Marx, K., *Grundrisse*, (1858), Harmondsworth, Penguin, 1977.
- Marx, K., "Marginal Notes on Adolph Wagner's *Lehrbuch der Politischen Okonomie*" (1879-80), *Theoretical Practice*, 5, 1972, hal.40-65; Sebuah terjemahan lain dapat dijumpai dalam Carver (ed.), 1975, hal. 179-219.
- Marx, K. and Engels, F., *Collected Works* (CW), London, Lawrence and Wishart, Vol.III, (1943-44), 1975; Vol. V. (1845-47), 1976.
- Marx, K. and Engels, F., *Selected Works*, 3 vols. Moscow, Progress Publishers, 1970.
- Marx, K. and Engels, F., *Selected Correspondences*. Moscow, Progress Publishers, 3rd. rev.edn., 1975.
- Maxwell, N. and McFarlane, B. (eds.), *China's Changed Road to Development*, Oxford, Pergamon Press, 1984.
- Mayer, P., "The Penetration of Capitalism in a South Indian District: The First 60 Years of Colonial Rule in Tiruchirappalli," makalah belum-terbit, Adelaide University, 1981.
- Mayer, P., "Transformation of two Provincial Districts," dalam Alavi et.al., 1982, hal. 77-118.
- Meek, R., *Studies in the Labour Theory of Value*, (1956), New York, Monthly Review Press, n.d.
- Meisner, M., *Li Ta-chao and the Origins of Chinese Marxism*, New York, Atheneum, 1977.
- Melotti, U., *Marx and the Third World*, London, Macmillan, 1977.
- Mepham, J. and Ruben, D. (eds.), *Issues in Marxist Philosophy, Vol. III, Epistemology, Science, Ideology*, Sussex, Harvester, 1979.
- Myers, R., *The Chinese Peasant Economy: Agricultural Development in Hopei and Shantung, 1890-1949*, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1970.
- N.P.C., "Documents of the First Session of the Fifth National People's Congress of the People's Republic of China," PFLP, 1978.
- N.P.C., "Main Documents of the Second Session of the Fifth National People's Congress of the People's Republic of China," PFLP, 1979.
- Neild, K. and Seed, J., "Theoretical Poverty or the Poverty of Theory British Marxist Hisyotiography and

- the Althusserians," *Economy and Society*, Vol. VIII, No.4, 1979, hal. 383-416.
- New Left Review* (ed.), *Western Marxism: A Critical Reader*, London, 1977.
- Nové, A., *The Economics of Feasible Socialism*, London, Allen and Unwin, 1983.
- O'Leary, G., "The Impact of Recent Policies on Peasant Income," memo. University of Adelaide, 1979.
- O'Leary, G., "New Directions in Chinese Agriculture," makalah pada *Chinese Modernisation; the Latest Phase*, konferensi di Contemporary China Centre, Australian National University, 16-18 Februari 1983.
- O'Leary, G. and Watson, A., "Current Trends in China's Agricultural Strategy: A Survey of Communes in Hebei and Shandong," *The Australian Journal of Chinese Affairs*, No.4, 1980, hal. 119-65.
- O'Leary, G. and Watson, A., "The Production Responsibility System and the Future of Collective Farming," *The Australian Journal of Chinese Affairs*, No.8, 1982, hal. 1-34.
- O'Leary, G and Watson, A., "The Role of the People's Commune in Rural Development in China," *Pacific Affairs*, Vol. LV, No.4, 1982-3, hal. 593-612.
- Paine, S., "Balanced Development: Maoist Conception and Chinese Practice," *World Development*, Vol. IV, No.4, 1976, hal. 227-304.
- Parkin, F. (ed.), *The Social Analysis of Class Structure*, London, Tavistock Publications, 1974.
- Peck, J., "Introduction," dalam Mao, 1977(a), hal.7-29.
- P.F.L.P., *Three Major Struggles on China's Philosophical Front (1949-64)*, Neijing, 1973.
- Perkins, D (ed.), *China's Modern Economy in Historical Perspective*, Stanford University Press, 1975.
- Polanyi, K., *The Great Transformation*, (1944), Boston, Beacon Press, 1957.
- Poulantzas, N., *Classes in Contemporary Capitalism*, London, New Left Books, 1975.
- Pravda, A., "Industrial Workers: Patterns of Dissent, Opposition and Accomodation," Dalam Takes (ed.), 1979, hal. 209-62.
- Rawski, T., "Agricultural Employment and Technology," dalam Barker and Sinha (eds.), 1982, hal. 121-36.
- Reglar, S., "The Development of a Chinese Approach to Socialism: Chinese Reforms After the Dsenunciation of Stalin," *Journal of Contemporary Asia*, Vol. X, No. ½, 1980, hal. 181-214.
- Rey, P., *Les Alliances de Classes*, Paris, Maspero, 1973.
- Riskin, C. "Surplus and Stagnation in Modern China," dalam Perkins, 1975, hal. 49-84.

- Rosdolsky, R., *The Making of Marx's Capital*, London, Pluto Press, 1977.
- Ruben, D., "Review Article: Cohen, Marx and the Primacy Thesis," *British Journal of Political Science*, Vol. XI, Pt.II, 1981, hal. 227-34.
- Rubin, I., *Essays on Marx's Theory of Value* (1928), Montreal, Black Rose Books, 1975.
- Saich, T., "New Directions in Politics and Government," dalam Gray and White (*eds.*), 1982, hal. 19-36.
- Sayer, D., "Science as Critique: Marx vs. Althusser," dalam Mepham and Ruben, 1979, hal. 27-54.
- Schram, S. (ed.), *Mao Tse-tung Unrehearsed*, Harmondsworth, Penguin, 1974.
- Schram, S., "To Utopia and Back: A Cycle in the History of the Chinese Communist Party," *The China Quarterly*, 87, 1981, hal. 407-39.
- Schran, P., *The Development of Chinese Agriculture, 1950-1959*, Urbana, University of Illinois Press, 1969.
- Schurmann, H.F., *Ideology and Organization in Communist China*, Berkeley, University of California Press, 1966.
- Shue, V., *Peasant China in Transition: The Dynamics of Development Towards Socialism*, Berkeley, University of California Press, 1980.
- Sik, D., *Plan and Market Under Socialism*, White Plains, N.Y., International Arts and Sciences Press, 1967.
- Skocpol, T., *States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia and China*, Cambridge University Press, 1979.
- Smolinsky., "Planning without Theory," *Survey*, 64, Juli 1967, hal. 108-24.
- Stalin, J., *Works*, Moscow, Foreign Languages Publishing House, Vol.I, 1952; Vol. XI, 1954.
- Stalin, J., *Problems of Leninism*, PFLP., 1976.
- Stalin, J., *Economic Problems of Socialism in the U.S.S.R.* (1952), PFLP., 1972.
- Starr, J., *Continuing the Revolution: The Political Thought of Mao*, Princeton University Press, 1979.
- Su Zhaozhi et.al., *Marxism in China*, Nottingham, Spokesman, 1973.
- Su Zhaozhi., "Developing Marxism under Contemporary Conditions," dalam *ibid.*, hal. 13-52.
- Su Xing, "China's Planned Economy and the Market," makalah disajikan pada konferensi Australian Association for the Study of the Socialist Countries, Sydney, Macquarie University, 10 - 11 Mei 1982(a).
- Su Xing, "The Production Responsibility System in the Chinese Countryside," makalah disajikan pada Asian

Studies Association of Australia, 4th National Conference, Melbourne, Monash University, 10-14 Mei 1982(b).

Sun Yefang, *Shehuizhuyi Jingji de Ruogan Lilun Wenti*, Beijing Renmin Chubanshi, 1979.

Sun Yefang, "What is the Origin of the Law of Value," *Social Sciences in China*, 3, 1980, hal. 155-71.

Sun Yefang, "Is There No Distinction between Simple and Expanded Reproduction," *Social Sciences in China*, 4, 1982, hal. 232-3.

Sweezy, P., "The Qualitative Value Problem," dalam Howard and King (*eds.*), 1976, hal. 140-9.

Sweezy, P and Bettelheim, C., *On the Transition to Socialism*, New York, Monthly Review Press, 1971.

Szamuely, L., *First Models of the Socialist Economic Systems: Principles and Theories*, Budapest, Akademiai Kiado, 1974.

Szelenyi, I., "Socialist Opposition in Eastern Europe: Dilemmas and Prospects," dalam Tokes (ed.), 1979, hal. 187-208.

Thompson, E., *The Poverty of Theory and other Essays*, London, Merlin Press, 1978.

Tokes, R (ed.), *Opposition in Eastern Europe*, London, Macmillan, 1979.

Therborn, G., *Science, Class and Society*, London, New Left Books, 1976.

Wang, G. (ed.), *Fundamentals of Political Economy*, White Plains, N.Y., M.E. Sharpe, 1977.

Watson, A., "Worker Self Management and Political Participation in China," makalah disajikan pada Australian Political Studies Association Conference, Adelaide, Agustus 1978.

Watson, A., "Industrial Development and the Four Modernisations" dalam Brugger (*ed.*), 1980, hal. 88-134.

Watson, A., "Economic Co-operation Revisited: The New Economic Associations in the Chinese Countryside," makalah pada *Chinese Modernisation: the Latest Phase*, Konferensi di Contemporary China Centre, Australian National University, 16-18 Februari 1983.

Watson, A., "Agriculture Looks for Shoes that Fit: The Production Responsibility System and Its Implications," *World Development*, Vol. XI, No.8, 1983, hal. 705-30; juga dalam Maxwell and McFarlane (*eds.*), 1984, hal. 83-108.

Weber, M., *The Methodology of the Social Sciences*, New York, The Free Press, 1949.

Weber, M., *Economy and Society*, Berkeley, University of California Press, 1968.

Womack, B., "Chinese Political Economy: Reversing the Polarity," *Pacific Affairs*, Vol. LIV, No.1, 1981, hal. 57-

81.

- Xiong Yingwu and Wang Shaoshun., *Sulian Shehuizhuyi Jingji Wenti Yanjiu* (rev.edn.), Harbin, Heilongjiang Renmin Chubanshi, 1980.
- Xu Dixin et.at., *China's Search for Economic Growth*, Beijing, New World Press, 1982.
- Xu Yi and Chen Baosen., "On the Necessity and Possibility of Stabilising Prices," *Social Sciences in China*, 3, 1981, jhal. 121-38.
- Xue Muqiao, *China's Socialist Economy*, BFLP, 1981.
- Xue Muqiao (ed.), *Almanac of China's Economy, 1981*, (Terj. dari *Zhongguo Jingji Nianjian*), Hong Kong, Eurasia Press, 1982.
- Young, G., "Party Building and the Search for Unity," dalam Brugger (*ed.*), 1978, hal. 35-70.
- Young, G. "Non-revolutionary Vanguard: Transformation of the Chinese Communist Party," dalam Brugger (*ed.*), 1980, hal. 51-87.
- Young, G., (ed.), *China: Dilemmas of Modernisation*, London, Croom Helm, akan terbit.
- Young, G. and Woodward, D., "From Contradictions Among the People to Class Struggle: The Theories of Uninterrupted and Continuous Revolution," *Asian Survey*, Vol. XVIII, No. 9, September, 1978, hal. 912-33.

Dara Penyumbang Tulisan

Bill Brugger adalah Profesor Ilmu Politik pada Flinder University of South Australia. Ia penulis *Democracy and Organisation in the Chinese Industrial Enterprise: 1948-52*, (Cambridge University Press, 1976); *China: Liberation and Transformation: 1942-62*, (Croom Helm, 1981); *China: Radicalism to Revisionism: 1962-79*, (Croom Helm, 1983); editor *China: The Impact of the Cultural Revolution*, (Croom Helm, 1978); *China Since the Gang of Four*, (Croom Helm, 1980).

Michael Dutton adalah seorang mahasiswa Ph.D. di School of Modern Asian Studies, Griffith University, Brisbane. Ia pengarang dari *The Crisis of Marxism in China*, (Griffith University, 1983). Ia sekarang di Beijing Languages Institute.

Kate Hannan adalah Pengajar dalam Politics pada Flinders University of South Australia. Ia pengarang-bersama *Modernisation and Revolution*, (Croom Helm, 1983).

Paul Healy adalah seorang mahasiswa Ph.D. di School of Modern Asian Studies, Griffith University, Brisbane. Risetnya membahas teori Marxis Tiongkok sejak jatuhnya *Komplotan Empat*.

Greg McCarthy adalah Pengajar dalam Politics pada Adelaide University. Risetnya membahas perbandingan masyarakat-masyarakat sosialis.

Steve Reglar hingga beberapa waktu berselang Pengajar dalam Politics pada Flinders University of South Australia. Publikasi-publikasinya termasuk tulisan-tulisan mengenai ekonomi politik Tiongkok dan ekonomi politik pada umumnya.

Michael Sullivan hingga beberapa waktu berselang adalah Pengajar paru-waktu dalam Politics pada Flinders University of South Australia. Ia telah menulis sejumlah karangan tentang kebijakan-kebijakan Tiongkok.